

# PERATURAN DAERAH NIAS SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2021

**TENTANG** 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021



### LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR: 8

SERI: E

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2021

#### TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI NIAS SELATAN,

### Menimbang: a.

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4272);

- SALINAN
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengendalian Cara Perencanaan, dan Cara Evaluasi Rancangan Daerah, Tata Pembangunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

SALINAN

- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sumatera Utara;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);

### Dengan Persetujuan Bersama

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN Dan BUPATI NIAS SELATAN

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan
- 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
- 5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Organisasi Perangkat Darah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

### BAB II SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 2

RPJMD memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program PD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2026.

#### Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. Pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis PD; dan
- b. Pedoman pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Darah.

### Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:
  - a. BAB I PENDAHULUAN;
  - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
  - c. BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
  - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU SRATEGIS DAERAH;
  - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
  - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
  - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
  - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
  - i. BAB IX PENUTUP
- (2) Rincian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Telukdalam Pada Tanggal 31 Desember 2021

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam Pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd

Ir. IKHTIAR DUHA, MM

Pembina Utama Madya NIP. 19660412 199203 022

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (6/193/2021)

Salinan sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RUPATEN NIAS SELATAN

SEL SARUMAHA, SH., MH

NIP. 19800216 200611 1 001

### PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2021

### TENTANG

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

### I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu pada kebijakan RPJPD tahun 2006-2026.

Selanjutnya RPJMD menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bagia satuan kerja di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Paraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 8

## LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2021

**TENTANG** 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2021-2026

### **DAFTAR ISI**

Dafta	ar Isi	i
Dafta	ar Tabel	iv
Dafta	ar Gambar	xiv
Dafta	ar GRAFIK	xvii
Bab	I Pendahuluan	I-1
1.1.	Latar Belakang	I-1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-5
	1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan R	encana
	Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	I-5
	1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan	
	RPJMD Provinsi Sumatera Utara	I-6
	1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan	
	RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD	I-6
	1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RTRW	
	Kabupaten Nias Selatan	I-7
	1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan	
	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	I-8
1.4.	Maksud dan Tujuan	I-8
	1.4.1. Maksud	I-8
	1.4.2. Tujuan	I-8
1.5.	Sistematika Penulisan	I-9
Bab	II Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1. Kondisi Geografi	II-1
	2.1.2. Kondisi Demografi	II-25
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
	2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-31
	2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	1II-35
	2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	II-43

	2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	II-43
	2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-74
	2.3.3. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan	II-85
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-90
	2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-90
	2.4.2. Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur	II-92
	2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-100
	2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia	II-101
2.5.	Rekapitulasi evaluasi capaian indikator kinerja daerah	II-103
	2.5.1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-103
	2.5.2. Rekapitulasi Evaluasi Capaian	
	Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD	II-109
Bab	III Gambaran Keuangan Daerah	III-1
3.1.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
	3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
	3.1.2. Neraca Daerah	III-15
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-17
	3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-18
	3.2.2. Analisis Pembiayaan	III-20
3.3.	Kerangka Pendanaan	III-21
	3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	III-21
	3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-26
Bab	IV Analisis Isu-Isu Strategis	IV-1
4.1.	Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2.	Isu-isu Strategis	IV-15
	4.2.1. Isu-isu Strategis pada Tataran Global	IV-15
	4.2.2. Isu-isu Strategis Nasional	IV-18
	4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	IV-20
	4.2.4. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Nias Selatan	IV-22
	4.2.5. Isu-isu Strategis Pembangunan Daerah	
	Kabupaten Nias Selatan	IV-27
	4.2.6. Penelahaan KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2021-2026	IV-33

	4.2.7. Penelaahan RPJMD Daerah LainnyaIV-	-34
Bab	V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	<b>V-1</b>
5.1.	Visi	V-1
5.2.	MisiV	V-2
5.3.	Tujuan dan SasaranV	<i>V</i> -4
Bab	VI Strategi dan Arah Kebijakan	
6.1.	StrategiV	T-1
6.2.	Arah KebijakanVI-	-10
6.3.	Arahan Kebijakan Pengembangan Kewilayahan	
	(Kawasan Strategis)VI-	-19
6.4.	Program Pembangunan DaerahVI-	-21
6.5.	Kegiatan Strategis DaerahVI-	-30
Bab	VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan	
	Program Perangkat DaerahVI	I-1
7.1.	Kerangka PendanaanVI	I-1
7.2.	Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Organisasi Perangkat	
	DaerahVI	I-2
7.3.	Program Perangkat DaerahVI	I-9
Bab	VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah DaerahVII	I-1
8.1.	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Nias SelatanVII	I-1
8.2.	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias SelatanVII	I-4
8.3.	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Nias SelatanVII	I-7
Bab	IX Penutup	K-1
9.1.	Pedoman Transisi	<b>K</b> -2
9.2.	Kaidah PelaksanaanIX	K-3

### DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Nama Sungai yang mengalir di wilayah
	Kabupaten Nias Selatan II-5
Tabel 2. 2	Pembagian luas satuan rencana pola ruang
	Kabupaten Nias Selatan II-7
Tabel 2. 3	Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Longsor
	di Kabupaten Nias Selatan II-20
Tabel 2. 4	Pembobotan Informasi Geologi untuk Kawasan Rawan
	Bencana Longsor Kabupaten Nias Selatan II-21
Tabel 2.5	Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Gempa
	Bumi di Kabupaten Nias SelatanII-23
Tabel 2. 6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-25
Tabel 2. 7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-26
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-27
Tabel 2. 9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-28
Tabel 2. 10	Distribusi Penduduk Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-29
Tabel 2. 11	Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-30
Tabel 2. 12	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas
	Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
	Tahun 2016 s/d 2020 II-32
Tabel 2. 13	PDRB Per Kapita Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-34
Tabel 2. 14	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-35
Tabel 2. 15	Angka Harapan Hidup Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-37
Tabel 2. 16	Jumlah penduduk berusia 15 Tahun keatas yang

	bekerja selama seminggu lalu menurut Pendidikan	
	Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	. II-38
Tabel 2. 17	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan	
	Hidup Bayi (AKHB) Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s.d 2020	. II-39
Tabel 2. 18	Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan	
	tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2017 s.d 2020	. II-41
Tabel 2. 19	Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang	
	dilestarikan Tahun 2016 s/d 2020	. II-42
Tabel 2. 20	Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di	
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	. II-42
Tabel 2. 21	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Nias	
	Selatan Tahun 2016 s/d 2020	. II-43
Tabel 2. 22	Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	. II-44
Tabel 2. 23	Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	. II-44
Tabel 2. 24	Angka Melek Huruf di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	. II-45
Tabel 2. 25	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	
	Tahun 2016 s/d 2020 di Kabupaten Nias Selatan	. II-45
Tabel 2. 26	Rasio Jumlah Guru dan Murid jenjang Pendidikan	
	Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun 2016 s/d 2020	
	di Kabupaten Nias Selatan	. II-46
Tabel 2. 27	Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	. II-47
Tabel 2. 28	Angka Kelulusan di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	. II-47
Tabel 2. 29	Angka Melanjutkan di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	. II-48
Tabel 2. 30	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Rasio Guru/Murid	

	dan Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi di	
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-48
Tabel 2. 31	Perkembangan Bidang Kesehatan di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-49
Tabel 2. 32	Rasio Fasilitas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	II-49
Tabel 2. 33	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-51
Tabel 2. 34	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020	II-51
Tabel 2. 35	Cakupan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-52
Tabel 2. 36	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi	
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-54
Tabel 2. 37	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan	
	Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s.d 2020	II-54
Tabel 2. 38	Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Pemerintahan	
	yang berwenang mengelolanya di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2020	II-55
Tabel 2. 39	Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Jenis	
	Permukaan Jalan di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2020	II-56
Tabel 2. 40	RasioTempat Ibadah per Satuan Penduduk	
	Di Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020	II-57
Tabel 2. 41	Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan	
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-58
Tabel 2. 42	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-59
Tabel 2. 43	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	
	Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-60
Tabel 2. 44	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020	II-61

Tabel 2. 45	Penyelesaian Pelanggran K3 (Ketertiban, Ketenteraman,	
	Keindahan) di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020II	-61
Tabel 2. 46	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II	-61
Tabel 2. 47	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	
	layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II	-61
Tabel 2. 48	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II	-62
Tabel 2. 49	Masalah Sosial Masyarakat di Kabupaten	
	Nias SelatanTahun 2016 s/d 2020II	-69
Tabel 2. 50	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
	dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2017 s/d 2020II	-63
Tabel 2. 51	Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020II	-63
Tabel 2. 52	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020II	-64
Tabel 2. 53	Besaran Pekerja/ buruh Yang menjadi peserta	
	Jamsostek Di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020II	-64
Tabel 2. 54	Jumlah Koperasi, UKM Non BPR, LKM dan UKM di	
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 S/D 2020 II	-64
Tabel 2. 55	Rasio KDRT di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020II	-65
Tabel 2. 56	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga	
	Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2016 s/d 2020II	-65
Tabel 2. 57	Persentase Ketersediaan Pangan di Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II	-65
Tabel 2. 58	Perkembangan Pengelolaan Lingkungan	
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II	-66

Tabel 2. 59	Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-67
Tabel 2. 60	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II-68
Tabel 2. 61	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-68
Tabel 2. 62	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-68
Tabel 2. 63	Cakupan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
	Berencana Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020II-68
Tabel 2. 64	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-69
Tabel 2. 65	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok
	Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-69
Tabel 2. 66	Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-70
Tabel 2. 67	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-70
Tabel 2. 68	Jumlah dan Nilai Investor di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-70
Tabel 2. 69	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-71
Tabel 2. 70	Cakupan Bidang Statistik di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-72
Tabel 2. 71	Cakupan Perkembangan Kebudayaan di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-73
Tabel 2. 72	Cakupan Perkembangan Bidang Perpustakaan
	Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-74
Tabel 2. 73	Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Darat
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-75
Tabel 2. 74	Kecamatan Tujuan Pengembangan Budidaya

	Perikanan di Kabupaten Nias Selatan II-76
Tabel 2. 75	Jumlah Desa Nelayan di Kabupaten Nias Selatan II-77
Tabel 2. 76	Jumlah Kelompok Nelayan di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-77
Tabel 2. 77	Persentase Kunjungan Wisata di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-78
Tabel 2. 78	Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II-80
Tabel 2. 79	Produksi Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-80
Tabel 2. 80	Luas Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020II-81
Tabel 2. 81	Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-81
Tabel 2. 82	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Nias Selatan
	2016 s/d 2020II-82
Tabel 2. 83	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap
	PDRB Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-82
Tabel 2. 84	Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-82
Tabel 2. 85	Rasio Elektrifikasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 II-84
Tabel 2. 86	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-84
Tabel 2. 87	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal
	di Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020 II-84
Tabel 2.88	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan
	menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 II-85
Tabel 2. 89	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2020 II-86
Tabel 2. 90	Perkembangan ASN di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016-2020 II-86
Tabel 2. 91	Jumlah PNS di Kabupaten Nias Selatan menurut
	Eselon Tahun 2016-2020 II-86

Tabel 2. 92	Cakupan Perkembangan Keuangan Daerah
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-87
Tabel 2. 93	Cakupan Bidang Perencanaan Pembangunan
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-89
Tabel 2. 94	Cakupan Pengawasan di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-90
Tabel 2. 95	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-91
Tabel 2. 96	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan
	per Kapita di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-91
Tabel 2. 97	Rencana hirarki dan fungsi pusat-pusat pelayanan
	di Kabupaten Nias Selatan II-93
Tabel 2. 98	Pembagian luas satuan rencana pola ruang
	Kabupaten Nias Selatan II-95
Tabel 2. 99	Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 II-96
Tabel 2. 100	Perkembangan Jumlah Restoran di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II-96
Tabel 2. 101	Jumlah Hotel dan Penginapan Lainnya di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2020 II-97
Tabel 2. 102	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan
	Air Bersih di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-98
Tabel 2. 103	Perkembangan Angka Kriminal yang tertangani
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-101
Tabel 2. 104	Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Nias Selatan II-102
Tabel 2. 105	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan
	di Kabupaten Nias Selatan II-102
Tabel 2. 106	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
	di Kabupaten Nias Selatan II-105
Tabel 2. 107	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
	dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Selatan II-106

Tabel 2. 108	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
	dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan II-107
Tabel 2. 109	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman,
	Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
	di Kabupaten Nias Selatan II-108
Tabel 2. 110	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
	di Kabupaten Nias Selatan II-109
Tabel 2. 111	Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja
	Utama (IKU) OPD Di Lingkungan Pemerintah
	Kabupaten Nias Selatan 2017-2021 II-110
Tabel 3. 1	Proporsi Komponen Pendapatan Asli DaerahIII-5
Tabel 3. 2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
	Kabupaten Nias Selatan III-8
Tabel 3. 3	Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 III-9
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 III-13
Tabel 3. 5	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias
	Selatan Tahun 2016 – 2020III-13
Tabel 3. 6	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 III-14
Tabel 3. 7	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 – 2020III-15
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 III-18
Tabel 3. 9	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan
	AparaturIII-18
Tabel 3. 10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 – 2020III-20
Tabel 3. 11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 – 2020III-21
Tabel 3. 12	Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2021 – 2026III-22

Tabel 3. 13	Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Nias
	Selatan Tahun 2021 – 2026III-24
Tabel 3. 14	Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2021 – 2026III-25
Tabel 3. 15	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah III-27
Tabel 3. 16	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan
	Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2022 – 2026III-27
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
	Prioritas dan Sasaran
Tabel 4.2	Identifikasi RPJMD Daerah Lain Kabupaten Nias
	dan Kabupaten Nias Barat Pembangunan DaerahIV-35
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten
	Nias Selatan Visi : Nias Selatan Maju, Masyarakat
	SejahteraV-6
Tabel 5.2	Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026V-13
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten
	Nias Selatan VISI: NIAS SELATAN MAJU,
	MASYARAKAT SEJAHTERAVI-2
Tabel 6.2	Sinkronisasi Kebijakan Prioritas Nasional dan
	Prioritas Pembangunan Kabupaten Nias SelatanVI-9
Tabel 6.3	Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan
	arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias
	Selatan Tahun 2021-2026VI-16
Tabel 6.4	Program Prioritas Pembangunan DaerahVI-22
Tabel 6.5	Kegiatan Strategis DaerahVI-31
Tabel 7.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2021-2026VII-2
Tabel 7.2	Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Oraganisasi
	Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2021-2026VII-3
Tabel 7.3	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai

	Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2022-2026VII-	17
Tabel 8. 1	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Nias Selatan	
	Tahun 2021-2026VIII	[-3
Tabel 8. 2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten	
	Nias Selatan Tahun 2021-2026VIII	[-5
Tabel 8. 3	Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026VIII	[-8

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1	Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian	
	dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	
	Jangka MenengahI-	2
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Kabupaten Nias Selatan II-	2
Gambar 2. 2	Peta Kawasan Rawan BencanaII-1	9
Gambar 2. 3	Peta Potensi Rawan Bencana Tsunami	
	Kabupaten Nias Selatan II-2	5
Gambar 2. 4	Piramida Penduduk Kabupaten Nias Selatan	
	berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 II-2	7
Gambar 5. 1	Grafik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan	
	tujuan dan sasaran program dan kegiatanV-	-1
Gambar 6. 1	Tema Pembangunan Kabupaten Nias SelatanVI-1	0

### **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2. 1	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
	Tahun 2016 s/d 2020 atas Dasar Harga Konstan
	dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nias Selatan II-31
Grafik 2. 2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-32
Grafik 2. 3	Laju Inflasi Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-33
Grafik 2. 4	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan
	dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 s/d 2020 II-34
Grafik 2. 5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-36
Grafik 2. 6	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II-37
Grafik 2. 7	Angka Gizi Buruk Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2021 II-39
Grafik 2. 8	Bayi Berat Badan Rendah (BBLR) Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020II-40
Grafik 2. 9	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2017 s/d 2020 II-40
Grafik 2. 10	Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-52
Grafik 2. 11	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses
	terhadap sanitasi layak di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-58
Grafik 2. 12	Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-59
Grafik 2. 13	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
	Di Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020 II-79
Grafik 2. 14	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan
	Listrik PLN II-83
Grafik 2. 15	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nias Selatan II-91
Grafik 2. 16	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN

	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 II-99
Grafik 2. 17	Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon
	di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 s/d 2020 II-100
Grafik 2. 18	Rasio Ketergantungan Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 s/d 2020 II-103
Grafik 3. 1	Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
	Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020
	(dalam miliar rupiah)III-2
Grafik 3. 2	Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan rupiah) III-3
Grafik 3. 3	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016-2020 (rupiah) III-3
Grafik 3. 4	Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 III-6
Grafik 3. 5	Proporsi Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten
	Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 (dalam miliar rupiah) III-7
Grafik 3. 6	Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan rupiah) III-10
Grafik 3. 7	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
	Tahun 2016 - 2020 (rupiah) III-11
Grafik 3.8	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
	Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 – 2020 III-20
Grafik 4. 1	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara
	Tahun 2020
Grafik 4. 2	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara
	tahun 2020IV-5
Grafik 4. 3	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara
	Tahun 2020
Grafik 4. 4	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara

	tahun 2020	IV-7
Grafik 4. 5	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota	
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara	
	tahun 2020	IV-10
Grafik 4. 6	Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten/Kota	
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara	
	tahun 2020	IV-11
Grafik 4. 7	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	
	se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara	
	tahun 2020	IV-12

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

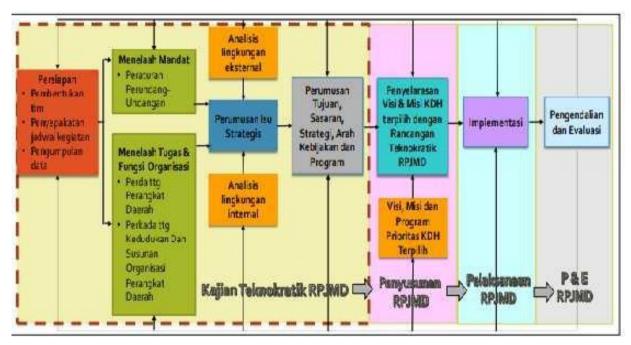
### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Demikian juga dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya dalam ayat (2) nya ditegaskan, bahwa rencana pembangunan daerah dimaksud dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud di atas meliputi tahapan sebagai berikut ;(i) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, (ii) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD, (iii) Penyusunan Rancangan RPJMD, (iv) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, (v) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD dan (vi) Penetapan RPJMD. Untuk menjamin berkualitasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka selain dalam perumusan kebijakan perlu dilakukan melalui berbagai langkah, yakni masukan/saran dari para pemangku kepentingan yang duduk dilembaga eksekutif, legislatif dan dari masyarakat umum serta kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat/agama dan kalangan profesi, juga dilakukan melalui beberapapendekatan, dengantahapan (i) pendekatan teknokratis; pendekatan partisipatif; (iii) pendekatan politis; dan (iv) pendekatan atasbawah dan bawah-atas. RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 merupakan RPJMD periode ke-4 tahun rencana terhadap RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2006-2026. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun alur proses penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah sebagai berikut :



Gambar 1.1
Proses Penyusunan, Pelaksanaan Serta Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Dari gambar di atas, maka proses yang paling mendasar dalam penyusunan rancangan RPJMD adalah merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur. Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, perlu dilaksanakaan dengan berbagai upaya dengan strategi dan arah kebijakan yang dipilih, untuk itu disusun indikasi rencana program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan.

### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);

- 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 4);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006-2026 Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 Nomor 06 Seri E);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018 Nomor 05 Seri E)

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

### 1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yangutuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda

pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah,dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakeristik daerah.

### 1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Utara, dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis provinsi dengan memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

## 1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ke-4 tahun rencana terhadap RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2006-2026. Dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan Program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kemudian, pelaksanaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Kabupaten Nias Selatan yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

### 1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan juga berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan, melalui penyelarasan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Pada rencana struktur ruang wilayah berupa sistem perkotaan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lingkungan. Sedangkan pada rencana pola ruang berupa penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Pada level tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk menjadikan wilayah Kabupaten sebagai pengembangan sentra pariwisata, pertanian, perkebunan dan perikanan secara terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan upaya pengurangan resiko bencana Kabupaten.

Untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan beberapa kebijakan yang disebutkan dibawah, dimana pada masing-masing kebijakan tersebut kemudian juga terdapat strategi yang dilakukan dan dapat diintegrasikan pada dokumen RPJMD. Berikut adalah kebijakan yang terdapat pada Dokumen RTRW Kabupaten Nias Selatan:

- a. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai sektor andalan kabupaten;
- b. Penguatan peran sentra-sentra perkotaan sebagai upaya mendukung pengembangan perekonomian lokal;
- c. Pemantapan kawasan lindung sebagai upaya mempertahankan kualitas lingkungan dalam lingkup regional;
- d. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan prasarana dan sarana;
- e. Pengintegrasian aspek kebencanaan dalam program pembangunan prasarana dan sarana;
- f. Peningkatan aksessibilitas dan memeratakan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah kabupaten; dan

g. Kebijakan peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

## 1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Nias Selatan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan Melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

### 1.4. Maksud dan Tujuan

### 1.4.1. Maksud

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam perencanaan lima tahun, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

### 1.4.2. Tujuan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 - 2026, antara lain adalah :

- 1. Mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah melalui kebijakan dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkeadilan:
- 2. Menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta instrument dalam melakukan pengawasan.
- 3. Memberikan arah pembangunan daerah jangka menengah, sebagai pedoman penyusunan Renstra SKPD dan RKPD serta menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 4. Menyajikan data visual dan gambaran hasil evaluasi pemetaan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, melakukan telaah dan kajian mendalam tentang isu-isu strategis yang mungkin akan timbul dalam penyelenggaraan pembangunan daerah kurun waktu Tahun 2021-2026; dan

5. Menjadi landasan bagi lembaga legislatif dan para pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk mewujudkan sinkronisasi program dan perumusan kebijakan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, antara program prioritas nasional, program prioritas provinsi dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, baik dalam rangka pencapaian target indikator kinerja visi dan misi, maupun pencapaian target indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab, secara garis besar tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan analisis kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/ misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategi, yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bagian ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan dimasa lalu, seperti kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu seperti proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan dan kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama, proyeksi data masa lalu, dan penghitungan kerangka pendanaan.

#### BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan isu-isu strategis yang permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional yang dapat memberikan manfaat/ pengaruh dimasa dating terhadap Kabupaten Nias Selatan.

#### BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan.

# BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

# BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

#### BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

#### BAB IX PENUTUP

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen RPJMD.

#### BAB II

#### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

## 2.1.1.Kondisi Geografi

#### A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

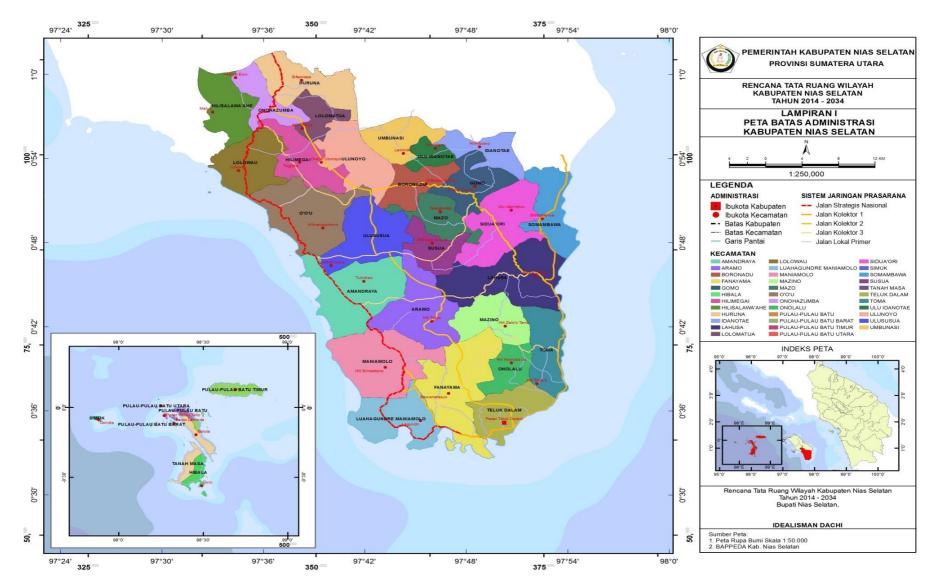
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Nias Selatan merupakan Kabupaten pemekaran dari wilayah otonomi Kabupaten Nias pada tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan saat ini terbagi atas 35 Kecamatan dan 459 Desa, dan 2 Kelurahan. Secara geografis Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 6.902.505 Km², dengan rincian luas daratan kurang lebih 2.452.100 Km² dan luas laut/perairan kurang lebih 4.450.405 Km².

Batas wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Pulaupulau Mentawai Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Nias Selatan

#### 2. Letak dan Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Nias Selatan berada disebelah Barat Pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk Dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu kota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu kurang lebih 60 kilometer dan lebar 40 kilometer. Kondisi ini di satu sisi berdampak pada iklim serta potensi ekonomi Kabupaten dan di sisi lain menjadikan wilayah tersebut mengalami aksesibilitas rendah dari pusat pertumbuhan Provinsi.

#### a. Posisi Astronomis

Secara Astronomis, Kabupaten Nias Selatan terletak pada 0° 33' 25" Lintang Selatan - 1° 4' 5" Lintang Utara dan 97° 25' 59" dan 98° 48' 29" Bujur Timur.

#### b. Posisi Geostrategik

Kabupaten Nias Selatan terletak pada posisi paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara sebagian besar wilayahnya berasal dari Pulau Nias (Pulau Induk) dan dibagian Selatan Pulau Nias sangat banyak tersebar pulau-pulau kecil. Letak tersebut menjadikan Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga membawa arti penting dalam aspek Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas)

c. Kondisi/kawasan, antara lain meliputi (pedalaman, terpencil, pesisir pegunungan, kepulauan)

Dari seluruh gugusan pulau itu terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km²), Pulau Tanah Masa (32,16 km²), Pulau Tello (18 km²), dan Pulau Pini (24,36 km²). Adapun penyebaran pulau yaitu daerah kepulauan sebanyak 101 Pulau, Kecamatan Somambawa 1 Pulau (Pulau Somambawa), Kecamatan Lolowau 1 pulau (Pulau Faro'a). Jumlah pulau yang dihuni sebanyak 21 buah, yang tidak dihuni sebanyak 83 buah.

#### 3. Kondisi Topografi

Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karen aitu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

### 4. Kondisi Geologi

#### a) Struktur dan karakteristik

Jalur-jalur struktur geologi yang berkembang di Kepulauan Nias, seperti jalur patahan merupakan bidang-bidang lemah yang apabila mengalami pergerakan dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Kabupaten Nias Selatan dilalui oleh dua jalur patahan utama yang tergolong aktif, yaitu jalur patahan utama yang melintasi Pulau Nias yang berarah barat – laut tenggara, disebut sebagai jalur patahan Nias. Jalur patahan utama lainnya di bagian selatan Pulau Nias, mulai bagian barat Pulau Pini memanjang ke arah utara menerus memotong Pulau Sumatera atau yang dikenal dengan jalur patahan Nias-Ordi-Bahorok (*Tarigan*, *J.I*, 2007).

#### b) Potensi

Posisi Kepulauan Nias yang berada dibagian depan dari batas interaksi lempeng mengakibatkan tingginya potensi gempa bumi yang juga dapat mengakibatkan bencana ikutan lainnya seperti bencana tsunami maupun bencana gerakan tanah atau longsoran.

Struktur batuan dan susunan tanah yang labil mengakibatkan sering terjadinya banjir dan masih terdapat jalan-jalan aspal yang patah dan longsor disana sini, bahkan juga daerah aliran sungai yang berpindah-pindah

# 5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Nias Selatan dialiri oleh sekitar 57 sungai dengan berbagai klasifikasi. Klasifikasi kecil memiliki lebar<10 meter; sedang sungai memiliki lebar 10-20 meter; klasifikasi besar memiliki lebar>20 meter. Berikut nama sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2. 1 Nama Sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Nias Selatan

No	Nama Sungai yang menganir di V	Kecamatan	Klasifikasi
1	Sungai Masio	Lahusa	Besar
2	Sungai Susua	Lahusa	Besar
3	Sungai Eri'i	Lahusa	Sedang
4	Sungai Fawai	Lahusa	Sedang
5	Sungai Saeto	Lahusa	Sedang
6	Sungai Idano Zala	Maniamolo	Sedang
7	Sungai Sialikhe	Maniamolo	Sedang
8	Sungai Meso	Maniamolo	Kecil
9	Sungai Lotu	Maniamolo	Sedang
10	Sungai Otua	Maniamolo	Sedang
11	Sungai Taro'olala	Fanayama	Sedang
12	Sungai Numono	Fanayama	Kecil
13	Sungai Mbombolaehuwa	Fanayama	Sedang
14	Sungai Mezaya	Mazino	Besar
15	Sungai Sa'ua	Teluk Dalam	Sedang
16	Sungai Mboi	Teluk Dalam	Sedang
17	Sungai Utawa	Teluk Dalam	Sedang
18	Sungai Laowo	Teluk Dalam	Sedang
19	Sungai Nanowa	Teluk Dalam	Sedang
20	Sungai Gewa	Toma	Sedang
21	Sungai Lagundri	Luahagundre Maniamolo	Sedang
22	Sungai Gomo	Gomo	Sedang
23	Sungai Fayo	Gomo	Sedang
24	Sungai Sambulu	Lõlõmatua	Sedang
25	Sungai Sea	Hilisalawa'ahe	Kecil
26	Sungai No'ou	O'ou	Besar
27	Sungai Mo'uliho	O'ou	Sedang
28	Sungai Ekholo	O'ou	Sedang
29	Sungai Lato Sebua	Lõlõwau	Sedang
30	Sungai Nalua	Lõlõwau	Besar
31	Sungai Chelo	Lõlõwau	Sedang

No	Nama Sungai	Kecamatan	Klasifikasi
32	Sungai Tegoyo	Lõlõwau	Sedang
33	Sungai Simana	Lõlõwau	Sedang
34	Sungai Siwalawa	Lõlõwau	Besar
35	Sungai Sehe	Lõlõwau	Sedang
36	Sungai Humana	Amandraya	Sedang
37	Sungai Maera fato	Amandraya	Sedang
38	Sungai Silimo	Amandraya	Sedang
39	Sungai Saku	Amandraya	Kecil
40	Sungai Bago	Amandraya	Sedang
41	Sungai Garese	Amandraya	Sedang
42	Sungai Fanuwu	Amandraya	Sedang
43	Sungai Bohalu	Amandraya	Sedang
44	Sungai Baya Simbo	Amandraya	Sedang
45	Sungai Sefa	Amandraya	Sedang
46	Sungai Amuri	Amandraya	Sedang
47	Sungai Gambu	Amandraya	Sedang
48	Sungai Sui	Amandraya	Sedang
49	Sungai Eho	Amandraya	Besar
50	Sungai Gomo Amandraya	Amandraya	Sedang
51	Sungai Aramo	Aramo	Sedang

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan 2014-2034

#### 6. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Nias Selatan terletak di daerah khatulistiwa maka curah hujannya pun tinggi. Rata-rata curah hujan dalam perbulan 298,60 mm dan banyaknya hari hujan dalam setahun 250 hariatau rata-rata 21 hari perbulan pada tahun 2012. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih berganti dalam setahun.

Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara ratarata berkisar antara 25,7°C – 26,4°C dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 88% dan kecepatan rata-rata angin 6 knot. Curah hujan tinggi dan relatif turun hujan sepanjang tahun dan sering kali dibarengi dengan badai besar. Musim badai laut biasanya berkisar antara bulan September sampai November dan kadang terjadi badai pada bulan Agustus, jadi cuaca bisa berubah secara mendadak. Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman (1975),

wilayah Kabupaten Nias Selatan ini mempunyai delapan bulan basah (bulan dengan curah hujan> 200 mm) tiga bulan lembab (bulan dengan curah hujan antara 100 – 200 mm), dan satu bulan kering (bulan dengan curah hujan< 100 mm). Bulan basah terjadi pada bulan September hingga Desember serta terjadi pula pada bulan Maret, April, Juni dan Juli, untuk bulan kering pada tahun 2008 hanya terjadi pada bulan Februari. Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), wilayah ini mempunyai 11 bulan basah (bulan dengan curah hujan > 100 mm), 1 bulan lembab (bulan dengan curah hujan 60 – 100 mm) dan tidak ada bulan kering (bulan dengan curah hujan< 60 mm), berdasarkan data tahun 2008. Dari dua klasifikasi iklim di atas menunjukkan kondisi alam Kabupaten Nias Selatan relatif lembab dan basah.

#### 7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara, kawasan hutan di Kabupaten Nias dan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan 2014-2034, struktur penggunaan lahan meliputi:

Tabel 2.2 Pembagian Luas Satuan Rencana Pola Ruang Kabupaten Nias Selatan

N	ο	Satuan Pola Ruang		Persentase
a.	Kawasan Lindung			
	1.	Hutan Lindung	73.613	29,83
	2.	Hutan Suaka Alam (HSA)	8.359	3,39
	3.	Kawasan pantai Berhutan Bakau	3.471	1,41
	4.	Sempadan Sungai	1.445	0,59
	5.	Sempadan Pantai	2.674	1,08
b.		Kawasan Budidaya		
	1.	Hutan Produksi Terbatas	19.713	7,99
	2.	Hutan Produksi	72.374	29,33
	3.	Areal Penggunaan Lain (APL)	65.088	26,38
		Luas Total	246.737	100

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan 2014-2034

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan dibagi atas:

#### a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten mencakup:

1) Kawasan Hutan Lindung;

Meliputi 24 kecamatan dengan luas total lebih kurang <u>+</u> 73.613 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga belas) hektar, meliputi :

- Kecamatan Umbunasi
- Kecamatan Gomo
- Kecamatan Mazo
- Kecamatan Amandraya
- Kecamatan Lolomatua
- Kecamatan Ulonoyo
- Kecamatan Huruna
- Kecamatan Onohazumba
- Kecamatan Hilimegai
- Kecamatan Hilisawala'ahe
- Kecamatan O'o'u
- Kecamatan Amandraya
- Kecamatan Ulususua
- Kecamatan Aramo
- Kecamatan Boronadu
- Kecamatan Idanotae
- Kecamatan Ulu Idanotae
- Kecamatan Pulau-Pulau Batu
- Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
- Kecamatan Hibala
- Kecamatan Tanah Masa
- Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat
- Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara
- Kecamatan Simuk
- 2) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat meliputi : (i) sempadan sungai; dan (ii) sempadan pantai.

3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri atas: (i) Kawasan Pantai Berhutan Bakau (Mangrove) dengan luas keseluruhan lebih kurang 3.470 hektar; (ii) Taman Buru dengan luas

keseluruhan lebih kurang 8.359 hektar terdapat di Pulau Pini ; (iii) Cagar Budaya terdapat di Desa Tradisional Bawomataluo Kecamatan Fanayama.

- 4) Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi
- 5) Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya berupa (i) kawasan terumbu karang; (ii) Ruang Terbuka Hijau (TRH) seluas kurang lebih 865 hektar. Luasan tersebut diperoleh dari paling sedikit 30 persen dari luas kawasan perkotaan yang direncanakan, yang terdiri dari 20 persen RTH Publik dan 10 persen RTH Privat.

#### b) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia. Dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan rencana kawasan budidaya kabupaten mencakup:

- 1) Kawasan Hutan Produksi
  - ➤ Kawasan hutan produksi tetap dengan luas total 73.842 (tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh dua) hektar, meliputi:
    - a. Kecamatan Pulau-Pulau Batu
    - b. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur
    - c. Kecamatan Hibala
    - d. Pulau Tanah Masa
    - e. Pulau Hibala
    - f. Pulau Pini.
  - ➤ Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas total 21.745 (dua puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektar terdapat:
    - a. Kecamatan Lolowa'u
    - b. Kecamatan Hilimegai
- 2) Kawasan Peruntukan Pertanian
  - Kawasan pertanian lahan basah kawasan pertanian lahan basah terdapat di :
    - a. Kecamatan Lolowa'u
    - b. Kecamatan Lolomatua

- c. Kecamatan Amandraya
- d. Kecamatan Maniamolo
- e. Kecamatan Fanayama
- f. Kecamatan Teluk Dalam
- g. Kecamatan Onolalu
- h. Kecamatan Lahusa
- i. Kecamatan Gomo
- i. Kecamatan Idanotae
- k. Kecamatan Ulu Idanotae
- 1. Kecamatan Mazo
- m. Kecamatan Aramo
- n. Kecamatan Hilimegai
- o. Kecamatan Umbunasi
- p. Kecamatan Mazino
- q. Kecamatan Toma
- r. Kecamatan Boronadu
- s. Kecamatan Sidua'ori
- t. Kecamatan Somambawa
- u. Kecamatan Ulunoyo
- v. Kecamatan Onohazumba
- w. Kecamatan O'ou
- x. Kecamatan Huruna
- y. Kecamatan Ulususa
- ➤ Kawasan pertanian lahan kering meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten dengan luas keseluruhan mencapai 14.452 (empat belas ribu empat ratus lima puluh dua) hektar.
- 3) Kawasan Peruntukan Perkebunan
  - Kawasan budidaya perkebunan seluas 14.203 (empat belas ribu dua ratus tiga) hektar terdapat diseluruh kecamatan yang merupakan perkebunan rakyat.
- 4) Kawasan Peruntukan Perikanan
  - Perikanan Tangkap berada pada kawasan perairan lebih kurang 12-16 mil dari garis pantai, meliputi:

- a. Kecamatan Lolowa'u
- b. Kecamatan Amandraya
- c. Kecamatan Maniamolo
- d. Kecamatan Teluk Dalam
- e. Kecamatan Fanayama
- f. Kecamatan Toma
- g. Kecamatan Lahusa
- Budidaya laut, meliputi:
  - a. Kepulauan
  - b. Kecamatan Teluk Dalam
  - c. Kecamatan Fanayama.
- Budidaya air tawar meliputi:
  - a. Kecamatan Teluk Dalam
  - b. Kecamatan Onolalu
  - c. Kecamatan Lahusa
  - d. Kecamatan Gomo
  - e. Kecamatan Mazino
  - f. Kecamatan Fanayama
  - g. Kecamatan Maniamolo
  - h. Kecamatan Aramo
  - i. Kecamatan Amandraya
  - j. Kecamatan Lolowa'u
  - k. Kecamatan Hilimegai
  - 1. Kecamatan Susua
- 5) Kawasan Peruntukan Industri
  - Kawasan peruntukan Industri terdapat di Kecamatan Teluk dalam di luar kawasan perkotaan yang merupakan Industri menengah. Kawasan Industri kecil tersebar diseluruh Kecamatan diwilayah Kabupaten.
- 6) Kawasan Peruntukan Pariwisata
  - Peruntukan pariwisata Alam meliputi Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Air Terjun Sumali, Air Terjun Namo Sifelendrua, Gua

- Gobali, Gua Segelo Gana'a, Pantai Sifika, Pantai Sibaranun Golfina, Pantai Simaleko dan Pulau-Pulau Batu.
- Peruntukan Pariwisata Kebudayaan meliputi peninggalan megalit di Kecamatan Gomo, Kampung Tradisional Bawomataluo, Kecamatan Boronadu, dan Silima Ewali Mazino.
- Peruntukan pariwisata minat khusus meliputi olah raga air di Pantai Sorake, Lagundri, Sigolong-golong, Teluk Dalam dan wisata menyelam di perairan Pulau-Pulau Batu.
- 7) Kawasan Peruntukan Permukiman.
  - Kawasan permukiman, terdiri atas:
    - a. Permukiman perkotaan, meliputi: Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan.
    - b. Permukiman perdesaan, meliputi seluruh wilayah Kabupaten di luar kawasan permukiman perkotaan.
- 8) Kawasan Peruntukan untuk Hutan Rakyat
- 9) Kawasan Peruntukan Lainnya
  - Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
    - a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara
    - b. Kawasan Pendidikan Tinggi
    - c. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
    - d. Kawasan Peruntukan Olahraga
    - e. Kawasan Pelayanan Kesehatan
    - f. Kawasan Peruntukan Perkantoran
    - g. Kawasan Peruntukan Pusat Kegiatan Pertemuan, Pameran dan Sosial Budaya.

#### B. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat di identifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan, penentuan kawasan budidaya dilakukan dengan mengacu pada pola ruang kawasan budidaya yang memiliki nilai

Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-12

strategis nasional, serta memperhatikan pola ruang kawasan budidaya Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Di Kabupaten Nias Selatan telah ditetapkan kawasan strategis yang merupakan bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan sekitarnya.

Kawasan strategis Kabupaten Nias Selatan berdasarkan kepentingan daya dukung lingkungan ialah sebagai berikut:

- 1. Taman buru Pulau Pini
- 2. Kawasan Pulau Simuk
- 3. Kawasan Taman Laut Pulau Sibaranun
- 4. Lagundri dan Sorake

Kawasan strategis Kabupaten Nias Selatan berdasarkan kepentingan sosial budaya ialah sebagai berikut:

- 1. Kawasan Bawomataluo
- 2. Kawasan Sifalago Gomo

Kawasan strategis Kabupaten Nias Selatan berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi ialah sebagai berikut:

- 1. Teluk Dalam
- 2. Pulau Tello

Berikut ini diuraikan kawasan budidaya di Kabupaten Nias Selatan:

- 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
  - a. Peruntukan Hutan Produksi Tetap

Hutan produksi tetap merupakan hutan yang diperuntukkan untuk menghasilkan produksi kayu ataupun tanaman kehutanan lainnya dan sifatnya adalah hak pengusahaan hutan (HPH). Dalam hal ini terdapat 2 HPH yang dipegang oleh 2 perusahaan yaitu oleh PT. Teluk Nauli dan PT. Gruti dan perusahaan mendapatkan hak pengusahaan ini secara tetap dari tahun ke tahun. Hutan produksi tetap ini terdapat di wilayah kecamatan Pulau-pulau Batu, Pulau-pulau Batu Timur dan Hibala dan berada di ketiga pulau besar pada masing-masing kecamatan tersebut, yaitu di Pulau Tanah Masa, Pulau Hibala dan Pulau Pini dengan luas keseluruhan lebih kurang 73.374 Hektar.

#### b. Hutan Produksi Terbatas

Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dapat ditanami atau melakukan produksi tanaman kehutanan, tetapi sifatnya terbatas dalam artian penggunaannya terbatas pada ketentuan yang ditetapkan oleh kesepakatan atau peraturan yang berlaku, baik jenis tanaman maupun tata cara pengelolaan. Hutan produksi terbatas ini terdapat di Kecamatan Lolowa'u dan Hilimegai dengan luas total 19.713 Hektar.

#### 2. Kawasan Peruntukan Pertanian

#### a. Peruntukan Pertanian Lahan Basah

Pertanian lahan basah ditentukan menurut hasil analisis kesesuaian lahan serta dukungan sarana dan prasarana penunjangnya terhadap aktivitas pertanian seperti jaringan jalan, irigasi dan lain-lain. Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah ini potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan. Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan pengairan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- Ketinggian < 1.000 m.
- Kelerengan < 40%.</li>
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

Berdasarkan kriteria tersebut maka ditetapkan kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Nias Selatan dengan luas total 14.925 Hektar. Kawasan pertanian lahan basah tersebar di 25 Kecamatan.

#### b. Peruntukan Pertanian Lahan Kering

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan dan dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- Ketinggian < 1.000 m
- Kelerengan < 40%.</li>
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.

Berdasarkan kriteria tersebut ditetapkan kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Nias Selatan dengan luas total 14.452 Hektar.

Kawasan pertanian lahan kering tersebar diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

#### 3. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan tanaman ditentukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- Ketinggian < 2.000 m.
- Kelerengan < 40%.
- Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm
- Kondisi saat ini (existing) merupakan tanaman karet, kelapa dan coklat atau kakao;

Berdasarkan kriteria tersebut ditetapkan kawasan budidaya perkebunan di Kabupaten Nias Selatan dengan luas total 43.039 Hektar. Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, baik yang berada di wilayah pulau induk maupun yang berada di wilayah kepulauan dan merupakan perkebunan rakyat.

#### 4. Kawasan Peruntukan Perikanan

## a. Peruntukan Perikanan Tangkap

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan perikanan pada wilayah laut dengan cara pengumpulan adalah dengan penangkapan atau non-budidaya. Kawasan Perikanan tangkap ini ditetapkan berada pada wilayah perairan yang potensial akan sumberdaya ikan yang berada pada kawasan perairan lebih kurang 12 – 16 mil dari garis pantai di Kecamatan Lolowa'u, Amandraya, Maniamolo, Fanayama, Teluk Dalam, Toma, Lahusa, Luahagundre Maniamolo, Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Pulau-Pulau Batu Timur, Tanah Masa, Simuk dan Kecamatan Hibala.

#### b. Peruntukan Budidaya Perikanan

Kawasan peruntukan budidaya perikanan dibagi atas budidaya perikanan laut dan budidaya perikanan darat. Budidaya perikanan laut diarahkan di Kepulauan, Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Fanayama. Peruntukan budidaya perikanan air tawar diarahkan di Kecamatan Telukdalam, Kecamatan Onolalu, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Gomo, Kecamatan Mazino, Kecamatan Fanayama,

Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-15

Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Toma, Kecamatan Aramo, Kecamatan Amandraya, Kecamatan Lolowa'u, Kecamatan Luahagundre Maniamolo, Kecamatan Ulususua, Kecamatan O'o'u, Kecamatan Onohazumba, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Ulunoyo, Kecamatan Huruna, Kecamatan Sidua'ori, Kecamatan Somambawa, Kecamatan Mazo, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Boronadu, Kecamatan Idanotae, Kecamatan Ulu Idanotae, Kecamatan Hilimegai dan Kecamatan Susua.

# c. Peruntukan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Rencana pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan diarahkan di PPI Lahusa, PPI Pulau Tello, dan PPI Teluk Dalam.

#### 5. Kawasan Peruntukan Industri

Berdasarkan RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014-2034 kawasan peruntukan industri di Kabupaten Nias Selatan terdapat di Kecamatan Telukdalam di luar kawasan perkotaan yang merupakan Industri Menengah. Kawasan Industri Kecil tersebar diseluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten.

#### 6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Sumberdaya bahan tambang yang terdapat di wilayah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan data yang ada berupa bahan tambang galian mineral non logam dan terdapatnya lokasi potensi batubara. Sebaran lokasi berdasarkan jenis bahan tambang galian mineral non logam terdapat di seluruh kecamatan yang dilalui sungai-sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Untuk jenis bahan tambang batu bara diperkirakan berada di sekitar Kecamatan Gomo, Kecamatan Lahusa, Kecamatan Amandraya, Kecamatan Lolomatua, Kecamatan Lolowa'u, Kecamatan Mazo, Kecamatan Susua, dan Kecamatan Umbunasi dengan luas potensi lebih kurang 15.916 Hektar.

#### 7. Kawasan Peruntukan Pariwisata

#### a. Pariwisata Alam

Kawasan Wisata Alam merupakan kawasan wisata yang mengutamakan atau menunjukkan keindahan alam. Untuk Kabupaten Nias Selatan, Peruntukan kawasan wisata alamini antara lain meliputi

Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Air Terjun Sumali, Air Terjun Namo Sifelendrua, Gua Gobali, Gua Sigelo Gana'a, Pantai Sifika, Pantai Sibaranun Golfina, Pantai Simaleko dan Pulau-Pulau Batu.

#### b. Pariwisata Kebudayaan

Peruntukan pariwisata kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 meliputi peninggalan megalit di Kecamatan Gomo, Kampung Tradisional Bawomataluo, Kecamatan Boronadu dan Silima Ewali Mazino

#### c. Pariwisata Minat Khusus

Peruntukan pariwisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada RTRW Kabupaten Nias Selatan tahun 2014-2034 meliputi olah raga air di Pantai Sorake, Lagundri, Sigolong-golong, Teluk Dalam dan Wisata menyelam di Perairan Pulau – Pulau Batu

#### 8. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan permukiman pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kondisi permukiman perkotaan dan pedesaan yang sehat dan layak huni (*liveble*), aman, nyaman, damai dan berkelanjutan sehingga tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud terdiri dari :

#### a. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi (i) Ibu Kota Kabupaten dan (ii) Ibukota Kecamatan. Perkotaan utama akan direncanakan pada Kota Teluk Dalam. Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada daerah pusat-pusat pelayanan, yaitu pada setiap ibu kota Kecamatan. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan tersebut dilakukan dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan yang seharusnya ditempatkan sesuai dengan fungsi kotanya.

#### b. Peruntukan Permukiman Perdesaan

Pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Nias Selatan meliputi seluruh wilayah Kabupaten diluar kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman pedesaan juga dikembangkan dengan melengkapi fasilitas yang diperlukan sebagai

n 2021-2026 Halaman : II-17

syarat suatu permukiman perdesaan yang baik. Pembangunan dan pengembangan pusat pertumbuhan permukiman perdesaan perlu dilakukan secara bertahap sehingga nantinya antar kawasan memiliki potensi dan karakteristik khas yang saling mendukung dan melengkapi. Keterpaduan antar kawasan akan lebih efisien dan efektif dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar perdesaannya.

Selain Kawasan Peruntukan Permukiman, terdapat juga kawasan yang di peruntukan untuk:

- (i) Kawasan Peruntukan untuk Hutan Rakyat
  Untuk Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dilakukan diseluruh
  wilayah Kabupaten Nias Selatan.
- (ii) Kawasan Peruntukan Lainnya.

Untuk Kawasan Peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

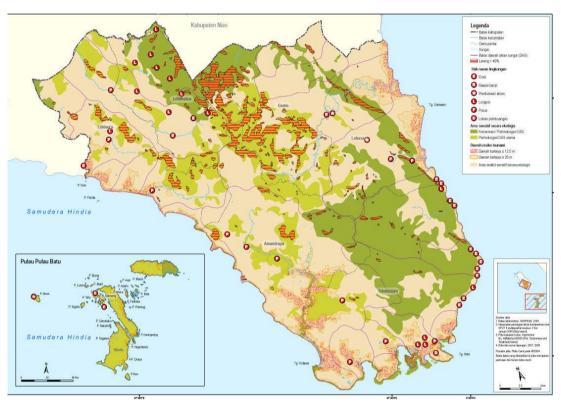
- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara;
- b. Kawasan Pendidikan Tinggi;
- c. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa;
- d. Kawasan Peruntukan Olahraga;
- e. Kawasan Pelayanan Kesehatan;
- f. Kawasan Peruntukan Perkantoran; dan
- g. Kawasan Peruntukan Pusat Kegiatan Pertemuan, Pameran dan Sosial Budaya

Luas Kawasan yang diperuntukan bagi Kawasan Peruntukan Pemukiman, Kawasan Peruntukan untuk Hutan Rakyat, dan Kawasan Peruntukan Lainnya kurang lebih seluas 13.262 Hektar.

#### C. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat di identifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana alam, seperti banjir, tsunami, abrasi, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik dan lain-lain. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Penentuan kawasan rawan bencana alam dilakukan dengan metode skoring terhadap informasi geologi atau kondisi alamiah (kemiringan lereng, jenis batuan dan curah hujan).

Posisi Kepulauan Nias yang berada dibagian depan dari batas interaksi lempeng mengakibatkan tingginya potensi gempa bumi yang juga dapat mengakibatkan bencana ikutan lainnya seperti tsunami maupun bencana gerakan tanah atau longsoran. Jika dilihat dari kondisi Kabupaten Nias Selatan, dapat dilihat potensi bencana yaitu: bencana longsor, banjir, gempa, dan tsunami.



Gambar 2. 2 Peta Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Nias Selatan, Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Nias Selatan terdiri dari :

#### 1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor

Aspek geologi atau aspek alamiah yang mengontrol terjadinya longsor adalah kemiringan lereng, litologi/batuan, keberadaan bidang lemah atau struktur geologi dan curah hujan sebagai faktor pemicu. Secara umum curah hujannya tergolong tinggi, dimana berkisar 90 % arealnya memiliki curah hujan 3000 – 3500 mm/thn dan 10 % sisa arealnya bercurah hujan 2500 – 3000 mm/thn. Curah hujan demikian sangat dapat memicu terjadinya longsor, sehingga tingkat potensi longsor dimasing-masing wilayahnya akan

ditentukan/dikombinasi dengan kondisi kemiringan lereng dan batuan penyusunnya.

Kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan tinggi di difungsikan sebagai kawasan lindung, namun dapat juga dijadikan fungsi budidaya terbatas. Dimana jenis budidaya yang diizinkan dikembangkan pada kawasan tersebut hanya untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan, peternakan, pertanian dan untuk kegiatan wisata dengan prasyarat. Sedangkan kegiatan pembangunan pemukiman, industri/pabrik, pertambangan dan peternakan tidak dapat dilakukan dikawasan rawan longsor tingkat kerentanan tinggi tersebut. Pada kawasan rawan bencana longsor tingkat kerentanan sedang sampai rendah, keseluruhan kawasannya dapat difungsikan sebagai kawasan budidaya. Kegiatan pembangunan industri tidak diizinkan di kawasan rawan bencana longsor tingkat sedang sampai rendah. Namun pembangunan pemukiman diizinkan berikut jenis budidaya yang lain yang dalam pengembangan atau pembangunannya harus mengikuti prasyarat atau acuan peraturan zonasi seperti tabel berikut:

Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Nias Selatan

Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Longsor di Kabupaten Nias Selatan					
Kawasan Rawan Bencana Longsor	Acuan Peraturan Zonasi/ Prasyarat				
Tingkat Kerawanan Tinggi	<ol> <li>Fungsi tidak berubah/dirubah sebagai hutan lindung.</li> <li>Tidak layak untuk hunian/pemukiman, pertambangan, industri, peternakan dan perikanan</li> <li>Kegiatan lain yang diizinkan : pariwisata terbatas, hutan kota, hutan produksi, perkebunan dan pertanian dengan prasyarat tertentu, antara lain :         <ol> <li>Memelihara kelestarian lingkungan</li> <li>Pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat</li> <li>Rekayasa teknik, kesetabilan lereng, drainase, dsb</li> </ol> </li> <li>Untuk kegiatan/kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap</li> <li>Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang tepat.</li> </ol>				
Tingkat Kerawanan Sedang	<ol> <li>Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik</li> <li>Diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, perkebunan dengan. prasyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat:         <ol> <li>Rekayasa teknis, penguatan lereng.</li> <li>Pemilihan jenis vegetai yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan.</li> <li>Untuk jenis kegiatan penelitian.</li> </ol> </li> <li>Diizinkan untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dengan syarat ketat:         <ol> <li>Rekayasa teknis.</li> <li>Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.</li> </ol> </li> </ol>				

Kawasan Rawan	Acuan Peraturan Zonasi/ Prasyarat						
Bencana Longsor							
	4. Diizinkan untuk kegiatan pertambangan dan						
	hunian/pemukiman dan pariwisata dengan prasyarat ketat :						
	<ul> <li>a. Tidak dikembangkan melebihi daya dukung lingkungan, harus mematuhi prasyarat andal.</li> </ul>						
	b. Dalam penetapan jenis kontruksi/bangunan didahului dengan penyelidikan geologi teknik, analisis kesetabilan						
	lereng, daya dukung tanah, memperkecil lereng, jalan mengikuti kontur, dsb.						
	5. Untuk kegiatan pertambangan, prasyaratnya : memperhatikan aspek kesetabilan lereng, daya dukung lingkungan, reklamasi lahan, revitalisasi kawasan, dsb.						
	1. Tidak diizinkan untuk pembangunan industri / pabrik						
	2. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan prasyarat:						
	a. Rekayasa teknis						
	b. Jenis wisata air						
	3. Diizinkan untuk kegiatan peternakan dengan prasyarat :						
a. Rekayasa teknis							
	b. Menjaga kesetabilan lingkungan						
	4. Diizinkan untuk kegiatan pertambangan dengan prasyarat :						
	a. Penelitian geologi, analisa kesetabilan lereng, rencana						
	jalan mengikuti garis kontur, rencana reklamasi lereng,						
	revitalisasi kawasan, analisa dampak lingkungan,						
Tingkat Kerawanan	rekayasa teknik.						
Rendah dan Sangat	b. Menjaga kelestarian lingkungan.						
Rendah	c. Pengendalian kegiatan tambang sesuai dengan						
Rendan	peraturan yang ada.						
	5. Diizinkan untuk pemukiman dengan prasyarat :						
	a. Rekayasa teknis/rumah panggung						
	b. Pemilihan tipe bangunan rendah hingga sedang						
	c. Menjaga kelestarian lingkungan						
	6. Diizinkan untuk transportasi dengan prasyarat :						
	a. Rekayasa teknis						
	b. Mengikuti pola kontur						
	7. Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan,						
	akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara						
	bertahap.						
	(DEDITION OF A ST. C. 1.4. OO 14. OO 24)						

Sumber : Hasil Analisa (RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014-2034)

Adapun pembobotan dari masing-masing informasi geologi seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4
Pembobotan Informasi Geologi untuk Kawasan Rawan Bencana Longsor
Kabupaten Nias Selatan

Komponen	Klas Komponen	Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
	1. Kemiringan 0 % – 8 %	iringan 0 % – 8 % 1	5	
Kemiringan	2. Kemiringan 8 % - 25 %	3	5	15
lereng	3. Kemiringan 25 % - 40 %	4	J	20
	4. Kemiringan > 40 %	5		25
	1. Kode : Qa, QTg, QTr, QTi	1		4
Batuan	2. Kode: Tml, Tmpg, Tms, Tmh	5	4	20
	3. Kode :Tomm	3		12
Curah hujan	1. 2500 - 3000 mm/thn	2	4	8

Komponen Klas Komponen		Nilai Kemampuan	Bobot	Skor
	2. 3000 - 3500 mm/thn	3		12
	3. > 3500 mm/thn	5		20
Cten 11-t11-n	1. < 100 m	5		12
Struktur Geologi	2. 100 - 500 m	3	3	9
Geologi	3. > 500 m	1		3

Sumber: RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014-2034

Berdasarkan pembobotan tersebut diperoleh tiga tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kerawanan tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Sebaran dari kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi lebih luas bahkan dominan dibandingkan tingkat kerawanan lainnya, diikuti oleh yang kerawanannya sedang, rendah dan sangat rendah. Artinya secara umum Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi longsor yang tergolong tinggi.

#### 2. Kawasan Rawan Banjir

Potensi banjir di Kabupaten Nias Selatan terdapat di Kecamatan Lahusa dimana mengalir Sungai Masio dan Susua dari wilayah kecamatan Gomo. Sehingga, Sungai Masio, dan Susua menjadi sumber banjir utama di wilayah Kecamatan Gomo, Lahusa dan Amandraya.

#### 3. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Terdapat tiga tingkat kerawanan bencana gempa bumi, yaitu: tingkat kerawanan sangat tinggi, tinggi dan tingkat kerawanan sedang yang menyebar sedikit lebih dominan dibanding dengan tingkat kerawanan tinggi. Data kegempaan yang digunakan dalam menganalisa tingkat kerawanan bencana gempa adalah data keterjadian gempa selama sepuluh tahun (1999-2008), dimana intensitas gempa sangat sering terjadi baik yang bersumber dari daratan maupun bersumber dari lautan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pola ruang untuk kawasan rawan bencana gempa dengan tingkat kerawanan sangat tinggi dan tinggi difungsikan sebagai kawasan lindung. Kawasan gempabumi dengan tingkat kerawanan tinggi dapat juga difungsikan sebagai kawasan budi daya, namun sebelumnya harus dilakukan analisa resiko bencana terlebih dahulu dan selanjutnya kegiatan pembangunannya harus mengikuti prasyarat. Sedangkan untuk tingkat kerawanan sedang dapat difungsikan sebagai kawasan budi daya.

Pada 28 Maret 2005 pukul 23:09 Wib pernah terjadi Gempa Bumi di Kepulauan Nias. Pusat gempanya berada di 2° 04′ 35″ U 97° 00′ 58″ T, 30 km di bawah permukaan Samudera Hindia, 200 km sebelah barat Sibolga atau 1400 km barat laut Jakarta, sekitar setengah jarak antara Pulau Nias dan Simeulue. Catatan seismik memberikan angka 8,7 skala Richter (BMG di Indonesia mencatat 8,2) dan getarannya terasa hingga Bangkok, Thailand, sekitar 1.000 km jauhnya. Dengan kekuatan sebesar 8,7 SR, gempa ini merupakan gempa Bumi terbesar kedua di dunia sejak tahun 1964.

Tabel 2. 5
Peraturan Zonasi Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di
Kabupaten Nias Selatan

Kabupaten Nias Selatan						
Kawasan Rawan Bencana Gempa	Acuan Peraturan Zonasi/Prasyarat					
Tingkat Kerawanan Sangat Tinggi	1. Diperuntukan sebagai kawasan lindung.					
Tingkat Kerawanan Tinggi	<ol> <li>Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan infrastruktur penunjangnya.</li> <li>Diizinkan untuk kegiatan pemukiman dengan syarat :         <ol> <li>Konstruksi bangunan semi permanen, kepadatan bangunan rendah (&lt; 30 unit/Ha), pola pemukiman mengelompok dan menyebar.</li> <li>Konstruksi bangunan tradisional, kepadatan bangunan rendah (&lt; 30 unit/Ha), pola pemukiman mengelompok dan menyebar.</li> </ol> </li> </ol>					
	<ol> <li>Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat :         <ul> <li>a. Konstruksi bangunan tahan gempa.</li> <li>b. Kepadatan bangunan sedang (KDB 50 – 70, KLB 100-200).</li> </ul> </li> <li>Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan, pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu :         <ul> <li>a. Konstruksi bangunan tahan gempa</li> <li>b. Skala industri kecil.</li> </ul> </li> <li>Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan.</li> <li>Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan jenis</li> </ol>					
Tingkat Kerawanan Sedang	wisata sosio-kultural dan wisata agro kultural.  1. Dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan infrastrukturpenunjangnya.  2. Diizinkan untuk kegiatan pemukiman dengan syarat:					
	<ul> <li>a. Konstruksi bangunan semi permanen, kepadatan bangunan sedang dan rendah, pola pemukiman mengelompok dan menyebar.</li> <li>b. Konstruksi bangunan tradisional, kepadatan bangunan sedang dan rendah, pola pemukiman mengelompok dan menyebar.</li> <li>3. Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat:</li> <li>a. Konstruksi bangunan tahan gempa.</li> </ul>					

Kawasan Rawan Bencana Gempa	Acuan Peraturan Zonasi/Prasyarat					
	b. Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB >					
	70, KLB > 200) hingga rendah (KDB < 50, KLB < 100).					
	4. Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan,					
	pengawasan dan pengendalian yang ketat, yaitu :					
	a. Konstruksi bangunan tahan gempa.					
	b. Skala industri besar, sedang maupun kecil.					
	5. Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan					
	basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan					
	dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta					
	mendukung konsep kelestarian lingkungan.					
	6. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan jenis					
	wisata sosio-kultural dan wisata agro-kultural.					

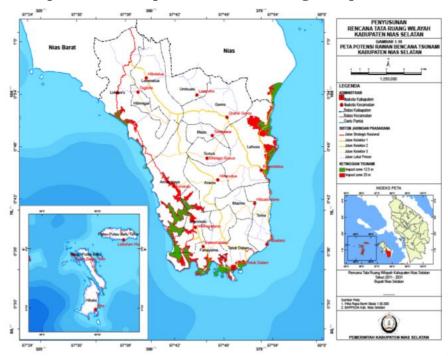
Sumber : Hasil Analisa (RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014-2034)

#### 4. Kawasan Rawan Tsunami

Penentuan kawasan rawan bencana tsunami di dasarkan pada pada beda tingi dataran pantai terhadap garis pantai, bentuk morfologi pantainya serta bentuk geometri pantainya (berbentuk teluk atau pantai lurus). Berdasarkan hal tersebut tingkat kerawanan kawasan rawan bencana tsunami dibagi atas tiga tingkat, yaitu kerawanan tinggi, sedang dan rendah. Kawasan rawan tsunami hanya terjadi pada kawasan sekitar pantai. Di Pulau Nias terutama di sepanjang pantai selatan dan sebagian di pantai barat dan sebagian pantai timur. Sedangkan yang di Kepulauan, potensi tsunaminya disepanjang pantai masing-masing Kepulauan.

Analisa tingkat kerawanan bencana alam gempa, longsor dan tsunami yang dilakukan di atas berdasarkan kondisi alamiah atau kondisi geologi Kabupaten Nias Selatan. Dimana secara umum kawasannya memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. Sedangkan untuk mengetahui tingkat resiko bencana yang akan ditimbulkan, maka perlu dilakukan analisa tingkat kerentanan dan analisa tingkat kemampuan. Kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, bila berada pada wilayah dengan tingkat kerentanan yang juga tinggi (kondisi sosial, ekonomi masayarak dan kondisi infrastruktur/fisik), sementara tingkat kemampuan penanganaan bencana di kawasan tersebut rendah, maka resiko bencana yang ditimbulkan akan sangat tinggi. Demikian juga sebaliknya, kawasan dengan tingkat kerentaan tinggi dapat memiliki tingkat resiko yang sedang sampai rendah bila tingkat kerentanannya rendah sampai sedang dan tingkat kemampuannya sedang sampai tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengurangan resiko bencana sekaligus sebagai tindakan mitigasi bencana dapat dilakukan dengan berfokus pada pengurangan tingkat kerentanan dan atau peningkatan tingkat kemampuan atau kapasitas dalam menghadapi bencana.



Gambar 2. 3 Peta Potensi Rawan Bencana Tsunami Kabupaten Nias Selatan

#### 2.1.2.Kondisi Demografi

#### a. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

#### 1. Jumlah Penduduk Perkecamatan

Jumlah penduduk Nias Selatan pada tahun 2020 adalah 360.531 jiwa. Dari 35 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, Kecamatan Teluk Dalam mempunyai jumlah penduduk terbanyak sebanyak 25.480 jiwa atau 7,07% dari jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan, sedangkan Kecamatan Simuk memiliki jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 1.934 jiwa atau 0,54% dari jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2. 6

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

	14H4H 2010 3/4 2020						
No	Vacamatan	Jumlah Penduduk					
	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Hibala	4.493	4.537	4.578	4.617	7.716	
2	Tanah Masa	3.662	3.698	3.731	3.763	4.807	
3	Pulau-Pulau Batu	6.556	6.620	6.679	6.736	9.731	
4	Pulau-Pulau Batu	1.695	1.712	1.727	1.741	3.091	
	Timur						

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
NO	McCamatan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Simuk	1.230	1.241	1.252	1.262	1.934
6	Pulau-Pulau Batu Barat	1.527	1.541	1.555	1.568	2.320
7	Pulau-Pulau Batu Utara	2.471	2.495	2.517	2.538	3.894
8	Teluk Dalam	19.317	19.509	19.683	19.849	25.480
9	Fanayama	18.581	18.765	18.933	19.093	18.207
10	Toma	10.469	10.572	10.667	10.757	13.316
11	Maniamolo	9.898	9.997	10.086	10.172	13.855
12	Mazino	11.038	11.148	11.248	11.343	8.735
13	Luahagundre	8.535	8.619	8.696	8.770	10.307
	Maniamolo					
14	Onolalu	5.329	5.383	5.431	5.477	8.474
15	Amandraya	10.581	10.686	10.782	10.874	14.059
16	Aramo	14.764	14.912	15.045	15.172	9.977
17	Ulususua	11.290	11.402	11.504	11.602	10.667
18	Lahusa	22.069	22.287	22.486	22.677	20.858
19	Sidua'ori	7.324	7.396	7.463	7.527	11.354
20	Somambawa	12.423	12.545	12.657	12.765	14.102
21	Gomo	9.720	9.817	9.905	9.989	10.544
22	Susua	18.639	18.823	18.991	19.152	16.811
23	Mazo	10.152	10.251	10.343	10.431	12.674
24	Umbunasi	10.286	10.388	10.481	10.570	7.583
25	Idanotae	9.935	10.032	10.122	10.208	10.102
26	Uluidanotae	6.524	6.588	6.647	6.704	7.185
27	Boronadu	8.421	8.504	8.580	8.653	7.483
28	Lolomatua	7.990	8.069	8.141	8.210	11.072
29	Ulunoyo	9.198	9.289	9.372	9.452	13.035
30	Huruna	10.433	10.537	10.631	10.722	13.135
31	Lolowau	5.872	5.931	5.984	6.035	9.645
32	Hilimegai	5.684	5.739	5.790	5.840	6.926
33	O'ou	5.870	5.928	5.981	6.032	8.825
34	Onohazumba	4.989	5.038	5.083	5.127	6.883
35	Hilisalawa'ahe	4.354	4.396	4.436	4.474	5.744
	Jumlah W. G. L.	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

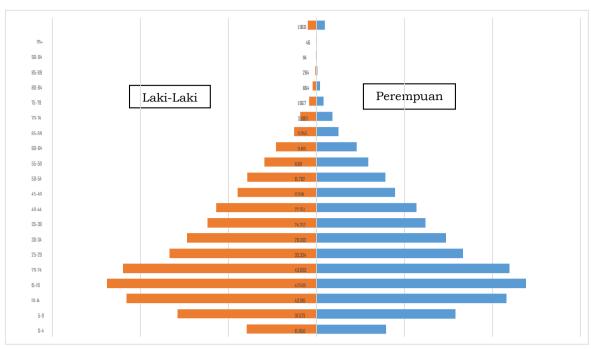
#### 2. Jumlah Penduduk per Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah yang hampir berimbang dimana jumlah Laki-Laki pada tahun 2020 adalah sebanyak 180.917 Jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 179.614 Jiwa. Jumlah penduduk per jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Ionia Kalomin	Jumlah Penduduk				
	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki – Laki	154.519	156.205	157.526	158.673	180.917
2	Perempuan	156.800	158.190	159.681	161.229	179.614
Jumlah		311.319	314.395	317.207	319.902	360.531

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021



Gambar 2. 4
Piramida Penduduk Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020

# 3. Jumlah penduduk per Struktur Umur

Tabel 2. 8

Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Umur di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

		Jumlah Penduduk									
No	Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020					
1	0-4	41.524	41.099	40.659	44.589	29.047					
2	5-9	41.773	42.209	42.501	42.259	32.417					
3	10-14	37.780	38.264	38.776	39.088	40.233					
4	15-19	33.159	33.302	33.408	34.753	42.933					
5	20-24	28.700	29.005	29.253	29.777	42.593					
6	25-29	23.291	23.330	23.420	24.759	34.860					
7	30-34	21.423	21.465	21.483	22.464	28.953					
8	35-39	18.623	18.800	18.941	19.174	22.841					
9	40-44	15.988	16.200	16.404	16.273	21.899					
10	45-49	14.238	14.487	14.716	14.257	17.643					
11	50-54	11.082	11.331	11.574	10.878	15.117					
12	55-59	8.626	8.923	9.183	8.013	11.583					
13	60-64	7.772	8.276	8.769	6.782	8.607					
14	65-69	3.726	3.998	4.299	3.333	5.534					
15	70-74	2.026	2.076	2.143	1.986	3.973					
16	75+	1.588	1.630	1.678	1.517	2.298					
	Jumlah Total	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531					

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Penduduk Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh penduduk dengan kelompok umur 10-14 tahun, 15-19 tahun dan 20-24 tahun dengan jumlah

persentase ketiga kelompok umur tersebut adalah sebesar 45 persen dari jumlah penduduk.

# b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Tabel 2. 9
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun 2016 s/d 2020  Laju Pertumbuhan Penduduk											
No	Kecamatan										
-	77'1 1	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020*						
1	Hibala	0,98	0,90	0,85	67,12						
2	Tanah Masa	0,98	0,89	0,86	27,74						
3	Pulau-Pulau Batu	0,99	0,89	0,85	44,46						
4	Pulau-Pulau Batu Timur	1,00	0,88	0,81	77,54						
5	Simuk	0,98	0,89	0,80	53,25						
6	Pulau-Pulau Batu Barat	0,98	0,91	0,84	47,96						
7	Pulau-Pulau Batu Utara	0,97	0,88	0,83	53,43						
8	Telukdalam	0,99	0,89	0,84	28,37						
9	Fanayama	0,99	0,90	0,85	-4,64						
10	Toma	0,98	0,90	0,84	23,79						
11	Maniamolo	0,99	0,89	0,85	36,21						
12	Mazino	0.99	0,90	0,84	-22,99						
13	Luahagundre Maniamolo	0,98	0,89	0,85	17,53						
14	Onolalu	0,99	0,89	0,85	54,72						
15	Amandraya	0,99	0,90	0,85	29,29						
16	Aramo	0,99	0,89	0,84	-34,24						
17	Ulususua	0,99	0,89	0,85	-8,06						
18	Lahusa	0,99	0,89	0,85	-8,02						
19	Sidua'ori	0,98	0,91	0,86	50,84						
20	Somambawa	0,99	0,89	0,85	10,47						
21	Gomo	0,99	0,90	0,85	5,56						
22	Susua	0,99	0,89	0,85	-12,22						
23	Mazo	0,99	0,90	0,85	21,50						
24	Umbunasi	0,99	0,90	0,85	-28,26						
25	Idanotae	0,99	0,90	0,85	-1,04						
26	Uluidanotae	0,98	0,90	0,86	7,17						
27	Boronadu	0,99	0,89	0,85	-13,52						
28	Lolomatua	0,99	0,89	0,85	34,86						
29	Ulunoyo	0,99	0,89	0,85	37,91						
30	Huruna	1,00	0,89	0,86	22,51						
31	Lolowau	0,99	0,89	0,85	59,82						
32	Hilimegai	0,99	0,89	0,86	18,60						
33	O'ou	0,99	0,89	0,85	46,30						
34	Onohazumba	0,98	0,89	0,87	34,25						
35	Hilisalawa'ahe	0,99	0,91	0,86	28,39						
	Nias Selatan	0,99	0,89	0,85	12,70						

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021 ; \*Data diolah

Laju pertumbuhan penduduk disuatu wilayah sangat dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Dari tabel diatas menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2020. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nias Selatan cenderung mengalami fluktuatif dimana di tahun 2016-2017 sebesar 0,99 persen, di tahun 2017-2018 sebesar 0,89, di tahun 2018-2019 sebesar 0,85 persen dan di tahun 2019-2020 sebesar 12,70 persen.

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Kepadatan penduduk erat kaitannya dengan kemampuan wilayah dalam mendukung kehidupan penduduknya. Berikut ini tabel distribusi penduduk Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020.

Tabel 2.10 Distribusi Penduduk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

		20	16	20	17	20	18	20	19	20	20
No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk								
1	Hibala	1,44	19,90	1,44	20	1,44	20	1,44	20	2.14	34.18
2	Tanah Masa	1,18	8,11	1,18	8	1,18	8	1,18	8	1.33	10.65
3	Pulau-Pulau Batu	2,11	62,39	2,11	63	2,11	64	2,11	64	2.70	92.60
4	Pulau-Pulau Batu Timur	0,54	4,56	0,54	5	0,54	5	0,54	5	0.86	8.31
5	Simuk	0,40	60,24	0,39	61	0,39	61	0,39	62	0.54	94.71
6	Pulau-Pulau Batu Barat	0,49	72,50	0,49	73	0,49	74	0,49	74	0.64	110.16
7	Pulau-Pulau Batu Utara	0,79	392,42	0,79	396	0,79	400	0,79	403	1.08	618.10
8	Telukdalam	6,20	467,71	6,21	472	6,21	477	6,20	481	7.07	616.95
9	Fanayama	5,97	225,25	5,97	227	5,97	230	5,97	231	5.05	220.72
10	Toma	3,36	253,76	3,36	256	3,36	259	3,36	261	3.69	322.73
11	Maniamolo	3,18	131,41	3,18	133	3,18	134	3,18	135	3.84	183.95
12	Mazino	3,55	279,53	3,55	282	3,55	285	3,55	287	2.42	221.20
13	Luahagundre Maniamolo	2,74	169,36	2,74	171	2,74	173	2,74	174	2.86	204.54
14	Onolalu	1,71	210,09	1,71	212	1,71	214	1,71	216	2.35	334.02
15	Amandraya	3,40	137,85	3,40	139	3,40	140	3,40	142	3.90	183.16
16	Aramo	4,74	232,53	4,74	235	4,74	237	4,74	239	2.77	157.14
17	Ulususua	3,63	197,44	3,63	199	3,63	201	3,63	203	2.96	186.55
18	Lahusa	7,09	274,62	7,09	277	7,09	280	7,09	282	5.79	259.56
19	Sidua'ori	2,35	117,38	2,35	119	2,35	120	2,35	121	3.15	181.96
20	Somambawa	3,99	305,72	3,99	309	3,99	312	3,99	314	3.91	347.08
21	Gomo	3,12	258,81	3,12	261	3,12	264	3,12	266	2.92	280.72
22	Susua	5,99	660,33	5,99	667	5,99	673	5,99	678	4.66	595.50
23	Mazo	3,26	349,66	3,26	353	3,26	356	3,26	359	3.52	436.58
24	Umbunasi	3,30	313,50	3,30	317	3,30	319	3,30	322	2.10	231.12
25	Idanotae	3,19	350,89	3,19	354	3,19	358	3,19	361	2.80	356.84
26	Uluidanotae	2,10	455,22	2,10	460	2,10	464	2,10	468	1.99	501.40

		20	16	2017		2018		2019		2020	
No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk								
27	Boronadu	2,70	287,10	2,70	290	2,70	293	2,70	295	2.08	255.13
28	Lolomatua	2,70	370,00	2,57	374	2,57	377	2,57	380	3.07	512.83
29	Ulunoyo	2,95	187,76	2,95	190	2,95	191	2,95	193	3.62	266.07
30	Huruna	3,35	211,69	3,35	214	3,35	216	3,35	218	3.64	266.48
31	Lolowau	1,89	122,27	1,89	123	1,89	125	1,89	126	2.68	200.81
32	Hilimegai	1,83	141,57	1,83	143	1,83	144	1,83	145	1.92	172.50
33	O'ou	1,89	80,23	1,89	81	1,89	82	1,89	82	2.45	120.63
34	Onohazumba	1,60	175,36	1,60	177	1,60	179	1,60	180	1.91	241.93
35	Hilisalawa'ahe	1,40	108,32	1,40	109	1,40	110	1,40	111	1.59	142.92
	Jumlah	100,00	125,13	100,00	126	127	99	100,00	128	100	144.91

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Penduduk di Kabupaten Nias Selatan tersebar di 35 Kecamatan dengan persebaran penduduk yang tidak merata dimana sebagian besar penduduk berdomisili di wilayah daratan Pulau Nias. Persentase penduduk di Kepulauan Batu adalah sebesar 9,3%. Kecamatan dengan kepadatan penduduk yang paling padat adalah Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Susua dan Kecamatan Lolomatua. Sementara Kecamatan dengan kepadatan penduduk paling jarang adalah Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur dimana kepadatan penduduknya pada tahun 2020 adalah 8,31.

#### c. Populasi masyarakat berdasarkan Agama

Tabel 2. 11 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020.

No	Agama	2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	4.755	4.802	4.845	7.300	8.806
2	Protestan	256.848	259.386	261.706	394.280	286.359
3	Katolik	49.684	50.175	50.623	76.268	70.933
4	Hindu	4	4	4	6	7
5	Budha	28	28	29	43	22
	Jumlah	311.319	314.395	317.207	477.897	366.127

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Mayoritas penduduk di Kabupaten Nias Selatan memeluk agama Kristen Protestan dimana jumlahnya pada tahun 2020 adalah sebanyak 286.359 (78,2%). Persentase Jumlah pemeluk agama Katolik pada tahun 2020 adalah 19,4%. Sementara persentase pemeluk agama Hindu, Budha dan Islam di Kabupaten Nias Selatan kurang dari 2%.

#### 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada capaian tahun 2020 sebesar Rp. 7.168,27 milyar rupiah jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 6.861,47 milyar rupiah. Sektor pertanian masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 44,61 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 14,10 persen dan sektor administrasi pemerintahan pertanahan dan jaminan sosial wajib sebesar 9,62 persen. Sementara sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 31,67 persen.

Nilai PDRB ADHK Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 4.246,83 milyar jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp. 4.221,03 milyar.

Nilai PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

ADHB ADHK 7.164,27 6.861,48 5.247,31 5.695,74 5.192,774.018,70 1.221,04 3.826,62 3.659,77 2020 2016 2017 2018 2019

Grafik 2. 1

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s/d 2020 atas Dasar Harga
Konstan dan atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nias Selatan

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

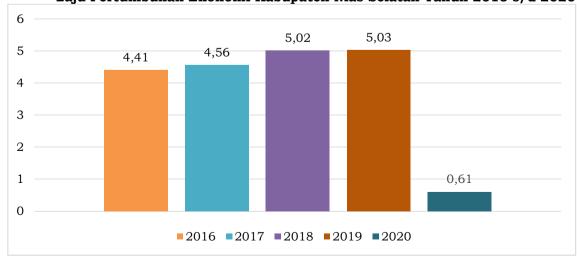
Tabel 2. 12 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2016 s/d 2020

	Harga Konstan (Hk) Tanun 2016 s/d 2020											
		2016		2017		2018		2019		202	20	
NO	Sektor	(Hb)	(Hk	(Hb)	(Hk	(Hb)	(Hk	(Hb)	(Hk	(Hb)	(Hk)	
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,05	3,83	45,65	4,22	45,17	4,45	44,36	3,89	44,61	1,04	
В	Pertambangan dan Penggalian	6,02	6,9	5,87	6,95	5,72	5,03	5,58	5,38	5,58	2,96	
С	Industri Pengolahan	0,17	4,8	0,17	4,15	0,17	3,4	0,16	3,67	0,16	0,04	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	6,51	0,05	6,23	0,05	6,23	0,05	6,34	0,05	6,61	
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	0,03	2,96	0,03	3,12	0,03	3,07	0,03	3,99	0,03	-2,01	
F	Konstruksi	13,58	5,59	13,83	5,65	14,17	6,18	14,83	7,49	14,01	-4,46	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	7,94	5,2	8,2	5,23	8,39	5,7	8,55	5,72	8,73	3,22	
Н	Transportasi dan Pergudangan	3,56	6,97	3,67	6,24	3,77	6,46	3,9	7,71	4,01	1,72	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,16	4,33	2,18	4,36	2,2	5,62	2,22	5,73	2,24	0,84	
J	Informasi dan Komunikasi	0,7	6,91	0,7	5,54	0,7	5,62	0,69	5,83	0,7	3,79	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	6,47	1,44	2,37	1,4	4,03	1,36	3,98	1,37	3,42	
L	Real Estase	4,95	4,67	5,1	4,9	5,15	5,43	5,21	5,78	5,2	1,86	
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	4,87	0,03	4,88	0,03	5,03	0,03	5,16	0,03	- 0,79	
О	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,84	2,05	9,68	2,23	9,62	4,73	9,64	5,09	9,64	- 0,53	
P	Jasa Pendidikan	2,56	5,07	2,53	4,93	2,52	5,04	2,5	5,25	2,5	1,65	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	3,16	0,77	4,05	0,77	4,71	0,77	5,86	0,77	4,26	
R,S, T,U	Jasa Lainya	0,11	4,91	0,11	5,05	0,11	5,12	0,12	5,55	0,12	1,54	

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

# b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

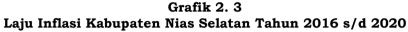
Grafik 2. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan jika dibandingkan pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 0,61 persen. Umumnya hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia sehingga sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian masyarakat.

#### c. Laju Inflasi





- Ket: \* Inflasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2019 Mengacu pada Inflasi Kota Sibolga dan Inflasi Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Inflasi Kota Medan.
  - \*\* Inflasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 Mengacu pada Inflasi Kota Gunungsitoli.

Jika dilihat dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa laju inflasi Kabupaten Nias Selatan tahun 2020 mengacu pada laju inflasi Kota Gunungsitoli yakni 1,87 persen, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga beberapa bahan pokok diantaranya cabe merah dengan andil 0,64 persen dan cabe rawit 0,38 persen.

#### d. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita adalah besaran pendapatan penduduk disuatu daerah. Indikator ini dapat dapat dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan daerah dengan kata lain semakin tinggi/besar pendapatan perkapitanya maka semakin makmur daerah tersebut.

Tabel 2. 13
PDRB Per Kapita Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (miliar rupiah)	5.192,77	5.695,74	6.247,31	6.861,48	7.164,27
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (miliar rupiah)	3.659,77	3.826,62	4.018,74	4.221,04	4.246,83
3	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	311.319	314.395	317.207	319.902	322.420
4	PDRB ADHB Per Kapita (Juta Rp/Jiwa)	16.86	18.12	19.69	21.45	22.22

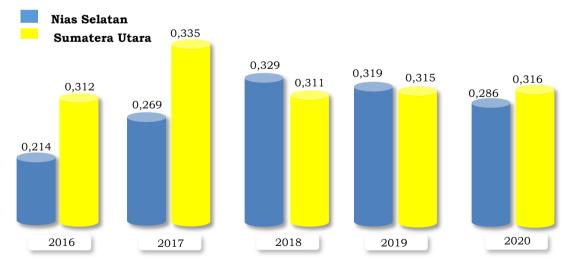
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, bahwa pada tahun 2020 PDRB per kapita di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) jika dibandingkan dengan tahun 2016 meningkat sebesar 5,36. Dari tabel diatas kita bisa melihat adanya peningkatan PDRB perkapita setiap tahun dari 2016-2020 rata-rata sebesar 1,07.

#### e. Indeks Gini Ratio

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,286. Angka ini menurun sebesar 0,043 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2019 yang sebesar 0,319, angka ini lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Utara di tahun 2019 yaitu sebesar 0,317. Indeks Gini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 4
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Berdasarkan grafik di atas indeks gini Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif nilainya. Jika dibandingkan indeks gini dari 2019-2020 terjadi penurunan sebesar 0,033 poin. Hal ini menandakan bahwa tingkat ketimpangan kesejahteraan semakin merata karena nilainya mendekati nol.

#### f. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan

Secara umum jumlah dan persentase penduduk miskin dari 2016-2020 mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,372 persen. Angka kemiskinan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,29 persen jika dibandingkan dengan angka kemiskinan tahun 2019. Hal ini disebabkan banyaknya penduduk yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2, 14 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

		Garis Kemiskinan	Pendudu	k Miskin
No	Tahun	(Rp/Kap/Bln)	Jumlah (000)	Persentase (%)
1	2016	238.119	57,75	18,60
2	2017	249.225	57,95	18,48
3	2018	261.104	52,70	16,65
4	2019	279.468	52,51	16,45
5	2020	312.453	53,88	16,74

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

# 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

## a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saatlahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya sebesar 59,14 menjadi 61,89 di tahun 2020.

Halaman: II-35

Nias Selatan IPM Nasional Tahun 2020 = 71,94 Sumatera Utara 71.74 71.77 71,18 70.57 70,00 61,59 61.89 59,14 60.75 59.85 Klasifikasi IPM Berdasarkan angka capaian : IPM≥80 Sangat Tinggi 70≤IPM<80 60≤IPM<80 2016 2017 2019 2020 IPM<60 Rendah

Grafik 2. 5
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

# b. Angka Usia Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2016-2020, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Nias Selatan semakin meningkat dari 67,83 pada tahun 2016 menjadi 68,74 di tahun 2020, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kabupaten Nias Selatan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 68 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan secara umumsudah semakin membaik.

Peningkatan angka harapan hidup ini menyebabkan bertambahnya populasi penduduk lansia, yaitu penduduk di atas 60 tahun. Peningkatan angka harapan hidup bisa berarti baik atau buruk. Baik karena angka ini menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat, namun bisa berarti buruk karena meningkatkan jumlah masyarakat yang rentan terhadap berbagai penyakit. Makin besar jumlah lansia, maka tantangan di bidang kesehatan juga semakin besar.

Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif

disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 15 Angka Harapan Hidup Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Timeia m	Angka Harapan Hidup							
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
Nias Selatan	67,83	68,00	68,24	65,58	68,74			
Sumatera Utara	68,29	68,33	68,61	68,95	69,10			

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

# c. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Apabila di tahun 2016 rata-rata lama sekolah hanya 4,65 tahun, maka di tahun 2017 menjadi 4,96 tahun, di tahun 2018 menjadi 5,2 tahun, di tahun 2019 sebesar 5,53 tahun dan di tahun 2020 menjadi 5,85 tahun.

Grafik 2. 6 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020



Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

# d. Angka Pendidikan yang di Tamatkan

Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja selama seminggu lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 16
Jumlah penduduk berusia 15 Tahun keatas yang bekerja selama seminggu lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	APT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak/Belum Tamat SD/SD	-	76.777	73.039	88.501	-
2	SMP	-	27.560	24.119	15.835	-
3	SMA	-	31.437	32.002	19.866	-
4	SMK	-	9.232	5.908	2.497	-
5	Diploma I/II/III	-	3.788	4.344	3.272	-
6	D IV/Universitas	-	5.603	9.912	10.444	-
7	Jumlah Penduduk	311.319	314.396	317.207	319.902	360.531

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yangditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 persentase Angka Pendidikan yang di Tamatkan di Kabupaten Nias Selatan antara lain SD sebesar 28%, SMP sebesar 5%, SMA sebesar 6% dan APT Diploma IV/Universitas sebesar 3%, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk diatas 15 tahun menurut pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Nias Selatan hanya tamat SD.

## e. Angka Kematian Bayi

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Halaman : II-38

Tabel 2. 17

Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

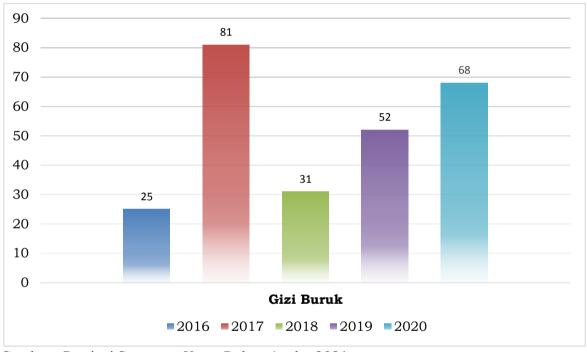
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s.d 2020

Tahun	AKB	АКНВ
2016	4	-
2017	3	8,81
2018	3	6,24
2019	3	6,4
2020	-	1,7

Sumber : Profil Kesehatan Sumatera Utara 2017, 2018, 2019 ; Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan

## f. Angka Gizi Buruk

Grafik 2. 7 Angka Gizi Buruk Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2021



Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif nilainya, dimana pada tahun 2016 sebanyak 25 orang dan meningkat menjadi 81 orang di tahun 2017. Di tahun 2018 kembali menurun sebanyak 31 orang, namun pada tahun 2019-2020 kembali mengalami kenaikan sebanyak 52 orang dan 68 orang. Kasus gizi buruk di Kabupaten Nias selatan dipengaruhi oleh adalah status sosial ekonomi masyarakat, ketidaktahuan ibu tentang pemberian gizi yang baik untuk anak dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Grafik Angka Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana grafik berikut ini:

Grafik 2. 8
Bayi Berat Badan Rendah (BBLR) Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

# g. Rasio Penduduk yang Bekerja

Grafik 2. 9 Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 s/d 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan, dimana di tahun 2017 sebesar 78,78 persen, di tahun 2018 sebesar 76,05 persen dan di tahun 2019 sebesar 70,59 persen, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 73,94 persen. Hal ini disebabkan oleh

dibukanya peluang pekerjaan khususnya dari tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di Kabupaten Nias Selatan. Selain dari pada itu, adanya minat masyarakat yang cukup tinggi untuk membuka peluang usaha sehingga menyerap tenaga kerja.

# h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Penganggura Terbuka

Tabel 2. 18
Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 s.d 2020

	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	79,80	79,03	72,22	77,14
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	1,28	3,77	2,25	4,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Penganguran Terbuka Kabupaten Nias Selatan setiap tahun angkanya bervariasi. Pada tahun 2020, TPAK di Nias Selatan sebesar 77.14 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,15 %, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 4 orang yang benar-benar menganggur. Terjadinya kenaikan TPT tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 disebabkan naiknya jumlah pelajar/ mahasiswa yang menamatkan pendidikannya pada saat itu.

## 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

## 2.2.3.1. Perkembangan Seni Budaya

# a. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

Penyelenggaraan festival Seni Budaya sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 selalu diselenggarakan di Kabupaten Nias Selatan. Kegiatan tersebut berupa Ya'ahowu Nias Festival, dimana diikuti oleh beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Nias. Namun pada tahun 2020 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehubungan dengan masa pandemi covid-19. Selain dari pada itu pada tahun 2019 Kabupaten Nias Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Sail Nias yang merupakan program dari pemerintah pusat.

b. Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan.

Kabupaten Nias Selatan memiliki kekayaan adat istiadat yang sangat beragam sehingga terdapat banyak benda, situs cagar budaya yang dimiliki,

namun tidak semua benda, situs dan cagar budaya tersebut dilestarikan. Jumlah benda, situs cagar budaya yang dilestarikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 19
Jumlah Benda, Situs dan Cagar Budaya yang
dilestarikan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	10	10	10	7

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2021

# c. Karya Budaya yang di Revitalisasi dan di Inventarisasi

Pada tahun 2017 dan 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah menetapkan Karya Budaya "Babae" dan "Kala Bubu" sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia. Selain dari pada itu, pada tahun 2019 ada beberapa karya budaya Kabupaten Nias Selatan yang sudah di inventarisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan menjadi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indonesia antara lain : Fahombo (Lompat Batu) dan Faluaya (Tari Perang).

# 2.2.3.2. Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2. 20
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	56,25	62,50	75	77,50	60
Cakupan Pembinaan Olarhraga	Keg	2	2	2	3	-
Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	2	3	3	3	-
Jumlah Prestasi Olahraga	Orang	4	5	5	5	-

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Nias Selatan masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari persentase organisasi pemuda yang aktif, dimana dari tahun 2016-2019 mengalami kenaikan namun di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 60 persen. Begitu juga halnya dengan pembinaan olahraga, jumlah atlet yang berprestasi dan jumlah prestasi olahraga cenderung stagnan. Untuk itu sangat diperlukan pembinaan serta

aten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-42

pembangunan sarana dan prasarananya sehingga dapat meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan dan pembinaan prestasi olahraga.

# 2.3. Aspek Pelayanan Umum

# 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

## 2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib

#### 1. Pendidikan

# a. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 2. 21 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Umur	Angka Partisipasi Sekolah					
Omur	2016	2017	2018	2019	2020	
4-6 Tahun	-	-	-	-	-	
7-12 Tahun	95,83	95,55	97,70	86,03	92,92	
13-15 Tahun	95,83	86,38	99,60	85,80	87,03	
16-18 Tahun	68,28	73,32	73,32	91,47	91,47	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2020

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia tahun 2016-2020 pada jenjang usia 7-12 tahun cenderung bervariasi, dari 95,83 di tahun 2016 menjadi 92,92 di tahun 2020. Sementara itu capaian APS pada jenjang 13-15 tahun setiap tahunnya bervariasi, dari 85,80 di tahun 2019 menjadi 87,03 di tahun 2020, sedangkan capaian APS pada jenjang usia 16-18 tahun di tahun 2016 sebesar 68,28, naik menjadi 73,32 di tahun 2017-2018 dan pada tahun 2019-2020 sebesar 91,47. Pada umumnya capaian APS dari tahun ketahun tidak mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia muda dari pada ketentuan yang ada. Selain itu, karena adanya kkebijakan zonasi yang mulai diterapkan, walaupun pada penerapannya secara umum belum efektif.

# b. Angka Partisipasi Kasar

APK Kabupaten Nias Selatan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif nilainya, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dan Perguruan Tinggi.

Pada tahun 2016, APK jenjang SD/MI/sederajat sebesar 109,34 persen, pada tahun 2017 menurun sebesar 105,07 persen, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 109,39 persen. Pada akhir periode (tahun 2020) APK jenjang SD/MI/sederajat kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu 111,59 persen. APK di jenjang SMP/MTs

cenderung fluktuatif seperti APK jenjang SD/MI. APK jenjang SMP/MTs mengalami penurunan dari tahun 2016 -2018. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 85,25 persen dan tahun 2020 kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 80,78 persen. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK mengalami kenaikan dari tahun 2016-2019, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 85,29 persen. Sedangkan APK jenjang Perguruan Tinggi juga cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2016 sebesar 12,18 persen naik menjadi 15,46 persen pada tahun 2017, pada tahun 2018 menurun menjadi 15,25 persen dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 16,50 persen dari 16,70 persen pada tahun 2020.

Tabel 2. 22 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Inniana Dandidilaan		Angka Partisipasi Kasar							
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020				
PAUD	-	-	-	-	-				
SD/MI	109,34	105,07	105,47	109,39	111,59				
SMP/MTs	82,98	82,63	78,07	85,25	80,78				
SMA/MA	73,67	77,68	98,41	87,81	85,29				
Perguruan Tinggi	12,18	15,46	15,25	16,70	16,50				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

# c. Angka Partisipasi Murni

APM SD pada tahun 2016 sebesar 95,83 persen dan mengalami penurunan menjadi 95,55 persen pada tahun 2017 dan kembali naik sebesar 96,02 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2020 naik sebesar 96,08 persen dari tahun 2019. APM terjadi pada tingkat pendidikan SMP dimana pada tahun 2019 sebesar 70,74 persen, sedangkan di tahun 2020 menjadi 70,44 persen. Untuk tingkat pendidikan SMA juga mengalami penurunan sebesar 0,10 persen dari tahun 2019. Secara rinci perkembangan APM di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 baik PAUD, SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2. 23
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020.

Inniana Dandidilaa		Angka Partisipasi Murni (APM)							
Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020				
PAUD	-	-	-	-	-				
SD/MI	95.83	95.55	96.02	95.91	96.08				
SMP/MTs	74.10	72.27	69.16	70.74	70.44				
SMA/MA	57.92	61.43	64.92	66.73	66.63				
Perguruan Tinggi	8.80	11.01	11.33	10.86	14.27				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Halaman : II-44

# d. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis merefleksikan pendidikan suatu daerah. Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf. Perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 24
Angka Melek Huruf di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Vohuneten	Angka Melek Huruf						
Kabupaten	2016	2017	2018	2019	2020		
Nias Selatan	90,38	72,77	69,16	70,74	70,74		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa angka melek huruf Nias Selatan setiap tahun nilainya fluktuatif. Dari tahun 2016-2018 nilainya mengalami penurunan, pada tahun 2016 sebesar 90,38 persen dan tahun 2018 turun menjadi 69,16 persen. Pada tahun 2019 dan 2020 nilainya sama sebesar 70,74 persen.

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

## e. Rasio Ketersedian Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 25
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2016 s/d 2020 di Kabupaten Nias Selatan

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	-	140	133	129	121
2	SMP	-	157	156	158	156
3	SMA/SMK	-	179	173	173	179

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu 2016-2020 ketersediaan sekolah SD, SMP dan SMA/SMK cenderung fluktuatif. Dimana

ketersediaan jumlah SD di tahun 2017 sebanyak 140 sekolah turun menjadi 121 sekolah di tahun 2020. Jumlah SMP di tahun 2017 sebanyak 157 sekolah, di tahun 2019 sebanyak 158 sekolah dan di tahun 2020 sebanyak 156 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMA/SMK di tahun 2017 sebanyak 179 sekolah, di tahun 2018-2019 sebanyak 173 sekolah dan di tahun 2020 bertambah sebanyak 179 sekolah.

# f. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 26
Rasio Jumlah Guru dan Murid jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Tahun 2016 s/d 2020 di Kabupaten Nias Selatan

	Tanan 2010 3/4 2020 at habapaten mas betatan								
No	Jenjang			Tahun					
NO	Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020			
	SD/MI								
1	Jumlah Guru	3.681	3.379	3.204	3.659	4.058			
	Jumlah Murid	55.071	49.585	47.502	45.561	42.754			
	SMP/MTs								
2	Jumlah Guru	1.830	1.546	1.475	1.689	2.204			
	Jumlah Murid	23.831	20.911	20.136	21.713	21.412			
	nlah Guru /MI+SMP/MTs)	5.511	4.925	4.679	5.348	6.262			
	nlah Murid .MI+SMP/MTS)	78.902	70.496	67.638	67.274	64.166			
(SD Mu	io Guru /MI+SMP/MTs) Per rid Per 10.000 duduk	698,46	698,62	691,77	794,95	975,90			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2016-2020, rasio ketersedian guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 rasio sebesar 698,46 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 975,90. Hal ini disebabkan oleh penerimaan Guru Tidak Tetap Daerah (GTTD) dan Guru Tidak Tetap Sekolah (GTTS) selama kurun waktu tersebut.

Halaman: II-46

## g. Angka Putus Sekolah

Tabel 2. 27
Jumlah Siswa Putus Sekolah di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	-	298	759	677	-
3	SMP	-	157	353	299	-
6	SMA	-	155	247	175	-
7	SMK	-	261	195	214	-

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kabupaten Nias Seltan 2017, 2018, 2019

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah siswa yang putus Sekolah di Kabupaten Nias Selatan, dimana jenjang SD pada tahun 2017 sebanyak 298 orang, pada tahun 2019 sebanyak 759 orang dan tahun 2019 turun menjadi 677 orang. Begitu juga halnya pada jenjang SMP, SMA/SMK.

Pada umumnya penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin dan keadaan geografis.

# h. Angka Kelulusan Sekolah

Tabel 2. 28 Angka Kelulusan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	72,40	85,22	82,20	19,91	99,42
2	SMP	91,34	95,68	84,29	30,10	95,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2021

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD, sepanjang tahun 2016-2020 tingkat kelulusannya nilainya fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 72,40 persen, pada tahun 2019 turun menjadi 19,91 persen, sedangan pada tahun 2020 mencapai 99,42 persen. Begitu juga halnya dengan tingkat kelulusan SMP, dimana pada tahun 2016 sebesar 91,34 persen dan pada tahun 2020 sebesar 95,87 persen.

## i. Angka Melanjutkan

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan tingkat SD selama kurun waktu 2016-2020 cenderung

bervariasi, dimana pada tahun 2016 sebesar 99,86 persen, tahun 2017 sebesar 85,21 persen dan tahun 2020 sebesar 96,27 persen.

Tabel 2, 29 Angka Melanjutkan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	99,86	85,21	99,00	99,00	96,27
2	SMP	96,25	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2021

# j. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Jumlah dan kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan untuk tingkat SD dan SMP selama kurun waktu 2016-2019 cenderung bervariasi. Tingkat SD pada tahun 2019 gedung sekolah dalam kondisi baik sebanyak 1140 unit, kondisi rusak ringan sebanyak 507unit dan kondisi rusak berat sebesar 732 unit. Sedangkan tingkat SMP pada taun 2019 gedung sekolah dalam baik sebanyak 337 unit, rusak ringan 203 unit dan rusak berat 234 Kondisi dipengaruhi oleh jumlah unit. ini sekolah dibangun/direhab setiap tahunnya.

Tabel 2. 30 Ketersediaan Fasilitas Pendidikan, Rasio Guru/Murid dan Jumlah Guru yang memenuhi Kualifikasi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

	memenum Kuamikasi	ui ixabupa	cen mas s	ciacan rand	un 2010 s/	u 2020
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Kondisi Bangungan SD					
	Baik	338	335	1276	1140	-
	Rusak Ringan	1356	1536	455	507	-
1	Rusak Berat	223	575	661	732	-
	Rasio Guru/Murid per Kelas	01:19	01:14	01:16	01:14	-
	Jumlah Guru yang memenuhi Klualifikasi S1/D4	37,2% / 62,8%	35,8% / 64,2 %	54,0% / 46,0%	57,9% / 42,1%	-
	Kondisi Bangunan SMP					
	Baik	67	70	357	337	-
	Rusak Ringan	311	418	210	203	-
2	Rusak Berat	155	276	214	234	-
	Rasio Guru/Murid per Kelas	01:17	01:14	01:16	01:14	-
	Jumlah Guru yang memenuhi Klualifikasi S1/D4	64,0% / 36,0%	73,4% / 26,6%	84,3% / 15,7%	87,5% / 12,5%	-

Sumber; Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2021

#### 2. Kesehatan

Kondisi perkembangan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat dari capaian indikator utama pembangunan sebagai berikut :

a. Perkembangan Bidang Kesehatan.

Halaman: II-48

Tabel 2. 31
Perkembangan Bidang Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup)	-	8,81	6,24	6,40	1,70
2.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup)					
	Nias Selatan	199	48	16	127	-
	Sumatera Utara	85	69	57	73	-
3.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Tertangani	-	100	20	7,7	10,7
4.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan.	-	53,8	59,3	69,5	92
5.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	-	8,7	9,96	12,5	12,5
6.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	0,1	11,37	23,9	23,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan 2021; Profil Kesehatan Sumatera Utara 2016-2019

Angka kelangsungan hidup bayi setiap tahunnya mengalami penuran, dimana pada tahun 2017 angkanya mencapai 8,81 persen, namun di tahun 2020 menjadi 1,70 persen. Kelangsungan hidup bayi sangat dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan *congenital*.

Begitu juga halnya dengan angka kematian ibu, dimana setiap tahunnya cenderung bervariasi. Di tahun 2016 sebesar 199 menjadi 127 di tahun 2020. Sedangkan untuk penanganan penderita penyakit TBC BTA cukup stabil dimana pada tahun 208 sebesar 11,37 persen dan di tahun 2018-2020 sebesar 23,9 persen.

# b. Rasio Fasilitas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020.

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Tabel 2. 32 Rasio Fasilitas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
Rumah Sakit					
Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	3

Fasilitas Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531
Rasio	0,003	0,003	0,003	0,003	0,008
Puskesmas					
Jumlah Puskesmas	2	36	36	36	39
Rasio	0,006	0,115	0,113	0,113	0,108
Puskesmas Pembantu					
Jumlah Pustu	40	68	68	68	59
Rasio	0,128	0,216	0,214	0,213	0,164
Posyandu					
Jumlah Posyandu	345	487	487	487	483
Rasio	1,108	1,549	1,535	1,522	1,340
Poskesdes					
Jumlah Posyandu	40	69	69	69	68
Rasio	0,128	0,219	0,218	0,216	0,189
Klinik					
Jumlah Klinik	1	3	3	5	13
Rasio	0,003	0,010	0,009	0,016	0,036

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Rasio rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Poskesdes dan Klinik di Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2020 berdasarkan data pada tabel diatas secara umum jumlahnya fluktuatif. Puskesmas, Posyandu, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes mengalami penurunan pada tahun 2020, dimana jumlah Puskesmas sebanyak 39 unit, Posyandu sebanyak 483 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 59 unit dan Poskesdes sebanyak 68 unit. Sedangkan untuk Rumah Sakit dan Klinik mengalami kenaikan pada tahun 2020. Dengan bertambahnya 3 unit Rumah Sakit dan 13 unit Klinik maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut menggambarkan rasio Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Poskesdes dan Klinik terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan pada umumnya masih memerlukan perhatian dari pemerintah baik bangunan, alat kesehatan maupun obat-obatan. Misalnya Rumah Sakit Umum Daerah Lukas yang ada di Kabupaten Nias Selatan kondisinya masih jauh dari ideal sebuah Rumah Sakit Umum Daerah, dimana beberapa ruang tidak bisa dimanfaatkan, alat kesehatannya tidak berfungsi dengan baik dan ketersediaan obat-obatan yang masih minim. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat melakukan pelayanan kesehatan di RSUD dr. M. Thomsen Nias.

#### c. Rasio Dokter

Rasio Dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal idealnya rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah 1:2500. Dari tabel dibawah Kabupaten Nias Selatan satu orang dokter umum melayani kurang lebih 8.300 orang dan dapat dikatakan jauh dari ideal.

Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 33
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Dokter	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	-	25	31	36	43
Rasio	-	0,08	0,10	0,11	0,12
Jumlah Dokter Gigi	-	3	1	3	5
Rasio	-	0,010	0,003	0,009	0,014
Jumlah Dokter Spesialis	-	1	2	2	3
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531
Rasio	-	0,003	0,006	0,006	0,008

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Dari tahun 2016-2020 terjadi penambahan jumlah dokter di Kabupaten Nias Selatan, namun masih jauh dari idealnya. Hal ini menjadi salah satu masalah dalam bidang kesehatan, dimana keberadaan dokter masih sangat dibutuhkan di Kabupaten Nias Selatan dilihat dari jumlah penduduk maupun luas wilayahnya.

## d. Rasio Tenaga Kesehatan

Dari tabel berikut ini dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 sebanyak 1.911 orang dimana naik sebanyak 215 orang dari tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi perekrutan tenaga kesehatan di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2. 34

Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	1.186	1.209	1.596	1.696	1.911
2	Jumlah Penduduk	310.524	314.395	317.207	319.902	360.531
3	Rasio	3,82	3,85	5,03	5,30	5,30

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

#### e. Gizi Buruk

Gizi buruk merupakan salah satu masalah kesehatan yang yang dihadapi di Kabupaten Nias Selatan. Beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk adalah kurangnya asupan makanan yang menyebabkan kekurangan nutrien bagi perkembangan tubuh anak dan makan secara tidak teratur bisa memicu masalah pencernaan dan malnutrisi.

Dari grafik dibawah ini dapat dijelaskan bahwa jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 bervariasi. Jumlah tertinggi penderita gizi buruk di Kabupaten Nias Selatan terjadi pada tahun 2017 sebanyak 81 orang, naik sebanyak 56 orang dari tahun 2016. Untuk tahun 2018-2020 selalu mengalami kenaikan, di tahun 2018 sebanyak 31 orang, di tahun 2019 sebanyak 52 orang dan di tahun 2020 sebanyak 68 orang.

**■**2016 **■**2017 **■**2018 **■**2019 **■**2020 90 81 80 68 70 60 52 50 40 31 30 25 20 10 0 Gizi Buruk

Grafik 2. 10 Penderita Gizi Buruk di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

### f. Pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 35 Cakupan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penderita Hipertensi yang tertangani	-	-	-	72.427 (41,24%)	-
2.	Penderita Diabetes Militus yang tertangani	-	-	-	165 (100%)	-

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Penderita HIV/AIDS yang mendapat penyuluhan	-	-	-	-	-
4.	Penderita DBD	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Penderita ODJGB	-	-	-	37 Org (8,43%)	-
6.	Penderita Malaria	-	-	-	11 (100%)	-
7.	Kasus Covid-19	-	-	-	-	
	Terkonfirmasi (+)					575*
	Meninggal Dunia					7*

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara 2019 Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan 2021 \*Angka dari tahun 2020 s/d per Agustus 2021

# g. Prevalensi Stunting

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Pada tahun 2021 ada 16 Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting dan di tahun 2022 direncanakan menjadi 154 Desa. Angka Prevalansi Stunting Kabupaten Nias Selatan sebesar 25,67 persen (Sumber: EPPGM 2021)

# 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

# 3.1. Pekerjaan Umum

Jaringan transportasi baik darat, laut maupun udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan suatu wilayah, yaitu memberi kemudahan atau meningkatkan interaksi antar wilayah/pusat pelayanan. Dengan demikian akan diperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan kewilayahan (membuka keterisolasian dengan wilayah lainnya), karena hubungan antar wilayah yang semakin mudah akan mendorong pergerakan penduduk. Dengan terbukanya wilayah yang terisolasi maka wilayah tersebut akan semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

## a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan (Nasional, Provinsi, dan kabupaten/Kota). Hal ini mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Kondisi jaringan jalan di Kabupaten

Nias Selatan kurun waktu tahun 2016-2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 36
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)							
NO	Hondisi Galan	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Kondisi Baik	276,97	309,73	348,39	433,181	467,54			
2	Kondisi Sedang Rusak	170,51	175,08	127,69	8,999	34,71			
3	Kondisi Rusak	213,41	198,32	184,55	88,085	36,71			
4	Kondisi Rusak Berat	210,05	192,75	216,75	347,115	338,42			
	Jalan secara								
5	keseluruhan (Nasional,	1.001,88	1.011,68	1.011,68	1.011,68	1.011,68			
	Provinsi dan Kabupaten)								

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan 2021

Panjang jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan kondisi baik di Kabupaten Nias Selatan meningkat setiap tahunnya. Sementara panjang jalan dengan kondisi rusak berat di Kabupaten Nias Selatan juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Panjang jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tidak mengalami pertumbuhan sejak tahun 2017 dimana panjang jalan pada tahun 2020 adalah 1.000,68 Km.

# b. Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan

Tabel 2. 37
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Berdasarkan Jenis Permukaan Jalan di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)						
ИО	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020		
I	Jenis Permukanan							
1	Aspal	359,05	371,25	398,36	452,98	428,51		
2	Kerikil	115,04	109,35	116,39	229,054	122,38		
3	Tanah	0	0	357,49	132,85	225,80		
4	Perkerasan Beton	0	1,84	5,14	62,50	100,70		
5	Lainnya	396,80	0	0	0	0		
	Jumlah	870,89	482,44	877,38	877,38	877,39		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Selatan 2021

Panjang jalan Kabupaten pada tahun 2020 adalah 877,39 Km. Permukaan jalan Kabupaten yang telah diaspal adalah sepanjang 428,52 Km. Panjang jalan Kabupaten yang jenis permukaanya masih kerikil dan tanah adalah sepanjang 348,18 Km. Sementara jalan dengan jenis permukaan perkerasan beton 100,70 Km.

c. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola.

un 2021-2026 Halaman : II-54

Tabel 2. 38
Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

		en Mas Seiat		Jalan (km)	
No	Kecamatan	Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	Hibala	-	-	22,00	22,00
2	Tanah Masa	-	_	4,90	4,90
3	Pulau-Pulau Batu	-	_	33,71	33,71
4	Pulau-Pulau Batu Timur	-	_	12,50	12,5
5	Simuk	-	-	4,05	4,05
6	Pulau-Pulau Batu Barat	-	-	3,20	3,20
7	Pulau-Pulau Batu Utara	-	-	8,00	8,0
8	Telukdalam	10,00	-	85,20	95,2
9	Fanayama	5,00	-	43,40	48,4
10	Toma	13,00	-	29,70	42,7
11	Maniamolo	13,40	-	39,93	53,33
12	Mazino	-	-	32,63	32,63
13	Luahagundre Maniamolo	3,70	-	24,94	28,64
14	Onolalu	-	-	24,50	24,50
15	Amandraya	11,00	-	58,20	69,20
16	Aramo	3,50	-	30,00	33,50
17	Ulususua	-	-	18,45	18,45
18	Lahusa	12,00	-	65,97	77,97
19	Sidua'ori	-	-	17,98	17,98
20	Somambawa	13,00	-	25,90	38,90
21	Gomo	-	-	24,46	24,46
22	Susua	-	-	24,00	24,0
23	Mazo	-	-	21,63	21,63
24	Umbunasi	-	-	14,77	14,77
25	Idanotae	-	-	15,27	15,27
26	Uluidanotae	-	-	11,60	11,6
27	Boronadu	-	-	6,46	6,46
28	Lolomatua	-	-	45,49	45,49
29	Ulunoyo	-	-	24,43	24,43
30	Huruna	12,80	-	18,44	31,24
31	Lolowau	11,85	5,00	20,94	37,79
32	Hilimegai	-	-	35,98	35,98
33	O'ou	15,05	-	0,50	15,55
34	Onohazumba	5,00	-	9,58	14,58
35	Hilisalawa'ahe	-	-	18,67	18,67
	Jumlah	129,30	5,00	877,38	1011,68

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa panjang jalan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 adalah 1011,68 km. Panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten adalah sepanjang 877,38 km. Jalan yang menjadi kewenangan Negara adalah 129,30 km. Sementara

jalan yang menjadi kewenangan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan hanya sepanjang 5 km.

d. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan

Tabel 2. 39
Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

NT.	Vocamatan					
No	Kecamatan	Aspal	Kerikil	ang Jalar Tanah	Beton	Jumlah
1	Hibala	_	3,90	4,60	11,46	19,96
2	Tanah Masa	-	-	-	4,90	4,9
3	Pulau-Pulau Batu	16,36	_	10,55	6,80	33,71
4	Pulau-Pulau Batu Timur	-	-	4,40	8,10	12,5
5	Simuk	-	-	_	1,50	1,5
6	Pulau-Pulau Batu Barat	-	-	-	1,50	1,5
7	Pulau-Pulau Batu Utara	-	8,00	-	-	8
8	Teluk Dalam	61,38	10,39	10,28	3,15	85,2
9	Fanayama	18,98	3,34	16,97	4,11	43,4
10	Toma	13,27	5,62	5,32	5,50	29,71
11	Maniamolo	30,16	6,10	3,47	0,20	39,93
12	Mazino	8,2	1,00	20,46	2,97	32,63
13	Luahagundre Maniamolo	6,43	2,20	16,30	-	24,93
14	Onolalu	22,83	1,67	_	_	24,5
15	Amandraya	27,59	7,44	19,99	3,19	58,21
16	Aramo	5,6	5,46	7,66	10,55	29,27
17	Ulususua	13,4	7,00	1,27	3,00	24,67
18	Lahusa	50,27	2,63	6,28	5,18	64,36
19	Sidua'ori	16,49	0,5	-	0,99	17,98
20	Somambawa	14,00	9,26	12,42	_	35,68
21	Gomo	18,31	6,15	_	-	24,46
22	Susua	0,80	10,73	11,96	-	23,49
23	Mazo	10,75	6,00	4,88	-	21,63
24	Umbunasi	0,20	10,21	3,25	1,11	14,77
25	Idanotae	3,80	4,62	-	-	8,42
26	Uluidanotae	-	1,00	-	10,60	11,6
27	Boronadu	2,74	1,28	2,44	-	6,46
28	Lolomatua	26,57	1,30	17,62	-	45,49
29	Ulunoyo	4,14	-	20,29	-	24,43
30	Huruna	7,70	0,20	9,54	1	18,44
31	Lolowau	10,82	2,07	4,11	3,94	20,94
32	Hilimegai	20,68	0,90	11,72	2,69	35,99
33	O'ou	0,50	-	-	-	0,5
34	Onohazumba	4,20	3,43	-	1,94	9,57
35	Hilisalawa'ahe	12,34	-	-	6,33	18,67
	Jumlah	428,51	122,4	225,78	100,71	877,4

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jalan Kabupaten dengan jenis permukaan aspal hampir seluruhnya di wilayah daratan Pulau Nias, yaitu sepanjang 412,15 km. Di kepulauan batu umumnya jenis permukaan jalan yang ada adalah jalan beton, yaitu sepanjang 82,07 Km pada tahun 2021. Jalan aspal adalah sepanjang 16,36 km. Terdapat beberapa Kecamatan yang

memiliki jalan permukaan tanah dan kerikil lebih dari 20 km, yaitu Kecamatan Amandraya, Kecamatan Susua, Kecamatan Mazino, Kecamatan Somambawa dan Kecamatan Teluk Dalam. Saat ini banyak jalan yang masih memerlukan perhatian dari pemerintah agar dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten Nias Selatan.

# e. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Tabel 2. 40
RasioTempat Ibadah per Satuan Penduduk di
Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mesjid	20	20	20	20	11
	Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317207	319902	360.531
	Rasio	0,064	0,064	0,063	0,063	0,031
2	Langgar/Mushola	2	2	2	2	1
	Rasio	0,006	0,006	0,006	0,006	0,003
3	Gereja Protestan	1126	1134	1134	1134	1347
	Rasio	3,617	3,607	3,575	3,545	3,736
4	Gereja Katolik	229	229	230	230	245
	Rasio	0,736	0,728	0,725	0,719	0,680
5	Pura	-	-	-	-	-
	Rasio	-	-	-	-	-
6	Vihara	2	2	0	0	0
	Rasio	0,006	0,006	0,000	0,000	0,000

Sumber : Kabubapten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Jumlah tempat ibadah di Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan jumlah pemeluknya. Rata-rata perbandingan jumlah Gereja Protestan dengan jumlah pemeluknya setiap tahunnya adalah 250 orang per setiap rumah ibadah. Rata-rata perbandingan jumlah Gereja Katolik dengan jumlah pemeluknya setiap tahunnya adalah 250 orang per setiap rumah ibadah 255 orang per setiap rumah ibadah. Berbeda dengan Mesjid dan Mushola, dimana pada tahun 2016, 2017, 2018 rata-rata perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah pemeluknya adalah 218 orang per setiap tempat ibadah. Kenaikan jumlah pemeluk Agama Islam pada tahun 2019 dan 2020 menyebabkan menurunnya rasio jumlah rumah ibadah dengan jumlah pemeluknya dimana pada tahun 2020 untuk setiap rumah ibadah pemeluk Agama Islam (Mesjid dan Mushola) jumlah pemeluk Agama Islam adalah 724 orang. Sementara rumah ibadah bagi pemeluk Agama Hindu dan Budha pada tahun 2020 tidak ada.

Halaman: II-57

#### f. Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 2. 41 Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah Pelanggan	1.676	1.667	1.670	1.650	-			
Air Disalurkan (m3)	470.881	411.749	358.526	320.510	-			
Nilai (Rp)	1.246.956.700	1.039.575.250	887.850.000	794.370.500	-			

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

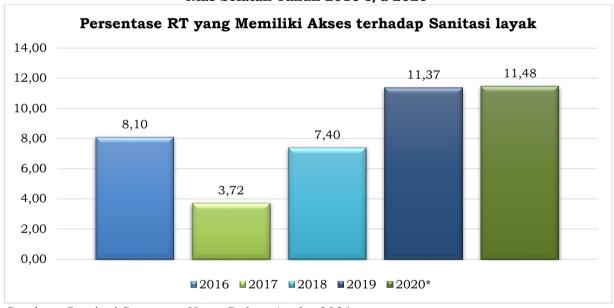
Jumlah pelanggan air minum di Kabupaten Nias Selatan setiap tahun jumlahnya bervariasi. Di tahun 2016 sebanyak 1.676, di tahun 2017 sebanyak 1.667, di ahun 2018 sebayak 1.670 dan di tahun 2020 menjadi 1.650.

g. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap sanitasi layak.

Grafik 2. 11

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten

Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020



Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Kabupaten Nias Selatan cenderung fluktuatif. Dimana di tahun 2016 sebesar 8,10 persen, di tahun 2017 turun menjadi 3,72 persen. Sedangkan pada kurun waktu tahun 2018-2020 cenderung mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatkan kesadaran masyakarat akan pentingnya sanitasi layak serta adanya pembangunan sanitasi layak dibeberapa lokasi oleh Pemerintah Daerah.

# h. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Nias Selatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 41,86 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 49,55 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pembangunan jaringan irigasi dibeberapa lokasi di Kabupaten Nias Selatan.

60 50 49,55 40 36,88 30 20 10 2017 2018 2019 2020

Grafik 2. 12 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Nias Selatan 2021

# 3.2. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jumlah penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias Selatan terjadi peningkatan dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 275 unit menjadi 413 unit di tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pembangunan/rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi manyarakat kurang mampu. Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 42
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	-	16.308	16.745	17.020	17.433
	Jumlah Penduduk	311.319	314.396	317.207	319.902	360.531
	Rasio	-	0,052	0,053	0,053	0,048
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	-	46.923	46.486	46.211	45.798
	Rasio	-	0,15	0,15	0,14	0,13

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Unit)	-	-	437	275	413
	Rasio	_	_	0,001	0,001	0,001

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan 2021

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Nias Selatan lebih banyak dibandingkan rumah yang sudah layak huni dimana jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 adalah sebanyak 17.433 rumah. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun tersebut adalah sebanyak 45.798 Rumah. Rata-rata penanganan rumah tidak layak huni setiap tahunnya adalah 413 rumah per tahun.

Tabel 2. 43
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	-	-	-	8463.96	8463.96		
Luas Wilayah (km2)	-	-	-	6.902.505	6.902.505		
Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	-	-	-	833.771	833.771		
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (RT)	-	-	-	1.267	1.267		
Jumlah seluruh rumah (Unit)	-	63.231	63.2512	63.356	63.356		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nias Selatan 2021

Kabupaten Nias Selatan memiliki luas kawasan kumuh pada tahun 2020 seluas 8463.96 Ha yang terdiri dari beberapa kawasan yang luasnya kurang dari 10 Ha.

# 4. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dibawah ini dapat kita lihat beberapa cakupan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

Halaman: II-60

Tabel 2. 44

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
100 Orang petugas Linmas di Kabupaten	-	160	155	157	177
Wilayah Kerja Kabupaten (Desa)	-	459	459	459	459
Persentase (%)	-	34,86	33,77	34,20	38,56
Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten	-	779	848	862	825
Jumlah Pos Siskamling di Kab. Nias Selatan berdasarkan Desa/Kel.	-	459	459	459	459

Sumber: Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 45
Penyelesaian Pelanggran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	-	18	27	23	25
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan	-	117	156	131	138
Persentase (%)	-	15,38	17,31	17,56	18,12

Sumber: Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2021

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya mengalami kenaikan. di tahun 2017 sebesar 15,38 persen, tahun 2018 sebesar 17,31 persen, tahun 2019 sebesar 17,56 dan di tahun 2020 sebesar 18,12 persen. Penyelesaian setiap pelanggaran tidak mencapai 100 persen setiap tahunnya disebabkan kurangnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada.

Tabel 2. 46 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

			,		
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jangkauan luas wilayah menajemen kebakaran (Kecamatan)	-	3	3	7	7
Luas wilayah Kabupaten Kecamatan)	-	35	35	35	35
Persentase (%)	-	8,6	8,6	20,0	20,0

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 47 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

manajomon novamentan (wana) an masapaton mas sociatan nanan 2010 5, a 2020							
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah Kasus kebakaran yang tertangani	-	1	3	3	4		
Jumlah Kasus kebakaran	-	3	5	4	5		
Persentase (%)	-	33	60	75	80		

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 48
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pol PP	PNS	-	16	19	16	12
	Honorer	-	144	136	141	165
Jumlah		-	160	155	157	177
Jumlah Penduduk		-	314.395	317.207	319.902	360.531
Rasio Jumlah Pol. PP	PNS	-	0,51	0,60	0,50	0,33
per 10000 penduduk	Honorer	-	4,58	4,29	4,41	4,58
Total			5,09	4,89	4,91	4,91

Sumber: Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2021

#### 5. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial. Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Pada tabel dibawah ini merupakan cakupan bidang Sosial.

Tabel 2. 49
Masalah Sosial Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian			Tahun		
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Balita Terlantar	654	654	-	360	360
Anak Terlantar	1.472	1.472	-	2.294	197
Anak Jalanan	153	135	-	-	170
Anak Jermal	-	-	18	-	15
Anak Nakal	-	-	-	-	24
Korban Tindak kekerasan	91	91	1	-	-
Korban Narkotika	90	90	-	-	101
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.695	1.695	420	-	-
Wanita Korban Tindak Kekerasan	91	-	-	-	85
Tuna Susila	82	82	-	-	102
Penyandang Disabilitas	-	-	430	79	1.873
Gelandangan	53	53	-	3.056	-
Pengemis	101	101	-	-	120
Bekas Narapidana	60	60	-	-	75
Korban Bencana Alam	122	122	25	-	120
Fakir Miskin	3.372	-	812	-	64.480
Trafiking	-	-	-	-	-
Komunitas Adat Terpencil	202	202	1	-	-
Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-
Korban Bencana Sosial	52	52	-	-	-
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	118	118	-	-	-
Pemulung	_	-	-	-	-

Uraian		Tahun							
Oraian	2016	2017	2018	2019	2020				
Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-				
Penderita HIV/AIDS	15	15	-	-	20				
Anak memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-				
Lanjut Usia	1.320	1.320	230	878	20				
Jumlah	9.743	6.262	1.937	6.667	67.762				

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel di atas dapat kita ketahui masalah sosial yang ada di Kabupaten Nias Selatan antara lain: balita terlantar, jumlah disabilitas, fakir miskin, lanjut usia dan sebagainya. Fakir miskin menjadi masalah yang utama yang dihadapi di Kabupaten Nias Selatan, dimana jumlah fakir miskin pada tahun 2020 sebanyak 64.480 orang, meningkatkan jumlah fakir miskin disebabkan oleh rendahnya ekonomi masyarakat yang dihantam oleh adanya 63andemic Covid-19, sehingga banyak masyarakat kehilangan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

# 2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

# 1) Tenaga kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tabel 2. 50 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 s/d 2020

	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	79,80	79,03	72,22	77,14
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	1,28	3,77	2,25	4,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 51 Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	TPAK (%)	n/a	79,80	79,03	72,22	77,14
2	Bekerja (%)	n/a	78,78	76,05	70,59	73,94
3	Bukan Angkatan Kerja (%)	n/a	20,20	20,97	27,78	22,86
	a. Sekolah (%)	n/a	10,73	11,05	14,82	n/a
	b. Mengurus Rumah Tangga (%)	n/a	7,66	6,85	8,48	n/a
	c. Lainnya	n/a	1,81	3,07	4,49	n/a
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	n/a	1,28	3,77	2,25	4,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 52 Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Lulusan	2016	2017	2018	2019	2020
S1	1.039	737	609	225	332
S2	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531
Rasio	33,37	23,44	19,20	7,03	9,21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2018 terjadi peningkatan jumlah tamatan S-1 di Kabupaten Nias Selatan. Hal ini disebabkan banyaknya mahasiswa yang menyelesaikan studinya diperguruan tinggi. Pada tahun 2020 jumlah mahasiswa yang lulus sebanyak 332 orang, naik sebanyak 107 orang dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 53
Besaran Pekerja/buruh Yang menjadi peserta Jamsostek
Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pekerja/buruh Jamsostek	35	35	35	42	31
Jumlah pekerja/buruh	6.201	7.200	7.200	7.200	6.502
Persentase (%)	56	49	49	58	48

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Nias Selatan 2021

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pekerja/buruh sebanyak 698 orang dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja oleh beberapa perusahaan karena dampak pandemi Covid-19.

Perkembangan Jumlah Koperasi, UKM Non BPR, LKM dan UKM di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2. 54

Jumlah Koperasi, UKM Non BPR, LKM dan UKM di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 S/D 2020

14H4H 2010 5/2 2020							
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah Koperasi aktif	3	7	17	18	23		
Jumlah koperasi tidak aktif	121	120	59	58	57		
Jumlah Seluruh Koperasi	124	127	76	76	86		
Jumlah Seluruh UKM	316	655	751	2.608	10.678		

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Nias Selatan 2021

# 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tabel 2. 55 Rasio KDRT di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020				
Jumlah KDRT	1	-	-	-	_				
Jumlah Rumah Tangga	64.864	65.505	66.091	66.823	69.915				
Rasio	0,002	-	-	-	-				

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan; Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka

Tabel 2. 56
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah perempuan dilembaga pemerintah	-	9	9	8	9			
Jumlah pekerja perempuan	-	74.001	72.914	66.457	72.215			
Persentase (%)	-	1	1	1	1			

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan; Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka

# 3) Pangan

Aspek ketersediaan dan distribusi pangan berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk, sehingga pertambahan penduduk membutuhkan tambahan ketersediaan bahan pokok, terutama beras. Disisi lain upaya peningkatan produksi beras tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena faktor lahan, infrastruktur, tenaga kerja, hama penyakit tanaman, bencana alam, maupun ketidakpastian harga pasar. Pada saat yang bersamaan ketersediaan sarana produksi seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga harga ditingkat petani lebih tinggi dari harga eceran yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dari tabel berikut ini dapat dilihat bahwa kesersediaan pangan utama dalam hal ini beras di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan. Pada 2018 dan 2019 jumlahnya sebesar 36.442,52 ton, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 37.007,63 ton, artinya adanya peningkatan sebesar 565,11 ton. Kenaikan tersebut disebabkan karena meningkatnya jumlah produksi pertanian masyarakat dalam hal ini padi. Untuk ketersediaan energi dan protein pertapitanya sebesar 1.428 Kkal/kap/hr.

Tabel 2. 57
Persentase Ketersediaan Pangan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
Rata-Rata Jumlah ketersediaan pangan utama (Beras) per tahun (ton)	-	-	36.442,52	36.442,52	37.007,63			

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
Ketersedianan Energi		_	_		1.428	
dan Protein perkapita	_	_	-	-	Kkal/kap/hr	
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531	
Persentase (%) Pangan	_	_	0,11	0.11	0,10	
Utama	_	_	0,11	0,11	0,10	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan 2021

# 4) Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan pembangunan bidang urusan lingkungan hidup antara lain : masih tingginya ekploitasi sumber daya alam, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, masih banyak usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan/atau usaha/kegiatan yang telah mempunyai dokumen lingkungan namun belum membuat laporan pemantauan dan masih banyak usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Dalam pengelolaan lingkungan harus memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tamping lingkungan hidup, kerentanan bencana, perubahan iklim, kualitas lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove.

Perkembangan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagimana tabel dibawah ini :

Tabel 2. 58
Perkembangan Pengelolaan Lingkungan di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusunnya RPPLH Kabupaten	n/a	5	10	6	5
Terintegrasi RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten	n/a	5	10	6	5
Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	1	-	-	-	-
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	1	1	1	1	1
Jumlah sampah yang tertangani (Kg)	16.520	17.520	17.520	17.520	18.520

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan 2021

Penanganan sampah merupakan salah satu masalah yang dihadapi saat ini. Dimana sebagian besar masyarakat membuang sampah disembarang tempat. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di perairan sugai ataupun laut, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan perairan. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penanganan sampah yang tertangani pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1 ton dari tahun

Halaman: II-66

sebelumnya, walaupun demikian masih diperlukan penanganan ekstra agar masalah tersebut dapat ditangani dengan baik.

# 5) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk :

- Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
- Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk
- Menyediakan data dan informasi kependudukan
- Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu;
- Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dari tabel-tabel berikut ini dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan Jumlah penduduk usia >17 tahun yg ber KTP, Jumlah Bayi berakta kelahiran, Jumlah pasangan nikah berakta nikah dan Jumlah KTP ber NIK yg diterbitkan selama tahun 2019-2020 di Kabupaten Nias Selatan disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, walaupun seyogianya sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil masih membutuhkan perhatian dari Pemerintah.

Tabel 2. 59
Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

1411411 2010 5/4 2020									
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020				
Jumlah peduduk usia >17 tahun yg ber KTP	-	-	-	137.358	164.532				
Jumlah Penduduk usia >17 tahun atau telah menikah	_	-	-	247.358	256.748				

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio	-	-	-	0,56	0,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 60 Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bayi berakta kelahiran	-	-	-	97.864	113.566
Jumlah bayi	-	-	-	63.748	78.589
Rasio	-	-	-	1,54	1,45

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 61 Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pasangan nikah berakta nikah	-	-	-	8.974	11.032
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	-	-	-	82.752	84.345
Rasio	-	-	-	0,11	0,13

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 62 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah KTP ber NIK yg diterbitkan	-	-	-	137.358	164.532
Jumlah Penduduk Wajib KTP	-	-	-	247.764	256.748
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2021

# 6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya bersifat stagnan, dimana pada tahun 2017-2020 rata-rata mempunyai anak 3 orang/keluarga.

Tabel 2. 63 Cakupan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rata- rata jumlah anak per keluarga	-	3	3	3	3
Cakupan peserta KB aktif	-	19.313	19.313	85.865	1.220

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan 2021

# 7) Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi disuatu daerah sangat berperan dalam perkembangan dan kemajuan suatu daerah terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kabupaten Nias Selatan sebagai

salah daerah tujuan wisata sangatlah memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Untuk mencapai Kabupaten Nias Selatan bisa menggunakan transportasi darat, udara maupun laut. Selama ini transportasi melalui udara masih mengandalkan Bandara Binaka Gunugsitoli berhubung di Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini Bandara yang ada belum bisa digunakan sebagaimana layaknya. Kondisi Bandara Silambo di Kabupaten Nias Selatan masih memerlukan perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Dearah dalam pembangunan sarana dan prasaranya. Selain dari pada itu, Pelabuhan Sibolga juga dapat digunakan sebagai akses keluar masuknya orang maupun barang di Kabupaten Nias Selatan. Pelabuhan laut terdapat di Kota Teluk Dalam, Pulau Tello dan Hibala. Cakupan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 64

Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

14H4H 2010 5/4 2020									
Jenis Kendaraan	Tahun								
Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020				
Truk	67	68	72	81	84				
Mobil Penumpang	32	34	43	51	54				
Becak Motor	12	17	21	32	35				
Mobil Pick Up dan Sejenisnya	121	134	168	272	394				

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

#### 8) Komunikasi dan Informatika

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai mediapenyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan 69erminal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi diantara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar.

Tabel 2. 65
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

14man 2010 5/4 2020								
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah KIM	-	2	5	6	6			
Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota	35	35	35	35	35			
Persentase (%)	-	5,71	14,29	17,14	17,14			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan 2021

Halaman : II-69

Tabel 2. 66 Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Luas Wilayah yang tercoverage	-	5.652	5.966	6.202	-
Luas Wilayah Keseluruhan	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505
Persentase (%)	-	0,0819	0,0864	0,0898	-

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan 2021

# 9) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 2. 67
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif	9	13	19	21	23
Jumlah Seluruh Koperasi	126	74	76	79	80
Persentase (%)	7,14	17,57	25	26,58	28,75

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Nias Selatan 2021

Total jumlah Koperasi di Kabupaten Nias Selatan di Kabupaten Nias Selatan setiap cenderung fluktuatif. Di tahun 2016 sebanyak 126 koperasi, di tahun 2018 turun menjadi 76 koperasi dan di tahun 2020 kembali naik menjadi 80 koperasi. Namun dilihat dari trennya persentase koperasi aktif di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020.

# 10) Penanaman Modal

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang – undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Berikut data jumlah Investor di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2. 68 Jumlah dan Nilai Investor di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

ouman dan mai investor di mabupaten mas belatan Tanun 2010 s/d 2020					
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah investor					
berskala					
nasional					
(PMDN/PMA)					

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
a. PMDN	3	3	8	8	18
b. PMA	0	1	0	0	0
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.935.000.000	172.787.000.000	8.235.000.000	8.369.319.936	27.550.000.000

Sumber: DPMP2TSP Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah investor berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Nias Selatan terjadi peningkatan dari tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2019 sebanyak 8 PMDN, meningkat menjadi 18 PMDN pada tahun 2020. Begitu juga halnya dengan nilai investasinya dimana pada tahun 2019 sebesar Rp.8.369.319.936,- meningkat menjadi Rp. 27.550.000.000,- pada tahun 2020.

Untuk mendorong tumbuh kembangnya iklim investasi dan meningkatkan realisasi PMDN dan PMA di Kabupaten Nias Selatan diperlukan dukungan dari pemerintah daerah dalam penerbitan regulasi terkait pemberian insetif dan kemudahan berinvestasi bagi masyakarat, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang pemberian Insentif dan Kemudaan Investasi di Daerah.

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya 71amping proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 69
Rasio Dava Serap Tenaga Keria di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahan	9	24	24	24	54		
Jumlah Seluruh PMA/PMDN	3	4	8	8	18		
Rasio	0,33	0,17	0,33	0,33	0,33		

Sumber: DPMP2TSP Kabupaten Nias Selatan 2021

### 11). Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan dan bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### 12). Statistik

Kumpulan data atau yang disebut dengan statistik dapat berupa angka atau bukan yang tersusun dalam bentuk tabel (daftar) atau dalam bentuk diagram yang merupakan gambaran dari suatu keadaan atau masalah tertentu. Dalam hal ini, kumpulan data yang sudah diolah akan dijabarkan sehingga dapat digunakan untuk menyusun suatu dokumen perencanaan. Data yang tersedia juga dapat digunakan untuk mengambil suatu kebijakan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah.

Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat.

Data yang dibutuhkan yaitu:

- 1. Buku Nias Selatan dalam angka (ada)
- 2. Buku PDRB Nias Selatan (ada)

Tabel 2. 70 Cakupan Bidang Statistik di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

1 0	_			•	
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan 2021

### 13). Persandian

Adapun permasalahan bidang urusan persandian yang dihadapi saat ini antara lain rendahnya kualitas pengamanan informasi pemerintah daerah dan belum adanya penetapan standar komunikasi sandi antar perangkat daerah.

## 14). Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan masih merupakan tantangan. Kedepan diperlukan kegiatan yang lebih bisa mempromosikan Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu potensi/nilai iual untuk pengembangan wisata. Perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan seni budaya juga dibutuhkan untuk mendukung promosi tersebut. Hal lain yang mendapatkan perhatian adalah pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan dan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Cakupan perkembangan kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 71 Cakupan Perkembangan Kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	1	1	1	0
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	10	10	10	8
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	0	1	1	1
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	1	1	1	1
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	10	10	8	8

Sumber: Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Nias Selatan 2021

### 17. Perpustakaan

memelihara Perpustakaan merupakan untuk dan upaya meningkattkan efisiensi dan efektifitas belajar-mengajar. proses Perpustakaan yang terorganisir secara baik dan sisitematis, secara langsung atau pun tidak langsung dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar mengajar di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Hal ini terkait dengan kemajuan bidang pendidikan dan dengan adanya perbaikan metode belajar-mengajar yang dirasakan tidak bisa dipisahkan dari masalah

penyediaan fasilitas dan sarana pendidikan. Cakupan perkembangan bidang perpustakaan dapat dilihat sebagimana tabel dibawah ini.

Tabel 2, 72 Cakupan Perkembangan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun	2.690	2.262	2.730	1.162	-
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	n/a	4.771	5.000	5.100	-
Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	900	1.107	773	527	-
Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	4.000	4.916	6.189	1.937	-
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	n/a	n/a	n/a	n/a	-
Jumlah Perpustakaan	136	149	149	149	-
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531

Sumber : Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan 2020

### 18. Kearsipan

Kearsipan mempunyai peranan yang penting dalam sebuah organisasi diantaranya yaitu:

- > Sebagai pusat informasi, setiap arsip bisa membantu ingatan seseorang mengenai sebuah naskah tertentu.
- > Sebagai sumber dokumentasi, arsip dapat digunakan pemimpin organisasi dalam mengambil keputusan dengan tepat mengenai masalah yang dihadapi.
- > Sebagai bukti resmi pertanggung jawaban penyelenggaraan administrasi.

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

### 1) Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan berperan sangat besar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam.

Potensi Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Nias Selatan. Wilayah perairan Kabupaten Nias Selatan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang meliputi Wilayah Pantai Barat Sumatera. Perairan Kabupaten Nias Selatan merupakan perairan kepulauan dimana salah satu ciri daerah penangkapan ikan yang baik yaitu terdiri dari gugusan pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar di Wilayah Kabupaten Nias Selatan khususnya Kepulauan Batu. Selain merupakan gugusan kepulauan, peraian Kabupaten Nias Selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dimana memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan.

Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 Pulau, 21 Pulau yang berpenghuni. Luas lautnya 4.450.405 Km² dan laus daratnya 2.452.100 Km². Potensi perikanan tangkap di Kabupaten Nias Selatan sangat besar terdapat di 7 Kecamatan yang ada di Kepulauan antara lain Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Utara, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Timur, Hibala, Tanah Masa, Simuk. Dibawah ini dapat dilihat perkembangan cakupan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2. 73
Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Darat di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	Sat	2016	2017	2018	2019	2020
Perikanan Laut						
Jumlah Tangkapan	Ton	5.311	8.400	8.503	8.612	8.503
Jumlah kapal penangkap ikan	Unit					
a. Perahu/Kapal tanpa motor		1.109	1.434	1.129	1.132	1.156
b. Perahu motor tempel		907	1193	1.210	1.230	1.239
Jumlah Rumah tangga perikanan	KK	1.198	1.299	1.358	1.381	2.741
Jumlah nelayan	Jiwa					
a. Penuh		4.457	4841	4952	4841	4841
b. Sambilan		231	353	362	353	353
Jumlah tempat pelelangan ikan	Unit	1	1	1	1	1
Perikanan Darat						
a. Tambak						
Luas	Ha	-	-	-	-	-
Produksi	kg					
b. Kolam						
Luas	На	21	25	27	29	31
Produksi	kg	16.052	22.450	25.767	28.031	27.3
c. Keramba						
Luas	На	3	3	4	5	5
Produksi	Ton	2	5	11	13	12.7
Jumlah Produksi Ikan	Ton	-	-	38,766	36,625	-

Uraian	Sat	2016	2017	2018	2019	2020
a. Produksi Perikanan		_	_	8.293,3	8,625	_
Laut				0.290,0	0,020	
b. Produksi Perikanan		19	23	38,766	28	31
Darat		19		38,700	20	31
Target Daerah untuk	Ton	7.980	8.111	8.210	8.313	8.414
produksi Ikan	1011	7.900	0.111	0.210	0.515	0.717
a. Produksi Perikanan		7.980	8000	8.200	8.400	8.500
Laut		7.900	8000	0.200	0.400	0.300
b. Produksi Perikanan		11	12	13	14	15
Darat			12	13	17	
Jumlah konsumsi Ikan	Kg	5.614.745	6.214.945	6.215.175	6.215.405	6.335.00
Target Daerah untuk	Va	5.968.253	8.820.893	8.854.877	8.878.493	8.878.493
konsumsi Ikan	Kg	3.906.233	0.040.093	0.034.077	0.010.493	0.010.493

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah produksi perikanan laut dan produksi peikanan Kabupaten Nias Selatan cenderung meningkat tiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 jumlah produksi perikanan laut sebesar 8.500 ton, sedangkan produksi perikanan darat sebesar 15 ton. Jumlah rumah tangga nelayan juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2020 berjumlah 1.198 dan pada tahun 2020 menjadi 2.741. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih menjadi nelayan. Tangkapan perikanan laut merupakan potensi yang besar sehingga perlu ditingkatkan aktifitasnya melalui pemberian perahu/kapal/ alat tangkap kepada kelompok nelayan.

Luas daratan untuk areal budidaya ikan air tawar juga cukup besar untuk dikembangkan. Wilayah sasaran pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar ini diprioritaskan pada wilayah Kecamatan yang secara geografis berada pada dataran tinggi, jauh dari pantai dan memiliki sumber mata air yang memadai. Wilayah Kecamatan dimaksud sebagai tujuan pengembangan kegiatan budidaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Kecamatan Tujuan Pengembangan Budidaya Perikanan di Kabupaten Nias Selatan.

	i ciikanan di Kabupaten Mas Sciatan.						
No.	Nama Kecamatan	Keterangan					
1.	Kecamatan Huruna	-					
2.	Kecamatan Lolomatua	-					
3.	Kecaatan Ulunoyo	-					
4.	Kecamatan Hilimegai	-					
5.	Kecamatan Onohazumba	-					
6.	Kecamatan Hilisalawa'ahe	-					
7.	Kecamatan Lolowau	Hanya memiliki 3 (tiga) desa pesisir dari 14 desa di Kecamatan Lolowau					
8.	Kecamatan Susua	-					
9.	Kecamatan Ulususua	-					

No.	Nama Kecamatan	Keterangan
10.	Vocamatan Amandraya	Hanya memiliki 8 (delapan) desa pesisir dari 21
10.	Kecamatan Amandraya	desa di Kecamatan Amandraya
11.	Kecamatan Aramo	-
12.	Kecamatan Maniamolo	Hanya memiliki 4 (empat) desa pesisir dari 14
14.	Recalliatan Maniamolo	desa di Kecamatan Maniamolo
13.	Kecamatan Fanayama	Hanya memiliki 3 (tiga) desa pesisir dari 17 desa
15.	Recalliatali Fallayallia	di Kecamatan Fanayama
14.	Kecamatan Onolalu	-
15.	Kecamatan Mazino	-
16.	Kecamatan Lahusa	Hanya memiliki 6 (enam) desa pesisir dari 23 desa
10.	Recalliatali Laliusa	di Kecamatan Lahusa
17.	Kecamatan Sidua'ori	-
18.	Kecamatan Gomo	-
19.	Kecamatan Umbunasi	-
20.	Kecamatan Ulu Idanotae	-
21.	Kecamatan Idanotae	-
22.	Kecamatan Boronadu	-

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2021

Selain dari pada itu di bawah ini diuraikan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. 75 Jumlah Desa Nelayan di Kabupaten Nias Selatan.

No	Kecamatan	Desa Nelayan	Kelurahan
1	Pulau-Pulau Batu	20	1
2	Hibala	17	-
3	Pulau-Pulau Batu Timur	10	-
4	Simuk	6	-
5	Pulau-Pulau Batu Barat	9	-
6	Pulau-Pulau Batu Utara	12	-
7	Tanah Masa	12	-
8	Lolowau	4	-
9	Lahusa	6	-
10	Telukdalam	14	1
11	Toma	14	-
12	Fanayama	7	-
13	Amandraya	21	-
14	Maniamolo	14	-
15	Luahagunde	10	-
16	O'ou	3	-
17	Somambawa	5	-
	Jumlah	198	2

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 76

Jumlah Kelompok Nelayan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemda	6	7	22	36	10
Jumlah kelompok nelayan keseluruhan	80	94	113	128	134
Jumlah Produksi ikan di daerah (ton)	5.329	8.437	8.540	8.653	8.528
Nilai Tukar Nelayan	103,83	108,59	109,76	110,00	99,52

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel tersebut dapat kita ketahuai bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan karena beberapa kegiatan pengadaan sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan tidak dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

### 2) Pariwisata

Selain potensi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata juga merupakan salah satu potensi unggulan yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017-2015. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan mencakup 4 (empat) pilar yakni destinasi pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Nias Selatan masih perlu ditingkatkan promosinya untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik, misalnya berupa promosi langsung dalam bentuk penyelenggaraan event pariwisata dan partisipasi pada kegiatan promosi pariwisata. Potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan cukup bervariasi seperti Wisata Alam, Wisata budaya, wisata bahari, dan peninggalan prasejarah / batu megalith.

Tabel 2. 77
Persentase Kunjungan Wisata di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah					
Kunjungan	33.710	57.442	61.292	69.596	10.783
Wisata (Orang)					
Rata Rata Lama					
Kunjungan	2	2	3	4	1
Wisata dalam			<u>ى</u>	4	1
satu tahun (hari)					
PAD Sektor		257 060 000	750.138.000	440 265 000	110.212.000
Pariwisata (Rp)	_	357.260.000	730.138.000	440.365.000	110.212.000

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata, lama kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020

jumlah kunjungan wisata menurun sebanyak 58.813 orang dari tahun 2019. Rata-rata lamanya kunjungan wisata dalam satu tahun menjadi 1 hari, sedangkan PAD sektor pariwisata juga mengalami penurunan sebesar Rp.330.153.00 jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan kunjungan wisata baik dalam maupun luar negeri yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.



Grafik 2. 13

Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik
Di Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2021

Dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik mengalami penurunan pada tahun 2020 dimana jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 150 orang dan wisatawan domestik sebanyak 10.633 orang yang berkunjung ke Kabupaten Nias Selatan, hal ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, aksesibilitas menuju Kawasan wisata serta Saranaprasarana penunjang pariwisata yang perlu penanganan, jumlah dan keterampilan SDM pariwisata yang perlu ditingkatkan, serta kurangnya Sadar Wisata dan Sapta Pesona di masyarakat juga diperlukan adanya promosi pariwisata dan ekonomi kreatif.

### 3) Pertanian

Pertanian juga merupakan potensi unggulan di Kabupaten Nias Selatan. Potensi pertaniannya antara lain: padi, jagung, kacang tanah,

kacang hijau, ketela pohon, sayur-sayuran serta buah-buahan. Untuk produksi perkebunan antara lain: karet, kelapa, kopi, pinang, kakao dan lain-lain.

Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tanaman Hortikultura yang ada di Kabupaten Nias Selatan antara lain adalah jenis tanaman seperti bawang daun, kacangan panjang, cabe, terong, ketimun, kangkung, bayam, buncis. Pada tahun 2020 luas panen terbesar adalah komoditi cabe sebesar 164 Ha, dengan produksi sebesar 577 ton.

Tabel 2. 78
Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Luas Fanen Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Mas Selatan Tanun 2010 s/u 2020									
Komoditi	Luas Panen (Ha)								
Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020				
Bawang Daun	57	54	53	40	22				
Kacang Panjang	168	124	128	58	58				
Cabe	576	386	335	95	164				
Terong	209	137	136	89	70				
Ketimun	112	92	88	64	39				
Kangkung	113	62	52	25	26				
Bayam	68	41	41	21	21				
Buncis	45	35	24	13	9				

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel berikut ini beberapa produksi tanaman sayur-sayuran pada tahun 2020 mengalami peningkatan yakni kacang panjang sebanyak 210 ton, cabe sebanyak 577 ton, kangkung sebanyak 99 ton, sedangkan yang mengalami penurunan jumlah produksi yakni bawang daun sebanyak 80 ton, terong sebanyak 193 ton, ketimun 120 ton, buncis sebanyak 25 ton.

Tabel 2. 79
Produksi Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)							
Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020			
Bawang Daun	589	2780	198	155	80			
Kacang Panjang	3057	5772	821	154	210			
Cabe	11636	21883	2121	569	577			
Terong	5460	8006	869	253	193			
Ketimun	1856	4580	614	195	120			
Kangkung	2187	3854	178	57	99			
Bayam	576	1180	106	48	48			
Buncis	806	1723	83	29	25			

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Pada tahun 2020 luas tanaman perkebunan yang terbesar adalah karet dengan luas sebesar 11.383,25 Ha. Sedangkan kelapa merupakan tanaman perkebunan yang produksinya tinggi sebesar 13.672,62 ton. Luas tanaman perkebunan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 80 Luas Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Jenis Tanaman					
Jems ranaman	2016	2017	2018	2019	2020
Karet	11.656,00	11.6977,75	11.204,3	11.383,25	11.383,25
Kelapa	21.634,25	18676,75	19786	20286	20286
Kopi	0	0	0	0	0
Cengkeh	290,50	113,50	355,00	389,00	389
Pala	50	67	68,00	71	71
Nilam	130	120	26,00	26,50	26,5
Kakao	6.077,75	4824	5568	5609	5609
Pinang	902,00	752	749,50	766,5	766,5
Kelapa Sawit	1.366,00	1.427,00	1427	929,00	929
Jagung	1922,8	2303	3914	3940	2785
Padi	29944,3	25572	27244	19496,2	21958

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 81 Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Jenis Tanaman		Produksi (Ton)								
Jenis Tanaman	2016	2017	2018	2019	2020					
Karet	13.561,20	10.281,43	9.967,25	9.976,84	9.976,84					
Kelapa	17.955,19	14124,97	12.672,62	13.672,62	13.672,62					
Kopi	0			0	0					
Cengkeh	40,06	22,37	112,1	129,60	129,6					
Pala	218,75	25,49	25,5	25,74	25,74					
Nilam	33,60	1904	9,3	753,07	753,07					
Kakao	3.468,00	3624,13	3.566,43	3.567,21	3567,21					
Pinang	202,80	752	185,43	185,34	185,34					
Kelapa Sawit	1,10	9,10	9,10	752,18	752,18					
Jagung	6389	7774	3331	4172	28313					
Padi	121125	97903	22137	21032	112803					

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Dari tabel di bawah ini dapat kita ketahui bahwa hewan ternak babi dan ayam buras merupakan jenis hewan ternak yang banyak dipelihara di Kabupaten Nias Selatan. Jumlah populasi babi meningkat setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 populasi ternak babi berjumlah mengalami penurunan, hal ini dikarenakan terjadinya kematian babi secara masal yang

disebabkan oleh virus. Sehingga banyak masyarakat yang beralih menjadi peternak ayam buras sehingga pada tahun 2020 jumlah polulasi ayam buras meningkat di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 278.344 ekor. Pada tahun 2021 pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan bibit babi kepada masyarkat sebagai upaya peningkatan populasi ternak babi.

Tabel 2. 82 Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020

Jenis Ternak	Jumlah Populasi ternak (ekor)								
Jenis Ternak	2016	2017	2018	2019	2020				
Babi	176.366	197.402	205.876	220.287	22.029				
Sapi	64	68	72	90	106				
Kerbau	43	53	56	59	65				
Ayam Buras	194.930	87.355	93.743	103.117	278.344				
Itik	5.516	6.772	7.433	7.954	8.749				
Kambing	3.845	4.620	4.632	5.095	6.571				

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016 sebesar 2.301,20 naik pada tahun 2020 menjadi 3.196,25. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian merupakan salah sektor yang mempunyai kontribusi dalam PDRB Kabupaten Nias Selatan sebagimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 83
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	2.391,20	2.600,34	2.822,21	3.044,02	3.196,25
Jumlah PDRB	5.192,77	5.695,74	6.247,31	6.861,48	7.164,27
Persentase (%)	46,05	45,65	45,17	44,36	44,61

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 84 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemda	583	198	220	226	226
Jumlah seluruh kelompok tani	1200	1306	504	1114	1114
Persentase (%)	48,58	15,16	43,65	20,29	20,29

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan 2021

Jumlah kelompok tani yang menerima bantuan dari pemerintah setiap tahun jumlahnya selalu berubah. Perubahan ini disebabkan banyaknya jumlah bantuan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada, sehingga tidak semua kelompok tersebut mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

en Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-82

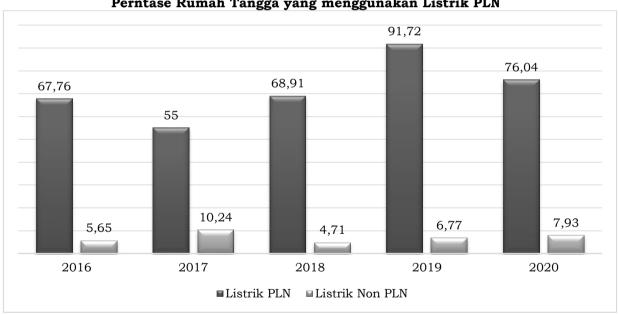
### 4) Kehutanan

Layanan urusan pilihan kehutanan dilaksanakan melalui pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

## 5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasokan energi listrik merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Nias Selatan, sebab tidak semua desa menikmati arus listrik dari PLN. Dari 461 desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan, masih terdapat beberapa desa yang belum tersentuh jaringan listrik yang bersumber dari PLN. Hal ini merupakan salah satu masalah yang terusmenurus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik sebagaimana dibawah ini :



Grafik 2. 14
Perntase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Kondisi listrik Desa di Provinsi Sumatera Utara per maret 2021 yakni sebagai berikut jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 33, Kecamatan sebanyak 445 dan jumlah Desa/kelurahan sebanyak 6.110. Desa yang sudah berlistrik sebanyak 6.110 Desa, Listrik PLN sebanyak 6.028 Desa dan Listrik Non PLN sebanyak 82 Desa. (Sumber: <a href="www.pln.co.id">www.pln.co.id</a>)

Rasio Elektrifikasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 85 Rasio Elektrifikasi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

	india miditimati markatan maran manan mana										
No	Uraian	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga	Jumlah Pekanggan Rumah Tangga Non PLN	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga	RE PLN (%)	RE Total (%)					
1	Nias Selatan	33.423	1.017	34.440	79.49	81.90					
2	Sumatera Utara	3.713.720	6.206	3.719.926	99.82	99,99					

Sumber: www.pln.co.id

## 6) Perdagangan

Permasalahan merosotnya daya beli akibat turunnya harga komoditi yang menjadi tumpuan hidup masyarakat Kabupaten Nias Selatan, seperti turunnya harga karet dan komoditi perkebunan lainnya. permasalahan lain yang dihadapi adalah masih terbatasnya sarana perdagangan, khususnya distribusi ke pasar, baik pasar dipusat-pusat kota maupun pasar desa, nelum terumusnya kebujakan mengenai pengaturan mata rantai dari hulu ke hilir.

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2. 86 Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Ekspor (ton)	23.520	20.880	20.880	25.440	25.440
Nilai Impor (ton)	4.800	7.440	7.920	7.680	8.160
Total	28.320	28.320	28.800	31.680	33.600

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 87
Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal
di Kabupaten Nias Selatan 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok pedagang/usaha informasi yang mendapat bantuan binaan	319	309	372	332	357
Jumlah seluruh pedagang/usaha informasi	2.900	3.090	3.100	3.320	3.570
Persentase (%)	11	10	12	10	10

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan 2021

## 7) Perindustrian

Permasalahan pembangunan bidang perindustrian di Kabupaten Nias Selatan antara lain masih lemahnya budaya industri, belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri, masih belum tersedianya bahan baku lokal

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-84

yang mencukupi, kurangnya informasi akses permodalan, inovasi produk masih rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia belum tersedia/terfasilitasinya ruang pamer hasil produksi dan kualitas produk belum memenuhi standar serta rendahnya investasi pada sektor industri.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pembangunan perindustrian di Kabupaten Nias Selatan adalah belum tersusunnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten sesuai amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2014, dimana hal itu menjadi dasar dalam pengembangan perindustrian disuatu wilayah Kabupaten/Kota. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten diharapkan tersinkronisasi dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

## 8) Transmigrasi

Permasalahan pembangunan bidang urusan ketransmigrasian dan kurangnya motivasi masyarakat untuk mengikuti transmigrasi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

### 2.3.3.Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

### 1. Pemerintahan Umum

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menurut jenis kelamin dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 88

Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

Partai Politik	Jenis I	Jenis Kelamin			
Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah		
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2	5		
Partai Nasional Demokrat	5	-	5		
Partai Golongan Karya	4	-	4		
Partai Berkarya	3	1	4		
Partai Demokrat	3	1	4		
Pertai Perindo	3	-	3		
Partai Garuda	3	-	3		
Partai Gerakan Indonesia Raya	2	-	2		
Partai Amanat Nasional	1	1	2		
Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1		
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	-	1		
Parta Solidaritas Indonesia	-	1	1		
Jumlah	29	6	35		

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Dari table tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh kaum laki-laki dimana jumlahnya 29 orang sedangkan perempuan hanya berjumlah 6 orang. Dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumbangkan 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Perkembangan Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 89 Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kecamatan	35	35	35	35	35
2	Desa	459	459	459	459	459
3	Kelurahan	2	2	2	2	2

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

### 2. Aparatur dan Kepegawaian

Dari sisi aparatur dan kepegawaian, perkembangan ASN di Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 90
Perkembangan ASN di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016-2020

Tanun 2016-2020							
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
Rata-rata lama pegawai							
mendapatkan pendidikan dan	-	-	4	4	4		
pelatihan (tahun)							
Jumlah pejabat ASN yang							
telah mengikuti diklat	-	-	-	5	n/a		
struktural (orang)							
Jumlah jabatan tinggi pada			35	35	35		
instansi pemerintah	_	_	33	33	33		
Jumlah pemangku jabatan							
fungsional tertentu pada	_	_	-	_	2.129		
instansi pemerintah (orang)							
Jumlah ASN	-	-	4.307	4.193	3.857		
Jumlah total jabatan	-	-	881	881	882		
Jumlah kasus pelanggaran			16	6	31		
yang ditangani	_	_	10	0	31		
Jumlah ASN yang ikut Diklat				4	n/a		
PIM II	_	_	_		11/a		
Jumlah ASN yang ikut Diklat	_	_	_	2	n/a		
PIM III					11/a		
Jumlah ASN yang ikut Diklat	_	_	_	1	n/a		
PIM IV	_	_	_	_	11/a		

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan 2021

Tabel 2. 91 Jumlah PNS di Kabupaten Nias Selatan menurut Eselon Tahun 2016-2020

NT -	IIi.	Tahun					
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Eselon II	-	-	38	32	32	
2	Eselon III	-	-	207	194	194	
3	Eselon IV	-	-	430	446	446	

Sumber: BKD Kabupaten Nias Selatan 2021

### 3. Keuangan Daerah

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah kurun waktu tahun 2016-2020 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja.

Tabel 2. 92 Cakupan Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

14Huli 2010 3/4 2020						
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
Total SILPA	68.059.971. 420,67	120.128.847. 091,71	113.461.402. 907,53	108.964.392. 033,71	-	
Jumlah Total APBD	810.002.81 5.632,78	1.066.164.74 6.908,50	1.171.732.68 8.457,20	1.308.864.75 5.913,57	-	
Persentase SILPA						
Jumlah Belanja bidang urusan pendidikan	174.165.58 0.659,00	201.200.908. 916,00	194.596.932. 360,80	202.106.868. 636,36	-	
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21,50	18,87	16,61	15,44	-	
Jumlah Belanja bidang urusan Kesehatan	114.765.03 8.695,78	129.506.931. 063,00	87.999.935.3 49,40	116.423.654. 482,00	-	

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-87

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Belanja Pendidikan (10%)	14,17	12,15	7,51	8,90	-
Jumlah Belanja Langsung	284.237.96 3.626,78	381.800.679. 971,50	498.227.399. 848,20	553.392.021. 602,57	593.653. 193,62
Jumlah Belanja Tidak Langsung	525.764.85 2.006,00	684.364.066. 937,00	673.505.288. 609,00	755.472.734. 311,00	960.007. 807,32
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	35,09% : 64,19%	35,8% : 64,19%	42,52% : 57,48%	42,28% : 57,72%	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2020

### 4. Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan komitmen Kabupaten Nias Selatan menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dengan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2014 maka pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan wajib menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Indikator-indikator yang digunakan dalam bidang Perencanaan Pembangunan:

- 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
- 2. Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
- 3. Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
- 4. Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Tabel 2. 93 Cakupan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah diterapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah diterapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah diterapkan dengan PERDAKA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	51	70	65	62

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan 2021

## 5. Penanggulangan Bencana Daerah

Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Kenyataan tersebut tidak dapat dipungkiri mengingat kondisi geografi dan geologi Indonesia yang terletak pada pertemuan tiga lempeng raksasa Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, serta berada pada Cincin Api (*Ring of Fire*). Untuk mengetahui secara rinci tingkat kerawanan daerah di wilayah Negara Indonesia, BNPB telah melakukan penilaian tentang Indeks Kerawanan Bencana Indonesia pada 2009 yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) pada 2011, selanjutnya disebut IRBI 2011.

Pada tahun 2013 BNPB meningkatkan analisis dari Indeks Rawan Bencana Indonesia menjadi Indeks Risiko Bencana Indonesia, selanjutnya disebut IRBI 2013. Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya (hazard) itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan ini ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan (exposure) dari setiap bahaya dan gabungan dari beberapa bahaya yang ada (multi hazards). Jadi apabila kerawanan yang lalu dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (existing data) untuk setiap bencana, saat ini indeks risiko ini dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bencana. Dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia ini telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana.

Tujuan Indeks Risiko Bencana Indonesia antara lain untuk:

- 1. Memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.
- 2. Memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain.
- 3. Melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

## 6. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang berjalan sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat perkembangan cakupan pengawasan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020. Dari tabel dibawah ini kita ketahui

Tabel 2, 94 Cakupan Pengawasan di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	109	85	67	16	-
2	Jumlah Total Temuan	130	101	119	95	-
3	Persentase tindak lanjut temuan		84	56	17	-
5	Jumlah Total ASN	n/a	4307	n/a	4193	-
7	Jumlah Temuan BPK	173	194	208	231	-

Sumber : Inspektorat Kabupaten Nias Selatan 2021

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1.Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

## a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Nias Selatan cenderung meningkat dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 666.745,-, sedangkan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 256.434,- jika dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dan Pengeluarkan Konsumsi Non Pangan per kapita Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2011-2015 dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 95
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Indikator	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita							
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020			
Total Pengeluaran RT	418.616	484.707	618.245	729.396	666.745			
Jumlah RT	64.864	65.505	66.091	66.653	67.725			
Jumlah	6,45	7,40	9,35	10,94	9,84			

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

# b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

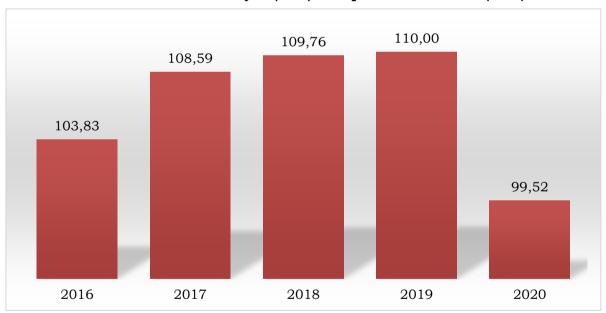
Tabel 2. 96
Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Total Pengeluaran Non	155.733	180.455	245.860	314.262	256.434
Pangan					
Total Pengeluaran	418.616	484.707	618.245	729.396	666.745
Persentase (%)	37,20	37,23	39,77	43,09	38,46

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

## c. Nilai Tukar Nelayan

Grafik 2. 15 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nias Selatan (Poin)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 103,83 poin dan hingga tahun 2019 menjadi 110,00 point. Jika dilihat dari Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100, artinya pada tahun 2016-2020 pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya karena nilai NTN >100. Namun pada tahun 2020 nilai NTN Kabupaten Nias Selatan

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-91

mengalami penurunan sebesar 99,52 point artinya pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit (NTN<100).

## 2.4.2.Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

### a. Ketaatan terhadap RTRW

Sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan tentang rencana sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut:

- 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan pusat kegiatan hirarki I di Kabupaten Nias Selatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maupun pusat pelayanan Kecamatan di sekitarnya. PKL di Kabupaten Nias Selatan adalah Teluk Dalam (ibukota kabupaten).
- 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), merupakan pusat kegiatan hirarki II di Kabupaten Nias Selatan yang direncanakan sebagai PKL yang dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maupun pusat pelayanan kecamatan di sekitarnya. PKLp di Kabupaten Nias Selatan adalah Pasar Pulau Tello.
- 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan pusat kegiatan hirarki II di Kabupaten Nias Selatan yang berperan sebagai pusat pelayanan kecamatan di sekitarnya. PPK di Kabupaten Nias Selatan adalah Orahili Gomo, Lolowa'u, dan Hilisimaetano.
- 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), merupakan pusat kegiatan hirarki III di Kabupaten Nias Selatan yang berperan sebagai pusat pelayanan antar desa. PPL di Kabupaten Nias Selatan adalah Hilisataro, Hilizalootano, Bawomataluo, Lawindra, Sifalago Susua, Tetegawai, Bawootaluo, Tuindrao, Hiliorudua, Hiliotalua, Togizita, Labuhan Hiu, Eho.

Setiap pusat kegiatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut mempunyai fungsi-fungsi tersendiri sesuai dengan hirarkinya. Semakin tinggi hirarki pusat pemukiman, maka semakin kompleks fungsi sebagai pusat pelayanan dan semakin rendah hirarki pusat pemukiman, maka semakin kecil fungsi sebagai pusat pelayanan. Secara lengkap fungsi pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Nias Selatan digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 97 Rencana hirarki dan fungsi pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Nias Selatan

No	No Hirarki Kota Fungsi Fasilitas Penduku				
			Pusat perdagangan	Pasar Induk	
			regional  o Pusat industri (agro industry)	o Terminal Angkutan	
1	PKL	Telukdalam	Pusat pemerintahan     Pusat jasa pendidikan     dan kesehatan	<ul><li>TPI</li><li>Pelabuhan</li><li>Kawasan Industri</li></ul>	
				<ul> <li>Jasa</li> <li>Pusat Pendidikan</li> <li>Pusat Kesehatan</li> <li>Kawasan</li> <li>perkantoran</li> </ul>	
			Pusat perdagangan antar     pulau	o Pasar	
		D D1	Pusat industri (agro- marine industry)	o TPI	
2	PKL	Pasar Pulau Tello (Kec. Pulau	o Pusat pariwisata	<ul><li>Kawasan Industri</li><li>Pelabuhan</li></ul>	
		Pulau Batu)		o Bandar Udara	
				o Jasa	
				o Pendidikan	
			Pusat pengembangan	<ul><li>Kesehatan</li><li>Museum</li></ul>	
			budaya		
3	PPK	Orahili Gomo	O Pusat pariwisata     Pusat jasa pendidikan	o Jasa o Pasar	
3	PPK	(Kec. Gomo)	o Pusat jasa pendidikan kejuruan	o Pasar o Terminal Angkutan	
				o Pendidikan	
				o Kesehatan	
			o Pusat perdagangan	o Pasar	
4	PPK	Lolowa'u	o Pusat jasa pendidikan	o Terminal Angkutan	
		(Kec. Lolowa'u)	dan kesehatan	o Pendidikan	
			Pusat perdagangan	<ul><li>Kesehatan</li><li>Pasar</li></ul>	
			o Pusat penasaran padi	o Terminal Angkutan	
5	PPK	Hilisimaetano (Kec. Maniamolo)	Pusat jasa pendidikan     kejuruan	Gudang Kilang     padi	
		(1200. Mainamolo)	Kejaraan	o Pendidikan	
				o Kesehatan	
			o Pusat perdagangan lokal	o Pasar	
6	PPL	Hilisataro	Pusat jasa pendidikan	o Dermaga	
		(Kec. Toma)	dan kesehatan	o Pendidikan	
			Pusat perdagangan lakat	Kesehatan     Pasar	
7	PPL	Hilizalootano	O Pusat perdagangan lokal     Pusat jasa pendidikan	o Pasar o Pendidikan	
'		(Kec. Mazino)	kejuruan	Kesehatan	
			Pusat perdagangan lokal	o Pasar	
8	PPL	Bawomataluo	<ul> <li>Pusat jasa pendidikan</li> </ul>	o Bandar Udara	
	111	(Kec. Fanayama)	kejuruan	o Pendidikan	
	DDI	T . 1		o Kesehatan	
9	PPL	Lawindra	o Pusat perdagangan lokal	o Pasar	

(Kec. Umbunasi)   O Pusat jasa pendidikan kejuruan   O Pendidikan kejuruan   O Pasar	No	Hirarki	Kota	Fungsi	Fasilitas Pendukung
PPL   Sifalago Susua (Kec. Susua)   O Pusat perdagangan lokal   O Pasar   O Pendidikan   Nejuruan   O Pusat perdagangan lokal   O Pasar   O Pendidikan   Nejuruan   O Pasar   O Pendidikan   O Pendidikan   O Pasar   O Pen			(Kec. Umbunasi)	o Pusat jasa pendidikan	o Pendidikan
PPL   Sifalago Susua (Kec. Susua)   O Pusat jasa pendidikan kejuruan   O Pendidikan kejuruan   O Pasar				kejuruan	o Kesehatan
Tetegawai (Kec. Mazo)			Cifalaga Cuana	o Pusat perdagangan lokal	o Pasar
Tetegawai (Kec. Mazo)  Pusat perdagangan lokal Pusat jasa pendidikan kejuruan  Perdagangan lokal Pusat perdagangan lokal Pusat perdagangan lokal Pusat perdagangan lokal Pusat jasa pendidikan Rejuruan  Perdagangan lokal	10	PPL			o Pendidikan
PPL   Tetegawai (Kec. Mazo)   Pusat jasa pendidikan kejuruan   O Pendidikan kejuruan   O Pasar			(NCC. Susua)	kejuruan	o Kesehatan
PPL   (Kec. Mazo)   Pusat jasa pendidikan kejuruan   O Resehatan			Totogorgoi	o Pusat perdagangan lokal	
PPL Bawootalua (Kec. Lahusa)  Tuindrao (Kec. Lahusa)  PPL (Kec. Lahusa)  Tuindrao (Kec. Lahusa)  PPL (Kec. Aramo)  PPL (Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  PPL (Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  PPL (Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  PPL (Kec. Aramo)  Pusat perdagangan lokal (Pasar Pendidikan Pendidika	11	PPL		, ,	
PPL   Bawootalua (Kec. Lahusa)   O Pusat jasa pendidikan kejuruan   O Resehatan			(Rec. Wazo)	5	o Kesehatan
Tuindrao   Pusat perdagangan lokal   Perdaga				o Pusat perdagangan lokal	o Pasar
Company   Comp	12	PDI			o Pendidikan
Tuindrao (Kec. Amandraya)  PPL  Tuindrao (Kec. Amandraya)  Pusat perdagangan lokal Pusat jasa pendidikan kejuruan  Pusat perdagangan lokal Pasar Pusat jasa pendidikan kejuruan  Pusat jasa pendidikan kejuruan  Pusat perdagangan lokal Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pusat perdagangan lokal	14	111	(Kec. Lahusa)	kejuruan	o Kesehatan
13 PPL (Kec. Amandraya)					o Dermaga
Amandraya) kejuruan o Kesehatan  PPL Hiliorudua (Kec. Aramo) Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat jasa pendidikan o Kesehatan  PPL Hiliotalua (Kec. Lolomatua) Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat jasa pendidikan o Pendidikan kejuruan o Kesehatan  Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat perdagangan lokal o Pasar			Tuindrao	o Pusat perdagangan lokal	
14 PPL Hiliorudua (Kec. Aramo)  Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pendidikan kejuruan  PPL Hiliotalua (Kec. Aramo)  PPL Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  PPL Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  PPL Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pendidikan kejuruan  Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pendidikan o Pasar  Pusat perdagangan lokal o Pasar	13	PPL			
14 PPL Hillorudua (Kec. Aramo)  O Pusat jasa pendidikan o Kesehatan  O Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat jasa pendidikan o Kesehatan  O Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat jasa pendidikan o Kesehatan O Pusat perdagangan lokal o Pasar O Pusat jasa pendidikan o Pendidikan			Amandraya)	<u> </u>	o Kesehatan
Aramo)  Aramolalian  Ara			Hiliomidua (Kec		
PPL Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  Hiliotalua (Kec. Lolomatua)  Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pendidikan kejuruan o Kesehatan  Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pusat perdagangan lokal o Pasar o Pusat pendidikan o Pendidikan	14	PPL	`		
15 PPL Lolomatua (Kec. Lolomatua)  O Pusat jasa pendidikan O Pendidikan Kejuruan  O Pusat perdagangan lokal O Pasar  O Pusat perdagangan lokal O Pasar  O Pusat jasa pendidikan O Pendidikan			Thairs,		-
Lolomatua)  Comparison of Pusat Jasa pendidikan of Pendidikan kejuruan  Comparison of Pusat Jasa pendidikan of Pendidikan of Kesehatan  Comparison of Pusat Jasa pendidikan of Pendidika			Hiliotalua (Kec		
o Reguruan o Kesehatan  o Pusat perdagangan lokal o Pasar  Togizita (Kec. o Pusat jasa pendidikan o Pendidikan	15	PPL	,		
Togizita (Kec. O Pusat jasa pendidikan O Pendidikan			Doromataaj		-
10   112   Hilimegai)   kejuruan	16	PPL	,		o Pendidikan
			Hilimegai)	kejuruan	
o Kesehatan					
Labuhan Hiu O Pusat perdagangan lokal O Dermaga					_
17 PPL (Kec. Pulau- o Pusat jasa pendidikan o Pendidikan	17	PPL		, -	
Pulau Batu kejuruan o Kesehatan Timur)				kejuruan 	o Kesehatan
O Pusat perdagangan lokal O Pelabuhan				Pusat perdagangan lokal	o Pelabuhan
18 PPL Eho (Kec. Hibala) o Pusat jasa pendidikan o Pendidikan	18	PPL	Eho (Kec. Hibala)		
kejuruan o Kesehatan				, ,	

Sumber: RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014-2034

Dengan demikian, rencana sistem pusat kegiatan Kabupaten Nias Selatan meliputi 2 (dua) buah PKL, dimana masing-masing PKL melayani wilayah yang berbeda. Kota Teluk Dalam diharapkan melayani wilayah pulau induk, sementara Pasar Pulau Tello melayani gugusan kepulauan. Keduanya juga direncanakan menjadi pintu gerbang utama serta pusat koleksi dan distribusi dari/menuju kecamatan-kecamatan sekitarnya. Dijadikannya Pasar Pulau Tello menjadi PKL dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah gugusan pulau sesuai dengan potensinya, serta mengurangi ketergantungan dengan Kota Teluk Dalam.

Berbagai fungsi dan fasilitas pendukung direncanakan di kedua PKL bertujuan untuk meningkatkan skala aglomerasi kegiatan perkotaan pada kedua kota sehingga pada akhirnya tercipta pertumbuhan kota yang stabil.

Kondisi ini selanjutnya akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten. Adapun PPK (hirarki II) dan PPL (hirarki III) diarahkan untuk berperan sebagai pusat pelayanan.

Kawasan pemukiman perkotaan dikembangkan pada daerah pusatpusat pelayanan, yaitu pada setiap ibukota kecamatan. Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan utama akan direncanakan pada Kota Teluk Dalam. Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan tersebut dilakukan dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas pelayanan yang seharusnya ditempatkan sesuai dengan fungsi kotanya, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan perdagangan, perekonomian, pemerintahan, jasa dan lain sebagainya.

Pengembangan kawasan pemukiman perkotaan di Kabupaten Nias Selatan diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana dasar (PSD) bagi kawasan rumah sehat sederhana (RSH), penataan dan peremajaan kawasan, serta peningkatan kualitas pemukiman.

Tabel 2. 98
Pembagian luas satuan rencana pola ruang
Kabupaten Nias Selatan

	No	Satuan Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
A.	Kawa	asan Lindung		
	1. Hutan Lindung		73.613	29,83
	2.	Hutan Konservasi	6.842,37	2,74
	3.	Kawasan pantai Berhutan Bakau	3.470,79	1,39
	4.	Sempadan Sungai	1.445,11	0,58
	5. Sempadan Pantai		2.674,27	1,07
B.	B. Kawasan Budidaya			
	1.	Hutan Produksi Terbatas	66.337,23	26,57
	2.	Kawasan Perdesaan	459,46	0,18
	3.	Kawasan Perkotaan	2.886,46	1,16
	4.	Perkebunan	80.258,23	32,15
	5.	Pertanian Lahan Basah	12.574,38	5,04
	6.	Pertanian Lahan Kering	51.505,75	20,63
	7.	Kawasan Pariwisata	314,15	0,13
	8.	Kawasan Industri	28,05	0,01
		Luas Total	249.636,30	100

Sumber: RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014-2034

### b. jenis dan jumlah bank dan cabang

Tabel 2. 99
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

Kelompok Bank	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
Bank Persero	-	-	5	1	6
Bank Pembangunan Daerah	-	1	1	-	2
Bank Swasta	-	-	-	-	0
Bank Umum Syariah	-	-	-	-	0
Nias Selatan	0	1	6	1	8

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah Kantor Bank menurut Kelompok yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Bank-bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU).

### c. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Perkembangan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Nias Selatan menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2. 100
Perkembangan Jumlah Restoran di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Tanun 2016 s/d 2020							
No	Kecamatan	Tahun					
NO	Recamatan	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Hibala	-	-	1	-	-	
2	Tanah Masa	-	-	-	-	-	
3	Pulau-Pulau Batu	-	-	-	2	5	
4	Pulau-Pulau Batu Timur	-	-	-	-	-	
5	Simuk	-	-	-	-	-	
6	Pulau-Pulau Batu Barat	-	-	-	-	-	
7	Pulau-Pulau Batu Utara	-	-	-	-	-	
8	Telukdalam	13	8	2	16	47	
9	Fanayama	-	2	-	4	-	
10	Toma	-	1	1	2	-	
11	Maniamolo	-	-	-	-	-	
12	Mazino	-	-	-		-	
13	Luahagundre Maniamolo	-	-	-	1	-	
14	Onolalu	-	-	-	-	-	
15	Amandraya	-	-	-	-	-	
16	Aramo	-	-	-	-	-	
17	Ulususua	-	-	-	-	-	
18	Lahusa	-	1	1	-	1	

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-96

No	Kecamatan	Tahun					
NO	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020	
19	Sidua'ori	-	-	-	-	-	
20	Somambawa	-	1	-	-	-	
21	Gomo	-	-	-	-	-	
22	Susua	-	-	-	1	-	
23	Mazo	-	-	-	-	-	
24	Umbunasi	-	-	-	-	-	
25	Idanotae	-	-	-	-	-	
26	Uluidanotae	-	-	-	-	-	
27	Boronadu	-	-	-	-	-	
28	Lolomatua	-	-	-	1	1	
29	Ulunoyo	-	-	-	-	-	
30	Huruna	-	1	-	2	-	
31	Lolowau	-	1	-	-	-	
32	Hilimegai	-	-	-	-	-	
33	O'ou	-	-	-	-	-	
34	Onohazumba	-	-	-	-	-	
35	Hilisalawa'ahe	-	-	-	-	-	
	Nias Selatan	13	15	5	29	54	

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

## d. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/hotel

Jumlah Hotel dan akomodasi lainnya yang ada di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagimana tabel dibawah ini.

Tabel 2. 101 Jumlah Hotel dan Penginapan Lainnya di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Hotel dan Akomodasi Lainnya
1	Hibala	1
2	Tanah Masa	1
3	Pulau-Pulau Batu	11
4	Pulau-Pulau Batu Timur	-
5	Simuk	-
6	Pulau-Pulau Batu Barat	4
7	Pulau-Pulau Batu Utara	-
8	Telukdalam	17
9	Fanayama	-
10	Toma	-
11	Maniamolo	-
12	Mazino	-
13	Luahagundre Maniamolo	54
14	Onolalu	-
15	Amandraya	-
16	Aramo	-
17	Ulususua	-
18	Lahusa	-

No	Kecamatan	Hotel dan Akomodasi Lainnya
19	Sidua'ori	-
20	Somambawa	-
21	Gomo	-
22	Susua	-
23	Mazo	-
24	Umbunasi	-
25	Idanotae	1
26	Uluidanotae	-
27	Boronadu	-
28	Lolomatua	-
29	Ulunoyo	1
30	Huruna	-
31	Lolowau	-
32	Hilimegai	-
33	O'ou	-
34	Onohazumba	-
35	Hilisalawa'ahe	-
	Nias Selatan	88

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada tahun 2020 jumlah Hotel/ Penginapan lainnya yang ada di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 88 Unit dan jumlah terbanyak berada di 3 Kecamatan antara lain : Kecamatan Luahagundre Maniamolo sebanyak 54 Unit, Kecamatan Teluk Dalam sebanyak 17 Unit, dan Kecamatan Pulau-pulau Batu sebanyak 11 Unit. Ketiga Kecamatan tersebut merupakan daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun luar negeri.

## e. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih, jumlah air yang disalurkan dan Nilainya di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Tabel 2. 102
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Air Bersih di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

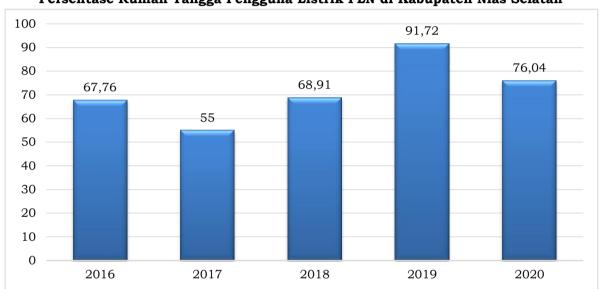
Uraian	Tahun						
Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah Pelanggan	1.676	1.667	1.670	1.650	-		
Air Disalurkan (m3)	470.881	411.749	358.526	320.510	-		
Nilai (Rp)	1.246.956.700	1.039.575.250	887.850.000	794.370.500	-		

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Kebutuhan akan air bersih merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah pelanggan, air yang disalurkan (m3) dan nilai pendapatannya setiap tahun mengalami penurunan. Di tahun 2016 dari 1.667 pelanggan menjadi 1.650 pelanggan di tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pasokan air bersih dari PDAM bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan sumber mata air lainnya untuk kebutuhan sehari-hari.

## f. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik PLN di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2. 16 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN di Kabupaten Nias Selatan

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

### g. Persentase Penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 sebesar 49,21 persen dan hingga tahun 2020 naik menjadi 86,16 persen. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya pengguna HP/Telepon, dimana dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan komunikasi dibeberapa lokasi dan faktor dari masa pandemi Covid-19 dari tahun 2019 hingga saat ini banyak kegiatan yang dilaksanakan secara virtual. Selain dari pada itu, sesuai kebijakan pemerintah kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring sehingga memerlukan alat komunikasi bagi

pelajar maupun guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana pada grafik dibawah ini :

100 86,16 90 80 65,45 70 57.43 60 49.21 50 40 30 20 10 0 2017 2018 2019 2020

Grafik 2. 17
Persentase Penduduk yang menggunakan HP/Telepon di
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2017 s/d 2020

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan 2021

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

## a. Angka Kriminalitas

Pada tahun 2019 angka kriminal yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan sebanyak 254 kasus, bertambah sebanyak 39 kasus dari tahun 2018 Secara umum rasio angka kriminalitas mengalami penurunan dari tahun 2016- 2018. Di tahun 2016 sebesar 10,00 persen, di tahun 2018 turun menjadi 6,78 persen namun kembali naik menjadi 7,94 pada tahun 2019.

Angka kriminalitas sangat mempengaruhi iklim berinvetasi disuatu daerah, semakin rendahnya jumlah angka kriminalitas disuatu daerah, maka akan memberikan dampak rasa aman kepada investor dalam maupun luar daerah untuk berinvestasi.

Dari table berikut ini dapat kita ketahui bahwa rasio angka kriminal yang tertangani di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 cenderung mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2016-2018 mengalami penurunan, namun pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar 7,79 persen. Untuk menekan angka kriminalitas di Kabupaten Nias Selatan diperlukan kerjasama semua pihak untuk melalukan sosialisasi atau penyuluhan

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-100

hukum kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyakarat untuk menjauhi diri dari tindakan-tindakan kriminal.

Tabel 2, 103 Perkembangan Angka Kriminal yang tertangani di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2020

Indikator	Angka Kriminal yang Tertangani					
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun	436	346	215	254	-	
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531	
Rasio	14,00	11,01	6,78	7,94	-	

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2020

## 2.4.4. Fokus Sumber Dava Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat. Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang merata dan berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dapat menjelma menjadi faktor penghambat pembangunan. Tingkat pendidikan yang tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia, namun sebaliknya tingkat pendidikan yang rendah dapat menimbulkan permasalahan sosial. Diharapkan dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Nias Selatan akan membuka peluang semakin majunya daerah tersebut.

Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

## a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio S1/S2/S3)

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.

Di Kabupaten Nias Selatan angka rasio lulusan S1 dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan dimana tahun 2016 sebesar 33,37 persen menjadi 7,03 persen pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan angka yang menamatkan pendidikan S1, namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 9,21 persen.

Tabel 2. 104
Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Lulusan	2016	2017	2018	2019	2020
S1	1.039	737	609	225	332
S2	-	-	-	-	-
S3	-	-	-	-	-
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531
Rasio	33,37	23,44	19,20	7,03	9,21

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2021

## b. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-102

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Nias Selatan sepanjang tahun 2017-2020, dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik dibawah ini :

Rasio Ketergantungan 80 70,98 69,83 69,49 70 60 45,94 50 40 30 20 10 2017 2018 2019 2020

Grafik 2. 18
Rasio Ketergantungan Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 s/d 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan 2021

Rasio ketergantungan Kabupaten Nias Selatan tahun 2017 sebesar 69,83 persen, tahun 2018 sebesar 69,49 persen dan tahun 2019 sebesar 70,98 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 45,94 persen, artinya terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan penduduk, hal ini selanjutkan akan meningkatkan angka harapan hidup (*life expentancy*).

### 2.5. Rekapitulasi evaluasi capaian indikator kinerja daerah

## 2.5.1.Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

## A. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang pendidikan sebagai berikut:

Halaman: II-103

a. pendidikan anak usia dini;

- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan pendidikan di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.105 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	0,00%	70,17%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,00%	91,67%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	0,00%	100%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2020

#### B. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

- a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. pelayanan kesehatan balita;
- e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- f. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- g. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- h. pelayanan kesehatan penderita Diabetes melitus;
- i. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- j. pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis;
- k. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-104

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan kesehatan di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.106 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan

	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan								
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	99,71%					
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	98,71%					
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	100%					
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	51,73%					
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	26,51%					
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	17%					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	16,02%					
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	85,79%					
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes delitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	33%					
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	0,00%	0,00%					
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	100,00%					
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Imm unodeficienc y Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	0,00%	1.13%					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
	tubuh manusia			
	(Human			
	Immunodefici			
	ency Virus)			

Sumber : Laporan Penerapan Standar Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2020

## C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.107
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Nias Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0,00%	54,80%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestk	0,00%	3,31%

Sumber : Laporan Penerapan Standar Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2020

### D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- b. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah;
- c. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.108
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Nias Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	0,00%	0,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00%	0,00%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2020

# E. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Adapun untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlidungan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dasar hukum dalam penerapan SPM diantaranya:

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupate/Kota; dan
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-107

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal ketentraman, ketertiban umum dan perlidungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi;
- b. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu;
- c. pelayanan informasi rawan bencana;
- d. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.109
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan
Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan

	many arana ar	nabapaten mas belatan		
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian penegakan Perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	0,00%	0,00%
2	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda	Jumlah penegakan Perda sesuai mutu	0,00%	68,15%
3	Pelayanan informasi rawan bencana		0,00%	1%
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		0,00%	0,00%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0,00%	0,00%
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		0,00%	40%

Sumber: Laporan Penerapan Standar Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2020

#### F. Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-108

Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang sosial adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota.

berikut pencapaian standar pelayanan minimal urusan Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Nias Selatan

Tabel 2.110
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten Nias Selatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian SPM 2019	Capaian SPM 2020
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00%	0,00%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00%	0,00%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	0,00%	0%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	0,00%	0,00%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0,00%	0,00%

Sumber : Laporan Penerapan Standar Minimal (SPM) Kabupaten Nias Selatan TA. 2020

#### 2.5.2.Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD

Evaluasi capaian indikator Utama (IKU) OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 2017-2021 sebagaimana tabel berikut ini:

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman : II-109

Tabel 2. 111 Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan 2017-2021

1. DI	NAS PENDIDIKAN									
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	LISASI IKU		
110	Tujuan Kenstia	Sasaran Strategis	IKO	Satuali	Reterangan/ Kriteria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	100%	100%	100%	100%	
2	Meningkatkan tingkat	Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan	Persentase desa yang memiliki PAUD	Persentase		45,12	54,01	36,22	52,28	
	pendidikan masyarakat pada pendidikan wajib 9 tahun (Pendidikan Dasar,	dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah	Persentase SD yang memiliki rasio siswa per kelas < 32 orang	Persentase	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/sederajat tidak melebihi 32 orang					
	Pendidikan Kesetaraan)		Persentase SMP yang memiliki rasio siswa per kelas < 36 orang	Persentase	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/sederajat tidak melebihi 36 orang					
			Persentase SD yang memiliki rasio rombel per kelas = 1 kelas	Persentase	Idealnya rasio rombel per kelas = 1:1					

me me	ersentase SMP yang emiliki rasio rombel er kelas = 1 kelas	Persentase	Idealnya rasio rombel per kelas = 1:1					
me	ersentase SD yang emiliki erpustakaan	Persentase	Idealnya setiap SD memiliki perpustakaan	0,00	0,00	7,06	7,06	
Per		Persentase	Idealnya setiap SMP memiliki perpustakaan		2,99	2,99	5,14	
Per		Persentase	Idealnya setiap SMP memiliki laboratorium	4,51	4,51	3,73	10,29	
	ngka Partisipasi urni SD	Persentase	Jika APM = 100, maka seluruh anak usia sekolah SD dapat bersekolah tepat waktu	93,30%	82,6%	78,75%	92,62%	
Ang	ngka Partisipasi urni SMP	Persentase	Jika APM = 100, maka seluruh anak usia sekolah SMP dapat bersekolah tepat waktu	69,70%	72,4%	68,46%	61,72%	
Kas	ngka Partisipasi asar PAUD	Persentase	Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa suatu wilayah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.		44,4%	8,26%		
	ngka Partisipasi asar SD	Persentase	Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur	112,40%	100,6%	94,37%	93%	

Angka Partisip Kasar SMP	asi Persentase	yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa suatu wilayah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.  Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa suatu wilayah mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.	106,0%	106,5%	101,20%	60,67%	
Tingkat Pelaya SD	nan	300 July 1					
Tingkat Pelaya SMP							
Angka Masuk Kasar (AMK) / Melanjutkan (	Angka AM) SD						
Angka Masuk Kasar (AMK) / Melanjutkan ( SMP	n Angka AM)						
Perbedaan Ge APK SD							
Perbedaan Ge APK SMP							
Indeks Paritas Gender APK S	D						
Indeks Paritas Gender APK S	MP						
Persentase Sis Swasta SD	wa Persentase						

		Persentase Siswa	Persentase						
		Swasta SMP Persentase Siswa	Persentase						
		Baru PAUD							
		Angka Mengulang SD							
		Angka Mengulang SMP							
		Angka Lulusan SD							
		Angka Lulusan SMP							
		Angka Putus Sekolah SD							
		Angka Putus Sekolah SMP							
		Rata-Rata Lama Belajar SD							
		Rata-Rata Lama Belajar SMP							
Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar, dan Kapasitas Pendidikan	Meningkatnya profesionalisme guru dan Distribusi Guru dan Tenaga Kependidikan	Persentase Tenaga pendidik SD yang Berijazah S1	Persentase	Tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/D4	35'8	54,0	57,9	43,04%	
Masyarakat		Persentase Tenaga pendidik SMP yang Berijazah S1	Persentase	Tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program S1/D4	73,4	84,3	87,5	82,89%	
		Persentase Tenaga Pendidik SD yang Bersetifikat Pendidik	Persentase	Tenaga pendidik wajib memiliki sertifikat pendidik	8,37506956	17,20689655	15,64541213	10,32659409	
		Persentase Tenaga Pendidik SMP yang Bersetifikat Pendidik	Persentase	Tenaga pendidik wajib memiliki sertifikat pendidik	6,587615283	15,05617978	13,93168118	22,50502344	
	Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana	Persentase SD yang berakreditasi A dan B	Persentase		7,34	33,33	37,00	36,90	
	pendidikan	Persentase SMP yang berakreditasi A dan B	Persentase		12,03	32,08	32,83	32,35	
		Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik dan rusak ringan	Persentase					100	
		Persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik dan rusak ringan	Persentase					100	

1				Persentase		<b>2017</b> 20	<b>2018</b> 20	<b>2019</b> 20	<b>2020</b> 20	2021
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria			ALISASI IKU		
2. D	INAS KESEHATAN	1								1
			pengelolaan Sekolah per tahun							
			perencanaan pendidikan Persentase Pelatihan	Persentase						
			Tersedianya Dokumen	ada/Tida ada						+
			Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio						
			Guru yang memiliki Sertifikasi	Persentase						
			Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	Persentase						
			SMA/SMK kondisi Bangunan Baik		Bangunan dengan kerusakan kurang atau sama dengan 6%					
			Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan	Persentase	Kondisi Bangunan Baik adalah Kondisi					
			SD/MI kondisi Bangunan Baik		adalah Kondisi Bangunan dengan kerusakan kurang atau sama dengan 6%					
			diatas 15 Tahun Sekolah Pendidikan	Persentase	Kondisi Bagunan Baik					
			Rata-rata lama sekolah penduduk	Tahun		4,65	4,95	5,20	02,41%	
			Angka Melek Huruf	Persentase	BUPATEN NIAS SELATAN	99,00	80,75	66,13	62,41%	
			dalam kondisi baik dan rusak ringan							
			Persentase laboratorium SMP	Persentase		100	100	100	100	
			Persentase perpustakaan SMP dalam kondisi baik dan rusak ringan	Persentase			100	100	100	
			Persentase perpustakaan SD dalam kondisi baik dan rusak ringan	Persentase			100	100	100	

	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia		Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ					
2	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Berkurangnya angka kematian	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	Persentase	Hasil penghitungan menggunakan kriteria pengukuran status gizi balita	100	100	100	100	
			Cakupan Ibu Hamil yang telah memperoleh Pelayanan Antenatal yang sesuai standar (K4)	Persentase	Cakupan kunjungan ibu hamil k4 adalah cakupan ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	25	35	43	47	
			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki potensi kebidanan (PN)	Persentase	Ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	53,8	59,3	69,5	92	
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani oleh tenaga kesehatan kompeten (PK)	Persentase	Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang	100	20	7,7	10,7	

			Cakupan kunjungan bayi	Persentase	penanganan defenitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dan rujukan ( Polindes, Puskesmas, Puskemas Poned, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU Ponek) Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuia dengan standar	100	102,9	85	102,9	
3	Mempermudah Akses Masyarakat pada pelayanan Kesehatan	Tersediannya fasilitas kesehatan yang menunjang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	Rasio	oleh dokter, bidan dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Rasio puskesmas terhadap penduduk adalah merupakan perbandingan ideal anatara jumlah ketersediaan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terhadap	0,12	0,12	0,12	0,12	
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persentase	jumlah penduduk  Angka penemuan pasien baru TB BTA Positif atau Case Detection Rate (CDR) adalah perenetase jumlah penderita baru TB BTA Positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	0,1	11,37	23,9	23,9	

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Resentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Resentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Resentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA
penderita penyakit DBD  sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Rasio Posyandu terhadap balita adalah  sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  21,25 4,34 210 111
DBD wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA Rasio Posyandu terhadap balita adalah Rasio Posyandu terhadap balita adalah
Rasio Posyandu per satuan BALITA  1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Rasio Posyandu per satuan balita adalah
dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Rasio Posyandu per satuan BALITA  dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  21,25  4,34  210  111
jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Rasio Posyandu per satuan BALITA  jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  21,25 4,34 210 111 terhadap balita adalah
yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA
yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA
ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Rasio Posyandu per satuan BALITA  ditemukan/dilaporkan dalam kurun satu tahun yang sama  21,25 4,34 210 111 terhadap balita adalah
dalam kurun satu tahun yang sama  Rasio Posyandu per satuan BALITA  Rasio Posyandu per satuan BALITA  dalam kurun satu tahun yang sama  21,25  4,34  210  111  terhadap balita adalah
Rasio Posyandu per Rasio Rasio posyandu 21,25 4,34 210 111 satuan BALITA terhadap balita adalah
Rasio Posyandu per satuan BALITA Rasio Rasio posyandu 21,25 4,34 210 111 terhadap balita adalah
satuan BALITA terhadap balita adalah
merupakan   merupa
perbandingan ideal
antara jumlah
ketersediaan
posyandu terhadap
jumlah balita
Rasio Pustu per Rasio Rasio Puskesmas 0,22 0,22 0,22 0,22
satuan penduduk Pembantu (PUSTU)
terhadap penduduk
adalah merupakan
perbandingan ideal
antara jumlah
ketersediaan PUSTU
terhadap jumlah
penduduk penduduk
Cakupan Persentase Cakupan Desa 8,7 9,96 12,5 12,5
Desa/Kelurahan /Keluran Universal
Universal Child Child Immunization
Immunization (UCI) (UCI) adalah
Desa/Kelurahan
diman Lebih dari atau
sama dengan 80%
dari jumlah bayi yang
ada didesa tersebut
sudah mendapat
imunisasi dasar
lengkap (IDL) : Hb-0,
BCG, Polio-1, DPT Hb
Hip-1, Polio-2, DPT Hb
Hip-2, Polio-3, DPT Hb
Hip-3, Polio IV,
Hip-3, Polio IV, Campak dalam waktu
Hip-3, Polio IV, Campak dalam waktu satu tahun.

	Mombangun	Tersediannya Tenaga Kesehatan yang Profesional sesuai kebutuhan masyarakat dan terdistribusi merata	Rasio Dokter per satuan penduduk  Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	Per 1000	Rasio Dokter per 1000 penduduk adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 1000 penduduk Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk adalah tenaga kesehatan yang bertugas di bidang kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 1.000 penduduk	5	4,99	6,25	7,9	
4	Membangun sistem Pelayanan Kesehatan yang mudah dan murah	Tersediannya Sistem Pemantauan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Akuntabel dan Efisien	Tersedianya Website Dinas Kesehatan	ada / Tidak ada	Website Dinas Kesehatan yang dapat diakses secara offline dan online	0	0	0	0	
				IKU KAI	BUPATEN NIAS SELATAN					
			Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000		267	19,08	128,65	48	
			Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)	Per 1000	dimana 1= Per 1000 Kelahiran	8,81	6,24	6,4	1,7	
			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio		0,002	0,002	0,002	0,002	
			Rasio Puskesmas, pustu per satuan penduduk	Rasio		0,22	0,22	0,34	0,40	
			Persentase Puskesmas yang terakreditasi	Persentase		0	9	9	9	
			Jumlah Puskesmas yang memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan	unit		0	0	3	3	
			Tersediannya Sistem Informasi Kesehatan Daerah terintegrasi	Ada/ Tidak ada		0	0	0	0	

	1	UMUM DAN PENATAAN R								
νo	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria	2017		ALISASI IKU	2022	2021
	Menciptakan	Mewujudkan	Persentase Dokumen	Persentase	Jumlah seluruh	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	2021
	pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia		laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LKPJ					
		Meningkatkan infrastruktur pembangunan di wilayah perdesaan	Persentase Desa yang dapat dilalui kendaraan roda 4	Persentase		40	50	60	70	
		Meningkatnya akses dari wilayah perdesaan ke wilayah kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik		Seluruh jalan yang dimaksud adalah jalan yang termasuk kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten dan jalan non status	3.34	4.88	6.42	7.96	
			Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 Km/Jam)	Persentase	Kriteria kondisi jalan adalah bahwa setiap ruas jalan harus memiliki kerataan permukaan jalan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaran dengan cepat aman dan nyaman sesuai	310	415	500	590	

		Tersedianya fasilitas pelayanan dasar/umum	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Rasio Jaringan Irigasi Persentase Penduduk	Persentase Persentase Rasio Persentase	Permen PU no 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42 34 36,88 42	54 38 39,69	66 74,22 41,86 63	78 54 49,55 90	
			berakses air minum Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase		12.47	19.39	26.24	33.12	
4. S	│ ATUAN POLISI PAM	ONG PRAJA		<u> </u>						
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU		
	-	_				2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase tahunan laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah	Persentase		86,27	88,24	90,20	90,20	0
2	Menciptakan situasi kehidupan yang aman bagi masyarakat	Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat	Jumlah pengamanan dan Pengawalan yang dilakukan oleh Satpol PP dan linmas dalam satu tahun	Kali		235	240	245	259	0
			Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat/ 10000 penduduk	Rasio		21,37	23,26	23,20	22,32	0
			Cakupan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan)	Persentase		15,38	17,31	17,56	18,12	0
			Persentase kecamatan yang memiliki petugas Perlindungan Masyarakat	Persentase		68,57	77,14	82,86	68,57	0
			Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persentase		14,29	14,29	28,57	28,57	0

			kabupaten Nias							
			Selatan Rasio Polisi pamong praja /10000 penduduk	Rasio		4,39	4,25	4,22	4,79	0
			7 DADAN DENA	 NGCIII ANGAN	BENCANA DAERAH					
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU		
	- ujuu					2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	100%	100%	100%	100%	100%
2	Menciptakan situasi kehidupan yang	Meningkatnya kapasitas dan kualitas mitigasi dan	Persentase dampak bencana alam yang tertangani	Persentase		100%	100%	100%	80%	80%
	nyaman bagi kehidupan masyarakat	pengelolaan dampak dari bencana alam	Cakupan Korban Bencana yang tertangani	Persentase		100%	100%	100%	80%	90%
			Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap	Persentase		100%	100%	80%	70%	70%
5. Di	INAS SOSIAL									
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	LISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021

1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
2	Meningkatkan Penghasilan /pendapatan bagi Keluarga Miskin guna mencapai Keluarga Mandiri	Terlayani Kepentingan Masyarakat oleh Aparatur Pemerintah	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	Persentase	Jumlah Penerima Bantuan Sosial	15,00%	17,50%	20,00%	22,50%	
3	Meningkatkan Penghasilan /pendapatan bagi Keluarga Miskin guna mencapai Keluarga Mandiri	Terlayani Kepentingan Masyarakat oleh Aparatur Pemerintah	Persentase PMKS yang tertangani	Persentase	Jumlah PMKS yang tertangani	5,00%	7,00%	9,00%	11,00%	
4	Meningkatkan Penghasilan /pendapatan bagi Keluarga Miskin guna mencapai Keluarga Mandiri	Terlayani Kepentingan Masyarakat oleh Aparatur Pemerintah	Persentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Jenis Lainnya	Persentase	Jumlah Kelompok Kube yang Terbentuk	0%	0%	0%	0%	

<b>6. D</b>	Meningkatkan Penghasilan /pendapatan bagi Keluarga Miskin guna mencapai Keluarga Mandiri	Terlayani Kepentingan Masyarakat oleh Aparatur Pemerintah JA, KOPERASI DAN UKM	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase	Kmasyarakat Korban Bencana	0	0	100%	100%	
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria			ALISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	25 Dok	25 Dok	25 Dok	25 Dok	
2	Mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan sekaligus penyangga perekonomian	Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha	Persentase Kelompok tani yang mendapat bantuan kredit dari Bank dan Koperasi	Persentase	33.1 3.1.1	0	0	0	0	
3	Meningkatkan daya tarik investasi usaha dan pendapatan	Meningkatnya investasi usaha	Jumlah Usaha Mikro Menengah yang mendapat bantuan permodalan dari pemerintah	unit		0	0	0	10.400	
4	Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan penyerapan	Berkembangnya usaha ekonomi lokal yang Menyerap tenaga kerja setempat	Rasio Daya serap Tenaga Kerja Lokal	Rasio		0	0	0	0	

	tenaga kerja									
	lokal		Persentase usaha	Persentase		0	0	0	0	
			Mikro dan kecil	1 cr scritasc		O				
			Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Persentase		0	0	100	105	
5	Menguatkan dan menumbuh	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan	Persentase Koperasi Yang aktif	Persentase		32%	60%	60%	60%	
	kembangkan alternatif perekonomian baru berbasis pemanfaatan sumberdaya lahan lokal	semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumberdaya lahan	Persentase UKM non BPR/LKM UKM aktif	Persentase		0	0	0	0	
7. D	INAS LINGKUNGAN	HIDUP								
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria			ALISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%
2	Menciptakan situasi kehidupan yang nyaman bagi	Terciptanya lingkungan pemukiman yang nyaman	Tersedianya dokumen Regulasi, SOP pengelolaan RTH	ada/ tidak ada		Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	-
	kehidupan masyarakat	Terjaganya kelestarian lingkungan dan terkendalinya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan	Persentase		-	5	10	6	5
		Terciptanya lingkungan pemukiman yang	Persentase Cakupan Areal Pelayanan Persampahan	Persentase		10%	10%	10%	10%	10%

		nyaman dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Persentase		16280	17280	17520	17520	20520
		yang baik	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%
			Terfasilitasinya penyediaan sarana/prasarana	Persentase		25%	25%	25%	40%	60%
			Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten Nias Selatan	Unit		1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
			Persentase Jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	Persentase		-	5	10	15	20
8 DI	  NAS PERHUBUNG	N N								
No No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pembangunan dikawasan perdesaan yang selaras dan bersenergi dengan kawasan lain melalui pembangunan yang berkelanjutan	Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen adalah: 1 Dok Renstra, 2 dok Renja / P. Renja, 4 Dok laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan keuangan bulanan, 2 Dok Laporan keuangan semesteran, 1 Dok laporan keuangan semesteran, 2 Dok RKA/PRKA, 2 Dok DPA/PDPA, 1 Dok LKIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	100%	100%	100%	100%	
		meningkatkatnya akses dari wilayah	Persentase layanan angkutan laut	Persentase		4%	4%	6%	2%	
		perdesaan kewilayah kecamatan dan	Persentase layanan angkutan udara	Persen		10%	14%	21%	21%	

		kecamatan ke ibu kota kabupaten	Jumlah Pelabuhan Laut, Udara,terminal Bis	Unit		3 Unit		1 Unit		
9. D	INAS PENANAMAN	MODAL DAN P2TSP		<u> </u>						
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU	I	
					_	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LKPJ	100%	100%	100%	100%	
			Penerapan SOP pada Pelayanan Perizinan	ada/tidak ada	Penyusunan kebijakan melalui Keputusan Kepala Dinas	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Meningkatkan daya tarik investasi usaha	Terciptanya kemudahan dan kepastian investasi	Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)	Jumlah Perusahaan		1 PMA, 3 PMDN	8 PMDN	8 PMDN	18 PMDN	1 PMDN
	dan pendapatan		Rasio daya serap tenaga kerja	Rasio		6	3	3	3	
			Tersedianya e- Perizinan	Aplikasi				Ada	Ada	Ada
		Meningkatnya investasi usaha	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional PMDN/PMA)	Rp		172.787.000.000	8.235.000.000	8.369.319.936	27.550.000.000	
			Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar Rp)	Persentase						

			Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMA (milyar Rp)	Persentase						
		N, PARIWISATA, PEMUI								
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria	2017		ALISASI IKU	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	<b>2017</b> 29	<b>2018</b> 29	<b>2019</b> 29	<b>2020</b> 29	29
	Meningkatkan pariwisata berbasis	Meningkatnya usaha yang terkait dengan sektor pariwisata	Persentase Okjek wisata yang menjadi Destinasi Wisata	Persentase	Urusan Pariwisata	5	5	5	5	5
	sumberdaya alam dan kebudayaan yang berkualitas dan		Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan/ terpelihara	Persentase	Urusan Kebudayaan	10	10	10	7	
	berkelanjutan	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	Urusan Pariwisata	54199	56.119	65.298	10.633	
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	Urusan Pariwisata	3243	5173	7298	150	
		Meningkatnya peran serta stakeholder didalam pengembangan kepariwisataan	Jumlah Regulasi tentang kepariwisataan yang di PERDAkan	Dokumen	Urusan Pariwisata	1	1	0	0	0

	Mewujudkan generasi muda yang	terbentuknya generasi muda yang kreatif, inovatif, terampil dan	Penyelengaraan festival seni dan budaya		Urusan Kebudayaan	1	1	1	0	
	berkarakter, berbudaya dan	berprestasi	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Persentase	Urusan Olahraga dan Pemuda	3	4	5	4	
	beriman		Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	Urusan Olahraga dan Pemuda	2	2	2	3	
			Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Persentase	Urusan Olahraga dan Pemuda	0	0	0	0	
			Cakupan Pembinaan muda	Persentase	Urusan Olahraga dan Pemuda	0	0	0	0	
11 1	NIN A C. IZEV AVIMAN I	DAN DEDUZANAN								
No	DINAS KELAUTAN I Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		RE/	ALISASI IKU		
110	I ujuun 11011011u			Dutuuii	iiotoiuiiguii/ iiiitoiiu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LKPJ	70	75	87	93	40
2	Menguatkan dan menumbuhkan alternatif perekonomian berbasis perikanan dan kelautan	Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis perikanan dan kelautan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Wilayah Potensi Perikanan Tangkap yaitu; Kecamatan Pesisir sebanyak 17 Kecamatan, yaitu: 1 Kec. Somambawa, 2 Kec. Lahusa, 3 Kec. Toma, 4. Kec. Teluk Dalam, 5. Kec. Fanayama, 6. Kec. Luahagundre, 7 Kec. Maniamolo, 8 Kec.	8.412	8.530	8.625	8.501	2.103

No		1	Persentase Dokumen	Persentase	Jumlah seluruh	14 Dok	14 Dok	14 Dok	14 Dok	3 DoK
	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria	2017	2018	ALISASI IKU 2019	2020	2021
	DINAS PERTANIAN									
			Laju pertumbuhan PDB Sektor Perikanan	%	Masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Nias Selatan	4,3	6,3	6,7	6,2	1,9
			Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	Jumlah Kelompok Nelayan 131 dan wilayah potensi Perikanan Tangkap 17 Kecamatan Pesisir	5.497	6.771	6.954	5.782	1.640
			Cakupan bina kelompok nelayan	KUB	Jumlah Kelompok Nelayan 131, Kelompok Pembudidaya 27, Kelompok Pemasar Ikan 14 dan Kelompok Pengolah 12	102	112	125	130	0
			Angka Konsumsi ikan	Kg	Jumlah Penduduk Kab. Nias Selatan yang layak konsumsi ikan sebanyak 185.209 org/ perhari / 0,2 kg	114.371	115.611	116.120	112.178	29.197
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Amandraya, 9 Kec. OOU, 10 Kec. Lolowau, 11 Kec. PP. Batu, 12 . Kec. PP. Batu Utara, 13 Kec. PP. Batu Barat, 14 Kec. PP. Batu Timur, 15 Kec. P. Simuk, 16 Kec. Tanah Masa, 17 Kec. Hibala Wilayah Potensi Perikanan Budidaya Ikan Tawar dan Ikan Laut yaitu; Se- Kabupaten Nias Selatan sebanyak 35 Kecamatan	22	37	41	31	9

					Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ					
2	Mewujudkan pertanian yang	Meningkatnya nilai PDRB sektor pertanian	Produktifitas sektor Pertanian	ton/ha		30,2	23,05	26,3	38,38	0
	berdaya saing dan sekaligus		Produktifitas sektor Perkebunan	ton/ha		4,48	5,06	4,48	4,48	0
	penyangga perekonomian	Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha	Persentase Kelompok tani yang mendapat bantuan kredit dari Bank dan Koperasi	Persentase		0	0	0%	47%	0%
3	Mewujudkan kemandirian	Meningkatnya produksi dan	Produksi Sektor Pertanian	ton		122.263	88.305	158392,8	148237,2	0
	pangan daerah	produktifitas sektor pertanian tanaman	Produksi Sektor Perkebunan	ton		8477,09	26.548	29062,6	29062,6	0
		pangan dan peternakan	Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persentase	bahan pangan utama lainnya adalah Jagung, Ubi, pisang,dll	6,5	5	5,3	8,639	0
			Jumlah populasi ternak pertahun	Ekor		165369	275334	275334	4756	0
		Meningkatkan Fungsi Kelembagaan Petani, penyuluh dan Aparatur	Cakupan kelompok tani aktif	Persentase		15%	44%	20%	38%	0%
		Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan	Tersedianya informasi/ database pertanian	ada/Tidak ada		tdk ada	tdk ada	tdk ada	ada	0
4	Mewujudkan ketahanan	Tersedianya prasarana dan sarana pertanian,	Persentase embung dalam kondisi baik	Persentase		3 unit	4 unit	7 unit	3 unit	0
	pangan daerah	perkebunan dan peternakan	Cakupan Bina Kelompok Petani	Persentase	Bantuan Pemda adalah berupa Pelatihan, Alsintan,	198 kel	220 kel	226 kel	462 kel	0%

					bibit, pupuk, obat obatan					
			Cakupan Bina Kelompok Peternak	Persentase	Bantuan Pemda adalah berupa Pelatihan, Alsintan, bibit, pupuk, obat obatan	4 kel	4 kel	4 kel	4 kel	0 kel
			Panjang jalan usaha tani dalam kondisi baik	Persentase		1457 meter	449 meter	1 unit	1 unit (jalan pertanian)	0
			Tersedianya peta lokasi komoditas unggulan daerah kabupaten Nias Selatan	ada/Tidak ada		tdk ada	tdk ada	tdk ada	ada	0
13. 1	 DINAS PERINDUST	│ RIAN DAN PERDAGANGA	L AN							+
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	LISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	100%	55,175	55,17%	69,77	
2	Mewujudkan pertanian yang berdaya saing dan sekaligus penyangga	Tercapainya produksi pertanian lokal yang mempunyai kualitas dan harga yang lebih kompetitif	Persentase Bangunan Pasar tradisional dalam kondisi baik	Persentase	Kondisi Bangunan Baik adalah Kondisi Bangunan dengan kerusakan kurang atau sama dengan 6%	-	11,43%	14,3%	-	
	perekonomian	Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian	Persentase IKM yang mengolah hasil pertanian	Persentase	Urusan Perindustrian	-	-	-	14,50%	

Halaman : II-131

			Cakupan Bina Kelompok IKM	Persentase		93%	12,20%	-	14,15	
3	Meningkatkan ketersedian	Berkembang usaha ekonomi lokal yang	Cakupan Bina Kelompok Pengarajin	Persentase	Urusan Perindustrian	100%	11,00%	13%	-	
	lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja lokal	menyerap tenaga kerja setempat	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/usaha informal	Persentase	Urusan Perdagangan	94%	11,25%	13%	-	
14 9	 SEKRETARIAT DAE	PDAH								
No.	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		RE4	LISASI IKU		
110	rujuun renstru	Susurum Strategis		Jucuun	incterungum, mitteriu	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai LPPD	Nilai	Sudah Jelas	20.453	25.342	23.174	23.174	2021
	Otonomi Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaran pemerintahan	Jumlah Kecamatan Yang Melaksanakan Tertib Administrasi	Kecamatan	Sudah Jelas	35	35	35	35	
		kecamatan	Rata-rata IKM Kecamatan	Kecamatan	Sudah Jelas	-	-	-	-	
2	Menata produk	Terwujudnya	Jumlah Produk	Perda			9	3	2	
	hukum dan meningkatkan budaya taat hukum	harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Hukum Yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Perbup	Sudah Jelas	5	31	42	32	
3	Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tungas dan fungsi	Meningkatnya Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	PD	Sudah Jelas	25	29	63	63	
	Perangkat Daerah	Diimplementasikannya Standar Pelayanan di Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Standar Pelayanan Publik	PD	Sudah Jelas	-	-	-	-	
		Meningkatnya kuaitas pelayanan publik Pemerintah Daerah	Rata-rata IKM Kabupaten Nias Selatan	Kategori	Sudah Jelas	-	-	_	-	
			Rata-rata IKM Setda Kab. Nias Selatan	Kategori	Sudah Jelas	-	-	-	-	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi Lakip Kabupaten Nias Selatan	Kategori	Sudah Jelas	С	С	С	С	

			Nilai Evaluasi Lakip Sekretariat Daerah	Kategori	Sudah Jelas	В	A	A	A	
4	Meningkatnya pengendalaian pembangunan dan pengembangan	pengendalaian pembangunan dan pengembangan dan sarana prasarana pengembangan dan sumber daya alam	Jumlah Perangkat Daerah Yang Dikendalikan Rencana dan Realisasi PBJ-nya	PD	Sudah Jelas	8	14	28	11	
	manuasi yang berdaya saing, perekonomian		Prosentase PBJ Yang Difasilitasi Melalui ULP	%	Sudah Jelas	100	100%	100	100	
	yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan	Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama	Terwujudnya Pemahaman dan Pengalaman Agama Sesuai Dengan Agama dan Keyakinan masing- masing	Kategori	-	С	С	A	A	
			Terwujudnya Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama	Kategori	-	С	С	A	A	
5	Meningkatnya kualitas dan kapasitas	Meningkatnya penatausahaan Sekretariat Daerah	Tingkat Tertib Pengelolaan Barang/Aset	%	Sudah Jelas	100	100	100	100	
	pelayanan aparatur dalam mendukung	dan Sekretariat Perangkat Daerah di lingkungan	Opini Keuangan Setda Kabupaten Nias Selatan	Opini	Sudah Jelas	Disclaimer	WDP	WDP	-	-
	penyelenggaraan pemerintahan	Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan	Jumlah Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Penatausahaan Berbasis Web	PD	Sudah Jelas	-	-	8	5	
1=										
15. No	SEKRETARIAT DPR Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		D	EALISASI IKU		
110	Tujuan Kenstia	basaran berategis	INO	Satuan	neterangan, miteria	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok	100%	100%	100%	100%	

					Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen					
					DPA/PDPA, 1 Dok LKjIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ					
		Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah Lembaga DPRD	Adanya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD	ada/tidak ada		ada	ada	ada	ada	
		Terciptanya suasana dan kondisi yang kondusif ditengah masyarakat	Persentase RANPERDA yang disetujui DPRD menjadi PERDA per Tahun	Persentase		100%	80%	100%	100%	
			Jumlah RANPERDA yang disetujui DPRD menjadi PERDA per Tahun	Dokumen		10	6	2	7	
			Jumlah minimal Rapat Paripurna pengambilan keputusan yang dilaksanakan DPRD	Kali		21	21	15	18	
		Terciptanya pelayanan yang maksimal bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	Tersedianya dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD setiap tahun	ada/tidak ada		ada	ada	ada	ada	
			Persentase RAPERDA yang disetujui per tahun			100%	100%	100%	100%	
16.1	NSPEKTORAT									
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU		<u> </u>
						2017	2018	2019	2020	2021
	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 30 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok	100%	100%	100%	100%	-

		Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ dan 1					
Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase	Dokumen SOP Dokumen Tindaklanjut dan Penetapan Hasil Tindaklanjut dari Audit Intern dan Auditt Ekstern	100%	100%	100%	100%	-
Jumlah Temuan BPK	Persentase	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI	355	444	472	526	-
Persentasi Reviu dan evaluasi terhadap kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Persentase	10 Dokumen terdiri dari 1 Dokumen Reviu RPJMD, 1 Dokumen Reviu RKPD, 1 Dokumen Reviu LKPD, 1 Dokumen Reviu LKPD, 1 Dokumen Reviu Lapkin, 1 Dokumen Reviu Penyerapan Anggaran, 1 Dokumen Reviu Penyerapan PBJ, 1 Dokumen Evaluasi SPIP, 1 Dokumen Evaluasi LAKIP	30%	40%	40%	50%	-
Jumlah laporan kegiatan penegakan integritas	Persentase	5 Dokumen yang terdiri dari 1 Laporan Gratifikasi, 1 dokumen Pelaksanaan Hari Anti Korupsi, 1 Dokumen Pelaksanaan Saber Pungli, 1 Dokumen laporan RAD PPK, 1 Dokumen LHKASN	40%	40%	60%	40%	-

		Mewujudkan								
		kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Persentase pengaduan masyarat yang tertangani	Persentase	Jumlah Pengaduan masyarakat yang tertangani / jumlah total pengaduan masyarakat x 100	80%	75%	75%	0%	-
			Persentase Tindak Lanjut Temuan	Persentase	Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah Total Temuan x 100	69%	74%	68%	66%	
			Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	Persentase	Jumlah Pengaduan masyarakat yang tertangani / jumlah total pengaduan masyarakat x 100	60%	75%	80%	16%	-
17 1	 RADAN PERENCAN	 AAN PEMBANGUNAN DA	EPAH							
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase		100%	100%	100%	100%	100%
2	Perencanaan Pembangunan yang transparan dan akuntable	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen		ada	ada	ada	ada	ada
		pengawasan pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen		ada	ada	ada	ada	ada
			Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen		ada	ada	ada	ada	ada
			Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen		ada	ada	ada	ada	ada
			Tersedianya Sistem e-planing, e- musrenbang dan e- monev	Aplikasi		Tidak	ada	ada	ada	ada

			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persentase Pelaksanaan Program Pembangunan sesuai	Persentase  Persentase		51 80 97	70 75 95	65 80 95	58 94	
			dengan Perencanaan							
18. I	 BPKPAD									
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria			ALISASI IKU		
						2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Persentase Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD yang tersedia	Persentase	Jumlah seluruh laporan kinerja dan keuangan SKPD sebanyak 29 Dokumen. adalah: 1 Dok Renstra, 2 Dok Renja/P Renja, 4 Dok Laporan Evaluasi Renja, 12 Dok Laporan Keuangan Bulanan, 2 Dok Laporan Keuangan Semesteran, 1 Dok Laporan Keuangan Akhir Tahun, 2 Dok Dokumen RKA/PRKA, 2 Dok Dokumen DPA/PDPA, 1 Dok LKJIP, 1 Dok LPPD, 1 Dok LKPJ	100%	100%	100%	100%	
			Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Oktober		November	Oktober	Oktober	Oktober	
			Presentase realisasi terhadap Anggaran Pendapatan yang telah ditetapkan	Persentase	Penghitungan dilakukan dengan membandingkan anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan	99%	94%	88%	91,52%	
			Presentase Realisasi terhadap Anggaran Belanja yang telah ditetapkan	Persentase	Penghitungan dilakukan dengan membandingkan anggaran belanja	91,5%	95%	95,47%	96%	

					dengan realisasi belanja					
			Presentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	Persentase	Persentase Jumlah SP2D yang terbit sejak diterimanya SPM yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibagi seluruh penerbitan SP2D	100%	100%	100%	100%	
			Presentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten	Persentase	Jumlah aktifa neraca SKPD dengan rincian Total BMD harus sesuai	65%	75%	83%	95%	
			Presentase tanah milik Pemerintah Kab. Nias Selatan bersertifikat	Persentase	Luas Tanah Pemkab Nias Selatan bersertifikat dibagi dengan Luas Tanah Pemkab Nias Selatan	55%	65%	75%	85%	
			Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini		TMP	WDP	WDP	WDP	
			Tersedianya Aplikasi Sistem e-budgeting	Aplikasi	Aplikasi Sistem e- budgeting adalah aplikasi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	ada	ada	ada	ada	
19. 1	∣ BADAN KEPEGAWA	IAN DAERAH								
No	Tujuan Renstra	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Keterangan/ Kriteria		REA	ALISASI IKU		
	_	_				2017	2018	2019	2020	2021
1	Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan	Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan	Jumlah Dokumen Laporan tahunan kinerja dan keuangan SKPD	Dokumen		100%	100%	100%	100%	100%
	transparan	bertanggungjawab	Jumlah Pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural (Diklat PIM IV,III,II)	Orang		5 org	-	5 org	-	-

			Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan Prajabatan	Orang	-	534 org	-	55 org	71 org
			Jumlah Jabatan Tinggi Pratama yang akan terisi melalui seleksi terbuka	Jabatan	16 Jabatan	-	4 Jabatan	-	-
2	Menciptakan pemerintahan yang berorientasi	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Jumlah ASN yang dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat	Orang	21 Org	20 org	16 org	31 org	blm ada
	pada pelayanan		Persentase kenaikan pangkat reguler Pegawai tepat waktu TMT bulan April	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase kenaikan pangkat reguler Pegawai tepat waktu TMT bulan Oktober	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah ASN yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya	Orang	100 org	100 org	150 org	-	-
			Jumlah Pensiunan yang terproses	Orang	98 org	81 org	120 org	150 org	30 org

# BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

## 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan.

Dalam perencanaan pembangunan daerah diperlukan gambaran keuangan daerah sebagai dasar pengalokasian anggaran. Secara umum gambaran keuangan daerah menyajikan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah serta gambaran umum pengelolaan keuangan di Kabupaten Nias Selatan pada periode 2016-2020 yang meliputi kinerja keuangan atau pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Halaman: III-1

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Untuk menganalisa kinerja pelaksanaan APBD masa lalu dibutuhkan analisis terhadap pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020). Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2016-2020 digambarkan dalam grafik berikut :

1.555,77 1,459.78 1.311,19 1.308,86 1.165,06 1.171,73 1.126,56 1.066,16 1.008.89 810,0 128.13 105,54 59.73 -130.82 2020 2016 2017 2018 ■ Pendapatan ■ Belanja ■ Pembiayaan

Grafik 3. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 – 2020 (dalam miliar rupiah)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

### 3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Analisis pendapatan daerah dibutuhkan untuk mendapatkan data tentang jenis dan besaran pendapatan yang dapat digunakan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah di masa yang akan datang.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan daerah terdiri dari :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

- Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Grafik 3. 2

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020 (dalam jutaan rupiah) 1.165.060,96 .008.887,21

2018 2020

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 meningkat setiap tahunnya dengan ratarata pertumbuhan mencapai 9,74% pertahun dari Rp.1.008 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp.1.459 miliar di tahun 2020.



Grafik 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Berdasarkan grafik 3.3 terlihat bahwa komponen pendapatan terbesar Kabupaten Nias Selatan berasal dari pendapatan transfer, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan asli daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan masih sangat bergantung dari dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kebergantungan ini sangat terasa ketika terjadi pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Kebijakan Pemerintah Pusat yang menginstruksikan realokasi anggaran dan refocussing kegiatan untuk penanganan Covid-19 membatasi kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Nias Selatan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

### a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah. Dengan proporsi rata-rata 1,61% dari total pendapatan daerah tiap tahunnya, PAD menjadi penyumbang terkecil dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan. Walaupun belum berkontribusi banyak, PAD Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun pada akhirnya terjadi penurunan pada tahun 2020 yang sebagian besar disebabkan oleh menurunnya pendapatan pajak dan retribusi daerah akibat pandemi Covid-19.

Berdasarkan PAD yang mengalami tren peningkatan setiap tahunnya dapat dinilai bahwa Kabupaten Nias Selatan terus berusaha agar PAD-Nya semakin meningkat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* Pendapatan Daerah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan baik yang menyangkut upaya *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* antara lain :

- 1. Melakukan penataan pengelolaan keuangan;
- 2. Menggali potensi baru atau mencari objek dan subjek pungutan baru;
- 3. Pemutakhiran dan validasi data objek dan subjek PAD;
- 4. Meningkatkan pungutan yang telah ada objek dan subjeknya;
- 5. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola keuangan daerah;

- 6. Melakukan pengawasan terhadap petugas pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- 7. Melakukan penyuluhan tentang wajib pajak dan wajib retribusi kepada masyarakat secara berkala;
- 8. Peningkatan pemanfaatan aset untuk meningkatkan retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD.

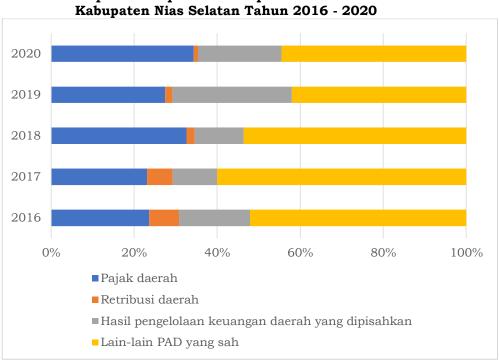
Walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya namun upaya tersebut diatas dapat menunjukkan hasil yang baik pada beberapa komponen PAD, salah satunya adalah pajak daerah yang stabil mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 12,98% per tahun yaitu dari Rp. 3,847 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 7,058 miliar pada tahun 2019 dan terakhir Rp. 5,701 miliar pada tahun 2020.

Tabel 3.1
Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020 (persen)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata- rata
1.1	Pendapatan Asli Daerah	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Pajak daerah	23,69	23,12	32,59	27,50	34,35	28,25
1.1.2	Retribusi daerah	7,16	6,13	2,01	1,73	1,01	3,61
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	17,11	10,74	11,76	28,77	20,15	17,71
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	52,20	60,00	53,64	41,99	44,50	50,47

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2021-2020 (data diolah)

Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen PAD yang memberikan sumbangan terbesar dalam struktur PAD dengan rata-rata mencapai 50,47% per tahun dari PAD. Penyumbang terbesar kedua adalah pajak daerah yang rata-rata mencapai 28,25% per tahun dari PAD, disusul hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan rata-rata sebesar 17,71% per tahun dari PAD dan penyumbang paling sedikit adalah dari sektor retribusi daerah yaitu rata-rata sebesar 3,61% per tahun dari PAD, dan ini menjadi tugas yang utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.



Grafik 3. 4 Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Sumbangan retribusi daerah yang begitu sedikit menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan perlu berupaya lebih giat untuk memaksimalkan pendapatan retribusi. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan pemanfaatan aset daerah. Perlu dilakukan pendataan dan penataan terhadap aset daerah agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan.

#### b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 Pendapatan Transfer Kabupaten Nias Selatan menunjukkan *trend* meningkat. Pada tahun 2016 pendapatan transfer Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar Rp.980,576 miliar pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp.1.347,225 miliar namun sempat menurun pada tahun 2018 menjadi Rp.1.075,996 miliar dari tahun sebelumnya (2017) Rp1.098,693 miliar. Pendapatan transfer memiliki rata-rata proporsi 94,33% per tahun pada pendapatan daerah dan rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,44% per tahun.

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020 (dalam miliar rupiah) 27.973 49,914 31,387 36.854 39,273 1319,251 1160,264 1067,305 1039,142 941,302 2016 2017 2018 2019 2020 ■ Transfer Pemerintah Pusat Tranfer antar-daerah

Grafik 3. 5 Proporsi Komponen Pendapatan Transfer

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Dana perimbangan terbagi menjadi dana transfer umum dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU menjadi penyumbang terbesar pendapatan daerah dengan proporsi rata-rata mencapai 47,39% per tahun. Pendapatan DAU Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 540,753 miliar meningkat menjadi Rp. 626,743 miliar pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan 3,79% per tahun. Dana transfer khusus terbagi menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik). Dana transfer khusus menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sebesar Rp. 159,744 miliar menjadi Rp. 327,268 miliar pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21,05% per tahun.

Dana Desa menjadi penyumbang terbesar kedua setelah dana perimbangan. Dengan rata-rata pertumbuhan 12,89% per tahun, Pendapatan Dana Desa Kabupaten Nias Selatan bertumbuh dari tahun 2016 sebesar Rp.224,695 miliar menjadi Rp.350,786 miliar pada tahun 2020. Semakin naiknya pendapatan Dana Desa menandakan bahwa pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan semakin membaik dari

tahun ke tahun sehingga memenuhi syarat untuk mendapatkan penambahan.

Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Nias Selatan menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif dimulai pada tahun 2016 sebesar Rp.39,273 miliar kemudian turun pada tahun 2017 menjadi Rp.31,387 miliar, meningkat lagi menjadi Rp.36,854 miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 Rp.49,914 miliar yang akhirnya turun menjadi Rp.27,973 miliar pada tahun 2020.

Tabel 3. 2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	1.008.887.209.661,00	1.126.563.468.536,07	1.165.060.955.793,02	1.311.187.399.606,75	1.459.778.561.444,50	9,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	16.236.067.492,00	18.450.266.700,07	19.605.734.782,42	25.664.883.761,35	16.598.894.145,70	3,87
1.1.1	Pajak daerah	3.847.053.306,00	4.266.281.115,00	6.389.584.239,65	7.058.816.211,48	5.701.344.377,60	12,98
1.1.2	Retribusi daerah	1.162.863.838,00	1.130.834.625,00	394.705.250,00	445.024.224,00	166.938.289,00	-29,40
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.777.493.794,00	1.982.256.772,00	2.305.007.405,00	7.384.538.798,00	3.344.299.449,00	38,33
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.475.656.554,00	11.070.894.188,07	10.516.437.887,77	10.776.504.527,87	7.386.312.030,10	-0,84
1.2	Pendapatan Transfer	980.576.059.766,00	1.098.693.318.469,00	1.075.996.874.340,00	1.210.178.540.043,00	1.347.225.124.818,00	8,44
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	941.302.286.668,00	1.067.305.707.783,00	1.039.142.326.027,00	1.160.264.028.796,00	1.319.251.191.664,00	9,03
1.2.1.1	Dana perimbangan	716.606.956.323,00	768.617.877.771,00	771.694.298.994,00	859.504.478.763,00	968.464.320.320,00	7,93
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	556.862.572.211,00	550.309.495.550,00	572.042.745.998,00	600.600.789.350,00	641.195.337.811,00	3,63
1.2.1.1.1.1	DBH	16.108.945.211,00	12.026.892.550,00	15.868.595.462,00	11.877.259.350,00	14.451.759.811,00	0,78
1.2.1.1.1.2	DAU	540.753.627.000,00	538.282.603.000,00	556.174.150.536,00	588.723.530.000,00	626.743.578.000,00	3,79
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	159.744.384.112,00	218.308.382.221,00	199.651.552.996,00	258.903.689.413,00	327.268.982.509,00	21,05
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	122.701.293.090,00	153.315.839.177,00				0,00
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	37.043.091.022,00	64.992.543.044,00				0,00
1.2.1.2	Dana insentif daerah	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana otonomi khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.4	Dana keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.5	Dana desa	224.695.330.345,00	298.687.830.012,00	267.448.027.033,00	300.759.550.033,00	350.786.871.344,00	12,89
1.2.2	Tranfer antar-daerah	39.273.773.098,00	31.387.610.686,00	36.854.548.313,00	49.914.511.247,00	27.973.933.154,00	-2,80
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil	39.273.773.098,00	31.387.610.686,00	28.875.842.614,00	49.914.511.247,00	27.973.933.154,00	0,21
1.2.2.2	Bantuan keuangan	-	-	7.978.705.699,00	-	-	0,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	12.048.055.403,00	9.419.883.367,00	69.458.346.670,60	75.343.975.802,40	95.954.542.480,80	162,84
1.3.1	Hibah	718.800.000,00	545.385.372,00	59.887.067.355,60	65.301.835.641,40	83.879.290.080,80	2.723,51
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	11.329.255.403,00	8.874.497.995.00	9.571.279.315,00	10.042.140.161,00	12.075.252.400,00	2,84

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (data diolah)

Tabel 3. 3
Proporsi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 – 2020

N7 -	TT 1			Proporsi (%	)		Rata-
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata (%)
1	PENDAPATAN	100	100	100	100	100	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1,61	1,64	1,68	1,96	1,14	1,60
1.1.1	Pajak daerah	0,38	0,38	0,55	0,54	0,39	0,45
1.1.2	Retribusi daerah	0,12	0,10	0,03	0,03	0,01	0,06
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,28	0,18	0,20	0,56	0,23	0,29
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	0,84	0,98	0,90	0,82	0,51	0,81
1.2	Pendapatan Transfer	97,19	97,53	92,36	92,30	92,29	94,33
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	93,30	94,74	89,19	88,49	90,37	91,22
1.2.1.1	Dana perimbangan	71,03	68,23	66,24	65,55	66,34	67,48
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	55,20	48,85	49,10	45,81	43,92	48,57
1.2.1.1.1.1	DBH	1,60	1,07	1,36	0,91	0,99	1,18
1.2.1.1.1.2	DAU	53,60	47,78	47,74	44,90	42,93	47,39
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	15,83	19,38	17,14	19,75	22,42	18,90
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	12,16	13,61	0,00	0,00	0,00	5,15
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	3,67	5,77	0,00	0,00	0,00	1,89
1.2.1.2	Dana insentif daerah	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Dana otonomi khusus	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana keistimewaan	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana desa	22,27	26,51	22,96	22,94	24,03	23,74
1.2.2	Tranfer antar-daerah	3,89	2,79	3,16	3,81	1,92	3,11
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil	3,89	2,79	2,48	3,81	1,92	2,98
1.2.2.2	Bantuan keuangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1,19	0,84	5,96	5,75	6,57	4,06
1.3.1	Hibah	0,07	0,05	5,14	4,98	5,75	3,20
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	_
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	1,12	0,79	0,82	0,77	0,83	0,87

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (data diolah)

#### c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 162,84% per tahun. Pada tahun 2016 pendapatan Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar Rp. 12,048 miliar kemudian turun menjadi Rp.9,419 miliar pada tahun 2017 namun setelahnya terus meningkat hingga

mencapai sebesar Rp.95,954 miliar pada tahun 2020. Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4,06% per tahun dalam struktur pendapatan daerah.

# 3.1.1.2 Belanja Daerah

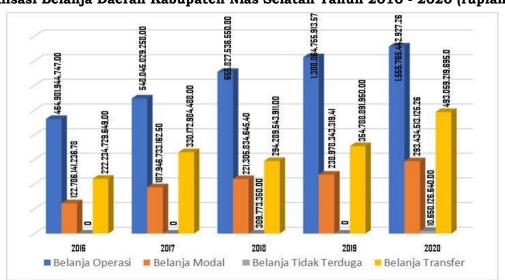
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

2016 2017 2018 2019 2020

Grafik 3. 6
Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 – 2020 (dalam jutaan rupiah)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 18,02% per tahun. Dimulai dari tahun 2016 belanja daerah Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar Rp. 810,002 miliar terus meningkat setiap tahun sampai dan akhirnya pada tahun 2020 mencapai Rp.1.555,765 miliar. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan Kabupaten Nias Selatan dalam pembangunan meningkat setiap tahun.



Grafik 3. 7 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020 (rupiah)

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

### a) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Belanja Pegawai menjadi komponen penyumbang terbesar dalam struktur belanja operasi. Belanja pegawai Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 sebesar Rp.303,015 miliar mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi Rp.296,876 miliar dan selanjutnya terus meningkat sampai tahun 2020 mencapai Rp.366,700 miliar.

Pada komponen belanja barang dan jasa juga terjadi kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 sebesar Rp. 160,286 miliar menjadi Rp.314,413 miliar pada tahun 2019 dan menurun menjadi Rp.300,220 miliar.

Komponen Belanja subsidi Kabupaten Nias Selatan dimulai pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.600 juta yang dialokasikan untuk subsidi Angkutan laut. Subsidi ini bertujuan agar angkutan laut dapat terjangkau oleh masyarakat mengingat Kabupaten Nias Selatan memiliki banyak Pulau Kecil. Pada tahun 2019 besaran belanja subsidi Kabupaten Nias Selatan tidak mengalami perubahan yaitu Rp.600 juta dan terakhir pada tahun 2020 sebesar Rp.994 juta yang juga dialokasikan untuk angkutan laut.

instansi Belanja hibah diberikan kepada vertikal, badan/Lembaga/organisasi swasta. Belanja Hibah Kabupaten Nias Selatan termasuk beban beasiswa Pendidikan bidang Kesehatan dan Pendidikan. Besaran belanja hibah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.1,061 miliar, meningkat dengan tajam pada tahun 2017 sebesar Rp. 28,275 miliar, Rp. 31,129 pada tahun 2018, Rp. 23,096 pada tahun 2019 dan pada akhirnya sebesar Rp. 74,435 miliar pada tahun 2020. Kenaikan dana hibah pada tahun 2020 adalah karena Kabupaten Nias Selatan termasuk salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada sehingga dibutuhkan hibah dari daerah untuk menunjang pelaksanaannya (pengamanan, pelaksana dan pengawas pilkada).

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Belanja bantuan sosial di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 16,270 terdiri dari bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan dan bantuan sosial kepada masyarakat.

#### b) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan setiap tahun dimulai dari tahun 2016 sebesar Rp. 122,786 miliar dan pada tahun 2020 mencapai Rp. 293,434 miliar.

## c) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk mendanai penanganan keadaan darurat akibat bencana alam atau peristiwa yang tidak biasa dan tidak diduga. Belanja tidak terduga Kabupaten Nias Selatan pernah digunakan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.309 juta pada tahun 2020 sebesar Rp.10,650 miliar yang digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

## d) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja Transfer Kabupaten Nias Selatan kepada Pemerintah Desa berupa bagi hasil pajak dan retribusi serta bantuan keuangan. Pada tahun 2016 besar belanja transfer Kabupaten Nias Selatan adalah Rp. 222,234 miliar dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 493,059 miliar.

Tabel 3. 4
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten
Nias Selatan Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	810.002.815.632,78	1.066.164.746.908,50	1.171.732.688.457,20	1.308.864.755.913,57	1.555.765.442.927,26	18,02
2.1.	Belanja Operasi	464.981.944.747,00	548.045.029.258,00	655.827.536.550,80	715.097.520.644,16	758.621.583.467,00	13,16
2.1.1	Belanja Pegawai	303.015.830.507,00	296.876.634.145,00	334.164.630.033,00	357.605.527.592,00	366.700.006.733,00	5,02
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.286.414.240,00	193.341.269.309,00	276.477.788.202,80	314.413.678.283,16	300.220.794.133,00	18,21
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	600.000.000,00	600.000.000,00	994.800.000,00	-
2.1.5	Belanja Hibah	1.061.600.000,00	28.275.387.400,00	31.129.935.000,00	23.096.657.950,00	74.435.212.732,00	692,51
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	618.100.000,00	29.551.738.404,00	13.455.183.315,00	19.381.656.819,00	16.270.769.869,00	1.163,65
2.2	Belanja Modal	122.786.141.236,78	187.946.733.162,50	221.305.834.645,40	238.978.343.319,41	293.434.513.125,26	25,40
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	-	309.773.350,00	-	10.650.126.640,00	-
2.4	Belanja Transfer	222.234.729.649,00	330.172.984.488,00	294.289.543.911,00	354.788.891.950,00	493.059.219.695,00	24,31
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	222.234.729.649,00	330.172.984.488,00	294.289.543.911,00	354.788.891.950,00	493.059.219.695,00	14,66

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (data diolah)

Tabel 3. 5 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020

No.	Urajan			Proporsi (%)			Rata-rata
Nu.	uraiaii	2016	2017	2018	2019	2020	(%)
2	BELANJA	100	100	100	100	100	
2.1.	Belanja Operasi	57,40	51,40	55,97	54,63	48.76	53,64
2.1.1	Belanja Pegawai	37,41	27,85	28,52	27,32	23.57	28,93
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,79	18,13	23,60	24,02	19,30	20,97
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	0,05	0,05	0,06	0,05
2.1.5	Belanja Hibah	0,13	2,65	2,66	1,76	4,78	2,40
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,08	2.77	1,15	1,48	1,05	1,30
2.2	Belanja Modal	55,25	17,63	18,89	18,26	18,86	25,78
2.3	Belanja Tidak Terduga	-	-	0,03	-	0,68	0,36

No.	Uraian	Proporsi (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	(%)
2.4	Belanja Transfer	27,44	30,97	25,12	27.11	31,69	28,46
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	27,44	30,97	25,12	27.11	31,69	28,46

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

#### 3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman.

Apabila terjadi surplus anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan jika terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutupi defisit daerah. Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 6 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	PEMBIAYAAN	(130.824.422.607,55)	59.730.125.464,14	120.133.135.571,71	106.641.748.377,53	109.180.580.762,71	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	6.102.145.716,45	67.657.902.256,14	122.133.135.571,71	113.461.402.907,53	109.180.580.762,71	269,60
3,2	Pengeluaran Pembiayaan	136.926.568.324,00	7.927.776.792,00	2.000.000.000,00	6.819.654.530,00	-	(7.00)

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pembiayaan Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, dimulai dari keadaan defisit pada tahun 2016 sebesar Rp.130,824 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp.59,730 miliar dan terakhir tahun 2020 menjadi Rp.109,180 miliar.

#### 3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca Daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Neraca Daerah terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Aset terbagi menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek dan ekuitas dana terbagi menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Neraca Daerah Kabupaten Nias Selatan digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 7
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	79.969.121.293,14	139.272.182.340,71	133.150.180.086,68	138.385.694.007,57	43.646.209.194,30	1,31
1.1.1.	Kas	68.994.084.371,14	122.957.397.094,71	113.761.676.167,53	109.195.597.054,71	13.416.129.283,95	(5.25)
1.1.2.	Piutang	2.406.320.321,00	5.946.300.329,00	2.582.807.608,15	8.163.956.760,25	7.801.509.849,95	75,55
1.1.3.	Persediaan	8.568.716.601,00	10.368.484.917,00	16.805.696.311,00	21.026.140.192,61	22.428.570.060,40	28,72
1.2.	INVENTASI JANGKA Panjang	50.243.379.948,00	55.883.404.722,00	58.220.160.849,00	63.955.880.900,00	63.737.412.806,00	6,23
1.2.1.	Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	-
1.2.2.	Investasi Permanen	50.243.379.948,00	55.883.404.722,00	58.220.160.849,00	63.955.880.900,00	63.737.412.806,00	6,23
1.3.	ASET TETAP	1.359.167.467.880,65	.348.753.843.296,52	1.362.781.117.082,85	1.641.498.358.050,09	1.821.444.440.913,55	7,92
1.3.1.	Tanah	115.128.966.413,00	109.316.921.913,00	202.394.584.404,39	207.300.189.147,79	211.110.438.717,83	21,09
1.3.2.	Peralatan dan mesin	273.927.357.205,59	310.059.943.926,59	185.303.149.238,83	220.918.851.810,87	290.228.243.018,58	5,89
1.3.3.	Gedung dan bangunan	758.642.012.592,48	717.778.518.253,00	542.898.787.234,48	716.032.211.116,14	807.602.611.182,20	3,73
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	715.549.382.585,00	803.468.851.549,00	895.525.910.853,06	1.010.007.464.772,28	1.078.401.953.378,37	10,82
1.3.5.	Aset tetap lainnya	47.111.856.972,00	52.111.299.572,00	40.709.278.514,98	49.914.829.211,98	57.772.690.718,98	6,77
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	24.625.567.774,12	27.018.655.866,00	37.429.718.609,72	55.388.817.445,78	106.736.351.615,50	47,23
1.3.7.	Akumulasi	(575.817.675.661,54)	(671.000.347.783,07)	(541.480.311.772,61)	(618.064.005.454,75)	(730.407.847.717,92)	7,39

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Penyusutan						
1.4.	ASET LAINNYA	4.006.681.583,88	3.966.681.583,88	242.277.941.877,32	85.127.411.615,07	83.284.766.152.26	1.484,95
$\vdash$	Tagihan penjualan	4.000.001.303,00	3.300.001.303,00	242.277.341.077,32	03.127.411.013,07	03.204.700.132,20	1.404,33
1.4.1.	angsuran	-	-	-	-		-
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	1.930.629.393,00	1.930.629.393,00	9.566.186.185,15	10.030.344.119,93	8.187.698.657,12	95,49
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	Aset tak berwujud	-	-	-	-	-	-
1.4.5.	Software Komputer	174.300.000,00	174.300.000,00	174.300.000,00	-	-	-
1.4.6.	Pengadaan Lainnya	181.460.130,00	-	-	-	-	-
1.4.7.	Aset Lain-Lain	1.720.292.060,88	1.861.752.190,88	232.537.455.692,17	75.097.067.495,14	75.097.067.495,14	3.082,69
	JUMLAH ASET Daerah	1.493.386.650.705,67	1.547.876.111.943,11	1.796.429.399.895,85	1.928.967.344.572,73	2.012.112.829.066,11	7,85
2	KEWAJIBAN	106.485.971.065,28	95.293.881.955,81	69.795.085.119,59	77.751.957.170,81	75.273.586.679,56	(7,26)
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA Pendek	106.485.971.065,28	95.293.881.955,81	69.795.085.119,59	77.751.957.170,81	75.273.586.679,56	(7.26)
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	408.463.318,47	878.705.091,00	300.273.260,00	231.205.021,00	222.430.031,00	5,62
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Utang Beban	1.898.630.799,00	516.873.617,00	-	-	2.838.174.390,00	-
2.1.5.	Utang Jangka Pendek Lainnya	104.178.876.947,81	93.898.303.247,81	69.494.811.859,59	77.520.752.149,81	72.212.982.258,56	(7,79)
3	EKUITAS DANA	1.386.900.679.640,39		1 770 094 914 770 70	1 051 715 707 / 01 07	.936.839.242.386,55	8,86
3.1.	EKUITAS DANA LANGAR	-	-	-	-	-	-
3.1.1.	SILPA	_	_	_	_		<u>-</u>
3.1.2.	Cadangan piutang	-	-	-	-	_	
3.1.3.	Cadangan persediaan	-	-	-	-	-	-
3.1.4.	dst	-	-	-	-	-	-
							-
3.2.	EKUITAS DANA Investasi	-	-	-	-	-	-
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	-	-	-	-	-	-
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya	-	-	-	-	-	-
							-
	JUMLAH KEWAJIBAN Dan ekuitas dana	1.493.386.650.705,67	1.547.876.111.943,11	1.796.429.399.895,85	1.928.967.344.572,73	2.012.112.829.066,11	7,85

Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (data diolah)

Pada tabel di atas terlihat bahwa aset Kabupaten Nias Selatan terdiri dari asset lancar, investasi jangka Panjang, asset tetap dan asset lainnya. Jumlah asset daerah Kabupaten Nias Selatan menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 7,85% per tahun dimulai dari tahun 2016 yaitu sebesar Rp.1.493 miliar meningkat dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 2.012 miliar.

Kewajiban Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek yang kemudian dibagi menjadi utang perhitungan pihak ketiga, utang beban dan utang jangka pendek lainnya. Kewajiban Kabupaten Nias Selatan mengalami trend fluktuatif dimulai dari tahun 2016 sebesar Rp.106,485 miliar turun menjadi Rp. 95,293 miliar pada tahun 2017 dan Rp.69,795 miliar pada tahun 2018 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.77,751 miliar dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.75,273 miliar.

Ekuitas Dana Kabupaten Nias Selatan menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 sebesar Rp.1.386 miliar menjadi Rp. 1.936 miliar pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,86% per tahun.

### 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dibutuhkan untuk evaluasi dan sebagai bahan dalam penyusunan arah kebijakan di masa yang akan datang. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kabupaten Nias Selatan baik dilihat dari efisiensi dan efektivitasnya telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya indikator WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Nias Selatan. Hal ini tercapai pada tahun 2019 dan 2020 setelah tahun-tahun sebelumnya Kabupaten Nias Selatan selalu menerima Opini disclaimer dari BPK. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dengan target mencapai indikator WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Beberapa upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1. Peningkatan kemampuan dan jiwa profesionalitas SDM
- 2. Peningkatan pendataan dan pengelolaan Aset
- 3. Pengelolaan Keuangan berbasis aktual, akuntabel, transparan dan efisien salah satunya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan
- 4. Membenahi temuan dan catatan oleh BPK dari tahun-tahun pemeriksaan sebelumnya

5. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan oleh internal Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

### 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Anggaran Kabupaten Nias Selatan dalam dalam satu tahun sebagian besar dialokasikan untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Dalam kurun waktu 2016-2020 belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan dari Rp.463,279 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp.749,807 pada tahun 2020.

Tabel 3. 8

Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten

Nias Selatan Tahun 2016 – 2020

	Nias Selatan Tanun 2016 – 2020											
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020						
Α	Belanja Tidak Langsung	296.210.669.357,00	296.363.956.645,00	333.720.853.033,00	357.605.527.592,00	366.700.006.733,00						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	232.939.184.141,00	225.670.991.815,00	236.442.817.580,00	248.883.226.476,00	253.053.886.178,00						
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	61.321.928.128,00	68.338.518.810,00	94.044.398.859,00	105.447.679.011,00	110.339.631.380,00						
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.949.557.088.00	2.228.446.020,00	2.925.262.008.00	2.924.388.540,00	2.996.267.704,00						
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah**)	-	126.000.000,00	308.374.586,00	350.233.565,00	310.221.471,00						
В	Belanja Langsung	167.069.076.194,78	245.199.112.401,50	301.278.841.874,40	335.288.278.084,41	383.107.033.169,26						
1	Belanja Honorarium PNS**)	3.334.803.000,00	2.173.784.921,00	2.460.665.000,00	3.186.031.000,00	2.215.950.000,00						
2	Belanja Uang Lembur**)	1.165.408.150,00	512.677.500,00	443.777.000,00	-	-						
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	62.200.000,00	132.900.000,00	53.600.000,00	-	-						
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	434.150.000,00	1.410.562.000,00	3.165.162.600,00	1.920.900.956,00	1.076.280.000,00						
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	690.000.000,00	2.195.904.000,00	2.801.670.521,00	5.046.604.500,00						
6	Belanja makanan dan minuman pegawai**)	9.330.927.000,00	10.513.300.370,00	13.335.791.300,00	14.785.276.794,00	10.888.579.263,00						
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya**)	-	983.092.770,00	1.483.815.675,00	1.214.871.577,00	1.068.649.500,00						
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	17.000.000,00	500.716.000,00	706.687.780,00	1.142.225.848,00	572.297.500,00						
9	Belanja perjalanan dinas**)	29.938.446.808,00	40.335.345.678,00	56.127.603.874,00	71.258.958.069,00	68.804.159.281,00						
10	Belanja perjalanan pindah tugas	-	-	-	-	-						
11	Belanja pemulangan pegawai	-	-	-	-	-						
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan, dll)	122.786.141.236,78	187.946.733.162,50	221.305.834.645,40	238.978.343.319,41	293.434.513.125,26						
	TOTAL	463.279.745.551,78	541.563.069.046,50	634.999.694.907,40	692.893.805.676,41	749.807.039.902,26						

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2016-2020 (data diolah)

Tabel 3. 9

Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Presentase	
		(a)	(Ь)	(a) / (b) x 100%	
1	2016	463.279.745.551,78	946.929.383.956,78	49%	
2	2017	541.563.069.046,50	1.074.092.523.700,50	50%	
3	2018	634.999.694.907,40	1.173.732.688.457,20	54%	

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan Total pengeluaran (Belanja + Uraian kebutuhan aparatur (Rp) Pembiayaan Pengeluaran) (Rp		Presentase
		(a)	(Ь)	(a) / (b) x 100%
4	2019	692.893.805.676,41	1.315.684.410.443,57	53%
5	2020	749.807.039.902,26	1.555.765.442.927,26	48%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Rata-rata alokasi anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 50,8% per tahun dari total pengeluaran daerah. Dalam kurun waktu 2016-2018 presentase proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan dari 49% menjadi 54% namun kemudian mengalami penurunan menjadi 48% pada tahun 2020.

Proporsi anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap pengeluaran daerah dapat menunjukkan apakah anggaran daerah digunakan secara efektif. Semakin tinggi proporsi anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur maka semakin rendah anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Demikian sebaliknya, semakin sedikit proporsi anggaran untuk belanja pemenuhan kebutuhan aparatur maka semakin tinggi anggaran yang bersifat substansial pembangunan. Banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah Kabupaten Nias Selatan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk mewujudkan pembangunan yang merata. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus berupaya untuk mengurangi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. Berbagai upaya yang dilakukan diantaranya:

- 1. Seluruh OPD agar menggunakan anggaran dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan
- 2. Meniadakan uang lembur dan belanja beasiswa pendidikan PNS
- 3. Merasionalisasikan biaya perjalanan dinas
- 4. Mengoptimalkan belanja modal hanya untuk keperluan yang mendesak
- 5. Menata struktur organisasi berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Upaya ini diharapkan dapat menurunkan jumlah belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat.

### 3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan diperlukan untuk mengetahui gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutupi defisit riil. Untuk menghitung defisit riil anggaran digunakan rumus realisasi anggaran dikurang realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Dari tabel dibawah dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Nias Selatan mengalami surplus dan pada tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami defisit anggaran.

Tabel 3. 10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020

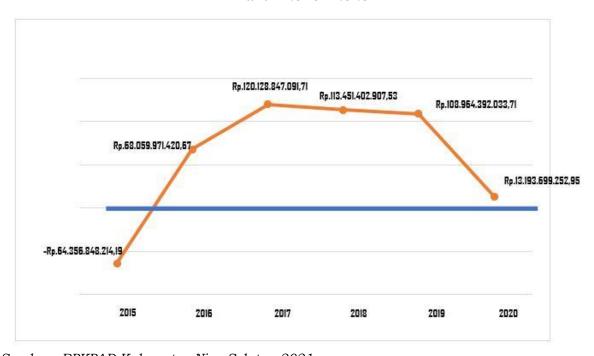
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.008.887.209.661,00	1.126.563.468.536,07	1.165.060.955.793,02	1.311.187.399.569,75	1.459.778.561.444,50			
	Dikurangi realisasi:								
2	Belanja Daerah	810.002.815.632,78	1.066.164.746.908,50	1.171.732.688.457,20	1.308.864.755.913,57	1.555.765.442.927,26			
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	136.926.568.324,00	7.927.776.792,00	2.000.000.000,00	6.819.654.530,00	-			
	Defisit riil	61.957.825.704,22	52.470.944.835,57	(8.671.732.664,18)	(4.497.010.873,82)	(95.986.881.482,76)			

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Grafik 3. 8

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Nias Selatan

Tahun 2015 - 2020



Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

SiLPA Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2020 mengalami *trend* pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2016 SiLPA Kabupaten Nias Selatan sebesar Rp.68,059 miliar mencapai puncak tertinggi pada tahun

2017 menjadi sebesar Rp.120,128 miliar dan menurun tahun 2020 menjadi sebesar Rp.13,193 miliar. SiLPA dalam kurun waktu 2016-2020 masih termasuk dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum sepenuhnya optimal. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus berupaya untuk memaksimalkan penyerapan anggaran setiap tahun untuk memaksimalkan pencapaian pembangunan daerah.

Tabel 3. 11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 - 2020

		Proporsi dari total defisit riil					
No.	Uraian	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	(103,87)	129,71	(1.385,29)	(2.522,82)	(113,52)	
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Pada tabel diatas dapat diketahui besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya dalam proporsi total defisit riil. Proporsi dari total defisit berarti persentase SiLPA tahun anggaran sebelumnya terhadap total defisit riil. Pada tahun 2020, SiLPA tahun anggaran sebelumnya (2019) sebesar Rp.108,964 miliar berjumlah sebesar -113,52% terhadap defisit riil tahun 2016.

#### 3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis Kerangka Pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang akan digunakan untuk mendanai belanja/pengeluaran daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun ke depan.

#### 3.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Pendapatan dan belanja daerah di masa depan diproyeksikan dengan memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Dari kinerja keuangan masa lalu dapat diketahui seperti apa pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat dijadikan dasar dalam memproyeksikan pendapatan dan belanja daerah di masa yang akan datang.

### 3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan pertumbuhan yang baik dengan adanya tahun peningkatan pendapatan dari ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,74% per tahun. Transfer pemerintah pusat melalui Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menjadi penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan Pendapatan daerah pada periode tahun 2016-2020 tetap meningkat setiap tahunnya meskipun pada tahun 2020 Transfer Pemerintah Pusat mengalami pemotongan dan refocussing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pendapatan Asli Daerah walaupun kontribusinya masih sedikit dapat mengalami kenaikan setiap tahun walaupun harus turun 35,32% di tahun 2020. Turunnya Pendapatan Asli Daerah utamanya disebabkan oleh turunnya pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah akibat kegiatan ekonomi yang tidak dapat berjalan stabil sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Berdasarkan analisis kinerja pendapatan masa lalu tersebut maka dapat diproyeksikan pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan di masa depan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. 12 Proyeksi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	PENDAPATAN	1.461.332.092.084,00	1.444.827.912.265,42	1.479.126.408.188,91	.504.801.996.060,84	1.531.121.408.159,25	1.557.103.144.776,85
1.1	Pendapatan Asli Daerah	63.056.696.948,00	49.256.696.896,00	50.656.696.896,00	52.156.696.896,00	53.656.696.896,00	54.156.696.896,00
1.1.1	Pajak daerah	12.058.816.212,00	13.158.816.212,00	14.358.816.212,00	15.658.816.212,00	16.858.816.212,00	17.058.816.212,00
1.1.2	Retribusi daerah	445.024.224,00	545.024.200,00	745.024.200,00	945.024.200,00	1.245.024.200,00	1.545.024.200,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	18.276.351.984,00	8.276.351.984,00	8.276.351.984,00	8.276.351.984,00	8.276.351.984,00	8.276.351.984,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	32.276.504.528,00	27.276.504.500,00	27.276.504.500,00	27.276.504.500,00	27.276.504.500,00	27.276.504.500,00
1.2	Pendapatan Transfer	1.319.223.991.220,00	1.323.544.777.658,78	.355.723.009.205,17	1.379.171.130.056,21	.403.255.800.463,54	.427.995.447.973,14
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.275.731.153.142,00	1.287.697.011.200,00	1.319.516.765.081,80	1.342.602.823.491,61	1.366.321.810.833,29	1.390.692.118.446,59
1.2.1.1	Dana perimbangan	924.592.403.142,00	936.558.261.200,00	968.378.015.081,80	991.464.073.491,61	1.015.183.060.833,29	1.039.553.368.446,59
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	631.851.032.142,00	650.596.031.990,00	670.113.912.949,70	690.217.330.338,19	710.923.850.248,34	732.251.565.755,79
1.2.1.1.1	DBH	14.294.392.142,00	14.512.692.790,00	14.948.073.573,70	15.396.515.780,91	15.858.411.254,34	16.334.163.591,97
1.2.1.1.1.2	DAU	617.556.640.000,00	636.083.339.200,00	655.165.839.376,00	674.820.814.557,28	695.065.438.994,00	715.917.402.163,82
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	292.741.371.000,00	285.962.229.210,00	298.264.102.132,10	301.246.743.153,42	304.259.210.584,96	307.301.802.690,81
1.2.1.1.2.1	DAK Fisik	164.780.943.000,00	150.973.468.210,00		0	0	0
1.2.1.1.2.2	DAK Non Fisik	127.960.428.000,00	134.988.761.000,00		0	0	0
1.2.1.2	Dana insentif daerah	0	0	0	0	0	0

No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1.2.1.3	Dana otonomi khusus	0	0	0	0	0	0
1.2.1.4	Dana keistimewaan	0	0	0	0	0	0
1.2.1.5	Dana desa	351.138.750.000,00	351.138.750.000,00	351.138.750.000,00	351.138.750.000,00	351.138.750.000,00	351.138.750.000,00
1.2.2	Tranfer antar-daerah	43.492.838.078,00	35.847.766.458,78	36.206.244.123,37	36.568.306.564,60	36.933.989.630,25	37.303.329.526,55
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil	43.492.838.078,00	35.847.766.458,78	36.206.244.123,37	36.568.306.564,60	36.933.989.630,25	37.303.329.526,55
1.2.2.2	Bantuan keuangan	0	0	0	0	0	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.051.403.916,00	72.026.437.710,64	72.746.702.087,75	73.474.169.108,62	74.208.910.799,71	74.950.999.907,71
1.3.1	Hibah	0	72.026.437.710,64	72.746.702.087,75	73.474.169.108,62	74.208.910.799,71	74.950.999.907,71
1.3.2	Dana darurat	0	0	0	0	0	0
1.3.3	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	79.051.403.916,00	0	0	0	0	0

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Berdasarkan analisis kinerja pendapatan masa lalu, pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 diperkirakan mengalami trend kenaikan setiap tahunnya dengan sumber pendapatan terbesarnya adalah pendapatan transfer. Kebergantungan Kabupaten Nias Selatan pada pendapatan transfer menyebabkan kondisi perekonomian Kabupaten Nias Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menyentuh angka -2,07% akibat pandemi Covid-19 yang dalam penanganannya sempat melumpuhkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Kebijakan keuangan Pemerintah pusat lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan kegiatan pemulihan ekonomi nasional sehingga pertumbuhan pendapatan transfer Kabupaten Nias Selatan diperkirakan melambat. Keadaan ini mengharuskan Kabupaten Nias Selatan untuk meningkatkan PAD. Peningkatan PAD dilakukan dengan memaksimalkan pemungutan pajak maupun retribusi daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat. PAD yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah juga perlu diupayakan agar memberi sumbangan maksimal pada PAD.

Strategi pengelolaan pendapatan daerah untuk mencapai pendapatan sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah adalah melalui kebijakan:

- 1. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk membuka kemungkinan perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi;
- 2. Meningkatkan PAD dengan *Intensifikasi* dan *Ekstensifikasi* sumbersumber pendapatan diantaranya melalui penyuluhan peningkatan

kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi, penagihan pajak dan retribusi serta pemanfaatan potensi daerah untuk menghasilkan sumber pajak dan retribusi baru;

- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengembangkan sarana dan fasilitas umum sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- 4. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang berpotensi untuk mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat (bertambahnya insentif ke daerah) sesuai ketentuan yang berlaku.

# 3.3.1.2. Proyeksi Belanja

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terus meningkat tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 17,98%. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menjadi pos belanja terbesar mencapai 48% pada tahun 2020.

Dengan berpedoman pada hasil analisis belanja daerah di masa lalu dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, maka disusun proyeksi belanja daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3. 13
Proyeksi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 - 2026

	14H4H 2021 2020							
No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
2	BELANJA	1.549.477.546.628,80	1.454.827.912.265,42	1.491.126.408.188,91	1.520.801.996.060,84	1.547.121.408.159,25	1.575.103.144.776,85	
2.1.	Belanja Operasi	766.003.670.194,80	711.879.346.714,00	735.146.106.587,95	791.896.126.764,01	797.796.277.141,53	807.128.186.283,64	
2.1.1	Belanja Pegawai	387.891.398.666,65	394.246.956.399,00	413.959.304.218,95	428.626.847.441,15	456.390.132.901,39	479.209.639.546,46	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.433.433.198,15	206.442.673.604,36	217.276.821.281,26	193.631.831.214,24	211.033.954.440,43	226.804.267.829,47	
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0	0	0	0	0	
2.1.4	Belanja Subsidi	3.207.201.300,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
2.1.5	Belanja Hibah	15.555.929.930,00	75.026.437.710,64	77.746.702.087,75	148.474.169.108,62	109.208.910.799,71	79.950.999.907,71	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.915.707.100,00	33.163.279.000,00	23.163.279.000,00	18.163.279.000,00	18.163.279.000,00	18.163.279.000,00	
2.2	Belanja Modal	298.118.808.474,00	252.318.823.294,22	265.560.559.343,76	236.661.127.039,63	257.930.388.760,52	277.205.216.236,01	
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.063.638.000,00	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.325.000.000,00	
2.4	Belanja Transfer	484.291.429.960,00	487.304.742.257,20	487.094.742.257,20	487.244.742.257,20	487.394.742.257,20	487.444.742.257,20	
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	750.384.044,00	1.370.384.041,20	1.510.384.041,20	1.660.384.041,20	1.810.384.041,20	1.860.384.041,20	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	483.541.045.916,00	485.934.358.216,00	485.584.358.216,00	485.584.358.216,00	485.584.358.216,00	485.584.358.216,00	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Belanja daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 sebagai tahun awal adalah sebesar Rp.1.549 miliar. Sebagai imbas keadaan

ekonomi nasional yang sedang melemah akibat pandemi Covid-19, belanja daerah diproyeksikan akan turun pada Tahun 2022 menjadi Rp.1.454 miliar kemudian secara perlahan terus naik setiap tahunnya hingga mencapai sebesar Rp.1.575 miliar pada tahun 2026.

Kabupaten Nias Selatan akan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja daerah strategi mengarahkan belanja daerah untuk mendanai sektor-sektor prioritas seperti pariwisata, pertanian dan perikanan. Ketiga sektor ini merupakan sektor unggulan Kabupaten Nias Selatan dan memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perekonomian. Dalam hal ini dibutuhkan peran Pemerintah untuk membenahi fasilitas pariwisata, pertanian dan perikanan untuk selanjutnya dapat dikelola oleh masyarakat. Belanja daerah juga diarahkan untuk membangun infrastruktur secara merata di wilayah Kabupaten Nias Selatan. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah sehingga kebutuhan dasar masyarakat seperti Pendidikan dan Kesehatan dapat terpenuhi.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diproyeksikan masih menjadi pos anggaran terbesar dalam struktur belanja daerah. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diproyeksi semakin meningkat di masa depan karena pada tahun 2019 dan 2020 Kabupaten Nias Selatan tidak melaksanakan kegiatan penerimaan pegawai (ASN). Tidak terlaksananya kegiatan penerimaan ASN di tahun sebelumnya dinilai dapat meningkatkan kebutuhan ASN pada tahun berikutnya karena adanya pengurangan jumlah pegawai akibat pensiun, pindah tugas maupun karena alasan lain.

# 3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan

Proyeksi Pembiayaan dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi pembiayaan periode tahun 2016-2020 serta asumsi-asumsi kebijakan penggunaan anggaran dimasa mendatang. Proyeksi anggaran pembiayaan daerah kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 14
Proyeksi Anggaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021 – 2026

1411411 2021 2020								
No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
3	PEMBIAYAAN NETTO	12.301.886.066,95	10.000.000.000,00	12.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	18.000.000.000,00	

No.	Uraian	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	13.193.699.252,95	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.1.1	Silpa	13.193.699.252,95	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	891.813.186,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah	891.813.186,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-		-	-	-	-

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2021 sebagai tahun awal adalah sebesar Rp.13,193 miliar diproyeksi mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp.12 miliar dan selanjutnya diproyeksi akan meningkat setiap tahun hingga mencapai Rp.20 miliar pada tahun 2026. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2021 sebagai tahun awal sebesar Rp.891,813 juta diproyeksikan akan naik pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.2 miliar setiap tahun sampai tahun 2026.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Nias Selatan setiapnya tahunnya mulai dari tahun 2022 s/d 2026 direncanakan sebesar 2 miliyar rupiah yang dialokasikan pada penyertaan modal daerah di Bank Sumut.

### 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah di masa depan sehingga dapat ditentukan alokasi untuk pendanaan program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3. 15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 - 2026

No.	Uraian	Proyeksi							
NU.	Dialan	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)			
1	Pendapatan	1.444.827.912.265,42	1.479.126.408.188,91	1.504.801.996.060,84	1.531.121.408.159,25	1.557.103.144.776,85			
2	Penerimaan Pembiayaan	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	20.000.000.000,00			
	Total penerimaan	1.456.827.912.265,42	1.493.126.408.188,91	1.522.801.996.060,84	1.549.121.408.159,25	1.577.103.144.776,85			
	Dikurangi:								
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	998.066.415.367	1.010.289.027.563,90	1.092.509.037.806,97	1.080.157.064.958,30	1.073.093.660.711,37			
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	458.761.496.898,58	482.837.380.625,02	430.292.958.253,87	468.964.343.200,95	504.009.484.065,48			

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Berdasarkan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas maka ditentukan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 16
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Nias
Selatan Tahun 2022 - 2026

No.	Uraian	Proyeksi							
NO.		2022	2023	2024	2025	2026			
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	458.761.496.898,58	482.837.380.625,02	430.292.958.253,87	468.964.343.200,95	504.009.484.065,48			
	Prioritas I	334.941.577.479,42	340.480.146.192,57	295.665.661.851,42	322.723.455.245,15	350.167.025.539,78			
	Prioritas II	83.628.508.000,00	103.656.271.310,00	100.987.296.399,65	106.073.286.865,65	112.914.317.188,63			
	Prioritas III	40.191.411.419,16	38.700.963.122,45	33.640.000.002,80	40.167.601.090,16	40.928.141.337,07			

Sumber: BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2021

Adapun ketentuan prioritas anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 157 dan Pasal 158 adalah sebagai berikut:

- a. **Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
- c. **Prioritas III,** dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Halaman: III-27

#### BAB IV

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun mendatang. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi *real* saat perencanaan dibuat.

Analisa permasalahan dan isu-isu strategis dilakukan dengan pertimbangan kondisi objektif daerah dan melihat perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (2016-2021) dan tentu di rumuskan juga berdasarkan hasil telaah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Penyelesaian permasalahan pembangunan merupakan esensi dari tujuan dari pembangunan daerah yaitu kesejahteran masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Begitu juga dengan isu – isu strategis baik dalam skala regional, provinsi, nasional maupun internasional harus di analisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan yang tepat sasaran. Selain itu dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah harus merujuk pada permasalahan pembangunan, dimana permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks. Dengan kebijakan yang tepat maka dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan secara efektif dan efisien.

#### 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Proses pembangunan sangat bergantung dengan apa yang dimiliki daerah tersebut sebagai modal dalam penyokong keberhasilan pembangunan. Namun pada perjalanannya pembangunan daerah juga sering menghadapi berbagai permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan dalam mencapai target-target pembangunan. Permasalahan tersebut, baik yang telah dan tengah berlangsung, ataupun permasalahan yang dapat terjadi pada masa yang akan datang harus diidentifikasi. Oleh karena itu, telaah dan analisis terhadap berbagai isu strategis dalam

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, perlu diawali dengan melakukan identifikasi permasalahan pembangunan melalui hasil capaian indikator kinerja pemerintah periode sebelumnya, observasi lapangan, wawancara mendalam, *Focused Group Discussion (FGD)* dengan berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Nias Selatan, serta dengan menganalisis RPJMN tahun 2019-2024, RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2006-2026 dan RTRW Kabupaten Nias Selatan tahun 2014-2034.

Berdasarkan evaluasi RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 dan hasil analisis dari data informasi setiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dirumuskan permasalahan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan adalah:

- 1. Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang belum optimal,
- 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM),
- 3. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah,
- 4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian berdaya saing;
- 5. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi,

Berikut penjabaran permasalahan pembangunan berdasarkan hasil telaahan gambaran umum kondisi pembangunan daerah.

## 1. Kinerja Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang belum optimal

Reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan berkaitan erat dengan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang meliputi upaya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan dan organisasi pemerintah daerah, pembinaan dan pengembangan aparatur, peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan penataan peraturan Perundang-Undangan.

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi modal utama pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai,

begitu juga dengan akuntabilitas kinerja memiliki nilai yang sama dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Hal penting lainnya pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Nias Selatan belum optimal disebabnya adanya ego sektoral sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengukur capaian pembangunan, merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis data yang akurat. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pemahaman tanggung jawab terkait pengelolaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) termasuk evaluasi kinerja dan capaian kinerja, pengaplikasian SAKIP dalam kinerja pemerintahan diharapkan akan mengubah pola kebiasaan ASN agar memiliki kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan adalah peningkatan pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Penertiban administrasi dan pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi hal utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran, baik secara teknis maupun administrasi. Hal ini dibuktikan dengan Opini BPK dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang didapatkan Kabupaten Nias Selatan yang menandakan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan kepentingan tersebut harus memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif tehadap hasil pelayanan yang telah diberikan pemerintah.

Pelayanan yang berbelit-belit, inefisiensi, lambat, tidak ramah dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bentuk rendahnya kualitas pelayanan. Faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik adalah SDM aparatur, organisasi birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang kurang proporsional serta lemahnya implementasi kebijakan dan penerapan prinsip *good governance*.

# 2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Kualitas SDM yang masih relatif rendah di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu masalah penting yang harus segera diatasi, hal ini terlihat pada IPM kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 sebesar 61,89 yang merupakan urutan kelima jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang terlihat pada Grafik 4.1.

Sumatera utara tahun 2020 Sumatera Utara 71,77 Gunungsitoli 69,31 Nias Utara 62,36 Nias 61,93 Nias Selatan 61,89 Nias Barat 61,51 56,00 58,00 60,00 62,00 64,00 66,00 68,00 70,00 72,00

Grafik 4.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi
Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Beberapa masalah yang dimaksud terkait pembangunan sumber daya manusia adalah: belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan; belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat; dan belum optimalnya peran serta perempuan dan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan.

Bidang pendidikan merupakan bidang penting dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, rendahnya kualitas SDM dapat dilihat pada Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 hanya 5.85 tahun atau rata-rata baru mengenyam pendidikan SD. Sementara angka melek hurufnya baru mencapai 70.74% pada tahun 2020. Masih rendahnya pelayanan pendidikan tercermin juga dari masih rendahnya angka partisipasi sekolah SD (92,92), SMP (87,03%) dan SMA (91,47%) serta perguruan tinggi (17.78%). Jumlah sekolah dan guru sebenarnya memadai, tetapi kualitas gedung, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas guru perlu terus ditingkatkan. Untuk peningkatan kualiats SDM, perlu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di tingkat SD, SMP sampai SMA atau SMK. Jadi, tantangan pembangunan lima tahun ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan rata-rata lama sekolah. Nias Selatan berada di peringkat kelima di Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 4.2.

Sumatera Utara

Gunungsitoli

Nias Utara

Nia s

Nias Selatan

Nias Barat

O 2 4 6 8 10 12

Grafik 4.2

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Nias Selatan juga masih sangat kurang atau rendah hal ini dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup Kabupaten Nias Selatan yang berada jauh di bawah jika dibandingkan dengan capaian indikator komposit pembentuk IPM lainnya, terlihat bahwa capaian AHH Kabupaten Nias Selatan sebesar 68,74 pada tahun 2020 dan berada

pada peringkat keenam dari Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang terlihat pada grafik 4.3.

Gunungsitoli 71,19 Nias 69.75 Nias Utara Sumatera Utara 69,10 Nias Barat 68,96 Nias Selatan 68,74 67.50 68.00 68.50 69.00 69.50 70.00 70.50 71.00 71.50

Grafik 4.3

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Selain itu Kabupaten Nias Selatan masih menghadapai masalah keterbatasan jumlah rumah sakit umum, puskesmas, dokter umum dan spesialis, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti laboratorium kesehatan, apotik dan perlengkapan medis lain. Masalah lainnya adalah masih relatif tingginya angka kematian ibu, masih ditemukannya balita gizi buruk, masih ditemukannya endemis malaria dan DBD, masih tingginya penderita penyakit menular, masih tingginya angka kematian bayi akibat masalah gizi selama kehamilan, fasilitas kesehatan dan perlengkapan puskesmas belum merata, termasuk di dalamnya penempatan tenaga kesehatan. Jika dilihat dari rasio pelayanan, banyak tenaga kesehatan berlebih sedangkan disisi lain masih banyak tenaga kesehatan yang kurang bahkan tidak ada.

Jika dilihat pembangunan gender di Kabupaten Nias Selatan, maka terlihat bahwa pencapaian sudah cukup baik dengan besaran Indeks Pembangunan Gender sebesar 87,58. Selain itu, terlihat bahwa angkatan kerja perempuan masih jauh di bawah angkatan kerja laki-laki dimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 69,82 sedangkan TPAK Laki-laki sebesar 84,81. Grafik 4.3 menunjukkan Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se Kepulauan

Nias dan Provinsi Sumatera Utara, dimana Nias Selatan berada di peringkat keempat.

Sumatera utara tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 Nias 90,81 Sumatera Utara 90,67 Kota Gunungsitoli Nias Selatan Nias Barat Nias Utara 79,37 70 75 85 90 95 80

Grafik 4.4
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi
Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

## 3. Rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah,

Infrastruktur daerah merupakan prasayarat penting mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang sangat luas dan terdiri dari berbagai pulau (wilayah kepulauan) masih sangat membutuhkan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, pelabuhan serta sarana prasarana transportasi, baik transportasi darat maupun udara, dan terutama tranportasi laut.

Masih kurangnya jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana daerah tersebut membawa implikasi pada sebagian besar wilayah Kabupaten Nias Selatan masih terpencil, terisolir, terbelakang dan akhirnya menjadi wilayah yang tertinggal. Contohnya adalah Infrakstruktur jalan yang berada di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 sepanjang 1011,68 km dengan kondisi rusak/rusak berat mencapai 375,13 km atau 37,5 persen. Selain itu, masih terdapat panjang jalan yang memiliki jenis permukaan kerikil dan tanah yakni sepanjang 122,38 km dan 225,80 km atau 39,68 persen.

Oleh karena itulah, agar pergerakan orang maupun barang, baik dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan maupun pergerakan ke luar Kabupaten Nias Selatan dapat secara cepat distribusikan dan terbukanya akses pasarnya, maka penambahan dan perbaikan infrastruktur daerah mutlak harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan.

Sementara itu, dari sisi pasokan air bersih, hampir sebagian besar penduduk Kabupaten Nias Selatan masih menggunakan air tanah dengan membuat sumur sendiri atau menggunakan air sungai sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan air bersih. Pelayanan air bersih untuk air minum yang dilayani oleh PDAM Tirtanadi Cabang Teluk Dalam masih sebatas pemenuhan kebutuhan pelanggan Kota Teluk Dalam. Secara rinci masalah infrastruktur Kabupaten Nias Selatan adalah:

- Rendahnya konektifitas dan aksesbilitas antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian
- belum terintegrasinya infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan kecamatan dan antar kecamatan dengan perdesaan
- masih rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi perairan yang menghubungkan antar wilayah kepulauan dan antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan
- masih rendahnya kualitas bangunan fisik pelabuhan-pelabuhan perintis
- Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum masih belum merata di seluruh kecamatan.
- Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air masih belum optimal
- dokumen RTRW yang tidak relevan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
- Masih rendahnya kualitas sanitasi perumahan;
- Masih adanya rumah tidak layak huni

#### 4. Belum optimalnya pembangunan perekonomian berdaya saing

Pembangunan ekonomi adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkeadilan, serta didukung oleh stabilitas ekonomi yang kokoh. Kinerja makro ekonomi bukanlah tujuan utama pembangunan, namun

kondisi makro ekonomi yang kokoh merupakan syarat perlu untuk tercapaianya tujuan pembangunan ekonomi. Kinerja makro ekonomi yang sering dijadikan sebagai indikator yang menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan berada pada titik terendah pada tahun 2020 sebesar 0,61 persen yang disebabkan dampak dari merebaknya Pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang rendah ini menjadi catatan bagi pemerintah daerah dimana perlu adanya penanganan dan pemulihan ekonomi semasa Pandemi Covid-19 yang masih berlanjut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan menduduki peringkat ke 24 pertumbuhan ekonomi terendah di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai wilayah kepulauan, Kabupaten Nias Selatan memiliki wilayah laut yang luas dan pantai yang panjang. Potensi sektor perikanan dan pariwisata laut merupakan modal pembangunan yang penting dari sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan. Potensi wisata laut dari keindahan wilayah pantai dan olah raga selancar (surfing) yang sudah dikenal di manca negara namun belum dikelola dengan baik, sehingga saat ini jumlah wisman yang berkunjung ke Kabupaten Nias Selatan cenderung menurun. Demikian juga halnya dengan potensi pertanian yang merupakan kontributor utama PDRB Kabupaten Nias Selatan sebesar 44,61 persen menjadi pengerak utama ekonomi daerah.

Potensi lain yang belum termanfaatkan dan dikelola dengan baik adalah warisan budaya yang mempunyai nilai historis kultural yakni rumah adat Kabupaten Nias Selatan dan budaya lompat batu. Jika hal ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sektor pariwisata, maka dapat digunakan sebagai penggerak pembangunan ekonomi Kabupaten Nias Selatan, karena sektor pariwisata mempunyai multiplier effect yang tinggi. Oleh karena itulah, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya Kabupaten Nias Selatan secara optimal adalah hal utama yang harus dilakukan dalam proses pembangunan lima tahun ke depan.

#### 5. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi

Salah satu masalah yang masih menjadi upaya dari pemerintah baik itu pemerintah pusat ataupun daerah adalah masalah pengentasan kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Semakin besar angka kemiskinan yang terjadi semakin tinggi pula tingkat kesulitan untuk mengatasinya. Data terakhir yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 53.880 jiwa merupakan penduduk miskin atau sebesar 16,74 persen dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Nias Selatan berada di peringkat keempat. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.4

Sumatera utara tahun 2020 Sumatera Utara 8,75 Gunungsitoli 16,41 Nias 16,6 Nias Selatan 16,74 Nias Utara 25,07 Nias Barat 25,69 5 10 20 25 30 15

Grafik 4.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi
Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Melihat luas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan dan juga rendahnya konektifitas antar daerah, hal ini menyebabkan rendahnya akses kebutuhan dasar bagi masyarakat. Belum lagi aksesibilitas yang masih tergolong sulit dikarenakan kondisi daerah Kabupaten Nias Selatan yang terdiri dari kepulauan dan daerah-daerah terpencil, terjauh dan terisolasi. Sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan sangat terkendala untuk masyarakat. Beberapa faktor inilah yang menyebabkan permasalahan dalam pengentasan kemiskinan Kabupaten Nias Selatan masih harus terus di upayakan dan menjadi fokus pembangunan.

Di Tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka tercatat berjumlah 6.865 orang atau setara dengan 4,15 persen dari total penduduk Kabupaten Nias Selatan. Angka ini mengalami kenaikan dibanding angka pengangguran terbuka yang diperoleh di tahun 2019 yaitu 3.230 orang. Data ini menjadikan Nias Selatan berada di peringkat ke empat dari Kabupaten/Kota Sekepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang ditunjukkan pada Grafik 4.5.

Sumatera Utara

Sumatera Utara

Gunungsitoli

Nias Selatan

Nias Selatan

Nias Barat

1,71

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Grafik 4.6
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi
Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Jika dilihat dari angka partisipasi angkatan kerja, Nias Selatan memiliki 77,14 persen. Hal ini menandakan bahwa ketersediaan lapangan kerja terhadap para angkatan kerja masih terbatas. Selain dapat memicu kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, pengangguran terbuka juga dapat menghambat perencanaan pembangunan pemerintah daerah terkait pembangunan sumber daya manusia dan daya saing daerah. Tingginya angka pengangguran terbuka, bukan hanya disebabkan karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, hal ini juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga minat untuk membangun usaha mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sangat minim.

Dengan masalah-masalah pokok tersebut, maka perekonomian Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi daerah yang rendah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan ekonominya rata-rata masih di bawah 5 persen. Sektor pertanian yang merupakan bagian terbesar dari "kue" ekonomi Kabupaten Nias Selatan yang menyumbang sekitar 44,36 persen dari PDRB Kabupaten Nias Selatan (hampir 50 persen dari PDRB), hanya mampu tumbuh rata-rata di bawah 5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Belum lagi masalah pandemi Covid-19 (Corona Virus Deases 2019) di tahun 2020 masih menjadi permasalahan utama yang memberikan dampak pada laju pertumbuhan ekonomi tak hanya di Kabupaten Nias Selatan namun juga laju pertumbuhan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan adalah 0,61. Memang masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Gunungsitoli dan Provinsi Sumatera Utara yang mengalami minus dalam laju pertumbuhan ekonomi yaitu masing-masing -0,38 dan -1,07. Kaputen Nias Selatan berada di posisi keempat jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Se-Kepulauan Nias dan Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 4.6.

Sumatera utara tahun 2020 Kabupaten Nias 1.8 Kabupaten Nias Barat Kabupaten Nias Utara 1,58 Kabupaten Nias Selatan 0,61 -0.38 Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara -1,07-0,50,5 -1,51,5

Grafik 4.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Kepulauan Nias dan Provinsi
Sumatera utara tahun 2020

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021

Dari data-data yang ditunjukkan di atas, tidak mengherankan jika tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 masih sekitar 16.74 persen, menurun sedikit dibandingkan kemiskinan tahun 2016 yang mencapai 18.60 persen. Permasalahan rendahnya pertumbuhan ekonomi wilayah karena sektor pertanian belum dimanfaatkan secara optimal, hal ini berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Nias Selatan dan tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan. Tidak mengherankan jika Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Nias Selatan menjadi tergolong rendah di Sumatera Utara yakni baru mencapai 59.14 pada tahun 2016 dan 61,86 pada tahun 2020 bandingkan dengan IPM Sumatera Utara yang sudah mencapai 71.77 (tahun 2020).

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan terdapat beberapa Permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
-1	-2	-3	-4
1	Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintah	Kurangnya profesionalisme, kedisiplinan dan rendahnya kinerja pegawai pemerintahan	<ol> <li>Penempatan pegawai yang tidak tepat sesuai dengan keahlian/profesi,</li> <li>kurangnya penerapan Penghargaan dan sanksi bagi pegawai</li> <li>terbatasnya jumlah pegawai yang kompeten</li> <li>belum tersedia dan diterapkannya SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja pemerintahan dan pelayanan public</li> <li>Lingkungan kerja perkantoran,</li> </ol>
2	Sumber daya Manusia	<ol> <li>Tidak dapat         melanjutkan         pendidikan ke         perguruan tinggi yang         berkualitas</li> <li>Rendahnya prestasi         kepemudaan dan olah         raga serta Kurangnya         pelestarian seni         budaya</li> <li>tingginya angka         stunting (gizi)</li> </ol>	sarana dan prasarana yang kurang memadai  9. banyak masyarakat tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan sampai perguruan tinggi  10. kurangnya dukungan dan peran pemerintah dalam melaksanakan even olahraga dan seni budaya  11. kurangnya asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita  12. Kurangnya penerapan Penghargaan dan sanksi

No Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<ol> <li>Manajemen dan pelayanan kependidikan yang masih lemah</li> <li>Kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang masih rendah</li> <li>Rendahnya minat baca</li> <li>Manajemen dan pengelolaan kesehatan yang jauh dari maksimal</li> <li>Pelayanan kesehatan yang belum sesuai standar</li> </ol>	kepada tenaga pendidik dan kependidikan  13. Rendahnya kompetesi pendidik  14. Belum meratanya sebaran tenaga pendidik dan kependidikan  15. Lemahnya Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan/pemeliharaan prasarana pendidikan.  16. kurangnya ketersediaan sarana pendidikan  17. kurangnya sarana dan prasarana pendukung budaya baca  18. Kurangnya penerapan Penghargaan dan sanksi kepada tenaga kesehatan  19. tidak lengkapnya fasilitas kesehatan dan alat kesehatan serta obat-obatan  20. tidak lengkapnya tenaga kesehatan esensial khususnya dokter spesialis
3 Infrastruktur wilayah	<ol> <li>Pembangunan lintas         OPD yang belum         tematik, holistik,         terintegrasi dan         spasial</li> <li>rendahnya konektifitas         dan aksesbilitas antar         wilayah pemukiman,         pusat ekonomi,         pendidikan,         kesehatan, pariwisata         dan pertanian</li> <li>Pengembangan dan         pengelolaan sumber         daya air masih belum         optimal</li> <li>masih banyaknya         rumah tangga yang         belum memiliki rumah         layak huni dan akses         air minum serta         sanitasi permukiman         yang layak</li> <li>Masih banyak desa         yang belum teraliri         listrik</li> </ol>	<ol> <li>kurangnya koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas OPD</li> <li>Masih banyak jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang belum terbangun dan dalam kondisi rusak yang menghubungkan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian</li> <li>Masih kurangnya moda transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran dengan kapal besar masih jarang</li> <li>Kurangnya jumlah jaringan irigasi, kurangnya pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi</li> <li>Meningkatnya kebutuhan air bersih yang tidak disertai dengan peningkatan sumber air.</li> <li>rendahnya layanan penyediaan rumah layak huni dan air minum</li> <li>belum semua desa dapat diakses dengan roda 4, lokasi di kepulauan dan geografis</li> </ol>

Halaman : IV-14

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4	Perekonomian Masyarakat	<ol> <li>masih rendahnya         Produksi dan         Produktifitas         Pertanian dan         peternakan untuk         kebutuhan pangan         lokal</li> <li>Masih rendahnya         Produksi dan         Produktifitas         Perikanan</li> <li>Belum optimalnya         pengembangan dan         pengelolaan cagar         budaya dan Kawasan         Strategis Pariwisata</li> <li>Terbatasnya Lapangan         pekerjaan dan         tingginya angka         pengangguran</li> </ol>	<ol> <li>belum terpetakannya lokasi pertanian unggulan daerah</li> <li>masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian, perkebunan dan peternakan (benih,obat-obatan,pupuk, alsintan)</li> <li>masih kurangnya pengairan sawah</li> <li>kurangnya pengawasan pendistribusian dan kualitas pupuk bersubsidi</li> <li>belum terpetakannya bidang perikanan</li> <li>Masih kurangnya sarana dan prasarana perikanan</li> <li>belum tertatanya kawasan cagar budaya dan objek wisata sebagai destinasi wisata dengan baik</li> <li>terbatasnya partisipasi swasta (investor) dalam perekonomian wilayah</li> <li>produktifitas UMKM yang terbatas dan kurangnya inovasi</li> <li>kurangnya jiwa berwira usaha</li> </ol>
5	Kemiskinan dan pengangguran	<ol> <li>Pendidikan yang masih rendah mengakibatkan kemampuan pegembangan diri terbatas</li> <li>Minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran</li> </ol>	<ol> <li>Rendahnya taraf Pendidikan</li> <li>Rendahnya derajat / mutu Kesehatan masyarakat</li> <li>Terbatasnya lapangan Pekerjaan</li> </ol>

#### 4.2. Isu-isu Strategis

### 4.2.1. Isu-isu Strategis pada Tataran Global

Isu-isu strategis pada level global maupun nasional jika diamati dan ditelaah secara seksama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap isu-isu strategis pada level lokal seperti di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Beberapa isu global dan nasional yang perlu dicermati dalam menelaah isu-isu strategis Kabupaten Nias Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Ketidakpastian perekonomian global yang terjadi selama beberapa tahun belakangan dan juga diprediksi akan menjadi tantangan dalam

Halaman: IV-15

beberapa tahun kedepan yang disebabkan dari beberapa peristiwa perekonomian dunia seperti terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok akibat kebijakan proteksionisme ekonomi AS dan proses penyesuaian (rebalancing) ekonomi Tiongkok, ekskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan masih belum terselesaikannya konflik Laut Cina Selatan serta penyebaran virus corona baru (SARS-Cov-2) penyebab pandemi COVID-19 membuat prediksi dan proyeksi dari International Monetery Fund (IMF) terhadap pertumbuhan ekonomi global tidak hanya melambat namun menunjukkan trend negatif. Penyebaran virus baru ini membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah (lockdown) dan kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik kepada warganya. Kebijakan tersebut tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian karena beberapa sektor perekonomian tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya tampak pada banyak hal, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kenaikan harga beberapa komoditas. Pandemi COVID-19 juga membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat dan negara menjadi lebih tinggi guna memberikan perlindungan kesehatan dan menjaga stabilitas sektor ekonomi yang terdampak dari terjadinya pandemi. Beberapa kebijakan solutif yang telah dilakukan banyak negara dalam penangan pandemi ini seperti mendorong percepatan vaksinasi masal vaksin COVID-19 pada masyarakat guna mencapai herd imuniti, penerapan protokol kesehatan sebagai gaya hidup baru dan pengucuran stimulus fiskal perlu didorong lebih sekaligus terarah menciptakan landasan pemulihan cepat guna perekonomian global yang berkelanjutan.

Isu global yang tidak kalah penting dipertimbangkan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 adalah Revolusi Industri 4.0, saat ini suka tidak suka kita sudah hidup di era revolusi Industri 4.0 satu era yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya, karena ada tantangan yang harus kita hadapi sekarang ini. Bahwa pada masa lampau, setiap upaya pembangunan ekonomi, setiap 1% pertumbuhan ekonomi, mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 200.000. Tetapi saat ini di era revolusi Industri 4.0 setiap pertumbuhan ekonomi 1% hanya mampu menciptakan kesempatan kerja sebanyak 75.000. Beberapa dampak yang

terjadi dan kita alami saat ini dari perkembangan revolusi industry 4.0 dan ekonomi digital yaitu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (e-learning) pada dunia pendidikan, e-government pada pemerintahan dan birokrasi, fintech dan e-commerce untuk pengembangan UMKM dan penggunaan Artificial Intelligence (AI) pada dunia industri. Untuk menghadapi perkembangan tersebut ini maka perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia yang melek terhadap kemajuan teknologi digital dan mempersiapkan tenaga kerja andal dan keterampilan khusus untuk bisa menerapkan teknologi terkini yang terus bergerak maju dan mengalami perubahan sehingga tidak menjadi korban dari peningkatan peradaban dunia.

Saat ini terdapat beberapa isu Internasional terkait lingkungan yang tidak kalah penting menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD Nias Selatan tahun 2021-2026 yang dianggap dapat berdampak terjadinya bencana baik alam dan non alam seperti efek gas rumah kaca yang warming menyebabkan Pemanasan Global atau global meningkatnya emisi gas karbondioksida, metana dan CFC sehingga terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, peningkatan hujan dan banjir, peningkatan permukaan air laut, gangguan pemukiman penduduk, hilangnya keanekaragaman hayati, migrasi fauna dan hama penyakit, gangguan produktifitas pertanian dan peningkatan resiko wabah penyakit lingkungan. Untuk menghadapi isu lingkungan tersebut berbasis diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi merupakan tahun transisi dari berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu:

pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan.

SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang dalam menjadi pondasi pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global sebagai berikut : 1). Tanpa Kemiskinan (No Poverty); 2). Tanpa Kelaparan (Zero Hunger); 3). Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (Good Health and Wll-being); 4). Pendidikan Berkualitas (Quality Education); 5). Kesetaraan Gender (Gender Equality); 6). Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation); 7). Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy); 8). Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (Decent Work and Economic Growth); 9). Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Industry, Innovation and Infrastructure); 10). Mengurangi Kesenjangan (Reduced Inequalities); 11). Keberlanjutan Kota dan Komunitas (sustainable Cities and Communities); 12). Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production); 13). Aksi Terhadap Iklim (Climate Action); 14). Kehidupan Bawah Laut (Life Below Water); 15). Kehidupan di Darat (Life on Land); 16). Institusi Keadilan yang Kuat dan Kedamaian (Peace, Justice and Strong Institutions); 17). Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnership for the Goals).

Berdasarkan tujuan tersebut, Kabupaten Nias Selatan memiliki keinginan kuat untuk turut berperan aktif dalam pelaksanaan SDGs. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 terkait tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah memiliki unsur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

#### 4.2.2. Isu-isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Ada dua hal yang menjadi isu nasional yang perlu ditelaaah yaitu Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Salah satu poin penting dalam melihat dampak COVID-19 pada pembangunan Nasional adalah terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi semasa Pandemi COVID-19. Hal tersebut juga memicu perekonomian di daerah yang mengalami kontraksi, Penurunan pertumbuhan ekonomi hingga ke level pertumbuhan ekonomi negatif menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan percepatan penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi masyarakat selama Pandemi berlangsung.

Isu-isu strategis pada level nasional, jika diamati dan ditelaah secara seksama dapat berpengaruh secara signifikan terhadap isu strategis Kabupaten Nias Selatan dapat dirinci sebagaimana dibawah ini:

- 1. Tidak tercapainya target pendapatan APBN dan meningkatnya pembiayaan hutang Indonesia yang berdampak pada menurunnya dana transfer ke daerah.
- 2. Pembangunan infrastruktur oleh negara yang diprioritaskan pada pembangunan kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan lumbung pangan (food estate).
- 3. Reformasi birokrasi yang mengharapkan lembaga pemerintahan semakin sederhana, efisien dan cepat dalam memberikan pelayanan.
- 4. Disahkannya Undang-undang omnibuslaw cipta lapangan kerja untuk mendorong investasi.
- 5. Pengentasan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi.
- 6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui reformasi sistem kesehatan dan reformasi sistem Pendidikan.
- 7. Penanganan, pemulihan serta peningkatan ketahanan kondisi sosial ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

Dalam rangka ikut mengatasi dan menyelaraskan dengan isu-isu level pembangunan pada nasional, penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan sepanjang Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, diarahkan untuk mencapai berbagai target indikator sasaran, antara lain (i) menurunkan angka kemiskinan; (ii) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; (iii) meningkatkan kuantitas dan kualitas bidang pendidikan, kesehatan, tata ruang, perumahan rakyat yang layak huni, moda transportasi dan ketahanan pangan; (iv) menciptakan lapangan kerja baru, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (v) mengupayakan secara maksimal kualitas ekosistem lingkungan hidup; (vi) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; (vii) menciptakan kondisi berkelanjutan, berkeadilan wilayah tertib, nyaman dan aman; dan (viii) terlaksananya penegakan hukum yang professional; (ix) serta penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19

#### 4.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 yaitu tahap pemantapan "Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh" menuju pencapaian "Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik". Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang dihadapi serta isu – isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu:

#### "Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat"

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Halaman: IV-20

#### • Misi Pertama:

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

#### Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.

#### • Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

#### • Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

#### • Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, danberadab. Pada RPJMD Sumatera Utara ini, tujuan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan ke depan adalah:

- a. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, yang dicapai dengan sasaran pembangunan:
  - i. Meningkatnya ketersediaan sandang pangan;
  - ii. Meningkatnya rumah yang layak;
  - iii. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
  - iv. Meningkatnya kesehatan yang prima;
  - v. Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan;
  - vi. Meningkatnya keterjangkauan harga;

- vii. Meningkatnya konektifitas infrastruktur;
- viii. Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan;
  - ix. Meningkatkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan kebudayaan daerah;
  - x. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender; dan
  - xi. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pemerintahan, politik dan pergaulan, yang dicapai dengan sasaran pembangunan:
  - i. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
  - ii. Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi; dan
  - iii. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

### 4.2.4. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Nias Selatan

RPJPD Kabupaten Nias Selatan sudah memasuki periode ke empat dari pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, telaahan ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai upaya memastikan setiap visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah sudah terlaksana dengan baik. Visi dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan adalah:

# "Masyarakat Nias Selatan yang beriman, berbudaya, berkualitas dan sejahtera"

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan tersebut ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi normanorma hukum dan nilai-nilai budaya
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif, memiliki etos kerja kompetitif dalam ilmu pengetahuan, informasi dan teknologi, melalui mendidikan formal dan informal

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

- 4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan perekonomian rakyat yang kompetitif
- 5. Mewujukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, melalui penguatan otonomi daerah serta bebas KKN
- 6. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat

#### Pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan diarahkan pada:

- 1. Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh, diarahkan untuk:
  - a. Memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta pariwisata
  - b. Menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi dan sertifikasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan, menuju terwujudnya swasembada pangan
  - c. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penganggulangan kemiskinan
  - d. Mendayagunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, pertanian, perkebunan dan perikanan, harus dikelola secara rasional, optimal, efisien dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
  - e. Mengelola SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, untuk dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal
  - f. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan
  - g. Meningkatkan nilai perekonoiman rakyat dengan pemanfaatan sumber daya alam tropis dan khas
  - h. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi untuk menjadi pelaku ekonomi daerah
  - i. Meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah

- j. Membangun Badan Usaha Milik Daerah yang handal, produktif dan kompetitif.
- 2. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana daerah, diarahkan untuk:
  - a. Membangun jaringan infrastruktur yang lebih baik sampai ke pedesaan dan sentra-sentra ekonomi masyarakat
  - b. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara yang lebih baik
  - c. Pembangunan transportasi untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan sebagai sarana mobilitas masyarakat, barang dan jasa
  - d. Penanganan kejadian bencana alam dengan cepat, tepat dan terkoordinasi
  - e. Pembangunan ketenaga-listrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan
  - f. Pembangunan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan kelestarian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai daerah resapan air
  - g. Pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan, memadai, layak huni dan terjangkau daya beli masyarakat serta didukung srana dan prasarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien dengna memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup
  - h. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi pertanian dan perkebunan di kawasan perdesaan
  - i. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas
  - j. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas
  - k. Peningkatan jaringan telekomunikasi yang merata dan berkualitas
  - 1. Peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintah
- 3. Mewujukan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius, diarahkan untuk:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompetitif
- b. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar
- c. Peningkatan jangkauan layanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, termasuk pemberdayaan sosial tepat guna
- d. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup
- f. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan
- g. Meningkatkan keurukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang-rasa dan harmonis
- h. Pemantapan jati diri Ononiha (Orang Nias) untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, dan modern
- i. Mengembangkan budaya inofatif yang berorientasi IPTEK
- j. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil bahagia dan berkualitas
- k. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan
- Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindakan kekerasan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penguatan kelembagaan

- dan jaringan pengarusutamaan gender serta kesediaan data dan statistik gender
- m. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya olah raga serta prestasi olah raga di kalangan masyarakat
- n. Pengembangan kepariwisataan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah
- o. Peningkatan peran BUMD yang turut meningkatkan PAD
- 4. Mewujudkan Pemeirntah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien, diarahkan untuk:
  - a. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparat daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah
  - b. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan
  - c. Memperkuat peran masyarakat sipil
  - d. Memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah
  - e. Mewujudkan batas wilayah pemerintahan daerah, kecamatan, desa dan kelurahan secara permanen
  - f. Menjamin kebebasan media dalam mengkomunikasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat
  - g. Meningkatkan penegakkan supremasi hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif
  - h. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan
  - i. Merespon aspirasi masyarakat untuk penataan wilayah melalui Pemekaran Desa, Kecamatan dan Kabupaten
  - j. Membina hubungan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga, instansi vertikal dalam negeri dan lembaga-lembaga pemerintah luar negeri dalam menggali, mengelolah dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki

#### 4.2.5. Isu-Isu Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan

Setelah menemu kenali, menelaah dan menganalisis masalahmasalah pembangunan yang selama ini muncul di Kabupaten Nias Selatan serta mempertimbangkan tantangan utama pembangunan nasional dan isu-isu global, sub bab ini akan merumuskan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Nias Selatan lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis Pembangunan Kabupaten Nias Selatan dirumuskan dalam rangka ikut mengatasi tantangan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Agar isu-isu strategis yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 dapat berkontribusi dalam menyelesaikan isu-isu strategis nasional, maka suatu masalah dirumuskan menjadi isu strategis, jika:

- 1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- 2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- 3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat, baik pada level Kabupaten Nias selatan, Provinsi maupun pada level nesional;
- 4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional
- 5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
- 6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Berdasarkan hasil telaah dan analisis data dan informasi yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang adalah:

## 1. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan

Menciptakan kultur dan karakter yang jujur, transparan dan bersih dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), melayani masyarakat, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara pada penyelenggaraan pemerintahan merupakan syarat utama reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan pada elemen birokrasi diantaranya perubahan pada kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi diarahkan pada penyederhanaan birokrasi dan upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik, (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), serta bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan harapan bahwa pemerintah akan mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu memberi pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel kepada masyarakat.

### 2. Peningkatan Kualitas SDM melalui peningkatan pelayanan dasar

Kualitas SDM dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen penting dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Dengan tingkat SDM yang masih relative rendah maka diperlukan percepatan peningkatan pelayanan dasar dalam pendidikan dan kesehatan secara merata dan terjangkau. Rendahnya kualitas SDM Kabupaten Nias Selatan berhubungan dengan permasalahan pokok antara lain rendahnya akses dan mutu pendidikan, rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan rendahnya pendapatan per kapita, sehingga pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas perlu mendapat perhatian khusus.

Pada bidang pendidikan tantangan utama yang dihadapi adalah mutu pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini disebabkan beberapa masalah pokok yaitu keterbatasan kompetensi, dan kualifikasi pendidikan tenaga guru, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama laboratorium, meubelair dan MCK, masih banyaknya anak usia 3-6 tahun yang belum terlayani lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanakkanak, serta masih adanya penduduk buta huruf pada usia di atas 15 tahun.

Dalam lima tahun ke depan, peningkatan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah hingga ke level sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas, serta penyediaan tenaga-tenaga yang terampil dalam budidaya pertanian dan perkebunan, perikanan dan pariwisata melalui bantuan beasiswa pemeritah daerah.

Pada bidang kesehatan tantangan utama yang dihadapi adalah mutu pelayanan kesehatan yang masih rendah dan dikeluhkan oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu masih ditemukan permasalahan gizi buruk dan gizi kurang pada balita, masih cukup tingginya angka kematian ibu melahirkan, masih banyaknya masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah rumah sakit umum, Puskesmas, dokter umum dan spesialis, kurangnya sarana dan kesehatan seperti laboratorium kesehatan, apotik prasarana perlengkapan medis lain. Masalah lainnya adalah fasilitas kesehatan dan perlengkapan Puskesmas belum merata, termasuk di dalamnya penempatan tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan berlebih jika dilihat dari rasio pelayanan, di satu sisi masih banyak tenaga kesehatan yang kurang bahkan tidak ada.

# 3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastrutur untuk Konektivitas Wilayah dan Pemerataan Pembangunan

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir mempengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi serta membuka keterisoliran wilayah.

Meningkatkan dan membuka jalur transportasi di darat, berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat kegiatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pertanian dan desa serta kecamatan, menghubungkan transportasi laut dalam meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau, serta mengembangkan transportasi udara dalam membuka peluang percepatan pembangunan sehingga integrasi domestik ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa.

Ketersediaan air bersih tidak hanya menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini, namun juga pada masa yang akan datang. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Rumah tidak layak huni (RTLH) mempunyai dampak langsung dan tidak langsung secara fisik atau non fisik kepada penghuni. Dampak terhadap fisik penghuni RTLH karena kurang mampu memberi perlindungan dari panas dan hujan serta bahaya konstruksi, masalah kesehatan dan ancaman bencana. Dampak terhadap non fisik adalah kecemasan yang berkepanjangan serta berkurangnya produktifitas terhadap penghuninya. Karena kurang produktif maka penghuni RTLH pendapatannya relatif kecil baik sebagai penyedia jasa atau sebagai wiraswasta, dampak ikutannya mereka terjebak dalam lingkaran "setan" kemiskinan yang menerus. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2020 adalah sebanyak 45.798 rumah. Rata-rata penanganan rumah tidak layak huni setiap tahunnya adalah 413 rumah per tahun. Hal ini tentu harus menjadi salah satu fokus pembangunan Kaupaten Nias Selatan.

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Nias Selatan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2019 sebesar 41,86 persen, sedangkan tahun 2020 sebesar 49,55 persen. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pembangunan jaringan irigasi di beberapa lokasi di Kabupaten Nias Selatan. Kawasan pertanian lahan basah yang dimiliki oleh Kabupaten Nias Selatan Seluas total 14.925 Hektar. Kawasan pertanian lahan basah tersebut tersebar di 25 Kecamatan. Pembangunan Jaringan Irigasi ini akan terus ditingkatkan. Karena Kawasan dengan peruntukan pertanian lahan basah ini potensial untuk pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan. Tentu dengan hal tersebut dapat juga meningkatkan pembangunan sektor ekonomi di bidang pertanian

# 4. Pengembangan Perekonomian yang Produktif Berbasis Sumberdaya Alam Dan Warisan Budaya

Halaman: IV-30

Sebagai wilayah kepulauan yang saat ini beberapa kebutuhan pokok masih bergantung pada wilayah luar Pulau Nias, Kabupaten Nias Selatan perlu mewujudkan kemandirian pangan. Tanahnya yang subur menjadi sumber daya alam yang dapat digunakan mencapai kemandirian pangan.

Dalam kerangka rencana pembangunan daerah, upaya mempersiapkan produksi pangan daerah tetap menjadi keharusan yang senantiasa berjalan dan diawasi peningkatannya setiap tahun. Ada dua hal utama yang harus dilakukan yaitu peningkatan produksi tanaman pangan (padi, jagung dan sayur-sayuran) serta tanaman perkebunan seperti kelapa, karet, kakao dan lain-lain. Disamping itu perlu dilakukan kebijakan tata niaga komoditi pangan dan perkebunan untuk menjaga harga agar tetap mendorong produksi padi, jagung dan komoditi perkebunan lainnya.

Wilayah Kabupaten Nias Selatan yang merupakan wilayah kepulauan memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar dan memerlukan upaya yang terintegrasi untuk pemanfaatannya. Pada sektor perikanan tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya produksi dan produktifitas perikanan. Kondisi ini disebabkan oleh potensi perikanan yang belum dipetakan, minimnya sarana dan prasarana perikanan.

Pembangunan sektor perikanan menjadi lebih penting mengingat potensinya yang begitu besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Diperlukan inovasi baru dan pemetaan potensi untuk mengakselerasi peningkatan produktivitas usaha perikanan melalui penerapan teknologi, sistem penyuluhan yang efektif, penyediaan sarana dan prasarana perikanan.

Potensi sektor wisata di Kabupaten Nias Selatan terdapat pada pariwisata bahari (laut dan pantai) serta pariwisata berbasis warisan budaya yaitu situs megalitikum, rumah adat dan lompat batu yang sudah terkenal ke penjuru dunia. Peningkatan pariwisata bahari di Kabupaten Nias Selatan harus terus ditingkatkan dengan memanfaatkan keunggulan laut yang sangat baik untuk olah raga selancar (surfing). Karena selama ini potensi wisata tersebut belum terkelola dengan baik, maka peningkatan pengelolaan wisata bahari dan warisan budaya tersebut mutlak segera untuk dilakukan. Membuat event-event dan promosi wisata bisa yang

mendatangkan wisatawan domestik dan mancanegara perlu dilakukan dengan menggandeng biro-biro perjalanan wisata. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan investasi untuk sektor pariwisata.

Dengan pengelolan yang baik terhadap sektor pariwisata, maka akan tercipta lapangan kerja dan manarik investasi. Dan pada gilirannya sektor ini akan mampu menarik dan mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya yaitu menarik sektor pertanian dan perkebunan menjadi berkembang serta mendorong peningkatan sektor UMKM, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa lainnya.

### 5. Pengentasan Kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan saat ini menjadi isu global sejalan dengan Amanat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini juga merupakan salah satu yang selaras dengan upaya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam menurunkan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan masih relatif tinggi yaitu 16,74 % terhadap total penduduk di tahun 2020. Persoalan kemiskinan bukan saja sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah-daerah yang sulit di jangkau karena rendahnya aksesibilitas antar daerah di Kabupaten Nias Selatan. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi, akses infrastruktur dan tentu juga pola hidup masyarakat.

Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2016 sebesar 5,48 persen menjadi 5,41 persen di tahun 2019. Walaupun pada akhirnya di tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2020 menjadi 6,91 persen. Jumlah Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2020 adalah sebanyak 6.865 Orang. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu 3.230 Orang. Banyaknya jumlah

pengangguran yang tercatat disebabkan karena terbatasnya kesempatan kerja baru serta tidak adanya kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan pasar kerja. Belum lagi pengaruh pandemi covid-19 yang sedikit banyaknya sangat memberi dampak bagi perekonomian masyarakat terutama di Kabupaten Nias Selatan.

### 6. Penanganan dan Pemulihan COVID-19

Saat ini, dunia mengalami fenomena yang serius dimana penyakit virus menyebar ke berbagai negara di dunia dan menyebabkan timbulnya pandemi Covid-19 pada hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi Nias Selatan juga memiliki kasus positif Covid-19 dengan tingkat kesembuhan yang sangat baik. Meskipun begitu, antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu melalui badai Covid-19 ini.

Beberapa sektor yang terdampak akibat terjadinya pandemi ini adalah perekonomian, yang berujung pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat baik dikarenakan kesehatan menurun, tingkat setres yng meningkat, menurunnya pendapatan dan hilangnya pekerjaan akibat PHK, hingga kondisi perekonomian yang tidak stabil. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, diperlukan perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak wabah Covid-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sebelumnya.

## 4.2.6. Penelahaan KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 telah ditetapkan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi kajian berwawasan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk diintegrasikan ke dalam RPJMD. Hal ini merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD.

KLHS RPJMD merupakan dokumen kajian yang disusun untuk mendukung cara perumusan rencana pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berwawasan lingkungan berarti bahwa rencana pembangunan daerah disusun untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan berkelanjutan berarti bahwa rencana pembangunan mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Isu strategis dalam KLHS RPJMD didukung dengan isu lintas, yang terdapat pada beberapa dokumen perencanaan seperti RPJMD (sebelumnya), RTRW, IKPLHD, dan isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat yang terdapat di media online. Kemudian isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan karakteristik isu terhadap keterkaitan TPB.

Berdasarkan analisa tersebut, maka KLHS RPJMD Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 menentukan isu strategis sebagai berikut:

- 1. Infrastruktur dasar, air bersih dan sanitasi
- 2. Kemiskinan
- 3. Kualitas lingkungan hidup dan persampahan
- 4. Tingkat kesehatan dan pelayanan kesehatan
- 5. Ketenagakerjaan (pengangguran dan kesempatan kerja)
- 6. Kualitas SDM Tingkat Pendidikan masyarakat
- 7. Resiko dan mitigasi bencana
- 8. Ketahanan pangan
- 9. Pengembangan ekonomi local
- 10. Tata Kelola pemerintahan
- 11. Pemberdayaan perempuan
- 12. Konservasi Sumber daya air

#### 4.2.7. Penelaahan RPJMD Daerah Lainnya

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah

lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Hubungan antara Kabupaten Nias Selatan dengan kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias juga menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam perumusan RPJMD Kabupaten Nias Selatan mengingat wilayah Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias berbatasan dengan Nias Selatan dan berada pada satu wilayah pulau yang sama. Dua isu penting dalam perumusan RPJMD Kabupaten Nias Selatan yang harus diperhatikan mencakup urusan dengan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias adalah permasalahan bencana alam, terutama gempa dan pengembangan wisata, disamping urusan tentang keterkaitan perdagangan antar wilayah maupun mobilitas orang.

Dalam konteks permasalahan penanggulan bencana, terutama bencana alam sudah sewajarnya dilakukan mitigasi dan penanggulangan bencana secara bersama dan gotong royong dengan Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias. Sementara dalam pengembangan pariwisata, Provinsi Sumatera Utara telah meletakkan pengembangan wisata Pulau Nias sebagai satu kesatuan, sehingga pengembangan wisata di Kabupaten Nias Selatan juga mempertimbangkan pengembangan wisata Pulau Nias secara keseluruhan. Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Identifikasi RPJMD Daerah Lain Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat

NO	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1	Kabupaten Nias	2021-2026	Memperkuat infrastruktur dasar pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisata	
2	Kabupaten Nias Barat	2021-2026	Peningkatan Kerjasama antar daerah dan lembaga	

Halaman: IV-35

#### BAB V

#### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD adalah Rumusan atau gambaran umum mengenai keadaan yang di inginkan di akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi akan selaras dengan keinginan kepala daerah terpilih dalam menentukan arah pembangunan lima tahun kedepan. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut adalah dengan merumuskan Misi dalam RPJMD. Selain itu, untuk menentukan agenda Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan pada periode 2021-2026 dirumuskan juga tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan merupakan gambaran apa yang akan dihasilkan pada lima tahun mendatang. Sasaran merupakan rumusan yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan, berupa hasil pembangunan daerah. Penjabaran Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator. Indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam hal pencapaian Visi. Gambar 5.1 menjelaskan keterkaitan antara Visi, Misi dengan perumusan Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan.

Visi/Misi Hasil Pembangunan Dampak daerah yang diperoleh "Apa yang diubah" dari pencapaian (impact) outcame Tujuan/ Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah Hasil untuk beneficiaries "Apa yang dicapai" (Outcame) tertentu sebagai hasil dari output Produk/barang/jasa "Apa yang dikerjakan dan dihasilkan Kegiatan/ Keluaran adalah yang dihasilkan Sub kegiatan (Output) dari proses/keaiatan (barang) atau dilayani (proses)" yang merupakan output Sumberdaya yang memberikan kontribusi "Apa yang digunakan dalam bekerja" dalam menghasilkan output

Gambar 5.1 Grafik keterkaitan antara Visi, Misi dengan perumusan Tujuan dan Sasaran Program dan Kegiatan

#### 5.1. VISI

Visi dibangun guna mendorong semangat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan serta dalam membangun dan

mewujudkan Kabupaten Nias Selatan yang maju dan sejahtera. Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah pembangunan dan pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Nias Selatan.

Mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang tercantum dalam RPJMD Sumatera Utara Tahun 2019-2023 serta merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dan melanjutkan pembangunan yang belum selesai periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021 maka ditetapkan visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahap – IV Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 – 2026 yaitu:

#### NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA

Penjabaran dari Visi tersebut:

- ➤ Nias Selatan Maju adalah Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.
- ➤ Masyarakat Sejahtera adalah masyarakat yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

#### 5.2. MISI

Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang ditentukan untuk mencapai Visi. Misi ini dirumuskan untuk mewujudkan Visi dengan mengambil Langkah – Langkah yang tidak hanya efektif tapi juga efisien. Visi tersebut dimanifestasikan kedalam 5 (lima) Misi sebagai berikut:

#### MISI:

1. Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan.

- 2. Pemerataan Pembangunan dengan Skala Prioritas.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
- 4. Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif dan Tidak Konsumtif.
- 5. Memberi Rasa Aman dan Nyaman Ditengah Masyarakat.

Kelima misi ini merupakan Penajaman Terhadap **Siwa Sanuwu Sihönö** dengan tetap menjaga konsistensi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dengan penjelasan sebagai berikut:

# 1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan :

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

### 2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas:

Pola pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah dengan selalu menyeimbangkan pertumbuhan pada setiap wilayah. Demi mengejar pemerataan ini maka pembangunan disesuaikan dengan prioritas utama masing-masing wilayah untuk memberikan kesempatan mengejar ketertinggalan

# 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif :

Peningkatan Sumber Daya Manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan kemampuan kerja yang maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan mutu pendidikan baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi serta Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Dengan

berkembangnya Sumber Daya Manusia yang sehat dan memiliki Pendidikan yang tinggi, akan menciptakan Sumber Daya Manusia yang tidak hanya Berdaya saing tapi juga Sumber daya manusia yang kompetitif dan Inovatif.

# 4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif:

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. diantaranya adalah potensi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, potensi produksi pertanian dan potensi wisata. Dengan potensi – potensi yang dimiliki tersebut, upaya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif akan dapat dilakukan.

#### 5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat :

Terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku, ataupun terkait tanggap bencana mengingat Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang termasuk ke dalam daerah rawan bencana. Dengan terpenuhi nya dua hal tersebut, akan dapat menciptakan memberi rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat.

#### 5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah gambaran dari suatu kondisi yang dicapai oleh Kabupaten Nias Selatan dalam waktu lima tahun mendatang. Tujuan Pembangunan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD yang memberi gambaran hasil akhir dari jangka waktu tertentu. Perumusan tujuan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi - Misi dalam RPJMD. Dimana perumusan tujuan kabupaten Nias Selatan dimuat ke dalam lima hal dan ditetapkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu – isu strategis pembangunan daerah di Kabupaten Nias Selatan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah. Hasil pembangunan Daerah tersebut diperoleh dari *outcome* program perangkat daerah. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan pembangunan. Sama

halnya tujuan pembangunan, sasaran juga disusun mengacu pada permasalahan pembangunan dan isu – isu strategis Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan sasaran, merupakan rumusan yang lebih detail dan terukur. Artinya, Sasaran pembangunan ditetapkan sesuai dengan indikator dan target kinerja secara spesifik, terfokus dan terukur. Dimana, perumusannya dapat dicapai dengan indicator-indikator pembangunan atau indikator kinerja. Indikator Kinerja tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan dalam lima tahun mendatang.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan Visi: Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera

				Indikator Tujuan dan		Kondisi		Target Capaian Kinerja Sasaran				
No	Misi	1	Гujuan dan Sasaran	Sasaran	Satuan	Awal	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
1	Menciptakan Kultur serta Karakter yang		udnya Birokrasi dan tata pemerintahan yang bersih ik	Indek Reformasi Birokrasi	Predikat	-	С	С	CC	СС	В	В
	Bersih, Jujur, Transparan dan	1.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	sedang	sedang	sedang	tinggi	tinggi	tinggi
	Berorientasi pada Pelayanan		tata kelola pemerintahan	Nilai SAKIP	Predikat	С	CC	В	В	В	В	В
				Opini BPK	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala	unan pembangunan infrastruktur ktur daerah berkualitas dan		Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	54.36	60.44	64.51	68.09	71.66	75.74	75.74
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	61	65	68	71	75	75	
		Infrastruktur Daerah	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55.72	59.87	64.02	68.17	72.32	76.47	76.47	
				Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	rasio	49,55	50,05	50.45	51.05	51.55	52.04	52.04
				Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76.04	80.40	84.76	89.12	93.48	97.84	97.84
				Rasio Rumah Layak huni	rasio	0.048	0.050	0.052	0.054	0.056	0.057	0.059
3	Meningkatkan   Terwujudnya SDM yang sehat   Sumber Daya   Cerdas dan berdaya saing   Manusia yang			Indeks pembangunan manuasia (IPM)	Poin	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	67,39
	Sehat, Berkualitas,	3.1.1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	53.56	55.83	57.01	58.19	59.38	60.56	60.56
	Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif	3.1.2	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	Poin	72.90	73.69	74.09	74.48	74.89	75.28	75.28
		3.1.3	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Poin	60,71	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	67,13

<b>N</b> -	No Misi		Misi Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan	Satuan Kondisi	Target Capaian Kinerja Sasaran					Kondisi	
NO	Wisi	•	Tujuan dan Sasaran	Sasaran	Satuan	Awa1	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
4	Mengembangkan perekonomian masyarakat yang		udnya perekonomian rakat yang produktif dan f	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.61	0,61- 1,79	1,79- 2,97	2,97- 4,15	4,15- 5,33	5,33	5,33
	produktif dan tidak konsumtif	4.1.1	Meningkatnya perekonomian yang	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1.04- 2.22	2.22- 3.40	3.40- 4.00	4.00- 4.45	4.45	4.45
			produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	1.7	2.4	2.70	3.17	3.64	3.64
5	Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat		udnya rasa aman dan n ditengah masyarakat elatan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
				Indeks Resiko bencana (IRB)	Indeks	202	202	197	197	192	192	192
		5.1.1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
				Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah di atas maka dirumuskan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut:

#### 1) Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, akan berdampak pada pelayanan masyarakat yang lebih maksimal.

Berbagai permasalahan/ hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Lebih lanjut, agar tujuan ini dapat tercapai maka sasaran yang harus dipenuhi adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Dengan Indikator:

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Nilai SAKIP
- c. Opini BPK

# 2) Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang,

papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu infrastruktur juga merupakan modal sosial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

Dalam mewujudkan pembangunan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, dibutuhkan dukungan dari stakeholders sektor konstruksi. Dukungan tersebut berupa pendanaan, tenaga kerja konstruksi bersertifikat, inovasi teknologi, peningkatan mutu konstruksi dan lain sebagainya. Pemenuhan terhadap hal tersebut akan menjamin kualitas infrastruktur yang berkulitas. Meskipun demikian, Kabupaten Nias Selatan masih memiliki keterbatasan anggaran, sehingga penentuan pembangunan infrastruktur harus berdasarkan skala prioritas. Dimana pembangunan infrastruktur di suatu wilayah harus memiliki daya ungkit dan kontribusi dalam upaya meningkatkan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi masyarakat Nias Selatan. Artinya pembangunan dilakukan di wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah tersebut. Agar pembangunan infrastruktur tidak hanya berkualitas tapi juga merata.

Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur terhadap sasaran kinerja berupa **Meningkatnya kuantitas dan kualitas Infrastruktur Daerah** adalah Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah yaitu:

- a. Tingkat kemantapan jalan kabupaten
- b. Persentase rumah tangga pengguna air bersih
- c. Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
- d. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN
- e. Rasio Rumah Lavak huni

## 3) Terwujudnya SDM yang sehat, cerdas dan berdaya saing

Salah satu pelayanan yang sangat dasar dalam pembangunan manusia adalah pelayanan Kesehatan. Pelayanan. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan Kesehatan sebagai salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan. Pembangunan Kesehatan juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan serta kesadaran

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Komponen selanjutnya yang digunakan dalam pembangunan sumber daya Manusia adalah Pendidikan. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Belum lagi melihat perkembangan zaman saat ini yang semakin maju, yang dimana secara tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan ekonomi. Sehingga sangat diperlukan upaya untuk menciptakan dan membentuk sumber daya benar-benar mampu dan manusia yang berkompeten untuk meningkatkan daya saing daerah

Adapun sasaran yang menjadi tolak ukur dalam mewujudkan peningkatan Sumber daya manusia dengan menerapkan **sasaran** sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan.
  - Indikator yang digunakan adalah Indeks Pendidikan
- 2. Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat Kesehatan.
  - Indikator yang digunakan adalah Indeks Kesehatan.
- 3. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  - Indeks Pengeluaran

#### 4) Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif

Kabupaten Nias Selatan memiliki beberapa potensi daerah yang dapat digali dan dijadikan sebagai langkah untuk mewujudkan perekonomian yang produktif dan inovatif. Potensi daerah tersebut adalah potensi perikanan, potensi pertanian dan potensi wisata. Pengembangan potensi daerah inilah yang selanjutnya akan menjadi fokus pembangunan Nias Selatan. Dimana upaya ini diharapkan akan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nias Selatan. Selain itu, dengan dimaksimalkannya pengembangan potensi daerah tersebut, tingkat minat masyarakat untuk melakukan usaha sendiri baik itu di bidang perikanan seperti perikanan tangkap dan perikanan budidaya atau di sektor

pertanian semakin baik. indikator yang digunakan untuk memenuhi sasaran kinerja berupa Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal adalah sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi
- b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian
- c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata

## 5) Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan

Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka diperlukan kerjasama antara tiga elemen masyarakat, yakni: Pemerintah/ Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Pemerintah maupun pemerintah daerah tidak lepas dari tanggungjawab dalam menjamin dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga dapat secara jangka panjang meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, terciptanya ketertiban umum di suatu wilayah menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Baik itu terkait penegakan hukum dan norma-norma yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk memenuhi sasaran kinerja tersebut adalah **Persentase** Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan Hal ini akan tercermin dari capaian dengan indikator yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan;

Kabupaten Nias Selatan juga merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak daerah rawan bencana. Untuk memahami kondisi rawan bencana tersebut diperlukan sinergitas antara masyarakat dan pemerintah daerah agar tidak hanya peduli namun siap dan tanggap terhadap bencana. Baik itu melalui sosialisasi maupun perlindungan atau pengamanan terhadap alat pendeteksi bencana. Indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini adalah **Indeks Rawan Bencana**. Dimana hal ini yang akan menjadi tolak ukur untuk menentukan kepedulian masyarakat dan pemerintah daerah terhadap aksi tanggap bencana. Indikator yang

# digunakan adalah sebagai berikut adalah Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dalam rangka memperjelas indikator-indikator yang digunakan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan, maka disajikan definisi operasional IKU (Indikator Kinerja Utama) daerah. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Adapun Defenisi Operasional IKU yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Halaman: V-12

Tabel 5.2 Defenisi Operasional Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

No 1	Komponen Komponen Pengungkit	Bobot 60%	a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan perundang- undangan (5%)
	Komponen		a. Manajemen perubahan (5%) b. Penataan peraturan
1		60%	b. Penataan peraturan
			c. Penataan dan penguatan organisasi (6%) d. Penataan tatalaksana (5%) e. Penataan sistem manajemen SDM (15%) f. Penguatan Akuntabilitas (6%) g. Penguatan pengawasan (12%) h. Peningkatan kualitas pelayanan publik (6%)
2	Komponen Hasil	40%	a. Birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. Birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas (10%)
	2		Hasil

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Defenisi Operasional IKU						
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM = Total dari nilai persepsi per unsur Total unsur yang terisi x nilai penimbang  Ket: Unsur Pelayanan = prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas pelayanan, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, kenyamanan pelayanan						
	Nilai SAKIP	Sistem AKIP   FORMAL   KUALITAS   PEMANFAATAN   TOTAL						
	Opini BPK	Hasil Penilaian Keuangan Daerah Oleh BPK						

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Defenisi Operasional IKU
M.2 Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas		
T.2 Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan	Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Proxy= Rata-rata dari lima indikator sasaran
	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang Jalan dalam kondisi mantap Panjang jalan keseluruhan
	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah kumulatif kapasitas rumah tangga pengguna air bersih yang dapat terlayani Jumlah kumulatif kebutuhan pemenuhan kapasitas rumah tangga pengguna air bersih
Sasaran 2 Meningkatnya kuantitas dan	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Luas Daerah Irigasi yang dibangun Luas Daerah Irigasi Keseluruhan x100%
kualitas Infrastruktur Daerah	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	$\frac{\text{RTPLN}}{\text{RT}} \ge 100\%$ Ket: $\text{RT}_{\text{PLN}} = \text{Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik PLN}$ RT = Jumlah Rumah Tangga
	Rasio Rumah Layak huni	Luas Kawasan Kumuh Luas Kawasan Permukiman ×100%
M3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif		

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Defenisi Operasional IKU				
T.3 Terwujudnya SDM yang sehat. Cerdas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$				
Sasaran 3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0				
Sasaran 4 Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHHmin}{AHH_{maks} - AHHmin}$ Ket: $AHH = Angka \ Harapan \ Hidup$ $AHH_{min} = 25; \ AHH_{maks} = 85$				
Sasaran 5 Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks Pengeluaran	$Indeks\ Pengeluaran = \frac{In(Pengeluaran) - In(Pengeluaran_{min})}{In(Pengeluaran_{maks}) - In(Pengeluaran_{min})}$				
4. Mengembangkan perekonomian asyarakat yang produktif dan tidak onsumtif						

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Defenisi Operasional IKU
T.4 Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}}x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya
Sasaran 6 Meningkatnya perekonomian yang produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	$\frac{PDRB_{(IP)t}-PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}}x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Pertanian
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	$\frac{PDRB_{(IP)t}-PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}}x100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Pariwisata
M5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat		

Misi/Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Defenisi Operasional IKU
T5. Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
	Indeks Resiko bencana (IRB)	IRB = $\frac{\text{H x V}}{\text{C}}$ Ket:  IRB = Indeks Resiko Bencana  H = Indeks Bahaya ( <i>Hazard</i> )  V = Indeks Kerentanan ( <i>Vulnarability</i> )  C = Indek Kapasitas ( <i>Capacity</i> )
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\hbox{\tt Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\hbox{\tt Jumlah keseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi}}} x100\%$
Sasaran 7 Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah korban bencana alam yang berhasil <u>diselamatkan dan dievakuasi</u> $\chi$ 100% Jumlah keseluruhan korban bencana alam

#### **BAB VI**

#### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan upaya apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran misi dalam wujud strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan menjadi pedoman dan akan menuntun untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efesien dan efektif.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Maka darii itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya – upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah tersebut

#### 6.1. Strategi

Strategi adalah pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau memperkuat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun dan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi juga merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*) dan berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD.

Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua:

- 1. Perencanaan Strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- 2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam Rencana Kerja yang *actionable*. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap sebagai sesuatu yang strategis. Tabel 6.1. berikut menjabarkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Nias Selatan
VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA

VISI. NIAS	SELATAN MAJU, MASTA	IKAKAI SEGAIIIEKA
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1: Menciptakan Kultı	ır serta Karakter yang I	Bersih, Jujur, Transparan dan
Berorientasi pada Pelayan		
Terwujudnya Birokrasi	Meningkatnya	Peningkatan kapasitas dan
dan tata kelola	kualitas pelayanan	akuntabilitas pegawai
pemerintahan yang lebih	publik dan tata kelola	Penguatan kelembagaan yang
baik	pemerintahan	akuntabel, efektif, efisien dan
		transparan
Misi 2: Pemerataan pemba	engan skala prioritas	
Terwujudnya pemerataan	Meningkatnya	Meningkatkan pembangunan
pembangunan	kuantitas dan	Infrastruktur dasar yang
infrastruktur daerah	kualitas Infrastruktur	berkualitas dan merata disetiap
berkualitas dan	Daerah	wilayah
berkelanjutan		
Misi 2. Moninglyothan Sun	hor Dovo Monucio von	r Sohot Poultyolitae Poudeye Soing
serta Kreatif dan Inovatif	iber Daya Manusia yang	g Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing
Terwujudnya SDM yang	Meningkatnya	Meningkatkan kualitas pengelolaan
sehat, Cerdas dan	kualitas pendidikan	dan pelayanan pendidikan
berdaya saing	dan derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas pengelolaan
	serta kesejahteraan	dan pelayanan kesehatan
	sosial masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
		Masyarakat
Misi 4: Mengembangkan p konsumtif	erekonomian masyarak	at yang produktif dan tidak
Terwujudnya	Meningkatnya	Mengembangkan potensi
perekonomian masyarakat	perekonomian yang	Pariwisata, Pertanian dan
yang produktif dan	produktif dan inovatif	Perikanan menjadi sektor
inovatif	melalui pengelolaan	ungggulan penggerak ekonomi
	sumber daya alam	daerah
	dan warisan budaya	Memfasilitasi penyediaan Lapangan
	secara optimal	pekerjaan untuk menurunkan
		angka pengangguran
		Mengembangkan Produk lokal
		UMKM guna percepatan pemulihan
		ekonomi masyarakat
Misi 5: Memberi rasa ama		
Terwujudnya rasa aman	Meningkatnya rasa	Memelihara ketentraman dan
dan nyaman ditengah	aman dan nyaman	ketertiban umum
masyarakat Nias Selatan		Meningkatkan kesiap siagaan
		daerah dalam penanggulangan
		kebencanaan

Penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah tersebut adalah sebagai berikut:

## 1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai

Profesionalisme pegawai mempunyai pengaruh yang kuat dan bernilai positif terhadap kinerja pegawai pada lingkungan pemerintahan. Artinya apabila profesionalisme pegawai meningkat maka kualitas pelayanan publik yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan. Profesionalisme pegawai dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai.

Upaya untuk mendorong peningkatan Kapasitas dan akuntabilitas pegawai adalah dengan meningkatkan profesionalisme para pegawai dengan Pendidikan dan pelatihan (Diklat). Berbagai Diklat tersebut tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk pegawai yang mengalami stagnan dalam hal kemampuan dilakukan dengan pengalihan profesi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, Pemberian sanksi dan penghargaan juga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pegawai di pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. Sehingga tidak hanya tercipta dan terbentuknya pegawai-pegawai yang kompeten di setiap bidangnya, tapi juga tercipta kesejahteraan sebagai wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

# 2. Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelengaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara akuntabel, efektif, efisien dan transparan .

Reformasi kelembagaan dilakukan melalui perampingan struktur organisasi birokrasi pemerintah daerah untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah melakukan redefinisi

kelembagaan birokrasi termasuk melakukan penataan kelembagaan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP). Artinya akan dilakukan pembenahan pada organisasi pemerintah dengan mengedapankan desain job description yang dapat diukur, dipertanggung dan dievaluasi. jawabkan Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan Opini BPK terhadap pengelolaan anggaran di Kabupaten Nias Selatan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan.

# 3. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah

Dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar, pembangunan tersebut bertujuan untuk mendorong konektifitas antar daerah seperti pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan dermaga atau pelabuhan dan juga pembangunan pelabuhan udara. Upaya ini dilakukan agar bisa tercipta surplus produksi yang kompetitif untuk dipasokkan ke wilayah lain. Pembangunan ini juga ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar seperti Pendidikan dan kesehatan.

Selain daripada pembangunan transportasi, sarana pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi, pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi, peningkatan kualitas Kawasan rumah tidak layak huni juga merupakan hal penting yang harus terus ditingkatkan. Hal ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelayanan dasar kehidupan masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Agar akses terhadap air bersih dan Persentasi Kawasan Pemukiman layak huni di Kabupaten Nias selatan mengalami peningkatan. Peningkatan Infrastruktur dasar dilakukan memperhatikan karakteristik wilayah dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian Indikator Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan memiliki nilai yang tinggi di tahun 2026.

### 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan Pendidikan

Perkembangan era globalisasi yang penuh dengan iklim persaingan, World Economic Forum (WEF) menyampaikan bahwa dari 12

Halaman : VI-4

indikator daya saing global di suatu negara, ada 2 indikator di dalamnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Indikator pertama yakni kesehatan dan pendidikan dasar yang merupakan rumpun faktor dasar bagi suatu negara untuk mampu bersaing di kancah global. Dan indikator yang kedua yakni pendidikan tinggi dan pelatihan yang termasuk dalam rumpuk faktor pendorong efisiensi di suatu daerah.

Salah satu upaya yang diberikan dalam mendukung Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan adalah dengan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi dan Masyarakat yang kurang mampu. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya generasi-generasi penerus daerah yang berdaya saing dan berkualitas. Selain itu, untuk pelayanan dasar Pendidikan dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan di wilayah yang masih sulit dijangkau. Baik itu jalan menuju sekolah, pembangunan atau rehabilitasi ruang kelas, pembangunan laboratorium, pembangunan perpustakaan dan lain sebagainya. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan indikator Indeks Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan di tahun 2026.

#### 5. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah. Sebagai salah satu komponen penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Indonesia, Kesehatan juga merupakan fokus penting dari pembangunan Kabupaten Nias Selatan. Apalagi di tahun 2021 pandemi *Corona Virus Deases 2019 (Covid-19)* masih juga memberikan dampak pada perekonomian dan pembangunan daerah baik itu di pusat maupun di daerah. Sehingga Masyarakat dan pemerintah harus saling bahu membahu meningkatkan pola hidup sehat dan bersih demi menekan laju penyebaran *Covid-19*.

Pembangunan di bidang kesehatan juga dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Mulai dari

Halaman: VI-5

pembangunan Puskesmas di wilayah-wilayah yang membutuhkan, pemenuhan alat-alat kesehatan dan obat-obatan yang diperlukan, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta perhatian lebih terkait isu stunting. Mengenai isu stunting, upaya yang dilakukan untuk menekan laju stunting adalah pelayanan gizi bagi kelompok anak usia dini, remaja dan ibu menyusui. Strategi ini diharapkan dapat memenuhi target Indikator Indeks Kesehatan di tahun 2026.

# 6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kesejahteraan sosial masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi seluruh warga negara di dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat terlihat dari indeks pengeluaran. Pengeluaran ini sangat terkait dengan pendapatan oleh sebab itu dibutuhkan usaha didalam upaya meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja.

# 7. Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah

Kabupaten Nias Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki potensi-potensi daerah yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sektor unggulan penggerak ekonomi daerah. Potensi-potensi yang dimiliki tersebut adalah sumber daya kelautan dan perikanan, potensi ekonomi pariwisata berupa keindahan alam pantai dan wisata budaya serta potensi kekayaan alam berupa hasil-hasil pertanian.

Sebagaimana dengan paradigma perncanaan pembangunan saat ini, dimana pemerintah daerah lebih berperan sebagai mediator dan fasilitator, maka peran serta masyarakat lebih di kedepankan. Sehingga pemerintah Kabupaten Nias Selatan pada prinsipnya menerapkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dan terfasilitasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong minat dan kemampuan masyarakata dalam mengelola potensi – potensi

Halaman: VI-6

daerah yang dimiliki. Untuk potensi daerah yang berupa fisik, seperti wisata alam dan wisata budaya. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan dukungan berupa pengembangan potensi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan pengadaan even-even besar agar lokasi - lokasi tersebut dapat dijangkau dan dapat memberi kemudahan serta ketertarikan para wisatawan maupun para investor. Upaya-upaya tersebutut dilakukan agar Laju Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2026 mengalami peningkatan.

# 8. Memfasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran

Upaya peningkatan kesempatan kerja tidak terlepas dari kemampuan lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja. Laju perkembangan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja merupakan permasalahan krusial yang perlu menjadi perhatian oleh semua pihak. Tidak menutup kemungkinan bahwa perkembangan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja jika dioptimalisasikan dapat dijadikan sebagai peluang emas dalam peningkatan kesempatan kerja. Upaya yang akan dilakukan untuk menekan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Nias Selatan adalah melakukan kerjasama dengan pihak - pihak yang berkompeten demi mendorong terbukanya kesempatan kerja dan penyediaan sarana dan prasarana bursa kerja, pengadaaan dan pelatihan kompetensi para pencari kerja. Artinya Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan menjadi Fasilitator bagi para pihak yang mau bekerja sama membuka peluang bagi para pencari kerja. Hal ini diharapkan persentasi jumlah pengangguran di tahun 2026 menjadi semakin kecil.

# 9. Mengembangkan Produk lokal UMKM guna percepatan pemulihan ekonomi masyarakat

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam penggerak pertumbuhan ekonomi. Lewat otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia dapat mengembangkan setiap potensi lokal yang dimilikinya agar dapat bertahan dan

Halaman: VI-7 RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

berkembang di tengah persaingan regional maupun global. Pengembangan ekonomi lokal juga diarahkan untuk mendukung perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai potensi menciptakan kesempatan kerja yang luas dan memiliki prospek yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 10. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban adalah sesuatu situasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan semua kegiatan masyarakat. Situasi Ketentraman dan ketertiban sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan aman dan nyaman untuk setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Upaya yang dapat dilakukan dalam menciptakan situasi ketentraman dan ketertiban adalah meningkatkan kinerja personil linmas dalam keterlibatannya menangani ketentraman dan ketertiban baik berupa penegakan-penegakan hukum, pelanggaran-pelanggaran perda atau perkada dan lain sebagainya.

# 11. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan kebencanaan

Kabupaten Nias Selatan merupakan salah satu daerah yang rawan terjadinya gempa dan tsunami. Hal ini dikarenakan daerah nias selatan terdiri dari beberapa gugus pulau kecil yang terhampar sebanyak 101 pulau. Namun masalahnya bencana bukan hanya pada gempa dan tsunami. Terdapat 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya bencana, yaitu: Faktor alam (natural disaster), yaitu karena fenomena alam dan tanpa ada campur tangan manusia; Faktor non-alam (non-natural disaster), yaitu bukan karena fenomena alam dan juga bukan akibat perbuatan manusia; Faktor sosial/manusia (manmade disaster) yang murni akibat perbuatan manusia, misalnya konflik horizontal, konflik vertikal, dan terorisme. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategistrategi khusus dalam penanggulan bencana di Kabupaten Nias Selatan.

Halaman: VI-8

Pencapaian Pembangunan daerah menjadi dukungan dalam pencapaian pembangunan Nasional. Dengan ini segala kebijakan yang ada didaerah harus selaras dengan kebijakan Nasional. Hal ini dilakukan untuk sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, yang ditindaklanjuti dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.2 Sinkronisasi Kebijakan Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Nias Selatan

	Kabupaten Mas Selatan	
Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Sumatera Utara	Prioritas Pembangunan Daerah
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1)	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan	Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2)	Peningkatan Infrastruktur Dasar, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN 3)	Peningkatan Aksesbilitas dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Aksesbilitas dan Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreativitas Daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan pendidikan, Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN 4)	Terpeliharanya Kerukunan Umat Beragama	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan Pelayanan Dasar ( PN 5)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi, Menurunnya Angka Kemiskinan, Menurunnya Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan	Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6)	Peningkatan Infrastruktur Yang Berwawasan Lingkungan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris Dan Pariwisata	Meningkatkan kesiap siagaan daerah dalam penanggulangan kebencanaan
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN 7)	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan Hak Pilih, Menurunnya Konflik Pemilu	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai, Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan

### 6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran

dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021. Arah kebijakan akan mengarah pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dapat mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu, kualitas dan transparansi hasil pembangunan. Selain itu, penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun harus memiliki keterkaitan satu lain dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tahapan Tema Pembangunan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:



Gambar 6.1 Tema Pembangunan Kabupaten Nias Selatan

Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Arah Kebijakan Tahun I (2022)

Pembangunan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 diarahkan pada Reformasi birokrasi dan pemulihan ekonomi akibat pandemic Covid-19, berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Nias

"Mendorong percepatan Reformasi birokrasi dan Selatan adalah: pemulihan ekonomi masyarakat menuju Nias Selatan maju dan sejahtera" untuk mewujudkan Birokrasi dengan tujuan dan kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Tema pembangunan ini untuk mendukung misi I yaitu: Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan dan misi ke IV. arah kebijakan pembangunan pada misi I difokuskan pada:

- Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian atau profesi
- Penerapan Penghargaan dan sanksi bagi pegawai
- Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai
- Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja pemerintahan dan pelayanan public
- Penerapan Pengelolaan SAKIP yang berkualitas
- Peningkatan Pengelolaan dan pengawasan penggunaan keuangan dan aset daerah

Misi ke IV adalah Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Produktif Tidak Konsumtif dengan tujuan mewujudkan perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada:

- Pemetaan lokasi pertanian unggulan daerah
- Penyediaan sarana dan prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan (benih, obat-obatan, pupuk, alsintan, sumber-sumber air, dll)
- Penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta peraturan pengelolaan usaha perikanan daerah yang di PERDAkan
- Pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah
- Fasilitasi peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja

#### 2. Arah Kebijakan Tahun II (2023)

Pemerataan pembangunan merupakan sebuah langkah yang cukup besar untuk menuju pembangunan sumber daya manasia dan pembangunan ekonomi. Dengan tercapainya infrastruktur yang baik di setiap daerah yang memiliki potensi-potensi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia, maka setiap masyarakat akan mendapatkan

Halaman: VI-11 RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses ekonomi di dalamnya. Akses terhadap pelayanan dasar berupa Pendidikan dan kesehatan tentu akan menjadi lebih mudah.

Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, transportasi laut dan udara, Irigasi, Air bersih, Sanitasi, rumah layak huni dan gedung perkantoran di seluruh wilayah kabupaten Nias Selatan adalah fokus pembangunan Kabupaten Nias Selatan di tahun kedua periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Hal ini sejalan dengan Misi II (kedua) RPJMD yaitu: Pemerataan pembangunan Infrastruktur dengan skala prioritas. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah berkualitas dan berkelanjutan. Rumusan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Peningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan
   Pembangunan lintas Perangkat Daerah
- Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian
- Penyediaan transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian
- Pembangunan Bandara udara Silambo
- Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian
- Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman
- Penyediaan rumah layak huni dan akses air minum serta sanitasi bagi penduduk miskin
- pembukaan akses jalan roda 4, dan penyediaan PLTS/energi lainnya di lokasi di kepulauan dan geografis yang ekstrim

### 3. Arah Kebijakan Tahun III (2024)

Sumber Daya Manusia adalah merupakan setiap individu yang menjadi sumber utama yang bekerja sebagai inti penggerak dari sebuah pembangunan di suatu daerah. Peranan sumber daya manusia

ditegaskan dalam garis-garis besar haluan negara, bahwa untuk pembangunan jangka panjang titik berat pembangunan adalah pembangunan ekonomi dan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia.

Melihat betapa pentingnya peranan sumber daya manusia untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Nias Selatan, maka tema pembangunan yang diambil di periode RPJMD tahun ketiga adalah "Mewujudkan Sumber Daya Manusia Nias Selatan yang sehat dan Cerdas dan Berdaya Saing". Tema ini digunakan untuk mendukung Misi III yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif. Arah Kebijakan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik
- Pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan,
- Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat berprestasi dan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan
- Meningkatkan minat baca
- Peningkatan kapasitas pemuda yang berdaya saing dan berwira usaha
- Memajukan kebudayaan daerah yang memiliki nilai penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan dan pendidikan
- Meningkatkan manajemen dan pengelolaan serta pelayanan kesehatan
- Menurunkan prevalensi stunting
- Percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk tercapainya herd imunity

#### 4. Arah Kebijakan Tahun IV (2025)

Sehubungan dengan kecenderungan perkembangan ekonomi dan sosial budaya berlangsung sekarang, yang sangat diwarnai oleh perkembangan ekonomi pasar dan ketergantungan sosial ekonomi sangat tinggi terhadap globalisasi dan perkembangan sosial-ekonomi dari luar, maka diperlukan karakter ekonomi yang berproduktif. Karakter produktif adalah karakter berorientasi pada upaya menghasilkan sesuatu untuk

memberikan kontribusi secara langsung terhadap lingkungan sekitar dalam hal ini daerah. Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi – potensi daerah yang dapat dimaksimalkan untuk membentuk perekonomian yang tidak hanya produktif namun juga kreatif. Dengan terbentuknya perekonomian produktif dan kreatif, akan berdampak langsung kepada masyarakat sebagai pelaku ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Nias Selatan adalah: "Optimalisasi pengembangan perekonomian Daerah menuju masyarakat maju dan sejahtera" yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif. Tema pembangunan ini untuk mendukung misi IV yaitu: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- Pemetaan lokasi pertanian unggulan daerah
- penyediaan sarana dan prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan (benih,obat-obatan,pupuk, alsintan, sumber-sumber air, dll)
- Peningkatan pengawasan pendistribusian pupuk bersubisidi
- Penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan usaha perikanan
- Pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah
- Peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan/kursus, magang kerja dan kuliah

### 5. Arah Kebijakan Tahun V (2026)

Pembangunan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan keamanan dan kenyaman ditengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Nias Selatan adalah: "Nias Selatan aman, ekonominya maju" yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi aman dan tertib di masyarakat sehingga perekonomian masyarakat berjalan produktif. Tema dengan pembangunan ini untuk mendukung misi V yaitu: Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Halaman: VI-14

- Mengoptimalkan Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban
- Meningkatkan sarana dan prasarana dalam hal mitigasi bencana di beberapa titik lokasi yang rawan bencana
- Pendidikan dan Pelatihan Tim Penanggulangan Bencana.

Tabel 6.3 Keterkaitan visi, misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 -2026

VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
Misi 1: Menciptakan Kultur serta Karakter yang Bersih, Jujur, Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan									
Terwujudnya Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas pegawai	Penempatan pegawai sesuai dengan keahlian atau profesi Penerapan Penghargaan dan sanksi bagi pegawai Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai						
		Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	Penyediaan dan penerapan SOP/SPM/NSPK dilingkungan kerja pemerintahan dan pelayanan public Penerapan Pengelolaan SAKIP yang berkualitas Peningkatan Pengelolaan dan pengawasan penggunaan keuangan dan aset daerah						
Misi 2: Pemerataan pemban	gunan Infrastruktur denga	n skala prioritas	F88						
		Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap wilayah	Peningkatkan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan lintas Perangkat Daerah Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian Penyediaan transportasi umum darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian Pembangunan Bandara udara Silambo Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi						

	VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
Mini 24 Moninghathan Sumb	Down Manuaia wang Sah	at, Berkualitas, Berdaya Saing ser	Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas umum dan permukiman Penyediaan rumah layak huni dan akses air minum serta sanitasi bagi penduduk miskin Menfasilitasi dan menyediakan listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik					
Terwujudnya SDM yang	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kualitas	Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga					
sehat. Cerdas dan berdaya saing	pelayanan pendidikan	pengelolaan dan pelayanan pendidikan	pendidik Pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan,					
			Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat berprestasi dan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan					
			Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan					
			advokasi dan promosi budaya baca					
			Peningkatan kapasitas pemuda yang berdaya saing dan berwira usaha  Memajukan kebudayaan daerah yang memiliki					
			nilai penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan dan pendidikan					
	Meningkatnya mutu pelayanan dan derajat kesehatan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan kesehatan	Penambahan dan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan serta obat-obatan yang lengkap					
			penambahan tenaga kesehatan esensial khususnya dokter spesialis					
			Menurunkan prevalensi stunting					
			Percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk tercapainya <i>herd imunity</i>					

	VISI: NIAS SELATAN MAJU, MASYARAKAT SEJAHTERA								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat						
Misi 4: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif									
Terwujudnya perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif produktif dan inovatif melalui pengelolaan sumber daya alam dan warisan budaya secara optimal		Mengembangkan potensi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan menjadi sektor ungggulan penggerak ekonomi daerah  Fasilitasi penyediaan lapangan pekerjaan	Pemetaan lokasi pertanian unggulan daerah Penyediaan sarana dan prasarana Pertanian, perkebunan dan peternakan (benih,obat- obatan,pupuk, alsintan, sumber-sumber air, dll) Peningkatan pengawasan pendistribusian pupuk bersubisidi Penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta tersedianya peraturan daerah tentang pengelolaan usaha perikanan Pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pariwisata daerah Peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan/kursus, magang kerja dan						
		pekerjaari	kuliah						
Misi 5: Memberi rasa aman									
Terwujudnya rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat Nias Selatan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman	Memelihara ketentraman dan ketertiban umum	Mengoptimalkan Personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban						
		Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan kebencanaan	Peningkatan sarana dan prasarana dalam hal mitigasi bencana di beberapa titik lokasi yang rawan bencana						
			Pendidikan dan Pelatihan Tim Penanggulangan Bencana.						

# 6.3. Arahan Kebijakan Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)

Perubahan yang ada di sekitar masyarakat, seperti globalisasi, pasar bebas, atau lainnya menyebabkan terjadinya pula perubahan dan dinamika sosial, ekonomi, bahkan spasial antar negara, antar daerah, antar kecamatan, hingga antar perdesaan. Perubahan tersebut telah menyebabkan terjadinya polarisasi pembangunan daerah, terbentuknya wilayah pembangunan (transborder regions), serta terbentuknya koridor wilayah baik lokal. pengembangan skala nasional. regional dan internasional. Dengan demikian sangat penting untuk melakukan pembangunan dengan memperhatikan sistem pengembangan kewilayahan. Artinya perlu ditentukan Kawasan strategis pembangunan.

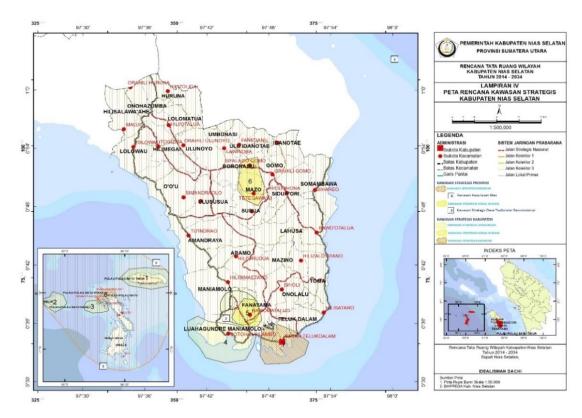
Kawasan strategis pembangunan merupakan bagian wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten baik untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya ataupun fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Upaya untuk menjembatani antara Sistem Perencanaan Pembangunan dan Sistem pengembangan kewilayahan ini dilakukan agar tercipta keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Nias Selatan yang keberlanjutan. Selain itu, Efektivitas mekanisme dan prosedur instrumen Pembangunan Kawasan strategis dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terhadap penyempurnaan pelaksanaan sistem perencanaan yang ada.

Kawasan Strategis Kabupaten Nias Selatan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan tahun 2014-2034 dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Nias Selatan, yaitu Kawasan yang dijadikan sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan meliputi Desa tradisional Bawomataluo, Wilayah Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan Kawasan Taman Laut Pulau Sibaranun
- 2) Kawasan Setrategis Kabupaten Nias Selatan terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya; dan
- c. Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- 3) Penetapan Kawasan strategis Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014 2034 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Nias Selatan dengan ketelitian 1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Strategis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini.
  - A. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi:
    - a. Telukdalam sebagai Ibukota Kabupaten, Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan Kecamatan Fanayama sebagai Kawasan Pariwisata; dan
    - b. Tello sebagai tempat pendaratan dan pelelangan ikan, lokasi pemasaran berbagai komoditas dan pariwisata;
  - B. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya meliputi:
    - a. Kawasan bawomataluo Kecamatan Fanayama sebagai tempat pelestarian rumah induk adat Nias Selatan dan perkampungan tradisional; dan
    - b. Kawasan Sifalago Gomo dan Kecamatan Boronadu sebagai tempat pelestarian rumah adat Nias Selatan dan cagar budaya Megalith;
  - C. Kawasan Strategis fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang dikembangkan di Kabupaten berupa Kawasan pesisir pantai Hilisataro Kecamatan Toma, Pesisir Pantai Baloho Kecamatan Telukdalam dan Pesisir Pantai Lagundri dan Sorake Kecamatan Luahagundre Maniamolo.



Gambar 6.2
Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Nias Selatan

# 6.4. Program pembangunan Daerah

Dalam penyusunan RPJMD, visi dan misi dijabarkan menjadi rumusan tujuan dan sasaran, kemudian tujuan dan sasaran dijabarkan melalui strategi dan arah kebijakan dan dilaksanakan dengan program prioritas pembangunan daerah untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati. Dalam rangka memperjelas bagaimana mekanisme dari program, dapat memberikan dampak dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran maka disajikan logical frame work dalam bentuk arsitektur kinerja dalam mencapai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut

Tabel 6.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

				Nias Selata	n Maju, Masyarakat S	Sejahtera						
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Koı	ndisi	OPD		
							Awal	Akhir	P.JAWAB			
MISI 1	1: Mencip	takan Kultur serta	a Karakter yang Bers	ih, Jujur, Transparan da	an Berorientasi pada	Pelayanan						
1	Terwuju	dnya Birokrasi dan	tata kelola pemerinta	han yang bersih dan bail	K	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	-	В			
		Meningkatnya kı	ıalitas pelayanan publ	lik dan tata kelola pemer	intahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	tinggi			
						Nilai SAKIP	Predikat	С	В	SETDA		
						Opini BPK	Predikat	WDP	WTP	BPKPAD		
			Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pegawai	Penempatan sesuai dengan keahlian/profesi dan Penerapan Penghargaan dan sanksi bagi pegawai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yg mengikuti diklat tehnis	Orang	-	100%	Seluruh OPD		
				Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	Rasio			BKD		
								Rasio pegawai fungsional (PNS Tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		52%	75%	
			Penguatan kelembagaan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan	Penerapan SOP/SPM/NSPK di lingkungan kerja pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menerapkan Pemenuhan SPM	OPD	6	6	Dispen, Dinkes, DPUPR, DPRKP, Dinsos, Satpol		
			-	Penerapan Pengelolaan SAKIP		Jumlah OPD yang menerapkan SOP	OPD	1	28	Seluruh OPD		
				yang berkualitas		Persentase perangkat daerah yang didampingi mendapatkan nilai SAKIP minimal berkategori C	Persen	-	100	SETDA/ Inspektorat		
				Peningkatan Pengelolaan dan	Program Pengelolaan	Persentase SILPA terhadap PAD	Persen	79.48	30.12	BPKPAD		
				pengawasan penggunaan	Keuangan Daerah	Penyusunan Struktur anggaran yang berimbang	Rupiah	84 M	0	BPKPAD		
				keuangan dan aset daerah		Ketepatan waktu penyusunan APBD Setiap tahun	Kondisi	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKPAD		

				Nias Selata	n Maju, Masyarakat	Sejahtera				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi		OPD
WIISI	Iujuan	Jasaran	Strategr	Alan Konjakan	Tiogram	indikator	Datuan	Awal	Akhir	P.JAWAB
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah asset yang telah disertifikatkan	Persen	15%	90%	BPKPAD
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1.14	3.30	BPKPAD
MISI 2	2: Pemerat	taan pembanguna	ın Infrastruktur den	gan skala prioritas						
	Terwujuo	lnya pemerataan p	pembangunan infrast	ruktur daerah berkualitas	dan berkelanjutan	Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah	Persen	54.36	75.74	DPUPR
		Meningkatnya k	uantitas dan kualitas	Infrastruktur Daerah		Tingkat kemantapan jalan Kabupten	Persen	53	75	DPUPR
						Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55.72	76.47	DPUPR
						Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49.55	52.04	DPUPR
						Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76.04	97.84	SETDA
						Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0.048	0.059	DPRKP
			Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata disetiap	Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase desa yang melaksanakan musrenbang RKPD tingkat desa	Persen	50	75	BAPPEDA
			wilayah		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya revisi dokumen RTRW Kab. Nias Selatan yang di-PERDA- kan	Dok	0	1	DPUPR
				Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan antar wilayah pemukiman, pusat ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan pertanian	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53	74	DPUPR
				Penyediaan transportasi umum	Program Pengelolaan	Jumlah arus penumpang kapal laut per tahun	Orang	-	80640	DISHUB

				Nias Selata	n Maju, Masyarakat S	Sejahtera				
lisi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi		OPD
1131	I ujuan	Dasaran	Strategr	Alan ilebijahan	Tiogram	Indikator	Satuan	Awal	Akhir	P.JAWAB
		darat dan perairan serta frekuensi pelayaran yang lebih sering untuk mendukung roda perekonomian Pembangunan	Pelayaran							
				Pembangunan Bandara udara Silambo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bandara Udara Silambo melayani rute penerbangan	Ada/Tidak ada	Tidak Ada	Ada	DISHUB
				Penambahan jumlah jaringan irigasi dan pemeliharaan dan fungsi jaringan irigasi untuk peningkatan produktifitas pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49.55	57.99	DPUPR
				Peningkatan sumber air bersih dan air minum di fasilitas	Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	55.7	80.72	DPUPR
				umum dan permukiman	Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum dengan jaringan perpipaan	Persen	3.81	6.22	DPUPR
				Penyediaan rumah layak huni dan akses air minum serta sanitasi bagi penduduk miskin	Program Kawasan Permukiman	Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	KK	451	701	DPRKP
				Menfasilitasi dan menyediakan listrik bagi desa-desa yang belum teraliri listrik		Persentase rumah tangga pengguna listrik PLN	Persen	76	97	SETDA
SI 3	: Meningk	atkan Sumber Da	iya Manusia yang S	Sehat, Berkualitas, Berday	ya Saing serta Kreatii	dan Inovatif				
	Terwujudı	nya SDM yang sel	nat. Cerdas dan bero	laya saing		Indeks pembangunan manuasia (IPM)	Persen	61.89	67.39	BPS
		Meningkatnya ku	ıalitas pendidikan d	an derajat kesehatan		Indeks Pendidikan	Poin	53.56	60.59	DISPEN
						Indeks Kesehatan	Poin	72.90	75.28	DINKES

				Nias Selata	n Maju, Masyarakat S	Sejahtera				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kor	ndisi	OPD
	I uj uuII		J					Awa1	Akhir	P.JAWAB
			Meningkatkan kualitas	penguatan kapasitas dan kompetensi	Program Pengelolaan	Angka partisipasi Murni SD/MI	Persen	96.08	100	DISPEN
			pengelolaan dan Pelayanan	tenaga pendidik	Pendidikan	Angka Partisipasi Murni SMP	Persen	70.44	75	DISPEN
			Pendidikan			APK PAUD	Persen	-	75	DISPEN
						Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	5,85	7.0	DISPEN
						Harapan lama sekolah	Tahun	12.23	12.43	DISPEN
				Pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan,	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio guru/murid pendidikan Dasar	Rasio	1:15	1:20	DISPEN
				pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	SD/MI Kondisi bangunan baik	Ruang	1140	2140	DISPEN
				Pemberian bantuan beasiswa bagi masyarakat berprestasi dan yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah mahasiswa yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Orang	5.538	6.038	DISPEN/ SETDA
				advokasi dan promosi budaya baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Buku	6.189	11.189	DPERPUS
				Peningkatan kapasitas pemuda yang berdaya saing dan berwira usaha	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0	0.5	DISBUDPARP ORA
				Memajukan kebudayaan daerah yang memiliki nilai	Program Pengembangan Kebudayaan	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	0	30	
				penting terhadap sejarah, ilmu pengetahuan dan pendidikan	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	0	30	DISBUDPARP ORA
			Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Kesehatan	Penambahan dan penyediaan fasilitas dan alat kesehatan serta obat-obatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	0	100	DINKES
				yang lengkap, Percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk	Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	47	70	DINKES

	Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera												
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi		OPD			
MIGI	I ujuan	Gasaran	Strategr	Alan Nebijakan	Hogram	Indirator	Satuan	Awal	Akhir	P.JAWAB			
				tercapainya herd imunity									
				Peningkatan kesehatan ibu hamil/menyusui, anak dan balita		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	92	100	DINKES			
				Menurunkan prevalensi stunting		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen		100	DINKES			
						Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase usia 15-59 th mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						persentase Warga negera usia 60 th ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase penderita hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase org terduga penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen		100	DINKES			
						Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesui	Persen		100	DINKES			

Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera  Kondisi											
Iisi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Program		Indikator	Satuan			OPD P.JAWAB	
						-t1		Awal	Akhir	1.011W11D	
				-		stand					
						Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Persen	18.4	18.4	DINKES	
						Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Persen	7.5	7.5	DINKES	
				Penambahan tenaga kesehatan esensial	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	cakupan puskesmas yang memenuhi 9 jenis tenaga strategis (dokter,drg, perawat, bidan, farmasi, kesmas, kesling, gizi dan laborat)	Persentase minimal	-	59	DINKES	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Program Pelayanan Penanaman Modal	penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	8000	500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satt	
ISI	4: Mengen	nbangkan perekor	nomian masyarakat y	ang produktif dan tidak	konsumtif						
	Terwujud	lnya perekonomia	n masyarakat yang pro	oduktif dan inovatif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	0.61	5.33	BPS	
			rekonomian yang prod ım dan warisan buday	uktif dan inovatif melalui a secara optimal	pengelolaan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1.04	4.45	BPS	
						Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum)	Persen	0.84	3.64	BPS	
			Mengembangkan potensi	Pemetaan lokasi pertanian unggulan	Program Penyediaan Dan	Produktifitas tanaman padi	Ton/ha	4.27	4.38		
			Pariwisata, Pertanian dan	daerah	Pengembangan Sarana Pertanian	Produktifitas tanaman jagung	Ton/ha	6.13	6.28		
			Perikanan			Produktifitas Cabai	Ton/ha	4.5	5.5	DISTAN	
							T21	4756	25756		
			menjadi sektor ungggulan			Populasi ternak babi	Ekor	1700	20100		
			menjadi sektor			Populasi ternak babi Produktifitas kelapa	Ton/ha	1052. 29	1078.8		
			menjadi sektor ungggulan penggerak	penyediaan sarana dan prasarana	Program Penyediaan Dan			1052.	1078.8	DISTAN	

				Nias Selata	n Maju, Masyarakat S	эејаптега 		1		1
lisi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Koı	ndisi	OPD
				·				Awal	Akhir	P.JAWAB
				perkebunan dan peternakan	Prasarana Pertanian	jagung				
				(benih,obat-	Tertaman	Produktifitas Cabai	Ton/ha	4.5	5.5	
				obatan,pupuk, alsintan, dll)		Populasi ternak babi	Ekor	4756	25756	
				, ,		Produktifitas kelapa	Ton/ha	1052. 29	1078.8 6	
				Peningkatan pengawasan pendistribusian pupuk bersubisidi	Program stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase kinerja realisasi pupuk bersubsidi	Persen	-	100	DISPERINDA
				Penyediaan sarana dan prasarana perikanan serta	Program Pengelolaan Perikanan	Tersedianya PERDA Master plan dan usaha perikanan	PERDA	0	2	DKP
				peraturan pengelolaan usaha	Tangkap	Produktifitas perikanan tangkap per tahun	Ton/thn	8600	8850	DKP
				perikanan daerah yang diPERDAkan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktifitas perikanan budidaya per tahun	Ton/thn	10	15	DKP
				Pengembangan dan Pengelolaan kawasan strategis Pariwisata Daerah	Program peningkatan daya tarik Destinasi pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0.86	0.25	DISBUDPAR ORA
					Program pemasaran pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0.86	0.25	DISBUDPAR ORA
			Fasilitasi penyediaan Lapangan pekerjaan	Peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan/kursus,	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	16%	100%	DTKKUKM
				magang kerja dan kuliah	Program Penempatan Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam/luar Negeri)	Persen	145	895	DTKKUKM
ISI 5			nyaman ditengah m	<u> </u>						
	Terwujud	lnya rasa aman da	an nyaman ditengah	masyarakat Nias Selatan	Persentase Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	18.12	21	SATPOL	
						Indeks Resiko bencana	Indeks	202	197	BPBD

				Nias Selata	n Maju, Masyarakat S	Sejahtera				
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	Satuan	Kondisi		OPD
MISI	Iujuan	Sasaran	Strategr	Aran Isonjakan	Tiogram	Indikator	Satuali	Awal	Akhir	P.JAWAB
					(IRB)					
		Meningkatnya ra	isa aman dan nyaman	ı	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	10	30	SATPOL	
					Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	BPBD	
		ketentraman dan Personil Lini ketertiban umum terlibat dala	Mengoptimalkan Personil Linmas yang terlibat dalam	Program Peningkatan Ketenteraman Dan	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	Persen	18.12	21	SATPOL	
				menjaga keamanan dan ketertiban	Ketertiban Umum	persentase pelangggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	10	30	SATPOL
			Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan kebencanaan	Peningkatan sarana dan prasarana dalam hal mitigasi bencana di beberapa titik lokasi yang rawan bencana Pendidikan dan Pelatihan Tim Penanggulangan Bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 5 jam	Persen	-	100	BPBD

## 6.5. Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan strategis adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcame) suatu program pembangunan yang secara khusus memberikan dampak langsung. Sama halnya dengan program-program pembangunan lainnya, kegiatan strategis daerah juga disertai dengan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kegiatan. Kegiatan strategis ini dapat menjadi salah satu hal yang mendukung visi dan misi bupati dan wakil bupati, tujuan dan sasaran dan tentu program prioritas pembangunan daerah. Untuk melihat apa saja yang menjadi kegiatan strategis Kabupaten Nias Selatan, maka kegiatan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel, dimana setiap kegiatan atau sub kegiatan disertai dengan indikator kinerja dan Pagu indikatif.

Tabel 6.5 Kegiatan Strategis Daerah

	Regiatan Strategis Daeran												
NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
Misi 1	Mencipta	akan Kultur serta Kar	akter yang Bersih, Ju	ıjur, Trans	paran da	n Berorien	tasi pada	Pelayana	ın				
P1	Program	Penunjang Urusan Per	nerintahan Daerah Ka	bupaten/K	ota								
		Penataan Organisasi	Nilai LAKIP OPD	С	С	В	В	В	В	В	480,000,000	DAU	SETDA
			Nilai LAKIP OPD	С	С	В	В	В	В	В	3,780,000,000	DAU	Seluruh OPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	-	189 orang	189 orang	189 orang	189 orang	189 orang	945 orang	1,890,000,000	DAU	Seluruh OPD
P2	Program	Kepegawaian Daerah											
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya dokumen rekapitulasi pengadaan, pemberhentian ASN		1 Dok	5 Dok	250,000,000	DAU	BKD				
		Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya dokumen rekapitulasi mutasi dan promosi ASN	-	1 Dok	5 Dok	103,000,000	DAU	BKD				
		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Pegawai Struktural yang mengikuti Diklat Teknis dan bersertifikat		5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	25 orang	150.000.0000	DAU	BKD
			Jumlah Pegawai fungsional yang mengikuti Diklat Teknis dan bersertifikat	-	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	28 orang	140 orang	280,000,000	DAU	BKD
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen laporan Evaluasi Kinerja ASN	-	1 Dok	5 Dok	50,000,000	DAU	BKD				
P3	Program	Pengelolaan Keuangan	Daerah		1	1		1	1	1	I	1	T
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya dokumen DPA- OPD tepat waktu		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	493,000,000	DAU	BPKPAD

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tersedianya laporan rekapitulasi hasil pengelolaan perbendaharaan daerah		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	600,000,000	DAU	BPKPAD
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan rekapitulasi akuntasi dan pelaporan keuangan daerah		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	1,350,000,000	DAU	BPKPAD
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah dalam kondisi baik		baik	baik	baik	baik	baik	baik	39,000,000	DAU	BPKPAD
P4	Program	Pengelolaan Barang M	ilik Daerah										
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase dokumen barang milik daerah yang tersedia	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Tersedianya dokumen Standar harga daerah	0	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	693,500,000	DAU	BPKPAD
			Tersedianya laporan barang milik daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok			
P5	Program	Pengelolaan Pendapata	an Daerah										
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan PAD per tahun	0%	2%	2%	2%	2%	2%	10%	1,000,000,000	DAU	BPKPAD
Misi 2	Pemerata	aan Pembangunan de	ngan Skala Prioritas										
P1	Program	perencanaan, pengend		nbangunan	daerah								
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	jumlah Desa yang melaksanakan musrenbang desa	229	244	249	258	281	352	352	1.200.000.000	DAU	Bappeda
P2	Program	Penyelenggaraan Pena											
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Tersedianya ranperda revisi dokumen RTRW			1				1	1.000.000.000	DAU	DPUPR

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
		dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota											
P3	Program	Penyelenggaraan Jalar											
		Penyelenggaraan	Panjang jalan lapen yang terbangun	0	32 Km	32 Km	32 Km	32 Km	32 Km	160 Km	48,000,000,000	DAU	DPUPR
		Jalan Kabupaten/ Kota	Panjang jalan Hotmix yang terbangun	0	7 Km	7 Km	7 Km	7 Km	7 Km	35 Km	21,000,000,000	DAK	DPUPR
			Panjang Jembatan yang terbangun	0	50 M	50 M	50 M	50 M	50 M	250 M	10,000,000,000	DAU	DPUPR
P4	Program	Pengelolaan Pelayaran											
		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang	Tersedianya kapal penyeberangan antara Telukdalam-telo- hibala	6 kali/se minggu						6 kali/semi nggu	3.500.000.000	DAU	DISHUB
		Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arus penumpang kapal laut per tahun	72,146	58,87 6	71,576	84,976	104,6 76	105,77 6	105,776 Orang			
P5	Program	Penunjang Urusan Pe	merintahan Daerah Ka	abupaten/K	Cota								
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pembangunan bandara silambo								10.000.000.000	DAU	DISHUB
P6	Program	Pengelolaan Sumber D	aya Air (SDA)										
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha	panjang jaringan irigasi yang dibangun								7,500,000,000	DAK	DPUPR
P7	Program	Pengelolaan Dan Penge	embangan Sistem Pen	yediaan Air	Minum								
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak Jumlah rumah								7,500,000,000	DAK	DPUPR

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
			tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum dengan jaringan perpipaan										
P8	Program	Kawasan Permukiman											
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	0	50	50	50	50	50	250 Rumah	3,000,000,000	DAK	DPRKP
Misi 3	Meningk	atkan Sumber Daya N	Manusia yang Sehat, l	Berkualitas	, Berdaya	a Saing se	rta Kreatif	dan Ino	vatif				
P1	Program	Pengelolaan Pendidika	n										
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase ruang kelas SD dalam kondisi baik Jumlah ruang								75,784,000,000	DAK	DISPEN
			kelas SD dalam kondisi baik										
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik								45,184,000,000	DAK	DISPEN
		Menengah Pertama	Jumlah ruang kelas SMP dalam kondisi baik								16,692,000,000	DAU	DISPEN
		Pengelolaan Pendidikan Anak	Jumlah PAUD Aktif	-	40	80	120	160	200	200	4,000,000,000	DAK	DISPEN
		Usia Dini (PAUD)									3,420,000,000	DAU	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan non formal/kesetaraan								270,000,000	DAK	DISPEN
P2	Program	Pendidik Dan Tenaga I	Kependidikan										
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan									500,000,000	DAU	DISPEN

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
		Nonformal/ Kesetaraan											
Р3	Program	Pemerintahan Dan Kes	sejahteraan Rakyat										
			Jumlah Penerima bantuan beasiswa pemerintah daerah	5.538	200	200	200	200	200	6.538	23,369,690,320	DAU	SETDA
P4	Program	Pembinaan Perpustaka	aan										
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ragam judul buku							1000 judul	200,000,000	DAU	DPPERPUS
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan advokasi gemar membaca							100 kali	200,000,000	DAU	DPPERPUS
P5	Program	pengembangan kapasi	tas daya saing kepemu	ıdaan									
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota									1,000,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
P6	Program	Pengembangan Kebud	ayaan										
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									50,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah festival budaya daerah yang diselenggarakan ditingkat kabupaten								3,000,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
		Pembinaan										DAU	DISBUDPAR

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
		Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota									200,000,000		PORA
P7	Program	pelestarian dan pengel	olaan cagar budaya										
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									150,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota									250,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
P8	Program	Pemenuhan Upaya Kes	sehatan Perorangan D	an Upaya I	Kesehatan	Masyarak	at					DAK	
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan									47,621,000,000	DAK	DINKES
		Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									22,058,844,000	DAU	DINKES
		Penyediaan Layanan Kesehatan									50,661,000,000	DAK	
		untuk UKM dan UKP Rujukan									22,126,190,000	DAU	
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									22,569,754,000	JKN	
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									250,000,000	DAU	DINKES
P9	Program	Peningkatan Kapasitas	Sumber Daya Manus	ia Kesehata	ın		l		l		I		
	111111111111111111111111111111111111111	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			-						14,000,000,000	DAU	DINKES
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya									2,100,000,000	DAU	DINKES

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
		Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											
P10	Program	Pelayanan Penanaman	Modal										
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkan	8000	100	200	300	400	500	500	210.000.000	DAU	Dinas Penanaman Modal PPTSP
Misi 4		bangkan Perekonomia			an Tidak	Konsumt	if.						
P1	Program	Penyediaan Dan Penge	embangan Sarana Perta	anian			T		T				<u> </u>
P2	Program	 Penyediaan Dan Penge	  -mhangan Prasarana P	  ertanian									
	Trogram	Pengembangan Prasarana Pertanian									1,000,000,000	DAU	DISTAN
		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Embung pertanian yang dibangun										
			panjang jaringan irigasi yang dibangun Panjang jalan usaha tani yang dibangun								5,500,000,000	DAK	DISTAN
			panjang DAM parit yang dibangun untuk pertanian Terbangunnya Long storage										
Р3	Program	Pengelolaan Perikanan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah kapal dibawah 5 GT beserta kelengkapanya bantuan Pemda kepada	2 unit							1,400,000,000	DAK	DKP

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
		Lainnya yang dapat	masyarakat										
		Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kapal 0.5 GT beserta kelengkapanya bantuan Pemda kepada masyarakat	-						165 unit	858,000,000	DAU	DKP
P4	Program	Pengelolaan Perikanan	Budidaya										
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		-						25 kolam	850,000,000	DAU	DKP
P5	Program	peningkatan daya taril	k Destinasi pariwisata										
		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota									1,000,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									1,000,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
		Pengelolaan Destinasi pariwisata Kabupaten/Kota									10,000,000,000	DAK	
P6	Program	pemasaran pariwisata				l		1	l	1			
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota									362,000,000	DAU	DISBUDPAR PORA
P7	Program	pelatihan kerja dan pr	oduktifitas tenaga kerj	а									
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	145	295	445	595	745	895	895 orang	800,000,000	DAU	DTKKUKM
P8	Program	Penempatan Tenaga K											
		Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja dan diterima kerja	145	295	445	595	745	895	895 orang	500,000,000	DAU	DTKKUKM

NO	Program	Kegiatan Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal 2020	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir	Pagu indikatif per tahun	Sumber Dana	OPD P Jawab
			didalam/luar negeri										
Misi 5	Memberi	Rasa Aman dan Nyar		akat				I	I	I		ı	
P1	Program	Peningkatan Ketentera	man Dan Ketertiban U	Jmum									
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									250,000,000	DAU	SATPOL
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota									150,000,000	DAU	SATPOL
P2	Program	Penanggulangan Benca	ana										
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									100,000,000	DAU	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									200,000,000	DAU	BPBD
										Total	546,620,012,320	)	
										DAK	279,420,000,000		
										DAU	267,200,012,320		
										JKN	22,569,754,000		

#### **BAB VII**

## KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

#### 7.1. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program perangkat daerah guna mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, maka dialokasikan anggaran untuk belanja daerah sebagaimana telah dihitung dan dianalisis pada Bab III RPJMD ini. Kerangka pendanaan pembangunan daerah telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah menerapkan *money* follow programme priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi saat ini serta isu strategis pada masa datang sampai akhir periode masa jabatan kepala daerah. Hal ini berarti program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi prioritas yang akan dilaksanakan dan mendapatkan anggaran.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat.
- b. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Bupati dan Wakil Bupati juga termasuk hal tersebut.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan

urusan pemerintahan lainnya. Alokasi anggaran prioritas III diperuntukkan untuk mendanai program-program perangkat daerah yang tidak termasuk dalam kategori Prioritas I dan Prioritas II. Program-program tersebut dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026.

Berdasarkan gambaran keuangan daerah yang telah dijelaskan dalam bab III, maka kerangka pendanaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 ditunjukkan pada tabel 7.1 berikut

Tabel 7.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Kode	Uraian Belanja	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
2.	Belanja						
2.1.	Belanja Operasi	766.003.670.194,80	711.879.346.714,00	735.146.106.587,95	791.896.126.764,01	797.796.277.141,53	807.128.186.283,64
2.1.1	Belanja Pegawai	387.891.398.666,65	394.246.956.399,00	413.959.304.218,95	428.626.847.441,15	456.390.132.901,39	479.209.639.546,46
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	349.433.433.198,15	206.442.673.604,36	217.276.821.281,26	193.631.831.214,24	211.033.954.440,43	226.804.267.829,47
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	3.207.201.300,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	15.555.929.930,00	75.026.437.710,64	77.746.702.087,75	148.474.169.108,62	109.208.910.799,71	79.950.999.907,71
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	9.915.707.100,00	33.163.279.000,00	23.163.279.000,00	18.163.279.000,00	18.163.279.000,00	18.163.279.000,00
2.2	Belanja Modal	298.118.808.474,00	252.318.823.294,22	265.560.559.343,76	236.661.127.039,63	257.930.388.760,52	277.205.216.236,01
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.063.638.000,00	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	5.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.325.000.000,00
2.4	Belanja Transfer	484.291.429.960,00	487.304.742.257,20	487.094.742.257,20	487.244.742.257,20	487.394.742.257,20	487.444.742.257,20
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	750.384.044,00	1.370.384.041,20	1.510.384.041,20	1.660.384.041,20	1.810.384.041,20	1.860.384.041,20
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	483.541.045.916,00	485.934.358.216,00	485.584.358.216,00	485.584.358.216,00	485.584.358.216,00	485.584.358.216,00
ı	Proyeksi Belanja	1.549.477.546.628,80	1.454.827.912.265,42	1.491.126.408.188,91	1.520.801.996.060,84	1.547.121.408.159,25	1.575.103.144.776,85

### 7.2. Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Oraganisasi Perangkat Daerah

Berikut pagu indikatif Menurut Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Halaman: VII-2

Tabel 7.2

Pagu Indikatif Menurut Urusan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

	Urusan			Pagu Indik	atif (Rp)		
Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	747.534.389.556,78	638.137.400.694,39	652.107.000.492,01	617.730.749.879,26	651.234.051.671,60	687.130.477.781,75
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	350.336.548.776,00	356.159.967.376,94	364.820.524.642,65	360.949.835.048,62	371.015.143.878,76	386.715.699.736,06
1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan	350.336.548.776,00	356.159.967.376,94	364.820.524.642,65	360.949.835.048,62	371.015.143.878,76	386.715.699.736,06
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	241.375.116.952,70	184.635.360.447,83	179.998.522.462,48	177.372.590.434,70	182.047.564.538,86	187.003.608.366,95
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	241.375.116.952,70	184.635.360.447,83	179.998.522.462,48	177.372.590.434,70	182.047.564.538,86	187.003.608.366,95
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	137.708.932.658,00	79.478.648.746,33	89.162.571.827,68	62.520.397.302,32	79.520.273.706,01	92.996.351.802,69
1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	137.708.932.658,00	79.478.648.746,33	89.162.571.827,68	62.520.397.302,32	79.520.273.706,01	92.996.351.802,69
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5.292.556.313,00	5.888.151.805,40	6.001.029.629,20	6.114.495.551,48	6.728.558.393,70	7.843.227.109,68
1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	5.292.556.313,00	5.888.151.805,40	6.001.029.629,20	6.114.495.551,48	6.728.558.393,70	7.843.227.109,68
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	9.356.826.163,00	8.000.632.283,67	8.090.913.845,34	7.681.195.407,01	8.271.476.968,68	8.361.758.530,35
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat	3.002.927.345,00	5.476.855.976,20	5.524.233.327,75	5.571.610.679,30	5.618.988.030,85	5.666.365.382,40
1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.353.898.818,00	2.523.776.307,48	2.566.680.517,60	2.109.584.727,72	2.652.488.937,84	2.695.393.147,96
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3.464.408.694,08	3.974.640.034,23	4.033.438.084,68	3.092.236.135,13	3.651.034.185,58	4.209.832.236,03
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	3.464.408.694,08	3.974.640.034,23	4.033.438.084,68	3.092.236.135,13	3.651.034.185,58	4.209.832.236,03

	Urusan			Pagu Indik	catif (Rp)		
Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	79.627.769.655,02	68.104.124.431,13	80.281.069.713,38	80.584.491.775,28	115.141.367.438,52	90.451.748.507,13
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3.250.005.642,00	2.864.755.944,98	2.927.347.356,93	2.989.938.768,88	3.052.530.180,83	3.115.121.592,78
2.07.2.17.0.00.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah	3.250.005.642,00	2.864.755.944,98	2.927.347.356,93	2.989.938.768,88	3.052.530.180,83	3.115.121.592,78
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.475.854.451,00	15.806.675.741,23	16.282.612.355,68	16.508.905.179,78	16.985.559.556,67	17.212.580.909,65
2.08.2.14.0.00.02	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	15.475.854.451,00	15.806.675.741,23	16.282.612.355,68	16.508.905.179,78	16.985.559.556,67	17.212.580.909,65
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4.367.525.099,02	4.950.044.178,30	5.113.082.430,90	5.276.120.683,50	5.439.158.936,10	6.602.197.188,70
2.09.3.27.0.00.01	Dinas Ketahanan Pangan	4.367.525.099,02	4.950.044.178,30	5.113.082.430,90	5.276.120.683,50	5.439.158.936,10	6.602.197.188,70
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	5.997.686.758,00	7.238.455.087,50	7.303.782.262,50	7.369.109.437,50	8.434.436.612,50	8.499.763.787,50
2.11.0.00.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup	5.997.686.758,00	7.238.455.087,50	7.303.782.262,50	7.369.109.437,50	8.434.436.612,50	8.499.763.787,50
2.12	Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.522.041.263,00	5.565.893.602,58	5.669.641.241,73	5.773.388.880,88	5.877.136.520,03	5.980.884.159,18
2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.522.041.263,00	5.565.893.602,58	5.669.641.241,73	5.773.388.880,88	5.877.136.520,03	5.980.884.159,18
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.278.589.000,00	4.138.696.765,50	4.120.894.656,50	4.203.092.547,50	34.285.290.438,50	4.367.488.329,50
2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.278.589.000,00	4.138.696.765,50	4.120.894.656,50	4.203.092.547,50	34.285.290.438,50	4.367.488.329,50
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	16.230.238.821,00	10.616.507.557,78	10.750.720.731,33	10.885.760.779,88	12.021.640.106,55	13.158.371.300,52
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	16.230.238.821,00	10.616.507.557,78	10.750.720.731,33	10.885.760.779,88	12.021.640.106,55	13.158.371.300,52

	Urusan			Pagu Indik	ratif (Rp)		
Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	4.613.299.413,00	5.871.117.849,33	5.947.113.841,98	6.023.109.834,63	6.099.105.827,28	6.175.101.819,93
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika	4.613.299.413,00	5.871.117.849,33	5.947.113.841,98	6.023.109.834,63	6.099.105.827,28	6.175.101.819,93
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	2.633.680.704,00	3.010.727.786,60	3.080.020.751,80	3.149.313.717,00	3.218.606.682,20	3.287.899.647,40
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.633.680.704,00	3.010.727.786,60	3.080.020.751,80	3.149.313.717,00	3.218.606.682,20	3.287.899.647,40
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	16.003.282.756,00	4.974.331.025,65	15.931.508.904,95	15.163.980.479,25	16.398.704.823,98	18.635.715.730,68
2.22.2.19.3.26.02	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga	16.003.282.756,00	4.974.331.025,65	15.931.508.904,95	15.163.980.479,25	16.398.704.823,98	18.635.715.730,68
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2.255.565.748,00	3.066.918.891,70	3.154.345.179,10	3.241.771.466,50	3.329.197.753,90	3.416.624.041,30
2.23.2.24.0.00.01	Dinas Perpustakaan	2.255.565.748,00	3.066.918.891,70	3.154.345.179,10	3.241.771.466,50	3.329.197.753,90	3.416.624.041,30
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	16.364.066.502,00	9.995.067.013,58	19.082.186.370,73	17.346.090.727,88	19.111.506.860,03	21.878.457.443,80
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3.727.027.644,00	3.279.419.215,05	5.752.634.777,15	5.328.135.339,25	5.903.955.176,35	5.980.099.077,58
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan	3.727.027.644,00	3.279.419.215,05	5.752.634.777,15	5.328.135.339,25	5.903.955.176,35	5.980.099.077,58
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	10.800.284.214,00	3.996.285.884,18	10.059.137.878,53	9.196.489.872,88	9.835.034.367,23	12.474.789.249,08
3.27.0.00.0.00.01	Dinas Pertanian	10.800.284.214,00	3.996.285.884,18	10.059.137.878,53	9.196.489.872,88	9.835.034.367,23	12.474.789.249,08
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.836.754.644,00	2.719.361.914,35	3.270.413.715,05	2.821.465.515,75	3.372.517.316,45	3.423.569.117,15
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	1.836.754.644,00	2.719.361.914,35	3.270.413.715,05	2.821.465.515,75	3.372.517.316,45	3.423.569.117,15
4	Unsur Pendukung	99.349.482.521,00	101.420.316.976,13	93.797.982.852,38	89.175.648.728,63	89.553.314.604,88	89.930.980.481,13
4.01	Sekretariat Daerah	57.715.100.798,00	62.766.191.868,00	55.072.451.764,00	50.378.711.660,00	50.684.971.556,00	50.991.231.452,00
4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah	57.715.100.798,00	62.766.191.868,00	55.072.451.764,00	50.378.711.660,00	50.684.971.556,00	50.991.231.452,00
4.02	Sekretariat DPRD	41.634.381.723,00	38.654.125.108,13	38.725.531.088,38	38.796.937.068,63	38.868.343.048,88	38.939.749.029,13

	Urusan			Pagu Indik	ratif (Rp)		
Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD	41.634.381.723,00	38.654.125.108,13	38.725.531.088,38	38.796.937.068,63	38.868.343.048,88	38.939.749.029,13
5	Unsur Penunjang	546.459.276.831,00	562.745.224.621,46	569.496.553.665,73	639.867.563.289,30	591.547.879.357,93	603.242.355.770,95
5.01	Perencanaan	5.587.534.159,00	6.690.952.788,25	6.779.061.704,75	5.607.170.621,25	6.955.279.537,75	7.043.388.454,25
5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.587.534.159,00	6.690.952.788,25	6.779.061.704,75	5.607.170.621,25	6.955.279.537,75	7.043.388.454,25
5.02	Keuangan	536.291.865.141,00	547.557.597.044,43	553.052.010.254,90	625.438.735.606,43	573.614.767.403,01	585.064.959.543,97
5.02.0.00.0.00.04	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah	536.291.865.141,00	547.557.597.044,43	553.052.010.254,90	625.438.735.606,43	573.614.767.403,01	585.064.959.543,97
5.03	Kepegawaian	4.579.877.531,00	8.496.674.788,78	9.665.481.706,07	8.821.657.061,62	10.977.832.417,17	11.134.007.772,72
5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian Daerah	4.579.877.531,00	8.496.674.788,78	9.665.481.706,07	8.821.657.061,62	10.977.832.417,17	11.134.007.772,72
6	Unsur Pengawas	4.125.738.873,00	8.651.989.833,75	8.765.018.801,25	6.878.047.768,75	8.991.076.736,25	9.104.105.703,75
6.01	Inspektorat Daerah	4.125.738.873,00	8.651.989.833,75	8.765.018.801,25	6.878.047.768,75	8.991.076.736,25	9.104.105.703,75
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	4.125.738.873,00	8.651.989.833,75	8.765.018.801,25	6.878.047.768,75	8.991.076.736,25	9.104.105.703,75
7	Unsur Kewilayahan	52.441.053.100,00	62.226.664.695,00	64.042.344.293,45	65.858.023.891,75	67.673.703.490,05	69.489.383.088,35
7.01	Kecamatan	52.441.053.100,00	62.226.664.695,00	64.042.344.293,45	65.858.023.891,75	67.673.703.490,05	69.489.383.088,35
7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Lolomatua	1.394.702.587,00	1.651.345.275,00	1.701.368.789,75	1.751.392.304,50	1.801.415.819,25	1.851.439.334,00
7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Gomo	1.899.268.588,00	2.187.692.276,00	2.261.886.446,30	2.336.080.616,60	2.410.274.786,90	2.484.468.957,20
7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Lahusa	1.844.180.970,00	2.134.953.138,00	2.197.834.692,65	2.260.716.247,30	2.323.597.801,95	2.386.479.356,60
7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Hibala	1.107.077.749,00	1.327.952.021,00	1.363.273.185,95	1.398.594.350,90	1.433.915.515,85	1.469.236.680,80
7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Pulau-Pulau Batu	3.514.486.866,00	4.242.961.226,00	4.355.355.786,85	4.467.750.347,55	4.580.144.908,25	4.692.539.468,95
7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Teluk Dalam	3.332.814.704,00	4.125.599.507,00	4.219.988.760,80	4.314.378.014,60	4.408.767.268,40	4.503.156.522,20
7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Amandraya	1.849.827.035,00	2.187.672.323,00	2.260.695.506,95	2.333.718.690,90	2.406.741.874,85	2.479.765.058,80
7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Lolowau	2.075.574.427,00	2.298.825.931,00	2.379.384.647,65	2.459.943.364,30	2.540.502.080,95	2.621.060.797,60
7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Susua	1.396.969.223,00	1.503.049.223,00	1.545.783.671,80	1.588.518.120,60	1.631.252.569,40	1.673.987.018,20

	Urusan			Pagu Indik	ratif (Rp)		
Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Maniamolo	1.764.519.337,00	2.145.000.385,00	2.211.949.209,90	2.278.898.034,80	2.345.846.859,70	2.412.795.684,60
7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Hilimegai	1.121.048.630,00	1.237.568.630,00	1.271.592.911,55	1.305.617.193,10	1.339.641.474,65	1.373.665.756,20
7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Toma	1.385.530.907,00	1.647.445.427,00	1.691.806.056,90	1.736.166.686,80	1.780.527.316,70	1.824.887.946,60
7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Mazino	1.076.157.461,00	1.288.384.005,00	1.323.995.835,75	1.359.607.666,50	1.395.219.497,25	1.430.831.328,00
7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Umbunasi	1.270.183.577,00	1.524.195.193,00	1.571.643.238,15	1.619.091.283,30	1.666.539.328,45	1.713.987.373,60
7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Aramo	1.334.858.757,00	1.469.998.757,00	1.512.894.734,85	1.555.790.712,70	1.598.686.690,55	1.641.582.668,40
7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur	1.223.178.323,00	1.448.167.507,00	1.489.688.202,35	1.531.208.897,70	1.572.729.593,05	1.614.250.288,40
7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Mazo	1.343.533.681,00	1.644.085.209,00	1.692.135.164,95	1.740.185.120,90	1.788.235.076,85	1.836.285.032,80
7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Fanayama	1.408.492.581,00	1.864.624.909,00	1.911.897.863,85	1.959.170.818,70	2.006.443.773,55	2.053.716.728,40
7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Ulunoyo	1.286.859.286,00	1.608.271.822,00	1.655.751.461,85	1.703.231.101,70	1.750.710.741,55	1.798.190.381,40
7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Huruna	1.745.411.911,00	2.013.745.463,00	2.079.044.855,40	2.144.344.247,80	2.209.643.640,20	2.274.943.032,60
7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan O'o'u	1.224.921.440,00	1.419.017.736,00	1.461.228.934,40	1.503.440.132,80	1.545.651.331,20	1.587.862.529,60
7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Onohazumba	1.413.962.019,00	1.680.104.707,00	1.732.994.782,55	1.785.884.858,10	1.838.774.933,65	1.891.665.009,20
7.01.0.00.0.00.23	Kecamatan Hilisalawa"Ahe	1.135.620.445,00	1.349.097.029,00	1.387.932.509,25	1.426.767.989,50	1.465.603.469,75	1.504.438.950,00
7.01.0.00.0.00.24	Kecamatan Ulususua	1.256.449.809,00	1.481.531.041,00	1.523.924.308,35	1.566.317.575,70	1.608.710.843,05	1.651.104.110,40
7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Sidua'ori	1.389.517.503,00	1.576.645.951,00	1.622.766.528,55	1.668.887.106,10	1.715.007.683,65	1.761.128.261,20
7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Somambawa	1.612.771.897,00	1.945.417.801,00	2.009.473.128,25	2.073.528.455,50	2.137.583.782,75	2.201.639.110,00
7.01.0.00.0.00.27	Kecamatan Boronadu	1.162.834.750,00	1.491.175.478,00	1.536.480.441,90	1.581.785.405,80	1.627.090.369,70	1.672.395.333,60
7.01.0.00.0.00.28	Kecamatan Simuk	1.073.904.273,00	1.224.462.113,00	1.255.866.918,65	1.287.271.724,30	1.318.676.529,95	1.350.081.335,60
7.01.0.00.0.00.29	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat	1.296.031.959,00	1.478.869.807,00	1.522.320.087,35	1.565.770.367,70	1.609.220.648,05	1.652.670.928,40
7.01.0.00.0.00.30	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara	1.259.148.053,00	1.627.032.269,00	1.677.134.312,45	1.727.236.355,90	1.777.338.399,35	1.827.440.442,80
7.01.0.00.0.00.31	Kecamatan Tanah Masa	1.368.199.918,00	1.629.712.414,00	1.679.627.614,70	1.729.542.815,40	1.779.458.016,10	1.829.373.216,80
7.01.0.00.0.00.32	Kecamatan Luahagundre Maniamolo	1.481.091.894,00	1.794.899.942,00	1.848.492.518,15	1.902.085.094,30	1.955.677.670,45	2.009.270.246,60

	Urusan			Pagu Indik	catif (Rp)		
Kode	Perangkat Daerah	Target Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
7.01.0.00.0.00.33	Kecamatan Onolalu	1.018.636.158,00	1.256.882.782,00	1.291.155.925,05	1.325.429.068,10	1.359.702.211,15	1.393.975.354,20
7.01.0.00.0.00.34	Kecamatan Uluidanotae	1.078.345.969,00	1.270.508.249,00	1.301.968.315,70	1.333.428.382,40	1.364.888.449,10	1.396.348.515,80
7.01.0.00.0.00.35	Kecamatan Idanotae	1.294.940.413,00	1.449.769.149,00	1.493.006.943,95	1.536.244.738,90	1.579.482.533,85	1.622.720.328,80
8	Unsur Pemerintahan Umum	3.575.769.590,00	3.547.124.000,00	3.554.252.000,00	3.361.380.000,00	3.868.508.000,00	3.875.636.000,00
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.575.769.590,00	3.547.124.000,00	3.554.252.000,00	3.361.380.000,00	3.868.508.000,00	3.875.636.000,00
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.575.769.590,00	3.547.124.000,00	3.554.252.000,00	3.361.380.000,00	3.868.508.000,00	3.875.636.000,00
	Total Belanja	1.549.477.546.628,80	1.454.827.912.265,42	1.491.126.408.188,91	1.520.801.996.060,84	1.547.121.408.159,25	1.575.103.144.776,85

#### 7.3. Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

## 7.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 7.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan,
- 2. Program Pengembangan Kurikulum
- 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

#### 7.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

### 7.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

- 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- 5. Program Penataan Bangunan Gedung
- 6. Program Penyelenggaraan Jalan
- 7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

## 7.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengembangan Perumahan
- 2. Program Kawasan Permukiman
- 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

### 7.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
- 2. Program Penanggulangan Bencana
- 3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

#### 7.3.1.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pemberdayaan Sosial
- 2. Program Rehabilitasi Sosial
- 3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- 4. Program Penanganan Bencana

# 7.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

#### 7.3.2.1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Perenanaan Tenaga Kerja
- 2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 3. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 4. Program Hubungan Industrial

## 7.3.2.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 2. Program Perlindungan Perempuan
- 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- 4. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 6. Program Perlindungan Khusus Anak

#### 7.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

### 7.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 5. Program Pengelolaan Persampahan

# 7.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pendaftaran Penduduk
- 2. Program Pencatatan Sipil
- 3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

## 7.3.2.6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Penataan Desa
- 2. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

# 7.3.2.7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengendalian Penduduk
- 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- 3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

#### 7.3.2.8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 2. Program Pengelolaan Pelayaran

### 7.3.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
- 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

## 7.3.2.10.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- 4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- 5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- 6. Program Pengembangan UMKM

#### 7.3.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2. Program Promosi Penanaman Modal
- 3. Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

### 7.3.2.12.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

#### 7.3.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

#### 7.3.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

### 7.3.2.15.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengembangan Kebudayaan
- 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- 3. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

#### 7.3.2.16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pembinaan Perpustakaan

#### 7.3.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengelolaan Arsip
- 2. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

#### 7.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 7.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

### 7.3.3.2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 2. Program Pemasaran Pariwisata
- 3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

### 7.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 5. Program Perizinan Usaha Pertanian
- 6. Program Penyuluhan Pertanian

#### 7.3.3.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- 4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

#### 7.3.3.5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
- 3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

#### 7.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

#### 7.3.4.1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Administrasi Umum
- 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

#### 7.3.4.2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
- 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

### 7.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 7.3.5.1. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

#### 7.3.5.2. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### 7.3.5.3. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Kepegawaian Daerah

#### 7.3.5.4. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### 7.3.5.5. Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### 7.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

### 7.3.6.1. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

#### 7.3.7. Unsur Kewilayahan

### 7.3.7.1. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### 7.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

#### 7.3.8.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

- 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- 3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
- 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

#### 7.3.9. Non Urusan

#### 7.3.9.1. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022-2026 sebagaimana tabel 7.3 berikut ini :

Halaman: VII-16

#### Tabel 7.3

#### INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

#### KABUPATEN NIAS SELATAN

#### TAHUN 2022-2026

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					638.137.400.694,39		652.107.000.492,01		617.730.749.879,26		651.234.051.671,60		687.130.477.781,75		687.130.477.781,75
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				356.159.967.376,94		364.820.524.642,65		360.949.835.048,62		371.015.143.878,76		386.715.699.736,06		386.715.699.736,06
1.01.0.00.0.00.01	Dinas Pendidikan					356.159.967.376,94		364.820.524.642,65		360.949.835.048,62		371.015.143.878,76		386.715.699.736,06		386.715.699.736,06
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					197.290.482.057,32		201.283.788.553,46		197.037.409.276,74		204.058.365.809,31		213.326.134.854,83		213.326.134.854,83
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan					158.319.485.319,62		162.986.736.089,19		163.362.425.771,88		166.406.778.069,45		172.839.564.881,23		172.839.564.881,23
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	5,85	6,10		6,35		6,60		6,85		7,00		7,00	
		Harapan lama sekolah	Tahun	12,23	12,27		12,31		12,35		12,39		12,43		12,43	
		APK PAUD	Persen	12,72	13,37		14,02		14,68		15,33		15,98		15,98	
		APK SD	Persen	111,59	108,17		109,17		110,17		111,17		111,17		111,17	
		APM PAUD	Persen	12,72	13,37		14,02		14,68		15,33		15,98		15,98	
		APM SD	Persen	96,08	96,14		96,20		96,26		96,32		96,38		96,38	
		APK SMP	Persen	80,78	81,94		82,94		83,94		84,94		85,94		85,94	
		APM SMP	Persen	70,44	71,54		72,64		73,34		74,84		75,94		75,94	
		Kondisi Bangunan baik tingkat SD	Unit	135	175		250		275		300		335		335	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
		Persentase kurikulum berbasis muatan lokal pada satuan pendidikan dasar	Persen	N/A	100		100		100		100		100		100	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00
		Rasio Guru/ Murid Pendidikan Dasar		1:15	1:16		1:17		1:18		1:19		1:20		1:20	
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SD		4.058	4.186		4.186		4.186		4.186		4.186		4.186	
		Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan SMP		2.024	2.178		2.178		2.178		2.178		2.178		2.178	
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					184.635.360.447,83		179.998.522.462,48		177.372.590.434,70		182.047.564.538,86		187.003.608.366,95		187.003.608.366,95
1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan					184.635.360.447,83		179.998.522.462,48		177.372.590.434,70		182.047.564.538,86		187.003.608.366,95		187.003.608.366,95

	Bidang Urusan			Kondisi					c	Capaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(522.5522)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					40.850.779.298,52		39.830.674.941,74		39.901.969.895,63		40.415.664.198,55		41.701.793.840,73	3	41.701.793.840,73
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					140.598.895.788,86		136.986.798.998,27		134.289.247.948,63		138.448.192.775,78		142.112.260.917,85	5	142.112.260.917,85
		Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	0,00
		Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan kesehatan pada usia lansia	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100 ribu KH	n/a	205		205		205		205		205		205	
		Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) per Tahun	Per 100 ribu KH	n/a	15		15		15		15		15		15	
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persen	n/a	91		91		91		91		91		91	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	Persen	n/a	18,4		18,4		18,4		18,4		18,4		18,4	
		Prevalensi Wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	Persen	n/a	7,5		7,5		7,5		7,5		7,5		7,5	
		Insidensi TB per 100.000 penduduk	Per 100 ribu pddk	n/a	231		231		231		231		231		231	
		Insidensi HIV per 1. 000 Penduduk yang Tidak Terinfeki HIV	Per 1000 pddk	n/a	0,19		0,19		0,19		0,19		0,19		0,19	
		Temuan Kasus TR Baru menggunakan Indikator SPM (Terduga TB)	Per 100 ribu pddk	n/a	90		90		90		90		90		90	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(522 5522)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Treatment coverage pada Pasien TB	Persen	n/a	90		90		90		90		90		90	
		Persentase Imunisasi Dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	Persen	n/a	71		71		71		71		71		71	
		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persen	n/a	59		59		59		59		59		59	
		Jumlah Puskesmas Melaksanakan Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	Pusk	n/a	10		10		10		10		10		10	
		Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	Persen	n/a	90		90		90		90		90		90	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar dan Persyaratan Perizinan	Persen	n/a	49		49		49		49		49		49	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					185.685.360,45		181.048.522,46		181.372.590,43		183.707.564,54		189.553.608,37		0,00
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
		Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	0,00
		Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	0,00
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
		Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	n/a	65		70		75		85		90		90	
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					79.478.648.746,33		89.162.571.827,68		62.520.397.302,32		79.520.273.706,01		92.996.351.802,69		92.996.351.802,69
1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					79.478.648.746,33		89.162.571.827,68		62.520.397.302,32		79.520.273.706,01		92.996.351.802,69		92.996.351.802,69
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					4.907.918.930,54		5.392.404.260,84		3.811.223.838,14		4.759.276.422,36		5.658.411.102,47		5.658.411.102,47
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					2.453.959.465,27		2.696.202.130,42		1.905.611.919,07		2.379.638.211,18		2.829.205.551,24		2.829.205.551,24

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49,55	50,05		50,6		51,1		51,6		52		52	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	55,72	60,72		65,72		70,72		75,72		80,72		80,72	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap jaringan perpipaan	Persen	3,81	6,22		7,42		8,62		9,82		11,02		11,02	
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional					500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)	Rasio	1:180266	1:73403		1:46287		1:33965		1:26965		1:22372		1:22372	
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					4.907.918.930,54		5.392.404.260,84		3.811.223.838,14		4.759.276.422,36		5.658.411.102,47		5.658.411.102,47
		Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	4,93	5,93		6,93		7,93		8,93		9,93		9,93	
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung					11.451.810.837,93		12.582.276.608,64		8.892.855.622,33		11.104.978.318,84		13.202.959.239,10		13.202.959.239,10
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan	Unit		15		2		2		2		2		2	
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan					52.757.040.582,05		58.349.284.566,94		40.349.482.084,64		52.767.104.331,27		61.147.364.807,41		61.147.364.807,41
		Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi	Persen	53	58		62		66		70		74		74	
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	haik				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	n/a	5,66		9,43		14,15		18,87		23,58		23,58	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang							1.750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00
		Tersedianya revisi dokumen RTRW yang di PERDA kan	Dokumen				1								1	
		Tersedianya dokumen RRTR (Rencana Rinci Tata Ruang) yang di PERDA kan	Dokumen				1		1		1		2		5	
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					5.888.151.805,40		6.001.029.629,20		6.114.495.551,48		6.728.558.393,70		7.843.227.109,68		7.843.227.109,68
1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					5.888.151.805,40		6.001.029.629,20		6.114.495.551,48		6.728.558.393,70		7.843.227.109,68		7.843.227.109,68
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.971.706.263,78		2.050.720.740,44		2.130.146.886,04		2.709.990.875,59		2.490.258.976,78		2.490.258.976,78
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan					1.916.445.541,62		1.950.308.888,76		1.984.348.665,44		2.018.567.518,11		3.352.968.132,90		3.352.968.132,90
		Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	кк	451	501		551		601		651		701		701	
		Rasio Rumah Layak Huni	Persen	0,048	0,050		0,050		0,053		0,055		0,059		0,059	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
		Luas kawasan permukiman kumuh	Hektar	833,771	832		830		828		826		824		824	
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kulluli				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	Unit				20		20		20		20		20	
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					8.000.632.283,67		8.090.913.845,34		7.681.195.407,01		8.271.476.968,68		8.361.758.530,35		8.361.758.530,35
1.05.0.00.0.00.01	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat					5.476.855.976,20		5.524.233.327,75		5.571.610.679,30		5.618.988.030,85		5.666.365.382,40		5.666.365.382,40
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2.738.427.988,10		2.762.116.663,87		2.785.805.339,65		2.809.494.015,42		2.833.182.691,20		2.833.182.691,20
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Treama			1.369.213.994,05		1.381.058.331,94		1.392.902.669,82		1.404.747.007,71		1.416.591.345,60		1.416.591.345,60
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	18,12	19		19,5		20		20,5		21		21	
		Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	10	10		15		20		25		30		30	
		Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Persen	14,28	7,69		14,28		14,28		14,28		14,28		14,28	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					1.369.213.994,05		1.381.058.331,94		1.392.902.669,82		1.404.747.007,71		1.416.591.345,60		1.416.591.345,60
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	Persen	20	20		20		20		20		20		20	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	80	80		80		80		80		80		80	
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	80	80		80		85		90		95		95	
1.05.0.00.0.00.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					2.523.776.307,48		2.566.680.517,60		2.109.584.727,72		2.652.488.937,84		2.695.393.147,96		2.695.393.147,96
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.766.643.415,23	100	1.796.676.362,32	100	1.476.709.309,40	100	1.856.742.256,49	100	1.886.775.203,57		1.886.775.203,57
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana					757.132.892,24		770.004.155,28		632.875.418,32		795.746.681,35		808.617.944,39		808.617.944,39
		Persentase Ketersedianya Layanan Informasi Rawan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	50	18,18		18,18		18,18		18,18		18,18		18,18	
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	50	33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33	
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					3.974.640.034,23		4.033.438.084,68		3.092.236.135,13		3.651.034.185,58		4.209.832.236,03		4.209.832.236,03
1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial					3.974.640.034,23		4.033.438.084,68		3.092.236.135,13		3.651.034.185,58		4.209.832.236,03		4.209.832.236,03
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.589.856.013,69		1.613.375.233,87		1.436.894.454,05		1.660.413.674,23		1.683.932.894,41		1.683.932.894,41
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
1.04.02	Program Pemberdayaan Sosial					1.488.588.015,40		1.515.047.138,10		816.506.260,81		1.067.965.383,51		1.594.424.506,21		1.594.424.506,21
		Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	105	105		105		105		105		105		105	
		Peningkatan kapasitas bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	Orang	35	35		35		35		35		35		35	
		Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang Dimiliki	Persen	30	35		100		100		100		100		100	
						-									-	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	Persen	10	20		25		20		25		30		30	
1.04.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					596.196.005,13		605.015.712,70		538.835.420,27		622.655.127,84		631.474.835,40		631.474.835,40
		Bantuan Sosial Ekonomi Produktif Bagi Fakir Miskin	Orang	0	20		30		40		40		50		50	
		Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat	KK	33.000	34.000		35.000		22.000		25		35.000		35.000	
1.04.06	Program Penanganan Bencana					596.196.005,13		605.015.712,70		538.835.420,27		622.655.127,84		631.474.835,40		631.474.835,40
		Persentase Kordan Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat	Persen	0	10		15		20		25		30		30	
		Jumlah Lokasi Warga Masyarakat Rawan Bencana Alam Yang Mendapatkan Kesiapsiagaan Dan Mitigasi	Lokasi	2	5		5		5		10		8		8	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					66.960.028.295,23		76.386.822.665,24		77.096.776.265,05		110.909.665.329,01		86.165.533.889,07		86.165.533.889,07
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					2.177.214.518,18		2.224.783.991,26		2.272.353.464,35		2.319.922.937,43		2.367.492.410,51		2.367.492.410,51
2.07.2.17.0.00.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah					2.177.214.518,18		2.224.783.991,26		2.272.353.464,35		2.319.922.937,43		2.367.492.410,51		2.367.492.410,51
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.718.853.566,99		1.756.408.414,16		1.793.963.261,33		1.831.518.108,50		1.869.072.955,67		1.869.072.955,67
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja					114.590.237,80		117.093.894,28		119.597.550,76		122.101.207,23		124.604.863,71		124.604.863,71
		Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	77,14	77,41		77,32		77,22		77,14		77,04		77,04	
		Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,15	4,42		4,33		4,23		4,15		4,05		4,05	
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Tenaga Kerja Makro, Mikro di Kabupaten Nias Selatan	Persen		50		50		50		50		50		50	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					114.590.237,80		117.093.894,28		119.597.550,76		122.101.207,23		124.604.863,71		124.604.863,71
		Persentase Tenaga Kerja							2		2		2		2	
		Bersertifikat Kompetensi	Persen		0		2		2				- 4		2	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.07.05	Program Hubungan Industrial					114.590.237,80		117.093.894,28		119.597.550,76		122.101.207,23		124.604.863,71		124.604.863,71
		Penetapan Upah Minimal Kabupaten (UMK)	Dok										1		1	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dengan peraturan yang berlaku	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					12.487.273.835,57		12.810.763.760,98		12.989.535.092,02		13.418.592.049,77		13.597.938.918,62		13.597.938.918,62
2.08.2.14.0.00.02	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					12.487.273.835,57		12.810.763.760,98		12.989.535.092,02		13.418.592.049,77		13.597.938.918,62		13.597.938.918,62
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.848.470.024,25		6.117.066.571,60		6.200.794.916,52		6.284.657.035,97		6.368.654.936,57		6.368.654.936,57
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
2.08.02	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					1.106.467.301,89		907.282.864,90		923.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68		1.204.880.663,68
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	60	70		70		70		80		80		80	
		Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	70	85		85		85		85		85		85	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	66,7	68,7		69,7		70,7		71,7		72,7		72,7	
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68		1.204.880.663,68
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000) penduduk perempuan)	Kasus per 100.000	1,67	1,67		1,67		1,67		1,67		2,11			2,11
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68		1.204.880.663,68
		Indeks Pembangunan Keluarga	Poin		57		57		57		57		57		57	
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68		1.204.880.663,68

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan analisis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68		1.204.880.663,68
		Persentase kampung layak anak	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68		1.204.880.663,68
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.09	Urusan Pemerintahan	and an analysis				4.950.044.178,30		5.113.082.430,90		5.276.120.683,50		5.439.158.936,10		6.602.197.188,70		6.602.197.188,70
2.09.3.27.0.00.01	Bidang Pangan  Dinas Ketahanan Pangan					4.950.044.178,30		5.113.082.430,90		5.276.120.683,50		5.439.158.936,10		6.602.197.188,70		6.602.197.188,70
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.257.037.993,34		4.397.250.890,57		4.537.463.787,81		4.677.676.685,05		5.677.889.582,28		5.677.889.582,28
	and approximate the second	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					99.000.883,57		102.261.648,62		105.522.413,67		108.783.178,72		132.043.943,77		132.043.943,77
		Jumlah Lumbung Pangan, Mesin dan Lantai Jemur yang terbangun	Paket	3	5		7		9		11		13		13	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					297.002.650,70		306.784.945,85		316.567.241,01		326.349.536,17		396.131.831,32		396.131.831,32
		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	77,6	81		82		83		84		85		85	
		Tersedianya Regulasi Ketahanan Pangan yang di PERDA kan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
		Jumlah Kebutuhan Pangan (Beras)	Ton	40.000	42.000		43.000		44.000		45.000		46.000			
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan					148.501.325,35		153.392.472,93		158.283.620,51		163.174.768,08		198.065.915,66		198.065.915,66
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-				148.501.325,35		153.392.472,93		158.283.620,51		163.174.768,08		198.065.915,66		198.065.915,66
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	62,86	57,14		51,43		45,71		40,00		34,29		34,29	
		Tersedianya data dan informasi tentang ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	50.000.000,00	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					7.238.455.087,50		7.303.782.262,50		7.369.109.437,50		8.434.436.612,50		8.499.763.787,50		8.499.763.787,50
2.11.0.00.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup					7.238.455.087,50		7.303.782.262,50		7.369.109.437,50		8.434.436.612,50		8.499.763.787,50		8.499.763.787,50

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan			Kondisi	Kondisi Capaian Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan													
		Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD 2020	2022			2023		2024	2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMI			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					4.943.073.052,50	100	4.982.269.357,50	100	4.421.465.662,50	100	5.060.661.967,50	100	5.099.858.272,50	100	5.099.858.272,50		
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В			
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
	Imguangan Indap	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Yang Disusun dalam 1 periode RPJMD	Dokumen	1	2		2		2		2		1		1			
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
		lndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,22	69,22		69,22		69,22		69,22		69,22		69,22			
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)					1.051.074.729,75		1.073.285.969,25		1.755.497.208,75		2.117.708.448,25		2.139.919.687,75		2.139.919.687,75		
		Jumlah RTH (Taman) yang terpelihara dalam 1 periode RPJMD	RTH	5	1		1		1		1		1		1			
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
		Persentae Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	50	50		60		70		80		90		90			
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan					494.307.305,25		498.226.935,75		442.146.566,25		506.066.196,75		509.985.827,25		509.985.827,25		
		Persentase Pengelolaan Sampah di wilayah Kabupaten	Persen	26,63	26,13		25,63		25,13		24,63		24,13		24,13			
		Persentase Pengurangan Sampah Kabupaten	Persen	2,00	2,50		3,00		3,50		4,00		4,50		4,50			
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					5.565.893.602,58		5.669.641.241,73		5.773.388.880,88		5.877.136.520,03		5.980.884.159,18		5.980.884.159,18		
2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil					5.565.893.602,58		5.669.641.241,73		5.773.388.880,88		5.877.136.520,03		5.980.884.159,18		5.980.884.159,18		
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					3.339.536.161,55		3.401.784.745,04		3.464.033.328,53		3.526.281.912,02		3.588.530.495,51		3.588.530.495,51		
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Out Come)		Kondisi														
			Satuan	Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMI			
				2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В			
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk					913.178.720,52		933.928.248,35		954.677.776,18		975.427.304,01		996.176.831,84		996.176.831,84		
		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	Persen		90		80		85		90		95		95			
		Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga.	Persen		100		85		90		95		100		100			
		Persentase Wajib KTP yang melakukan Perekaman KTP elektronik.	Persen		100		80		85		90		95		95			
		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki Kartu Identitas ANAK (KIA).	Persen		30		25		30		35		40		40			
2.12.03	Program Pencatatan Sipil					556.589.360,26		566.964.124,17		577.338.888,09		587.713.652,00		598.088.415,92		598.088.415,92		
		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran.	Persen		100		75		80		85		85		85			
		Persentase Pasangan yang Memiliki Akta Perkawinan.	Persen		100		45		50		55		60		60			
		Persentase Penerbitan Akta Kematian.	Persen		100		25		30		35		40		40			
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					556.589.360,26		566.964.124,17		577.338.888,09		587.713.652,00		598.088.415,92		598.088.415,92		
		Pemanfaatan data kependudukan	OPD		2		3		3		3		3		3			
2.12.05	Program pengelolaan Profil Kependudukan					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
		Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Nias	Buku		1		1		1		1		1		1			
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					4.138.696.765,50		4.120.894.656,50		4.203.092.547,50		34.285.290.438,50		4.367.488.329,50		4.367.488.329,50		
2.13.0.00.0.00.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa					4.138.696.765,50		4.120.894.656,50		4.203.092.547,50		34.285.290.438,50		4.367.488.329,50		4.367.488.329,50		
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2.483.218.059,30		2.472.536.793,90		2.521.855.528,50		2.742.823.235,08		2.620.492.997,70		2.620.492.997,70		
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В			
2.13.02	Program Penataan Desa					413.869.676,55		412.089.465,65		420.309.254,75		342.852.904,39		436.748.832,95		436.748.832,95		
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	21	23,29		24,66		26,03		27,40		28,77		28,77			
		Tersedianya Regulasi (Perbup) tentang kewenangan desa dalam pelaksanaan dana desa setiap tahun	Ada/ Tidak Ada	ada	ada		ada		ada		ada		ada		ada			
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa					413.869.676,55		412.089.465,65		420.309.254,75		342.852.904,39		436.748.832,95		436.748.832,95		

KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan			Kondisi														
		Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
				2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		Jumlah Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) yang terbentuk setiap tahunnya	Badan	4	6		8		10		12		14		14			
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa					413.869.676,55		412.089.465,65		420.309.254,75		30.513.908.490,27		436.748.832,95	5	436.748.832,95		
		Persentase Pengelolaan dan Penyerapan Dana Desa/ADD	Persen	99,56	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Dilatih Dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persen	25	100		100		100		100		100		100			
		Persentase BUMDes yang Aktif	Persen	50	58		67		76		85		94		94			
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					413.869.676,55		412.089.465,65		420.309.254,75		342.852.904,39		436.748.832,95	5	436.748.832,95		
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat yang Dibina	Persen	5	6		7		8		9		10		10			
		Jumlah desa percontohan yang melaksanakan 10 program pokok PKK	Desa	4	8		12		16		20		24		24			
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					3.319.401.905,66		3.471.848.594,69		3.519.370.087,75		3.566.967.506,90		3.614.641.991,03	3	3.614.641.991,03		
2.08.2.14.0.00.02	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					3.319.401.905,66		3.471.848.594,69		3.519.370.087,75		3.566.967.506,90		3.614.641.991,03	3	3.614.641.991,03		
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68	3	1.204.880.663,68		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	14,34	16		18		20		22		24		24			
		Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	91	89		88		87		86		85		85			
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68	3	1.204.880.663,68		
		Persentase Kampung KB Aktif	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)					1.106.467.301,89		1.157.282.864,90		1.173.123.362,58		1.188.989.168,97		1.204.880.663,68	3	1.204.880.663,68		
		Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Persen	40	50		60		60		70		80		80			
		Persentase Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR-PIKR) Aktif	Persen	20	0,4		60		70		70		80		80			
		Persentase Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Aktif	Persen	30	50		50		60		60		80		80			

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan					10.616.507.557,78		10.750.720.731,33		10.885.760.779,88		12.021.640.106,55		13.158.371.300,52		13.158.371.300,52
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan					10.616.507.557,78		10.750.720.731,33		10.885.760.779,88		12.021.640.106,55		13.158.371.300,52		13.158.371.300,52
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					3.784.952.267,33		3.825.216.219,40		3.565.728.233,96		3.906.492.031,97		3.947.511.390,16		3.947.511.390,16
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)					3.046.603.023,11		3.100.288.292,53		3.754.304.311,95		4.208.656.042,62		5.263.348.520,21		5.263.348.520,21
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Poin		73		75		77		79		81		81	
		persentase keselamatan lalu lintas didalam kabupaten	Persen	99,84	99,84		99,84		99,84		99,84		99,84		99,84	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran					3.784.952.267,33		3.825.216.219,40		3.565.728.233,96		3.906.492.031,97		3.947.511.390,16		3.947.511.390,16
		Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	70	72		75		77		79		81		81	
		Jumlah penumpang kapal laut per tahun	Orang	72.146	58.876		71.576		84.976		104.676		105.776		105.776	
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					5.377.561.956,86		5.449.758.149,88		5.521.954.342,89		5.594.150.535,91		5.666.346.728,93		5.666.346.728,93
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika					5.377.561.956,86		5.449.758.149,88		5.521.954.342,89		5.594.150.535,91		5.666.346.728,93		5.666.346.728,93
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2.348.447.139,73		2.378.845.536,79		2.409.243.933,85		2.439.642.330,91		2.470.040.727,97		2.470.040.727,97
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					2.735.558.924,66		2.773.556.920,99		2.811.554.917,31		2.849.552.913,64		2.887.550.909,96		2.887.550.909,96
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	Persen	14	43		57		71		86		100		100	
		Persentase kegiatan (event) perangkat daerah yang dipublikasi secara daring	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika					293.555.892,47		297.355.692,10		301.155.491,73		304.955.291,36		308.755.091,00		308.755.091,00

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	100	80		80		85		85		85		85	
		Tingkat Capaian Aplikasi Untuk Penerapan e- Government	Persen	14	43		57		71		86		100		100	
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah					687.541.426,79		702.563.365,66		717.585.304,53		732.607.243,40		747.629.182,27		747.629.182,27
2.07.2.17.0.00.01	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah					687.541.426,79		702.563.365,66		717.585.304,53		732.607.243,40		747.629.182,27		747.629.182,27
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					85.942.678,35		87.820.420,71		89.698.163,07		91.575.905,42		93.453.647,78		93.453.647,78
		Jumlah izin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan			2		2		2		2		2		2	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					114.590.237,80		117.093.894,28		119.597.550,76		122.101.207,23		124.604.863,71		124.604.863,71
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					114.590.237,80		117.093.894,28		119.597.550,76		122.101.207,23		124.604.863,71		124.604.863,71
		Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					114.590.237,80		117.093.894,28		119.597.550,76		122.101.207,23		124.604.863,71		124.604.863,71
		Persentase capaian peningkatan kapasitas SDM Koperasi	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					85.942.678,35		87.820.420,71		89.698.163,07		91.575.905,42		93.453.647,78		93.453.647,78
		Meningkatnya jumlah SDM KUKM dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)					85.942.678,35		87.820.420,71		89.698.163,07		91.575.905,42		93.453.647,78		93.453.647,78
		Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.17.08	Program Pengembangan UMKM					85.942.678,35		87.820.420,71		89.698.163,07		91.575.905,42		93.453.647,78		93.453.647,78
		Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					3.010.727.786,60		3.080.020.751,80		3.149.313.717,00		3.218.606.682,20		3.287.899.647,40		3.287.899.647,40
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu					3.010.727.786,60		3.080.020.751,80		3.149.313.717,00		3.218.606.682,20		3.287.899.647,40		3.287.899.647,40

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.956.973.061,29		2.002.013.488,67		2.047.053.916,05		2.092.094.343,43		2.137.134.770,81		2.137.134.770,81
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Treamae			270.965.500,79		277.201.867,66		283.438.234,53		289.674.601,40		295.910.968,27		295.910.968,27
	IKIIII FEIIAIIAII WOULI	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	Persen	230	33,33		50,00		50,00		66,67		80,00		80,00	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal					210.750.945,06		215.601.452,63		220.451.960,19		225.302.467,75		230.152.975,32		230.152.975,32
	renanaman Modai	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	Persen	230	33,33		50,00		50,00		66,67		80,00		80,00	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal					210.750.945,06		215.601.452,63		220.451.960,19		225.302.467,75		230.152.975,32		230.152.975,32
	1 chandhair Modal	penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	8000	100		200		300		400		500		500	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					180.643.667,20		184.801.245,11		188.958.823,02		193.116.400,93		197.273.978,84		197.273.978,84
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persen													
		Jumlah PMA dan PMDN yang dipantau, dibina dan diawasi	Perusahaan	42	42		42		42		42		42		42	
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					180.643.667,20		184.801.245,11		188.958.823,02		193.116.400,93		197.273.978,84		197.273.978,84
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten	Ada/ Tidak Ada	Ada	1		1		1		1		1		1	
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					397.946.482,05		1.354.520.712,40		1.213.118.438,34		1.471.896.385,92		1.490.857.258,45		1.490.857.258,45
2.22.2.19.3.26.02	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga					397.946.482,05		1.354.520.712,40		1.213.118.438,34		1.471.896.385,92		1.490.857.258,45		1.490.857.258,45
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					149.229.930,77		507.945.267,15		454.919.414,38		551.961.144,72		559.071.471,92		559.071.471,92
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	0,1		0,2		0,3		0,4		0,5		0,5	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					149.229.930,77		507.945.267,15		454.919.414,38		551.961.144,72		559.071.471,92		559.071.471,92
		Persentase organisasi induk/cabang olah raga yang dibina	Persen		100		100		100		100		100		100	
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan					99.486.620,51		338.630.178,10		303.279.609,59		367.974.096,48		372.714.314,61		372.714.314,61
		Peningkatan Kualitas Organisasi Kepramukaan	Kegiatan	1	1		1		1		1		1		1	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					293.555.892,47		297.355.692,10		301.155.491,73		304.955.291,36		308.755.091,00		308.755.091,00
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika					293.555.892,47		297.355.692,10		301.155.491,73		304.955.291,36		308.755.091,00		308.755.091,00
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					293.555.892,47		297.355.692,10		301.155.491,73		304.955.291,36		308.755.091,00		308.755.091,00
		Persentase Organisasi Pcrangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	0	20		40		60		80		100		100	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	0	20		40		60		80		100		100	
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
2.16.2.20.2.21.01	Dinas Komunikasi Dan Informatika					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00
		Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	ada/tidak ada	ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					3.432.288.407,70		10.682.741.144,42		10.463.146.530,68		10.695.106.328,54		12.858.643.854,17		12.858.643.854,17
2.22.2.19.3.26.02	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga					3.432.288.407,70		10.682.741.144,42		10.463.146.530,68		10.695.106.328,54		12.858.643.854,17		12.858.643.854,17
2.22.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2.238.448.961,54		7.619.179.007,23		6.823.791.215,66		8.279.417.170,79		8.386.072.078,81		8.386.072.078,81
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan					545.892.964,10		1.459.041.424,79		2.176.236.876,68		693.792.771,84		2.731.714.516,91		2.731.714.516,91
		Persentase festival budaya daerah yang diselenggarakan di tingkat kabupaten	Persen	0	100		100		100		100		100		100	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional					250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	Orang	0	20		40		60		80		100		100	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya					397.946.482,05		1.354.520.712,40		1.213.118.438,34		1.471.896.385,92		1.490.857.258,45		1.490.857.258,45
		Terlestarikannya cagar budaya	Persen	0	10		15		20		25		30		30	
	i	ì														
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					2.821.565.380,36		2.901.997.564,77		2.982.429.749,18		3.062.861.933,59		3.143.294.118,00		3.143.294.118,00

				Kondisi					C	Capaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					2.208.181.602,02		2.271.128.528,95		2.334.075.455,88		2.397.022.382,81		2.459.969.309,74		2.459.969.309,74
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan					613.383.778,34		630.869.035,82		648.354.293,30		665.839.550,78		683.324.808,26		683.324.808,26
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	1,00	1,10		1,25		1,50		1,70		2,00		2,00	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	50,00	52,30		53,0		54,0		54,0		55,0		55,0	
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					245.353.511,34		252.347.614,33		259.341.717,32		266.335.820,31		273.329.923,30		273.329.923,30
2.23.2.24.0.00.01	Dinas Perpustakaan					245.353.511,34		252.347.614,33		259.341.717,32		266.335.820,31		273.329.923,30		273.329.923,30
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip					122.676.755,67		126.173.807,16		129.670.858,66		133.167.910,16		136.664.961,65		136.664.961,65
		Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	Arsip	n/a	1.000		2.000		3.000		4.000		6.000		6000	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip					122.676.755,67		126.173.807,16		129.670.858,66		133.167.910,16		136.664.961,65		136.664.961,65
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	
3	Urusan Pemerintahan					11.139.163.149,47		22.976.433.418,86		20.833.806.238,10		23.343.208.969,54		26.164.672.061,86		26.164.672.061,86
3.25	Pilihan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					3.279.419.215,05		5.752.634.777,15		5.328.135.339,25		5.903.955.176,35		5.980.099.077,58		5.980.099.077,58
3.25.0.00.0.00.01	Dinas Kelautan Dan Perikanan					3.279.419.215,05		5.752.634.777,15		5.328.135.339,25		5.903.955.176,35		5.980.099.077,58		5.980.099.077,58
3.25.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.770.886.376,13		3.106.422.779,66		3.147.193.083,20		3.188.135.795,23		3.229.253.501,89		3.229.253.501,89
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					983.825.764,52		1.725.790.433,15		1.248.440.601,78		1.771.186.552,91		1.794.029.723,27		1.794.029.723,27
		Produktifitas perikanan tangkap	Ton/ Tahun	8.600	8.650		8.700		8.750		8.800		8.850		8.850	
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					459.118.690,11		805.368.868,80		815.938.947,50		826.553.724,69		837.213.870,86		837.213.870,86

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Produktifitas perikanan budidaya	Ton/ Tahun	10	11		12		13		14		15		15	
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					65.588.384,30		115.052.695,54		116.562.706,79		118.079.103,53		119.601.981,55		119.601.981,55
		Jumlah rumah tangga Nelayan yang Melakukan Diversifikasi Usaha (RTP)	RT	0	10		20		30		40		50		50	
		Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	Kg/ Kapita/ Thn	69,94	70		70,5		71		71,5		72		72	
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					1.144.096.135,90		3.894.247.048,14		3.487.715.510,23		4.231.702.109,51		4.286.214.618,06		4.286.214.618,06
2.22.2.19.3.26.02	Dinas Kebudayaan Pariwisata Dan Kepemudaan Olahraga					1.144.096.135,90		3.894.247.048,14		3.487.715.510,23		4.231.702.109,51		4.286.214.618,06		4.286.214.618,06
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					497.433.102,57		1.693.150.890,50		1.516.398.047,93		1.839.870.482,40		1.863.571.573,07		1.863.571.573,07
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0,86			1,72		1,85		1,92		2,00		2,00	
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata					397.946.482,05		1.354.520.712,40		1.213.118.438,34		1.471.896.385,92		1.490.857.258,45		1.490.857.258,45
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0,86	0,21		0,22		0,23		0,24		0,25		0,25	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					248.716.551,28		846.575.445,25		758.199.023,96		919.935.241,20		931.785.786,53		931.785.786,53
		Jumlah Pelaku Pariwisata yang Terbina	Orang	120	200		280		360		440		520		520	
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					3.996.285.884,18		10.059.137.878,53		9.196.489.872,88		9.835.034.367,23		12.474.789.249,08		12.474.789.249,08
3.27.0.00.0.00.01	Dinas Pertanian					3.996.285.884,18		10.059.137.878,53		9.196.489.872,88		9.835.034.367,23		12.474.789.249,08		12.474.789.249,08
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					1.798.328.647,88		4.526.612.045,34		4.363.420.442,79		4.650.765.465,25		5.613.655.162,08		5.613.655.162,08
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					1.078.997.188,73		2.715.967.227,20		2.118.052.265,68		2.290.459.279,15		3.368.193.097,25		3.368.193.097,25
		Produktifitas tanaman Padi per tahun	Ton/ hektar	4,27	4,29		4,31		4,34		4,36		4,38		4,38	
		Produktifitas tanaman Jagung per tahun	Ton/ hektar	6,13	6,16		6,19		6,22		6,25		6,28		6,28	
		Produktifitas Cabai per tahun	Ton/ hektar	4,50	4,70		4,90		5,10		5,30		5,5		5,5	
		Populasi Ternak Besar (Babi)	Ekor	4.756	8.956		13.156		17.356		21.556		25.756		25.756	
		Produktifitas Kelapa per tahun	Ton/ hektar	1.052,29	1.057,60		1.062,92		1.068,23		1.073,55		1.078,86		1.078,86	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					679.368.600,31		1.710.053.439,35		1.648.403.278,39		1.756.955.842,43		2.120.714.172,34		2.120.714.172,34

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	Persen		100		100		100		100		100		100	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					199.814.294,21		502.956.893,93		484.824.493,64		516.751.718,36		623.739.462,45		623.739.462,45
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulanganbencana pertanian kabupaten/ kota	Persen		100		100		100		100		100		100	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					79.925.717,68		201.182.757,57		193.929.797,46		206.700.687,34		249.495.784,98		249.495.784,98
		Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	Persen		100		100		100		100		100		100	
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian					79.925.717,68		201.182.757,57		193.929.797,46		206.700.687,34		249.495.784,98		249.495.784,98
		Persentasi penerbitan perizinan usaha di bidang pertanian			100		100		100		100		100		100	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian					79.925.717,68		201.182.757,57		193.929.797,46		206.700.687,34		249.495.784,98		249.495.784,98
		Persentase Kelompok Tani yang Aktif	Persen		100		100		100		100		100		100	
		Persentase PPL yang Terampil	Persen		100		100		100		100		100		100	
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					734.227.716,87		883.011.703,06		761.795.689,25		910.579.675,44		924.363.661,63		924.363.661,63
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan					734.227.716,87		883.011.703,06		761.795.689,25		910.579.675,44		924.363.661,63		924.363.661,63
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan					108.774.476,57		130.816.548,60		112.858.620,63		134.900.692,66		136.942.764,69		136.942.764,69
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	Persen	n/a	15		30		45		60		75		75	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					81.580.857,43		98.112.411,45		84.643.965,47		101.175.519,49		102.707.073,51		102.707.073,51
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan	Persen	n/a	70		75		80		85		90		90	
.30.04 E	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					435.097.906,30		523.266.194,41		451.434.482,52		539.602.770,63		547.771.058,74		547.771.058,74
		Persentase Kinerja realisasi pupuk	Persen	n/a	75		75		80		85		75		75	
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					108.774.476,57		130.816.548,60		112.858.620,63		134.900.692,66		136.942.764,69		136.942.764,69
		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	Persen		70		75		80		85		90		90	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					1.985.134.197,48		2.387.402.011,99		2.059.669.826,50		2.461.937.641,01		2.499.205.455,52		2.499.205.455,52
3.31.3.30.0.00.02	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan					1.985.134.197,48		2.387.402.011,99		2.059.669.826,50		2.461.937.641,01		2.499.205.455,52		2.499.205.455,52
3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.468.455.433,75		1.766.023.406,13		1.523.591.378,51		1.821.159.350,88		1.848.727.323,26		1.848.727.323,26
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					462.291.525,44		555.970.331,56		479.649.137,68		573.327.943,80		582.006.749,92		582.006.749,92
		Terselesaikannya dokumen RIPIK menjadi Perda	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri					54.387.238,29		65.408.274,30		56.429.310,32		67.450.346,33		68.471.382,34		68.471.382,34
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	n/a	50		50		50		50		50		50	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistim Infomasi industri Nasional															
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					101.420.316.976,13		93.797.982.852,38		89.175.648.728,63		89.553.314.604,88		89.930.980.481,13		89.930.980.481,13
4.01	Sekretariat Daerah					62.766.191.868,00		55.072.451.764,00		50.378.711.660,00		50.684.971.556,00		50.991.231.452,00		50.991.231.452,00
4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah					62.766.191.868,00		55.072.451.764,00		50.378.711.660,00		50.684.971.556,00		50.991.231.452,00		50.991.231.452,00
4.01.01	Program Administrasi Umum					18.829.857.560,40		16.521.735.529,20		15.113.613.498,00		15.205.491.466,80		15.297.369.435,60		15.297.369.435,60
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai LPPD	Nilai/ Predikat	19.044	20.144		2.344		2.544		2.744		2.944		2.944	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai/ Predikat	n/a	С		С		С		В		В		В	
		Tingkat capaian pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persen		100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					6.276.619.186,80		5.507.245.176,40		5.037.871.166,00		5.068.497.155,60		5.099.123.145,20		5.099.123.145,20
		Persentase administrasi pemerintahan yang tertata dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase produk hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Kerjasama yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah minimal "B"	Persen		60		65		70		80		90		90	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan					37.659.715.120,80		33.043.471.058,40		30.227.226.996,00		30.410.982.933,60		30.594.738.871,20		30.594.738.871,20
		Persentase terlaksananya siklus koordinasi bidang perekonomian dan evaluasi BUMD/ekonomi mikro kecil	Persen	100	67		83		100		100		100		100	
		Persentase program pembangunan yang terkendali dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase pengadaan barang dan jasa yang terlaksana dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase terpantaunya kebijakan sumber daya alam	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
4.02	Sekretariat DPRD					38.654.125.108,13		38.725.531.088,38		38.796.937.068,63		38.868.343.048,88		38.939.749.029,13		38.939.749.029,13
4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRD					38.654.125.108,13		38.725.531.088,38		38.796.937.068,63		38.868.343.048,88		38.939.749.029,13		38.939.749.029,13
4.02.01	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota					27.057.887.575,69		27.107.871.761,86		27.157.855.948,04		27.207.840.134,21		27.257.824.320,39		27.257.824.320,39
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					11.596.237.532,44		11.617.659.326,51		11.639.081.120,59		11.660.502.914,66		11.681.924.708,74		11.681.924.708,74
		Persentase Perda yang ditetapkan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					562.745.224.621,46		569.496.553.665,73		639.867.563.289,30		591.547.879.357,93		603.242.355.770,95		603.242.355.770,95

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.01	Perencanaan					6.490.224.204,60		6.575.689.853,61		5.431.155.504,61		6.746.621.151,62		6.832.086.800,62		6.832.086.800,62
5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					6.490.224.204,60		6.575.689.853,61		5.431.155.504,61		6.746.621.151,62		6.832.086.800,62		6.832.086.800,62
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					3.680.024.033,54		3.728.483.937,61		3.226.943.841,69		3.825.403.745,76		3.873.863.649,84		3.873.863.649,84
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					1.472.009.613,42		1.491.393.575,05		1.290.777.536,68		1.530.161.498,31		1.549.545.459,94		1.549.545.459,94
		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan daerah	Persen		100		100		100		100		100		100	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1.338.190.557,65		1.355.812.340,95		913.434.126,25		1.391.055.907,55		1.408.677.690,85		1.408.677.690,85
		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Persen		100		100		100		100		100		100	
		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA	Persen		100		100		100		100		100		100	
		Persentase konsistensi program perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen		100		100		100		100		100		100	
		tingkat sinkronisasi Dokumen Perencanaan Desa yang sinkron dengan Dokumen Perencanaan Kabupaten	Persen		75		75		75		75		75		75	
5.02	Keuangan					547.557.597.044,43		553.052.010.254,90		625.438.735.604,43		573.614.767.403,01		585.064.959.543,97		585.064.959.543,97
5.02.0.00.0.00.04	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah					547.557.597.044,43		553.052.010.254,90		625.438.735.604,43		573.614.767.403,01		585.064.959.543,97		585.064.959.543,97
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					51.959.071.710,10		52.515.161.884,84		59.425.229.882,61		54.392.601.568,34		55.475.673.665,68		55.475.673.665,68
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					492.598.525.334,33		497.536.848.370,06		563.013.505.721,82		516.222.165.834,67		526.589.285.878,29		526.589.285.878,29

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WDP	WDP		WDP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		Waktu Penetapan Perda APBD dan PAPBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Penyusunan struktur anggaran yang berimbang (setiap tahun targetnya nol rupiah)	Rupiah	(84 M)	0		0		0		0		0		0	
		Ketepatan waktu penyusunan APBD setiap tahun	Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
		Ketetapan waktu penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban yang handal dan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
		Persentase Realisisasi APBD yang Telah Ditetapkan	Persen	92,76	Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu		Tepat Waktu	
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00
		Penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah (SIAP BMD)	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Ada	
		Persentase penyelesaian asset pemda/BMD yang tidak diketahui keberadaannya	Persen		4		8		12		16		20		20	
		Persentase tanah asset pemda yang telah disertifikatkan (sebagian aset tanah masuk dalam kawasan hutan lindung)	Persen	15	30		45		60		75		90		90	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
		Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	3,41		3,42		3,47		3,50		3,48		3,48	
5.03	Kepegawaian					8.071.841.049,34		9.182.207.620,77		8.380.574.208,54		10.428.940.796,32		10.577.307.384,09		10.577.307.384,09
5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian Daerah					8.071.841.049,34		9.182.207.620,77		8.380.574.208,54		10.428.940.796,32		10.577.307.384,09		10.577.307.384,09
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					6.287.539.343,69		7.152.456.462,49		6.528.026.225,60		8.123.595.988,71		8.239.165.751,82		8.239.165.751,82
5.03.01 P		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah					1.784.301.705,64		2.029.751.158,28		1.852.547.982,94		2.305.344.807,61		2.338.141.632,27		2.338.141.632,27
		Persentase Jabatan yang diisi Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	69	60		65		65		70		70		70	
		Persentase Kehadiran PNS	Persen	85	90		90		90		95		95		95	
		Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang telah ditindaklanjuti	Persen	83	85		85		90		90		90		90	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program I	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(522.5522)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kategori	n/a	Baik		Baik		Baik		Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik	
5.04	Pendidikan dan Pelatihan					424.833.739,44		483.274.085,30		441.082.853,08		548.891.620,86	ĺ	556.700.388,64		556.700.388,64
5.03.0.00.0.00.01	Badan Kepegawaian Daerah					424.833.739,44		483.274.085,30		441.082.853,08		548.891.620,86		556.700.388,64		556.700.388,64
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					424.833.739,44		483.274.085,30		441.082.853,08		548.891.620,86		556.700.388,64		556.700.388,64
		Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi (managerial dan teknis)	Persen	n/a	5		6		7		8		8		8	
		Persentase pegawai struktural yang mengikuti Diklat dan bersertifikat	Persen	n/a	3		5		8		10		13		13	
		Persentase pegawai fungsional yang mengikuti Diklat dan bersertifikat	Persen	n/a	3		5		8		11		14		14	
5.05	Penelitian dan Pengembangan					200.728.583,65		203.371.851,14		176.015.118,64		208.658.386,13		211.301.653,63		211.301.653,63
5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					200.728.583,65		203.371.851,14		176.015.118,64		208.658.386,13		211.301.653,63		211.301.653,63
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					200.728.583,65		203.371.851,14		176.015.118,64		208.658.386,13		211.301.653,63		211.301.653,63
.05.02 Pr		Jumlah dokumen kajian bidang penelitian dan pengembangan	Dokumen		3		3		3		3		3		3	0,00
6	Unsur Pengawasan Urusan					8.651.989.833,75		8.765.018.801,25		6.878.047.768,75		8.991.076.736,25		9.104.105.703,75		9.104.105.703,75
6.01	Pemerintahan  Inspektorat Daerah					8.651.989.833,75		8.765.018.801,25		6.878.047.768,75		8.991.076.736,25		9.104.105.703,75		9.104.105.703,75
6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat					8.651.989.833,75		8.765.018.801,25		6.878.047.768,75		8.991.076.736,25		9.104.105.703,75		9.104.105.703,75
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					3.460.795.933,50		3.506.007.520,50		2.751.219.107,50		3.596.430.694,50		3.641.642.281,50		3.641.642.281,50
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan					2.595.596.950,13		2.629.505.640,38		2.063.414.330,63		2.697.323.020,88		2.731.231.711,13		2.731.231.711,13
		Tingkat capaian pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Persen	45	45		47		49		51		53		53	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti	Persen	66	70		75		85		93		97		97	
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	II	п		п		II		III		III		III	
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	п	п		п		II		Ш		III		95	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					2.595.596.950,13		2.629.505.640,38		2.063.414.330,63		2.697.323.020,88		2.731.231.711,13		2.731.231.711,13
		Capaian Pengawasan dengan tujuan tertentu	Persen	50	50		50		50		50		50			0,00
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindak lanjuti	Persen	35	35		35		35		35		35		35	
7	Unsur Kewilayahan					62.226.664.695,00		64.042.344.293,45		65.858.023.891,75		67.673.703.490,05		69.489.383.088,35		69.489.383.088,35
7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Lolomatua					1.651.345.275,00		1.701.368.789,75		1.751.392.304,50		1.801.415.819,25		1.851.439.334,00		1.851.439.334,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.354.103.125,50		1.395.122.407,60		1.436.141.689,69		1.477.160.971,79		1.518.180.253,88		1.518.180.253,88
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					66.053.811,00		68.054.751,59		70.055.692,18		72.056.632,77		74.057.573,36		74.057.573,36
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					66.053.811,00		68.054.751,59		70.055.692,18		72.056.632,77		74.057.573,36		74.057.573,36
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					66.053.811,00		68.054.751,59		70.055.692,18		72.056.632,77		74.057.573,36		74.057.573,36
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					49.540.358,25		51.041.063,69		52.541.769,14		54.042.474,58		55.543.180,02		55.543.180,02
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					49.540.358,25		51.041.063,69		52.541.769,14		54.042.474,58		55.543.180,02		55.543.180,02
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.02	Kecamatan Gomo					2.187.692.276,00		2.261.886.446,30		2.336.080.616,60		2.410.274.786,90		2.484.468.957,20		2.484.468.957,20
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.947.046.125,64		2.013.078.937,21		2.079.111.748,77		2.145.144.560,34		2.211.177.371,91		2.211.177.371,91

	Bidang Urusan			Kondisi					c	Capaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					65.630.768,28		67.856.593,39		70.082.418,50		72.308.243,61		74.534.068,72		74.534.068,72
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					43.753.845,52		45.237.728,93		46.721.612,33		48.205.495,74		49.689.379,14		49.689.379,14
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					43.753.845,52		45.237.728,93		46.721.612,33		48.205.495,74		49.689.379,14		49.689.379,14
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					43.753.845,52		45.237.728,93		46.721.612,33		48.205.495,74		49.689.379,14		49.689.379,14
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					43.753.845,52		45.237.728,93		46.721.612,33		48.205.495,74		49.689.379,14		49.689.379,14
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Lahusa					2.134.953.138,00		2.197.834.692,65		2.260.716.247,30		2.323.597.801,95		2.386.479.356,60		2.386.479.356,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.707.962.510,40		1.758.267.754,12		1.808.572.997,84		1.858.878.241,56		1.909.183.485,28		1.909.183.485,28
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					85.398.125,52		87.913.387,71		90.428.649,89		92.943.912,08		95.459.174,26		95.459.174,26
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					85.398.125,52		87.913.387,71		90.428.649,89		92.943.912,08		95.459.174,26		95.459.174,26

	Bidang Urusan			Kondisi					C	Capaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					85.398.125,52		87.913.387,71		90.428.649,89		92.943.912,08		95.459.174,26		95.459.174,26
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					85.398.125,52		87.913.387,71		90.428.649,89		92.943.912,08		95.459.174,26	i	95.459.174,26
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					85.398.125,52		87.913.387,71		90.428.649,89		92.943.912,08		95.459.174,26		95.459.174,26
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Hibala					1.327.952.021,00		1.363.273.185,95		1.398.594.350,90		1.433.915.515,85		1.469.236.680,80		1.469.236.680,80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					982.684.495,54		1.008.822.157,60		1.034.959.819,67		1.061.097.481,73		1.087.235.143,79		1.087.235.143,79
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					79.677.121,26		81.796.391,16		83.915.661,05		86.034.930,95		88.154.200,85		88.154.200,85
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					66.397.601,05		68.163.659,30		69.929.717,55		71.695.775,79		73.461.834,04		73.461.834,04
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					66.397.601,05		68.163.659,30		69.929.717,55		71.695.775,79		73.461.834,04		73.461.834,04
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					66.397.601,05		68.163.659,30		69.929.717,55		71.695.775,79		73.461.834,04		73.461.834,04
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					66.397.601,05		68.163.659,30		69.929.717,55		71.695.775,79		73.461.834,04		73.461.834,04

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(222 2222)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Pulau-Pulau Batu					4.242.961.226,00		4.355.355.786,85		4.467.750.347,55		4.580.144.908,25		4.692.539.468,95		4.692.539.468,95
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					3.097.361.694,98		3.179.409.724,40		3.261.457.753,71		3.343.505.783,02		3.425.553.812,33		3.425.553.812,33
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					254.577.673,56		261.321.347,21		268.065.020,85		274.808.694,50		281.552.368,14		281.552.368,14
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					254.577.673,56		261.321.347,21		268.065.020,85		274.808.694,50		281.552.368,14		281.552.368,14
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					212.148.061,30		217.767.789,34		223.387.517,38		229.007.245,41		234.626.973,45		234.626.973,45
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					212.148.061,30		217.767.789,34		223.387.517,38		229.007.245,41		234.626.973,45		234.626.973,45
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					212.148.061,30		217.767.789,34		223.387.517,38		229.007.245,41		234.626.973,45		234.626.973,45
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Teluk Dalam					4.125.599.507,00		4.219.988.760,80		4.314.378.014,60		4.408.767.268,40		4.503.156.522,20		4.503.156.522,20
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2.640.383.684,48		2.700.792.806,91		2.761.201.929,34		2.821.611.051,78		2.882.020.174,21		2.882.020.174,21
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					330.047.960,56		337.599.100,86		345.150.241,17		352.701.381,47		360.252.521,78		360.252.521,78
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					288.791.965,49		295.399.213,26		302.006.461,02		308.613.708,79		315.220.956,55		315.220.956,55
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					288.791.965,49		295.399.213,26		302.006.461,02		308.613.708,79		315.220.956,55		315.220.956,55
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					288.791.965,49		295.399.213,26		302.006.461,02		308.613.708,79		315.220.956,55		315.220.956,55
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					288.791.965,49		295.399.213,26		302.006.461,02		308.613.708,79		315.220.956,55		315.220.956,55
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Amandraya					2.187.672.323,00		2.260.695.506,95		2.333.718.690,90		2.406.741.874,85		2.479.765.058,80		2.479.765.058,80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.925.151.644,24		1.989.412.046,12		2.053.672.447,99		2.117.932.849,87		2.182.193.251,74		2.182.193.251,74
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					65.630.169,69		67.820.865,21		70.011.560,73		72.202.256,25		74.392.951,76		74.392.951,76
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					65.630.169,69		67.820.865,21		70.011.560,73		72.202.256,25		74.392.951,76		74.392.951,76
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					43.753.446,46		45.213.910,14		46.674.373,82		48.134.837,50		49.595.301,18		49.595.301,18

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(======,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					43.753.446,46		45.213.910,14		46.674.373,82		48.134.837,50		49.595.301,18		49.595.301,18
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					43.753.446,46		45.213.910,14		46.674.373,82		48.134.837,50		49.595.301,18		49.595.301,18
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Lolowau					2.298.825.931,00		2.379.384.647,65		2.459.943.364,30		2.540.502.080,95		2.621.060.797,60		2.621.060.797,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					2.068.943.337,90		2.141.446.182,89		2.213.949.027,87		2.286.451.872,86		2.358.954.717,84		2.358.954.717,84
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					45.976.518,62		47.587.692,95		49.198.867,29		50.810.041,62		52.421.215,95		52.421.215,95
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					45.976.518,62		47.587.692,95		49.198.867,29		50.810.041,62		52.421.215,95		52.421.215,95
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					45.976.518,62		47.587.692,95		49.198.867,29		50.810.041,62		52.421.215,95		52.421.215,95
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					45.976.518,62		47.587.692,95		49.198.867,29		50.810.041,62		52.421.215,95		52.421.215,95
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					45.976.518,62		47.587.692,95		49.198.867,29		50.810.041,62		52.421.215,95		52.421.215,95
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Susua					1.503.049.223,00		1.545.783.671,80		1.588.518.120,60		1.631.252.569,40		1.673.987.018,20		1.673.987.018,20

	Bidang Urusan			Kondisi					C	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.157.347.901,71		1.190.253.427,29		1.223.158.952,86		1.256.064.478,44		1.288.970.004,01		1.288.970.004,01
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					75.152.461,15		77.289.183,59		79.425.906,03		81.562.628,47		83.699.350,91		83.699.350,91
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					75.152.461,15		77.289.183,59		79.425.906,03		81.562.628,47		83.699.350,91		83.699.350,91
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					75.152.461,15		77.289.183,59		79.425.906,03		81.562.628,47		83.699.350,91		83.699.350,91
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					60.121.968,92		61.831.346,87		63.540.724,82		65.250.102,78		66.959.480,73	3	66.959.480,73
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					60.121.968,92		61.831.346,87		63.540.724,82		65.250.102,78		66.959.480,73	3	66.959.480,73
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Maniamolo					2.145.000.385,00		2.211.949.209,90		2.278.898.034,80		2.345.846.859,70		2.412.795.684,60		2.412.795.684,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.780.350.319,55		1.835.917.844,22		1.891.485.368,88		1.947.052.893,55		2.002.620.418,22		2.002.620.418,22
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					85.800.015,40		88.477.968,40		91.155.921,39		93.833.874,39		96.511.827,38	3	96.511.827,38

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					85.800.015,40		88.477.968,40		91.155.921,39		93.833.874,39		96.511.827,38		96.511.827,38
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					64.350.011,55		66.358.476,30		68.366.941,04		70.375.405,79		72.383.870,54		72.383.870,54
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					64.350.011,55		66.358.476,30		68.366.941,04		70.375.405,79		72.383.870,54		72.383.870,54
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					64.350.011,55		66.358.476,30		68.366.941,04		70.375.405,79		72.383.870,54		72.383.870,54
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Hilimegai					1.237.568.630,00		1.271.592.911,55		1.305.617.193,10		1.339.641.474,65		1.373.665.756,20		1.373.665.756,20
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					940.552.158,80		966.410.612,78		992.269.066,76		1.018.127.520,73		1.043.985.974,71		1.043.985.974,71
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					61.878.431,50		63.579.645,58		65.280.859,66		66.982.073,73		68.683.287,81		68.683.287,81
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					61.878.431,50		63.579.645,58		65.280.859,66		66.982.073,73		68.683.287,81		68.683.287,81
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					61.878.431,50		63.579.645,58		65.280.859,66		66.982.073,73		68.683.287,81		68.683.287,81
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					C	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					61.878.431,50		63.579.645,58		65.280.859,66		66.982.073,73		68.683.287,81		68.683.287,81
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					49.502.745,20		50.863.716,46		52.224.687,72		53.585.658,99		54.946.630,25		54.946.630,25
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Toma					1.647.445.427,00		1.691.806.056,90		1.736.166.686,80		1.780.527.316,70		1.824.887.946,60		1.824.887.946,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.219.109.615,98		1.251.936.482,11		1.284.763.348,23		1.317.590.214,36		1.350.417.080,48		1.350.417.080,48
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					98.846.725,62		101.508.363,41		104.170.001,21		106.831.639,00		109.493.276,80		109.493.276,80
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					82.372.271,35		84.590.302,85		86.808.334,34		89.026.365,84		91.244.397,33		91.244.397,33
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					82.372.271,35		84.590.302,85		86.808.334,34		89.026.365,84		91.244.397,33		91.244.397,33
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					82.372.271,35		84.590.302,85		86.808.334,34		89.026.365,84		91.244.397,33		91.244.397,33
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					82.372.271,35		84.590.302,85		86.808.334,34		89.026.365,84		91.244.397,33		91.244.397,33
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Mazino					1.288.384.005,00		1.323.995.835,75		1.359.607.666,50		1.395.219.497,25		1.430.831.328,00		1.430.831.328,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					979.171.843,80		1.006.236.835,17		1.033.301.826,54		1.060.366.817,91		1.087.431.809,28		1.087.431.809,28

	Bidang Urusan			Kondisi					C	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					64.419.200,25		66.199.791,79		67.980.383,33		69.760.974,86		71.541.566,40		71.541.566,40
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					64.419.200,25		66.199.791,79		67.980.383,33		69.760.974,86		71.541.566,40		71.541.566,40
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					64.419.200,25		66.199.791,79		67.980.383,33		69.760.974,86		71.541.566,40		71.541.566,40
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					64.419.200,25		66.199.791,79		67.980.383,33		69.760.974,86		71.541.566,40		71.541.566,40
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					51.535.360,20		52.959.833,43		54.384.306,66		55.808.779,89		57.233.253,12		57.233.253,12
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Umbunasi					1.524.195.193,00		1.571.643.238,15		1.619.091.283,30		1.666.539.328,45		1.713.987.373,60		1.713.987.373,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.265.082.010,19		1.304.463.887,66		1.343.845.765,14		1.383.227.642,61		1.422.609.520,09		1.422.609.520,09
.01.01		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					60.967.807,72		62.865.729,53		64.763.651,33		66.661.573,14		68.559.494,94		68.559.494,94
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					60.967.807,72		62.865.729,53		64.763.651,33		66.661.573,14		68.559.494,94		68.559.494,94
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					45.725.855,79		47.149.297,14		48.572.738,50		49.996.179,85		51.419.621,21		51.419.621,21
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					45.725.855,79		47.149.297,14		48.572.738,50		49.996.179,85		51.419.621,21		51.419.621,21
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					45.725.855,79		47.149.297,14		48.572.738,50		49.996.179,85		51.419.621,21		51.419.621,21
		pembinaan dan pengawasan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Aramo					1.469.998.757,00		1.512.894.734,85		1.555.790.712,70		1.598.686.690,55		1.641.582.668,40		1.641.582.668,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.161.299.018,03		1.195.186.840,53		1.229.074.663,03		1.262.962.485,53		1.296.850.308,04		1.296.850.308,04
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Tredikat			73.499.937,85		75.644.736,74		77.789.535,64		79.934.334,53		82.079.133,42	2	82.079.133,42
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					58.799.950,28		60.515.789,39		62.231.628,51		63.947.467,62		65.663.306,74		65.663.306,74
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					58.799.950,28		60.515.789,39		62.231.628,51		63.947.467,62		65.663.306,74		65.663.306,74
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					58.799.950,28		60.515.789,39		62.231.628,51		63.947.467,62		65.663.306,74		65.663.306,74
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					58.799.950,28		60.515.789,39		62.231.628,51		63.947.467,62		65.663.306,74	-	65.663.306,74

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur					1.448.167.507,00		1.489.688.202,35		1.531.208.897,70		1.572.729.593,05		1.614.250.288,40		1.614.250.288,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.144.052.330,53		1.176.853.679,86		1.209.655.029,18		1.242.456.378,51		1.275.257.727,84		1.275.257.727,84
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					72.408.375,35		74.484.410,12		76.560.444,89		78.636.479,65		80.712.514,42		80.712.514,42
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					57.926.700,28		59.587.528,09		61.248.355,91		62.909.183,72		64.570.011,54		64.570.011,54
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					57.926.700,28		59.587.528,09		61.248.355,91		62.909.183,72		64.570.011,54		64.570.011,54
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					57.926.700,28		59.587.528,09		61.248.355,91		62.909.183,72		64.570.011,54		64.570.011,54
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					57.926.700,28		59.587.528,09		61.248.355,91		62.909.183,72		64.570.011,54		64.570.011,54
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Mazo					1.644.085.209,00		1.692.135.164,95		1.740.185.120,90		1.788.235.076,85		1.836.285.032,80		1.836.285.032,80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.315.268.167,20		1.353.708.131,96		1.392.148.096,72		1.430.588.061,48		1.469.028.026,24		1.469.028.026,24
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					65.763.408,36		67.685.406,60		69.607.404,84		71.529.403,07		73.451.401,31		73.451.401,31
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					65.763.408,36		67.685.406,60		69.607.404,84		71.529.403,07		73.451.401,31		73.451.401,31
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					65.763.408,36		67.685.406,60		69.607.404,84		71.529.403,07		73.451.401,31		73.451.401,31
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					65.763.408,36		67.685.406,60		69.607.404,84		71.529.403,07		73.451.401,31		73.451.401,31
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					65.763.408,36		67.685.406,60		69.607.404,84		71.529.403,07		73.451.401,31		73.451.401,31
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.18	Kecamatan Fanayama					1.864.624.909,00		1.911.897.863,85		1.959.170.818,70		2.006.443.773,55		2.053.716.728,40		2.053.716.728,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.305.237.436,30		1.338.328.504,70		1.371.419.573,09		1.404.510.641,49		1.437.601.709,88		1.437.601.709,88
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					111.877.494,54		114.713.871,83		117.550.249,12		120.386.626,41		123.223.003,70		123.223.003,70
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					111.877.494,54		114.713.871,83		117.550.249,12		120.386.626,41		123.223.003,70		123.223.003,70
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					111.877.494,54		114.713.871,83		117.550.249,12		120.386.626,41		123.223.003,70		123.223.003,70

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					111.877.494,54		114.713.871,83		117.550.249,12		120.386.626,41		123.223.003,70		123.223.003,70
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					111.877.494,54		114.713.871,83		117.550.249,12		120.386.626,41		123.223.003,70		123.223.003,70
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.19	Kecamatan Ulunoyo					1.608.271.822,00		1.655.751.461,85		1.703.231.101,70		1.750.710.741,55		1.798.190.381,40		1.798.190.381,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.270.534.739,38		1.308.043.654,86		1.345.552.570,34		1.383.061.485,82		1.420.570.401,31		1.420.570.401,31
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					80.413.591,10		82.787.573,09		85.161.555,09		87.535.537,08		89.909.519,07		89.909.519,07
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					64.330.872,88		66.230.058,47		68.129.244,07		70.028.429,66		71.927.615,26		71.927.615,26
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					64.330.872,88		66.230.058,47		68.129.244,07		70.028.429,66		71.927.615,26		71.927.615,26
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					64.330.872,88		66.230.058,47		68.129.244,07		70.028.429,66		71.927.615,26		71.927.615,26
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					64.330.872,88		66.230.058,47		68.129.244,07		70.028.429,66		71.927.615,26		71.927.615,26
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.20	Kecamatan Huruna					2.013.745.463,00		2.079.044.855,40		2.144.344.247,80		2.209.643.640,20		2.274.943.032,60		2.274.943.032,60

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awa1 RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.711.683.643,55		1.767.188.127,09		1.822.692.610,63		1.878.197.094,17		1.933.701.577,71		1.933.701.577,71
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					60.412.363,89		62.371.345,66		64.330.327,43		66.289.309,21		68.248.290,98	i	68.248.290,98
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					60.412.363,89		62.371.345,66		64.330.327,43		66.289.309,21		68.248.290,98		68.248.290,98
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					60.412.363,89		62.371.345,66		64.330.327,43		66.289.309,21		68.248.290,98	;	68.248.290,98
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					60.412.363,89		62.371.345,66		64.330.327,43		66.289.309,21		68.248.290,98		68.248.290,98
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					60.412.363,89		62.371.345,66		64.330.327,43		66.289.309,21		68.248.290,98		68.248.290,98
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.21	Kecamatan O'o'u					1.419.017.736,00		1.461.228.934,40		1.503.440.132,80		1.545.651.331,20		1.587.862.529,60		1.587.862.529,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.135.214.188,80		1.168.983.147,52		1.202.752.106,24		1.236.521.064,96		1.270.290.023,68		1.270.290.023,68
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					56.760.709,44		58.449.157,38		60.137.605,31		61.826.053,25		63.514.501,18		63.514.501,18

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					56.760.709,44		58.449.157,38		60.137.605,31		61.826.053,25		63.514.501,18		63.514.501,18
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					56.760.709,44		58.449.157,38		60.137.605,31		61.826.053,25		63.514.501,18		63.514.501,18
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					56.760.709,44		58.449.157,38		60.137.605,31		61.826.053,25		63.514.501,18		63.514.501,18
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					56.760.709,44		58.449.157,38		60.137.605,31		61.826.053,25		63.514.501,18		63.514.501,18
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.22	Kecamatan Onohazumba					1.680.104.707,00		1.732.994.782,55		1.785.884.858,10		1.838.774.933,65		1.891.665.009,20		1.891.665.009,20
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.428.089.000,95		1.473.045.565,17		1.518.002.129,39		1.562.958.693,60		1.607.915.257,82		1.607.915.257,82
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Tround			50.403.141,21		51.989.843,48		53.576.545,74		55.163.248,01		56.749.950,28		56.749.950,28
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					50.403.141,21		51.989.843,48		53.576.545,74		55.163.248,01		56.749.950,28		56.749.950,28
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					50.403.141,21		51.989.843,48		53.576.545,74		55.163.248,01		56.749.950,28		56.749.950,28
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					C	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					50.403.141,21		51.989.843,48		53.576.545,74		55.163.248,01		56.749.950,28		56.749.950,28
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					50.403.141,21		51.989.843,48		53.576.545,74		55.163.248,01		56.749.950,28		56.749.950,28
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.23	Kecamatan Hilisalawa"ahe					1.349.097.029,00		1.387.932.509,25		1.426.767.989,50		1.465.603.469,75		1.504.438.950,00		1.504.438.950,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.052.295.682,62		1.082.587.357,22		1.112.879.031,81		1.143.170.706,41		1.173.462.381,00		1.173.462.381,00
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					67.454.851,45		69.396.625,46		71.338.399,48		73.280.173,49		75.221.947,50		75.221.947,50
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					67.454.851,45		69.396.625,46		71.338.399,48		73.280.173,49		75.221.947,50		75.221.947,50
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					53.963.881,16		55.517.300,37		57.070.719,58		58.624.138,79		60.177.558,00		60.177.558,00
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					53.963.881,16		55.517.300,37		57.070.719,58		58.624.138,79		60.177.558,00		60.177.558,00
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					53.963.881,16		55.517.300,37		57.070.719,58		58.624.138,79		60.177.558,00		60.177.558,00
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.24	Kecamatan Ulususua					1.481.531.041,00		1.523.924.308,35		1.566.317.575,70		1.608.710.843,05		1.651.104.110,40		1.651.104.110,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.170.409.522,39		1.203.900.203,60		1.237.390.884,80		1.270.881.566,01		1.304.372.247,22		1.304.372.247,22

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					74.076.552,05		76.196.215,42		78.315.878,79		80.435.542,15		82.555.205,52		82.555.205,52
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					59.261.241,64		60.956.972,33		62.652.703,03		64.348.433,72		66.044.164,42		66.044.164,42
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					59.261.241,64		60.956.972,33		62.652.703,03		64.348.433,72		66.044.164,42		66.044.164,42
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					59.261.241,64		60.956.972,33		62.652.703,03		64.348.433,72		66.044.164,42		66.044.164,42
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					59.261.241,64		60.956.972,33		62.652.703,03		64.348.433,72		66.044.164,42		66.044.164,42
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.25	Kecamatan Sidua'ori					1.576.645.951,00		1.622.766.528,55		1.668.887.106,10		1.715.007.683,65		1.761.128.261,20		1.761.128.261,20
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.371.681.977,37		1.411.806.879,84		1.451.931.782,31		1.492.056.684,78		1.532.181.587,24		1.532.181.587,24
7.01.01		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					47.299.378,53		48.682.995,86		50.066.613,18		51.450.230,51		52.833.847,84		52.833.847,84
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awa1 RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(522.5522)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					47.299.378,53		48.682.995,86		50.066.613,18		51.450.230,51		52.833.847,84		52.833.847,84
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					47.299.378,53		48.682.995,86		50.066.613,18		51.450.230,51		52.833.847,84		52.833.847,84
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					31.532.919,02		32.455.330,57		33.377.742,12		34.300.153,67		35.222.565,22		35.222.565,22
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					31.532.919,02		32.455.330,57		33.377.742,12		34.300.153,67		35.222.565,22		35.222.565,22
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.26	Kecamatan Somambawa					1.945.417.801,00		2.009.473.128,25		2.073.528.455,50		2.137.583.782,75		2.201.639.110,00		2.201.639.110,00
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.653.605.130,85		1.708.052.159,01		1.762.499.187,18		1.816.946.215,34		1.871.393.243,50		1.871.393.243,50
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					58.362.534,03		60.284.193,85		62.205.853,67		64.127.513,48		66.049.173,30		66.049.173,30
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					58.362.534,03		60.284.193,85		62.205.853,67		64.127.513,48		66.049.173,30		66.049.173,30
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					58.362.534,03		60.284.193,85		62.205.853,67		64.127.513,48		66.049.173,30		66.049.173,30
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					58.362.534,03		60.284.193,85		62.205.853,67		64.127.513,48		66.049.173,30		66.049.173,30
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					58.362.534,03		60.284.193,85		62.205.853,67		64.127.513,48		66.049.173,30		66.049.173,30
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.27	Kecamatan Boronadu					1.491.175.478,00		1.536.480.441,90		1.581.785.405,80		1.627.090.369,70		1.672.395.333,60		1.672.395.333,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.222.763.891,96		1.259.913.962,36		1.297.064.032,76		1.334.214.103,15		1.371.364.173,55	5	1.371.364.173,55
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					59.647.019,12		61.459.217,68		63.271.416,23		65.083.614,79		66.895.813,34		66.895.813,34
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					59.647.019,12		61.459.217,68		63.271.416,23		65.083.614,79		66.895.813,34		66.895.813,34
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					59.647.019,12		61.459.217,68		63.271.416,23		65.083.614,79		66.895.813,34		66.895.813,34
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					44.735.264,34		46.094.413,26		47.453.562,17		48.812.711,09		50.171.860,01		50.171.860,01
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					44.735.264,34		46.094.413,26		47.453.562,17		48.812.711,09		50.171.860,01		50.171.860,01
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.28	Kecamatan Simuk					1.224.462.113,00		1.255.866.918,65		1.287.271.724,30		1.318.676.529,95		1.350.081.335,60		1.350.081.335,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					881.612.721,36		904.224.181,43		926.835.641,50		949.447.101,56		972.058.561,63	3	972.058.561,63
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	a Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					73.467.726,78		75.352.015,12		77.236.303,46		79.120.591,80		81.004.880,14		81.004.880,14
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					73.467.726,78		75.352.015,12		77.236.303,46		79.120.591,80		81.004.880,14		81.004.880,14
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					73.467.726,78		75.352.015,12		77.236.303,46		79.120.591,80		81.004.880,14		81.004.880,14
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					61.223.105,65		62.793.345,93		64.363.586,22		65.933.826,50		67.504.066,78		67.504.066,78
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					61.223.105,65		62.793.345,93		64.363.586,22		65.933.826,50		67.504.066,78		67.504.066,78
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.29	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat					1.478.869.807,00		1.522.320.087,35		1.565.770.367,70		1.609.220.648,05		1.652.670.928,40		1.652.670.928,40
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.035.208.864,90		1.065.624.061,15		1.096.039.257,39		1.126.454.453,64		1.156.869.649,88		1.156.869.649,88
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					88.732.188,42		91.339.205,24		93.946.222,06		96.553.238,88		99.160.255,70		99.160.255,70
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					88.732.188,42		91.339.205,24		93.946.222,06		96.553.238,88		99.160.255,70		99.160.255,70
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					88.732.188,42		91.339.205,24		93.946.222,06		96.553.238,88		99.160.255,70		99.160.255,70

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(======,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					88.732.188,42		91.339.205,24		93.946.222,06		96.553.238,88		99.160.255,70		99.160.255,70
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					88.732.188,42		91.339.205,24		93.946.222,06		96.553.238,88		99.160.255,70		99.160.255,70
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.30	Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara					1.627.032.269,00		1.677.134.312,45		1.727.236.355,90		1.777.338.399,35		1.827.440.442,80		1.827.440.442,80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.350.436.783,27		1.392.021.479,33		1.433.606.175,40		1.475.190.871,46		1.516.775.567,52		1.516.775.567,52
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					65.081.290,76		67.085.372,50		69.089.454,24		71.093.535,97		73.097.617,71		73.097.617,71
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					65.081.290,76		67.085.372,50		69.089.454,24		71.093.535,97		73.097.617,71		73.097.617,71
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					48.810.968,07		50.314.029,37		51.817.090,68		53.320.151,98		54.823.213,28		54.823.213,28
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					48.810.968,07		50.314.029,37		51.817.090,68		53.320.151,98		54.823.213,28		54.823.213,28
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					48.810.968,07		50.314.029,37		51.817.090,68		53.320.151,98		54.823.213,28		54.823.213,28
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.31	Kecamatan Tanah Masa					1.629.712.414,00		1.679.627.614,70		1.729.542.815,40		1.779.458.016,10		1.829.373.216,80		1.829.373.216,80

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.336.364.179,48		1.377.294.644,05		1.418.225.108,63		1.459.155.573,20		1.500.086.037,78		1.500.086.037,78
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					65.188.496,56		67.185.104,59		69.181.712,62		71.178.320,64		73.174.928,67		73.174.928,67
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					65.188.496,56		67.185.104,59		69.181.712,62		71.178.320,64		73.174.928,67		73.174.928,67
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					65.188.496,56		67.185.104,59		69.181.712,62		71.178.320,64		73.174.928,67		73.174.928,67
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					48.891.372,42		50.388.828,44		51.886.284,46		53.383.740,48		54.881.196,50		54.881.196,50
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					48.891.372,42		50.388.828,44		51.886.284,46		53.383.740,48		54.881.196,50		54.881.196,50
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.32	Kecamatan Luahagundre Maniamolo					1.794.899.942,00		1.848.492.518,15		1.902.085.094,30		1.955.677.670,45		2.009.270.246,60		2.009.270.246,60
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.435.919.953,60	100	1.478.794.014,52		1.521.668.075,44		1.564.542.136,36		1.607.416.197,28		1.607.416.197,28
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					71.795.997,68		73.939.700,73		76.083.403,77		78.227.106,82		80.370.809,86		80.370.809,86

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					71.795.997,68		73.939.700,73		76.083.403,77		78.227.106,82		80.370.809,86		80.370.809,86
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					71.795.997,68		73.939.700,73		76.083.403,77		78.227.106,82		80.370.809,86		80.370.809,86
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					71.795.997,68		73.939.700,73		76.083.403,77		78.227.106,82		80.370.809,86		80.370.809,86
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					71.795.997,68		73.939.700,73		76.083.403,77		78.227.106,82		80.370.809,86		80.370.809,86
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.33	Kecamatan Onolalu					1.256.882.782,00		1.291.155.925,05		1.325.429.068,10		1.359.702.211,15		1.393.975.354,20		1.393.975.354,20
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					955.230.914,32		981.278.503,04		1.007.326.091,76		1.033.373.680,47		1.059.421.269,19		1.059.421.269,19
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					62.844.139,10		64.557.796,25		66.271.453,41		67.985.110,56		69.698.767,71		69.698.767,71
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					62.844.139,10		64.557.796,25		66.271.453,41		67.985.110,56		69.698.767,71		69.698.767,71
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					62.844.139,10		64.557.796,25		66.271.453,41		67.985.110,56		69.698.767,71		69.698.767,71
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	

	Bidang Urusan			Kondisi					c	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan			2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					62.844.139,10		64.557.796,25		66.271.453,41		67.985.110,56		69.698.767,71		69.698.767,71
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					50.275.311,28		51.646.237,00		53.017.162,72		54.388.088,45		55.759.014,17		55.759.014,17
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.34	Kecamatan Uluidanotae					1.270.508.249,00		1.301.968.315,70		1.333.428.382,40		1.364.888.449,10		1.396.348.515,80		1.396.348.515,80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					978.291.351,73		1.002.515.603,09		1.026.739.854,45		1.050.964.105,81		1.075.188.357,17		1.075.188.357,17
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Treama			63.525.412,45		65.098.415,79		66.671.419,12		68.244.422,46		69.817.425,79		69.817.425,79
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					63.525.412,45		65.098.415,79		66.671.419,12		68.244.422,46		69.817.425,79		69.817.425,79
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					63.525.412,45		65.098.415,79		66.671.419,12		68.244.422,46		69.817.425,79		69.817.425,79
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					50.820.329,96		52.078.732,63		53.337.135,30		54.595.537,96		55.853.940,63		55.853.940,63
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					50.820.329,96		52.078.732,63		53.337.135,30		54.595.537,96		55.853.940,63		55.853.940,63
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.0.00.0.00.35	Kecamatan Idanotae					1.449.769.149,00		1.493.006.943,95		1.536.244.738,90		1.579.482.533,85		1.622.720.328,80		1.622.720.328,80
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					1.145.317.627,71		1.179.475.485,72		1.213.633.343,73		1.247.791.201,74		1.281.949.059,75		1.281.949.059,75

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman: VII-65

									C	Capaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kin	erja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	(out come)		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	0,00
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	СС		В		В		В		В		В	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					72.488.457,45		74.650.347,20		76.812.236,95		78.974.126,69		81.136.016,44		81.136.016,44
		Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					57.990.765,96		59.720.277,76		61.449.789,56		63.179.301,35		64.908.813,15		64.908.813,15
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					57.990.765,96		59.720.277,76		61.449.789,56		63.179.301,35		64.908.813,15		64.908.813,15
		Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					57.990.765,96		59.720.277,76		61.449.789,56		63.179.301,35		64.908.813,15		64.908.813,15
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					57.990.765,96		59.720.277,76		61.449.789,56		63.179.301,35		64.908.813,15		64.908.813,15
		Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
8	Unsur Pemerintahan Umum					3.547.124.000,00		3.554.252.000,00		3.361.380.000,00		3.868.508.000,00		3.875.636.000,00		3.875.636.000,00
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik					3.547.124.000,00		3.554.252.000,00		3.361.380.000,00		3.868.508.000,00		3.875.636.000,00		3.875.636.000,00
8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik					3.547.124.000,00		3.554.252.000,00		3.361.380.000,00		3.868.508.000,00		3.875.636.000,00		3.875.636.000,00
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					851.309.760,00		853.020.480,00		806.731.200,00		928.441.920,00		930.152.640,00		930.152.640,00
		Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel dan transparan	Persen	100	100		100		100		100		100		100	
		Nilai Lakip OPD	Nilai/ Predikat	n/a	сс		В		В		В		В		В	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					532.068.600,00		533.137.800,00		504.207.000,00		580.276.200,00		581.345.400,00		581.345.400,00
		Tingkat Capaian Kegiatan Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persen	n/a	100		100		100		100		100		100	

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman: VII-66

	Bidang Urusan			Kondisi					С	apaian Kinerja Program D	an Kerangka	Pendanaan				
KODE	Pemerintahan Dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Out Come)	Satuan	Awal RPJMD		2022		2023		2024		2025		2026	Kondisi Kine	rja Pada Akhir RPJMD
	Pembangunan	, ,		2020	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					1.418.849.600,00		1.421.700.800,00		1.344.552.000,00		1.547.403.200,00		1.550.254.400,00		1.550.254.400,00
		Tingkat Capaian Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu	Persen	n/a	75		75		75		75		75		75	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					283.769.920,00		284.340.160,00		268.910.400,00		309.480.640,00		310.050.880,00		310.050.880,00
		Tingkat Capaian Fasilitasi Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan	Persen													
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					283.769.920,00		284.340.160,00		268.910.400,00		309.480.640,00		310.050.880,00		310.050.880,00
		Tingkat Capaian Pembinaan PEKAT	Persen		50		50		50		50		50			
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial					177.356.200,00		177.712.600,00		168.069.000,00		193.425.400,00		193.781.800,00		193.781.800,00
		Tingkat Capaian Penanganan Konflik Sosial	Persen		100		100		100		100		100		100	
		Tingkat Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama	Persen		100		100		100		100		100		100	

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 Halaman: VII-67

#### **BAB VIII**

#### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Guna menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan menetapkan indikator makro pembangunan. Indikator kinerja makro tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Nias Selatan, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan nasional dan menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten Nias Selatan, dan stakeholder lainnya serta pemerintah desa se-Kabupaten Nias Selatan.

## 8.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Nias Selatan

Indikator makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Indeks Gini. Untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, indikator makro menjadi

Halaman : VIII-1

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

parameter keberhasilan pembangunan di Nias Selatan. Selain itu indikator makro juga jadi pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara maupun nasional.

Proyeksi indikator kinerja makro mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 dimuat pada tabel 8.1 berikut:

RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026

Halaman : VIII-2

Tabel 8.1.
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARG	SET CAPAIA	N		KONDISI
			2020	2022	2023	2024	2025	2026 67,39 3,04 15,79 4,05 5,33 0,196 26,07 15,98	AKHIR
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	67,39
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	2,14	2,32	2,5	2,68	2,86	3,04	3,04
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	16,74	16,55	16,36	16,17	15,98	15,79	15,79
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,15	4,42	4,33	4,23	4,15	4,05	4,05
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	0,61	0,61-1,79	1,79-2,97	2,97-4,15	4,15-5,33	5,33	5,33
6	Indeks Gini	Poin	0,286	0,236	0,226	0,216	0,206	0,196	0,196
7	PDRB per kapita ADHB	Juta Rupiah/ Jiwa	22,22	22,99	23,76	24,53	25,30	26,07	26,07
8	PDRB per kapita ADHK	Juta Rupiah/ Jiwa	13,17	13,43	13,83	14,40	15,17	15,98	15,98

### 8.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nias Selatan

Indikator Kinerja Utama ditetapkan untuk memberi pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dari aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah direncanakan dalam periode RPJMD.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan periode 2021-2026. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan. IKU Kabupaten Nias Selatan disajikan pada Tabel 8.2 berikut.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2021-2026

				thun 2021-20	20				
No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		т	arget Capaia	n		Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indek Reformasi Birokrasi	Kategori	-	С	С	CC	В	В	В
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	-	Kurang Baik	Kurang Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	С	CC	В	В	В	В	В
5	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	54,36	60,44	64,51	68,09	71,66	75,74	75,74
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	61	65	68	71	75	75
7	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	Persen	55,72	59,9	64,0	68,2	72.32	76,47	76,47
8	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49,55	50,05	50,5	51,1	51,6	52,0	52,0
9	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76,04	80,4	84,76	89,12	93,48	97,84	97,84
10	Rasio Rumah Layak huni	Rasio	0,048	0,050	0,053	0,055	0,056	0,057	0,057
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	67,39
12	Indeks Pendidikan	Poin	53,56	55,83	57,01	58,19	59,38	60,56	60,56
13	Indeks Kesehatan	Poin	72,90	73,69	74,09	74,48	74,89	75,28	75,28
14	Indeks Pengeluaran	Poin	60,71	60,75	62,32	63,92	65,51	67,13	67,13
15	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	0,61	0,61 - 1,79	1,79 - 2,97	2,97 - 4,15	4,15 - 5,33	5,33	5,33

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		т	arget Capaia	n		Kondisi Akhir
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1,04 - 2,22	2,22 - 3,40	3,40 - 4,00	4,00 - 4,45	4,45	4,45
17	Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	0,84 - 1,4	1,4 - 1,96	1,96 - 2,52	2,52 - 3,08	3,08 - 3,64	3,64
18	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	-	100	100	100	100	100	100
19	Indek Resiko Bencana (IRB)	Poin	202	202	202	202	197	197	197
20	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Persen	10	10	15	20	25	30	30
21	Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100	100	100	100

# 8.3. Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU perangkat daerah atau IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah.

Selain itu dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan IKU perangkat daerah memberikan gambaran arsitektur kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Arsitektur kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi *(impact)* sampai paling rendah *(output)*. Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 8.3 berikut.

Halaman: VIII-7

Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias selatan Tahun 2021-2026

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kinerja Fembangunan Daeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	renanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
A.1.	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI									
1	Pertumbuhan Ekonomi									
1.1	PDRB per kapita ADHB	Juta Rupiah/ Jiwa	22,22	22,99	23,76	24,53	25,30	26,07	26,07	Seluruh Perangkat Daerah
1.2	PDRB per kapita ADHK	Juta Rupiah/ Jiwa	11,78	12,30	12,82	13,34	13,86	14,38	14,38	Seluruh Perangkat Daerah
1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian	Persen	1,04	1,04 - 2,22	2,22 - 3,40	3,40 - 4,00	4,00 - 4,45	4,45	4,45	Dinas Pertanian
1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata	Persen	0,84	0,84 - 1,4	1,4 - 1,96	1,96 - 2,52	2,52 - 3,08	3,08 - 3,64	3,64	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2	Laju Inflasi	Persen	1,87	1,85	1,83	1,80	1,78	1,76	1,76	Seluruh Perangkat Daerah
3	Indeks Gini	Poin	0,286	0,236	0,226	0,216	0,206	0,196	0,20	Seluruh Perangkat Daerah
4	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persen	16,74	16,55	16,36	16,17	15,98	15,79	15,79	Seluruh Perangkat Daerah
5	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	3,41	3,42	3,47	3,50	3,48	3,48	BPKPAD
6	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	61,89	62,99	64,09	65,19	66,29	67,39	67,39	Seluruh Perangkat Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Innoija i ombanganan baoran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	r onunggung ouwus
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,7	68,7	69,7	70,7	71,7	72,7	72,7	DP2KBP3A
3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,85	6,10	6,35	6,60	6,85	7,00	7	Dinas Pendidikan
4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,27	12,31	12,35	12,39	12,43	12,43	Dinas Pendidikan
5	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,85	68,96	69,07	69,18	69,29	69,29	Dinas Kesehatan
6	Indek Resiko Bencana (IRB)	Poin	202,00	202,00	202,00	202,00	197,00	197,00	197	BPBD
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	77,14	77,41	77,32	77,22	77,14	77,04	77,04	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	4,15	4,42	4,33	4,23	4,15	4,05	4,05	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
9	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	С	CC	В	В	В	В	В	Bagian Organisasi - Setda
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA									
1	Persentase festival budaya daerah yang diselenggarakan di tingkat kabupaten	Persen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
В	ASPEK PELAYANAN UMUM									
B.1	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
B.1.1	PELAYANAN DASAR									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	innerja i embanganan baeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tenanggung Gawas
1	PENDIDIKAN									
1.1	APK PAUD	Persen	12,72	13,37	14,02	14,68	15,33	15,98	15,98	Dinas Pendidikan
1.2	APK SD/MI/Paket A	Persen	111,59	108,17	109,17	110,17	111,17	111,17	111,17	Dinas Pendidikan
1.3	APK SMP/MTs/Paket B	Persen	80,78	81,94	82,94	83,94	84,94	85,94	85,94	Dinas Pendidikan
1.4	APM PAUD	Persen	12,72	13,37	14,02	14,68	15,33	15,98	15,98	Dinas Pendidikan
1.5	APM SD/MI/Paket A	Persen	96,08	96,14	96,20	96,26	96,32	96,38	96,38	Dinas Pendidikan
1.6	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	70,44	71,54	72,64	73,74	74,84	75,94	75,94	Dinas Pendidikan
1.7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	5,85	6,10	6,35	6,60	6,85	7,00	7,00	Dinas Pendidikan
1.8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,23	12,27	12,31	12,35	12,39	12,43	12,43	Dinas Pendidikan
1.9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	Persen	97,56	97,86	98,16	98,46	98,76	99,06	99,06	Dinas Pendidikan
1.10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	Persen	95,87	96,37	96,87	97,37	97,87	98,37	98,37	Dinas Pendidikan
1.11	Guru SD kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	57,9	60,4	62,9	65,4	67,9	70,4	70,4	Dinas Pendidikan
1.12	Guru SMP kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	87,5	88,00	88,50	89,00	89,50	90,00	90	Dinas Pendidikan
1.13	Rasio ketersediaan sekolah PAUD	Persen	52,28	57,78	67,78	77,78	87,78	97,78	97,78	Dinas Pendidikan
1.14	Rasio ketersediaan sekolah SD	Persen	77,24	79,74	82,24	84,74	87,24	89,74	89,74	Dinas Pendidikan
1.15	Rasio ketersediaan sekolah SMP	Persen	55,66	61,16	66,66	72,16	77,66	83,16	83,16	Dinas Pendidikan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	innerja i embanganan bacian		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	T Changgang Gawas
1.16	Rasio guru terhadap murid PAUD	Persen	73,40	74,9	76,4	77,9	79,4	80,9	80,9	Dinas Pendidikan
1.17	Rasio guru terhadap murid SD	Persen	81,82	83,02	84,22	85,42	86,62	87,82	87,82	Dinas Pendidikan
1.18	Rasio guru terhadap murid SMP	Persen	83,69	84,89	86,09	87,29	88,49	89,69	89,69	Dinas Pendidikan
2	KESEHATAN									
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)	per 1000 kelahiran hidup	n/a	993	995	995	995	995	995	Dinas Kesehatan
2.2	Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup)	n/a	205	205	205	205	205	205	Dinas Kesehatan
2.3	Angka Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,85	68,96	69,07	69,18	69,29	69,29	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	n/a	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Dinas Kesehatan
2.5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	23,47	23,13	19,14	14,67	13,68	12,89	12,89	Dinas Kesehatan
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	per satuan balita	50	55	60	65	70	75	75	Dinas Kesehatan
2.7	Rasio pustu per satuan penduduk	per satuan penduduk	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	Dinas Kesehatan
2.8	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Persen	1/31.000	1/31.000	1/31.000	1/31.000	1/31.000	1/31.000	1/31.000	Dinas Kesehatan
2.9	Jumlah Rumah Sakit di Kab. Nias Selatan yang terakreditasi	unit	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan
2.10	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Dinas Kesehatan
2.11	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	per satuan penduduk	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Minerja i embangunan Daeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tenanggung dawab
2.12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	18,5	Dinas Kesehatan
2.13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	94,87	95,87	96,87	97,87	98,87	99,87	100	Dinas Kesehatan
2.14	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	15,86	16,86	17,86	18,86	19,86	20,86	20,86	Dinas Kesehatan
2.15	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.16	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.17	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.18	Cakupan kunjungan bayi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.19	Cakupan puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.20	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	70/461	70/461	70/461	70/461	70/461	70/461	70/461	Dinas Kesehatan
2.21	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	49,3	50,3	51,3	52,3	53,3	54,4	54,4	Dinas Kesehatan
2.22	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	66	66	67	68	68	70	70	Dinas Kesehatan
2.23	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa	10	15	20	25	30	35	35	Dinas Kesehatan
2.24	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.25	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Innerja i embanganan baeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	T Changgung Gawas
2.26	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.27	Cakupan pelayanan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.28	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.29	Persentase usia 15-59 thn mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.30	Persentase Warga negera usia 60 thn ke atas mendapatkan screening kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.31	Persentase penderita hypertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.32	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.33	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.34	Persentase org terduga penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.35	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai stand	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
2.36	Cakupan Rumah tangga Sehat	Persen	65	70	75	80	90	100	100	Dinas Kesehatan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Innorja i embanganan baeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tonunggung ouwas
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
3.1	PEKERJAAN UMUM									
3.1.1	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	54,36	60,44	64,51	68,09	71,66	75,74	75,74	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.2	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Persen	53	61	65	68	71	75	75	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.3	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	46,21	56,28	55,50	60,14	64,78	69,43	69,43	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.4	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53	58	62	66	70,00	74,00	74	
3.1.5	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	49,55	50,05	50,60	51,10	51,60	52,00	52	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak	Persen	55,72	60,72	65,72	70,72	75,72	80,72	80,72	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.1.7	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	Rasio	1:180266	1:73403	1:46287	1:33965	1:26965	1:22372	1:22372	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.2	PENATAAN RUANG									
3.2.1	Tersedianya revisi dokumen RTRW Kab. Nias Selatan yang di-PERDA- kan	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
3.2.2	Tersedianya dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang di- PERDA-kan	Dokumen	0	0	1	1	1	2	5	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
4.1	Rasio Rumah layak huni	Persen	0,048	0,0502	0,05042	0,05262	0,05482	0,059	0,059	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.2	Jumlah penerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah daerah	KK	451	501	551	601	651	701	701	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	: Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Miletja i eliibaliguliali Daetali		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tenanggung dawab
4.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	Persen	76,04	80,34	84,64	88,94	93,34	97,84	97,84	Sekretariat Daerah
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	18,12	19	19,5	20	20,5	21	21	Satuan Polisi Pamong Praja
5.2	Persentase pelangggaran Perda dan Perkada yang ditangani.	Persen	10	10	15	20	25	30	30	Satuan Polisi Pamong Praja
5.3	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persen	n/a	80	80	80	80	80	80	Satuan Polisi Pamong Praja
5.4	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD
5.5	Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 5 jam	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	BPBD
5.6	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	50	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	BPBD
5.7	Tingkat Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6	SOSIAL									
6.1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persen	15	15	20	20	30	50	50	Dinas Sosial
6.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)	RT	19000	19000	19000	19000	19000	19000	19000	Dinas Sosial

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	
6.3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM).	Persen	10	20	25	20	25	30	30	Dinas Sosial
6.4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat dan setelah tanggap bencana darurat daerah kabupaten	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
B.1.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
1	KETENAGAKERJAAN									
1.1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	77,14	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	n/a	0	2	2	2	2	2	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
1.3	Persentase Tenaga kerja yang ditempatan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota	Persen	16	33,00	50,00	67,00	85,00	100,00	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
1.4	Persentase jumlah usaha mikro yang dilakukan updating pendataan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja Dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
2.1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	persen	17,00	17,00	17,00	23	23	23	23	DP2KBP3A

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	innerja i embangunan baeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	T changging oawab
2.2	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (II)	persen	11,76	14,71	14,71	17,65	17,65	20,59	20,59	DP2KBP3A
2.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	66,7	68,7	69,7	70,7	71,7	72,7	72,7	DP2KBP3A
2.4	Persentase kampung layak anak	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
2.5	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DP2KBP3A
3	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
3.1	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	Persen	91	89	88	87	86	85	85	DP2KBP3A
3.2	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Persen	14,34	16	18	20	22	24	24	DP2KBP3A
3.3	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Persen	14,34	16	18	20	22	24	24	DP2KBP3A
3.4	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Persen	14,35	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	DP2KBP3A
3.5	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen	14,34	16	18	20	22	24	24	DP2KBP3A
3.6	Persentase Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Aktif	Persen	40	50	60	60	70	80	80	DP2KBP3A
4	KETAHANAN PANGAN									
4.2	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	77,6	81	82	83	84	85	85	Dinas Ketahanan Pangan

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Innerja i embanganan bacian		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tenanggung Gawab
4.3	Tersedianya Regulasi Ketahanan Pangan yang di PERDA-kan	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Ketahanan Pangan
4.5	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	62,86	57,14	51,43	45,71	40,00	34,29	34,29	Dinas Ketahanan Pangan
5	LINGKUNGAN HIDUP									
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,22	69,22	69,22	69,22	69,22	69,22	69,22	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Persentae Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Persen	50	50	60	70	80	90	90,00	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Persentase Pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	Persen	26,63	26,13	25,63	25,13	24,63	24,13	24,13	Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL									
6.1	Persentase penduduk yang memiliki wajib KTP elektronik	Persen	64	70	80	85	90	95	95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.2	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Persen	53,83	70	75	80	85	85	85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6.3	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	8	20	25	30	35	45	45	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	21	23,29	24,66	26,03	27,40	28,77	28,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	219	219	219	219	219	219	219,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	PERHUBUNGAN									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Minerja i embangunan Daeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tenanggung Gawab
8.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	72.146	58.876	71.576	84.976	104.676	105.776	105.776	Dinas Perhubungan
8.2	Jumlah Bandar Udara (Bandara)	Unit	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan
8.3	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	8	14	16	18	20	22	22	Dinas Perhubungan
8.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat	Persen	73	73	75	77	79	81	81	Dinas Perhubungan
8.5	persentase keselamatan lalu lintas di dalam kabupaten	Persen	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	99,84	Dinas Perhubungan
8.6	Cakupan Layanan fasilitas pengelolaan pelayaran	Persen	70	72	75	77	79	81	81	Dinas Perhubungan
9	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
9.1	Tingkat Capaian Aplikasi untuk Penerapan e-Government	Persen	14	43	57	71	86	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
9.2	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	Persen	100	80	80	85	85	85	85	Dinas Komunikasi dan Informatika
10	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
10.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
10.2	Persentase koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam dan KSPPS/USPPS yang sehat dan cukup sehat	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
11	PENANAMAN MODAL									
11.1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	Persen	230	33,33	50	50	66,67	80	80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	innorja i ombanganan baoran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tonunggung ouwus
11.2	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Dokumen	8000	100	200	300	400	500	500	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
11.3	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
12	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
12.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	n/a	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
13	STATISTIK									
13.1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	-	20	40	60	80	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
13.2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	-	20	40	60	80	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	PERSANDIAN									
14.1	Tersedianya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	KEBUDAYAAN									
15.1	Persentase festival budaya daerah yang diselenggarakan di tingkat kabupaten	Persen	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
15.2	Jumlah SDM, lembaga, dan pranata yang dibina	Orang	-	20	40	60	80	100	100	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Kineija reinbangunan Daeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	renanggung Jawab
15.3	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	-	10	15	20	25	30	30	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
16	PERPUSTAKAAN									
16.1	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Poin	1,0	1,1	1,25	1,5	1,7	2,0	2,0	Dinas Perpustakaan
16.2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Poin	50	52,3	53	54	54	55,00	55	Dinas Perpustakaan
17	KEARSIPAN									
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional.	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Dinas Perpustakaan
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1	PARIWISATA									
1.1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0,86	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
1.2	Jumlah pelaku pariwisata yang terbina	Orang	120	200	280	360	440	520	520	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
2	PERTANIAN									
2.1	Produktifitas tanaman Padi per tahun	Ton/ hektar	4,27	4,292	4,314	4,336	4,358	4,38	4,38	Dinas Pertanian
2.2	Produktifitas tanaman Jagung per tahun	Ton/ hektar	6,13	6,16	6,19	6,22	6,25	6,28	6,28	Dinas Pertanian
2.3	Produktifitas Cabai per tahun	Ton/ hektar	4,5	4,7	4,9	5,1	5,3	5,5	5,5	Dinas Pertanian

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Imorju i ombungunun zuorun		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tonunggung ouwus
2.4	Populasi Ternak Besar (Babi)	Ekor	4756	8956	13156	17356	21556	25756	25756	Dinas Pertanian
2.5	Produktifitas Kelapa per tahun	Ton/ hektar	1052,29	1057,604	1062,918	1068,232	1073,546	1078,86	1078,86	Dinas Pertanian
3	PERDAGANGAN									
3.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan SIUP	Persen	n/a	15	30	45	60	75	75	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.2	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persen	n/a	70	75	80	85	90	90	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.3	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Persen	n/a	75	75	80	85	75	75	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4	PERINDUSTRIAN									
4.1	Terselesaikannya dokumen RIPIK menjadi Perda	Ada/ Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	Persen	n/a	50	50	50	50	50	50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
5.1	Produktifitas perikanan tangkap	Ton/ Tahun	8.600	8.650	8.700	8.750	8.800	8.850	8850	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.2	Produktifitas perikanan budidaya	Ton/ Tahun	10	11	12	13	14	15	15	Dinas Kelautan dan Perikanan
5.3	Peningkatan Konsumsi Makan Ikan	Kg per Kapita/Thn	69,94	70	70,5	71	71,5	72	72	Dinas Kelautan dan Perikanan
В.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Minerja i embangunan Daeran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tenanggung dawab
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1.1	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	62	80	90	100	100	100	100	Bappeda
1.2	Penjabaran Konsistensi Sub Kegiatan RKPD ke dalam APBD	Persen	58	70	80	90	100	100	100	Bappeda
1.3	Persentase usulan Musrenbang desa yang terakomodir dalam RKPD	Persen	4	10	15	20	25	30	30	Bappeda
1.4	Persentase desa yang melaksanakan Musrenbang tingkat desa.	Persen	50	55	60	65	70	75	75	Bappeda
2	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
2.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	Bappeda
3	KEUANGAN									
3.1	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3.2	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	3,41	3,42	3,47	3,50	3,48	3,48	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
3	KEPEGAWAIAN									
3.1	Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan Kompetensi	Persen	69	60	65	65	70	70	70	Badan Kepegawaian Daeah
3.2	Persentase Kehadiran PNS	Persen	85	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daeah
3.3	Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin yang telah ditindaklanjuti	Persen	83	85	85	90	90	90	90	Badan Kepegawaian Daeah
3.4	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Kategori	n/a	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Badan Kepegawaian Daeah

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Target	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	innorja i ombanganan baoran		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	1 onunggung ouwus
	Persentase pegawai struktural yang mengikuti Diklat dan bersertifikat	Persen	-	3	5	8	10	13	13	Badan Kepegawaian Daeah
3.5	Persentase pegawai fungsional yang mengikuti Diklat dan bersertifikat	Persen	-	3	5	8	11	14	14	Badan Kepegawaian Daeah
4	PENGAWASAN									
4.1	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang di Tindaklanjuti	Persen	66	70	75	85	93	97	97	Inspektorat
4.2	Tingkat Maturitas SPIP	Level	II	II	II	II	III	III	III	Inspektorat
4.3	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	II	II	II	II	III	III	III	Inspektorat
5	SEKRETARIAT DAERAH									
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sekretariat Daerah
5.2	Nilai LPPD	Nilai	19044	20144	2344	2544	2744	2944	2944	Sekretariat daerah
5.3	Indeks Reformasi Birokrasi	n/a	С	С	С	С	В	В	В	Sekretariat daerah
5.4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnsi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	С	CC	В	В	В	В	В	Sekretariat daerah
6	SEKRETARIAT DEWAN									
6.1	Persentase Rancangan Perda yang ditetapkan jadi Perda	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
6.2	Pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sekretariat DPRD

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja		Targe	t Capaian Setiap	Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	mnorju i ombungunun buotun		RPJMD	2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	Tonunggung ouwas
7	Unsur Kewilayahan									
7.1	Persentase ketercapaian pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan
7.2	Persentase APBDes yang difasilitasi kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Seluruh Kecamatan
7.3	Nilai Lakip Kecamatan	Predikat	С	CC	CC	В	В	В	В	Seluruh Kecamatan
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
C.1	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	milyar rupiah/tah un	5369,47	5831,03	6292,59	6754,15	7215,71	7677,27	7677,27	Seluruh Perangkat Daerah
2	Nilai Tukar Nelayan	Poin	99,52	100,02	100,52	101,02	101,52	102,02	102,02	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten per tahun	Persen	-0,86	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN.	Persen	76,04	80,34	84,64	88,94	93,34	97,84	97,84	Sekretariat Daerah
C.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur									
1	Indeks layanan kualitas infrastruktur daerah	Persen	54,36	60,44	64,51	68,09	71,66	75,74	75,74	Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang
С.3	FOKUS IKLIM BERINVESTASI									

No	Aspek/ Fokus/ Bidang/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Kinerja RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2022	2023	2024	2025	2026	RPJMD	renanggung Jawab
1	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Nias Selatan	Persen	230	33,33	50	50	66,67	80	80	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	Persentase PAD terhadap APBD	Persen	1,14	3,41	3,42	3,47	3,50	3,48	3,48	BPKPAD
C.4	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA									
1	APM SD/MI/Paket A	Persen	96,08	96,14	96,2	96,26	96,32	96,38	96,38	Dinas Pendidikan
2	APM SMP/MTs/Paket B	Persen	70,44	71,54	72,64	73,74	74,84	75,94	75,94	Dinas Pendidikan
3	Angka Kelulusan (AL) SD/MI/Paket A	Persen	97,56	97,86	98,16	98,46	98,76	99,06	99,06	Dinas Pendidikan
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	Persen	95,87	96,37	96,87	97,37	97,87	98,37	98,37	Dinas Pendidikan
5	Guru SD kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	57,9	60,4	62,9	65,4	67,9	70,4	70,4	Dinas Pendidikan
6	Guru SMP kualifikasi ≥ DIV/S1	Persen	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90	Dinas Pendidikan
7	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	23,47	23,13	19,14	14,67	13,68	12,89	12,89	Dinas Kesehatan

Sumber: Hasil Proyeksi Tahun

2021

# BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan yang menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan 2014-2034. RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 ini juga merupakan salah satu tahapan dari upaya mewujudkan visi jangka panjang kabupaten yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan 2006-2026 dengan visi yaitu " Masyarakat Nias Selatan yang Beriman, Berbudaya, Berkualitas dan Sejahtera". Sebagai sebuah visi jangka menengah, maka diharapkan RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dapat menjadi bagian integral menuju terwujudnya visi tersebut melalui visi Pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu "Nias Selatan, Maju Masyarakat Sejahtera".

Proses penyusunan RPJMD ini dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, melalui proses-proses teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Beberapa instrumen yang digunakan antara lain adalah serangkaian diskusi kelompok terfokus, hingga penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Melalui rangkaian proses tersebut maka RPJMD telah menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran yang terukur, strategi, kebijakan, dan program-program pembangunan daerah yang dijalankan selama periode masa jabatan Kepala Daerah.

Pada akhirnya, keseluruhan proses hingga tersusunnya dokumen RPJMD ini ditujukan untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan pembangunan antar sektor pemerintahan, antar elemen masyarakat dan antar hirarki pemerintahan. Melalui sinergitas dan keterpaduan ini, maka visi dan misi Kepala Daerah diharapkan akan dapat terealisasi di akhir periode perencanaan.

### 9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun pertama (2022) hingga tahun terakhir (2026).

Program-program transisi disusun sebagai rancangan program indikatif satu tahun ke depan (2027) setelah periode RPJMD Kabupaten Nias Selatan berakhir tahun 2026, bertujuan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Selama kurun waktu lima tahun ke depan, diasumsikan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ini telah dilaksanakan dengan konsisten oleh perangkat daerah, yang didukung peran aktif seluruh stakeholders dan partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi landasan bagi kesinambungan pelaksanaan program-program pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan periode selanjutnya.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik terutama dibidang pendidikan dan kesehatan, perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jumlah penduduk dan keluarga miskin, sekaligus jumlah pengangguran, berkurangnya tetapi diharapkan kesenjangan atau disparitas antara wilayah yang tertinggal dan wilayah yang sudah maju dapat terkurangi secara signifikan, serta berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Nias Selatan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena didukung kinerja aparat pemerintah yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel sehingga Nias Selatan yang maju dan masyarakat sejahtera.

Program transisi sudah barang tertentu akan dirumuskan dengan tetap berusaha menjamin keberlanjutan dari apa yang telah dilaksanakan dan dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk periode selanjutnya, program pembangunan yang dikembangkan dapat lebih banyak berorientasi

Halaman : IX-2

pada upaya memfasilitasi dan memberi berbagai kemudahan ekonomi (economic facilities) yang benar-benar nyata, dan peluang-peluang sosial (social opportunities) yang adil kepada masyarakat. Kemudahan ekonomi adalah kesempatan dan makin terbukanya akses masyarakat terhadap berbagai sumber-sumber produksi dan pasar. Sedangkan peluang-peluang sosial adalah upaya meningkatkan kesempatan masyarakat melakukan mobilitas sosial- ekonomi secara vertikal didukung kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta makin meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan.

### 9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik-baiknya.
- 2. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah mulai tahun 2021-2026.
- 3. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- 4. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
- 5. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap

- program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.
- 6. Konsep deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.
- 7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nias Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan berkewajiban melakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).
- 8. Keberhasilan dalam memujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026 sangat tergantung kepada peran seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mengajak seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan dan mengawal terwujudnya "Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera".

BUPATI NIAS SELATAN,

HILARIUS DUHA